



PEMERINTAH  
KABUPATEN KUBU RAYA



Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah Perubahan

**"RPJMD-P"**

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah satunya perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan daerah dan perubahan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 9 dan angka 23 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
13. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
18. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berkenaan dengan perubahan kewenangan daerah, nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja daerah serta perubahan kebijakan nasional yang mendasar lainnya, maka Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dengan demikian RPJMD Perubahan ini merupakan penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2019 hingga Tahun 2024.

Penyusunan RPJMD Perubahan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan reviu dan evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, daya saing dan pelayanan pemerintahan di semua bidang serta mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik dalam lingkup wilayah yang meliputi keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional maupun lingkup waktu yang menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tahunan daerah, mengefektifkan dan fokus penanganan beberapa isu strategis daerah yang dapat dicapai dalam sisa waktu periode perencanaan lima tahunan ketiga ini yang akan berakhir pada tahun 2024 berbasis holistik, integratif, tematik dan spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 10 November 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kebutuhan yang bersifat formal dan wajib dilakukan sebagaimana tuntutan regulasi dengan dukungan legitimasi yang komprehensif. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMD Provinsi.

Dokumen RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana acuan utama yang digunakan dalam melakukan Perubahan RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 bagian c dan ayat 3. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan kebijakan

nasional sehingga dianggap perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pasal 8 menyatakan bahwa penyesuaian bertahap terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota sebelum peraturan Menteri tersebut berlaku dilakukan mulai tahun 2020. Permendagri tersebut juga dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya perubahan struktur keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana sebelumnya untuk struktur pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, kemudian pada struktur belanja yang sebelumnya terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Isu kedua yang menjadi dasar perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya adalah isu pandemi Covid-19, dimana pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Awalnya *World Health Organization* (WHO) menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia yang disebut dengan *corona virus* di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, kemudian kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain, termasuk Indonesia. Pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada akhir Maret 2020 yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia, merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan politik maupun ekonomi. Nyatanya seluruh sendi kehidupan masyarakat terdampak oleh adanya pandemi ini. Tidak hanya ekonomi, sosial budaya

masyarakat dan religi pun tidak luput dari pandemi ini. Perkembangan tersebut mendorong Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Kubu Raya terdampak cukup berat, antara lain:

1. Indikator Makro Kabupaten Kubu Raya. Pada PDRB, lima sektor mengalami pertumbuhan terendah yaitu transportasi dan pergudangan (-32,46 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (-11,72 persen), jasa lainnya (-10,32 persen), jasa pendidikan (-6,43 persen) serta perdagangan besar dan eceran (-3,98 persen). Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya menurun secara drastis dari tahun 2019 di angka 5,72 persen menjadi -2,43 persen pada tahun 2020. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan pada tahun 2020 di angka 3,61 persen realisasinya 7,14 persen.
2. Perubahan sosial budaya masyarakat. Kebijakan *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB memaksa masyarakat harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru di berbagai tataran kehidupan, seperti pendidikan, keagamaan, sosial budaya, dan sebagainya.
3. Refocusing anggaran pemerintah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. Adanya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini menjadi salah satu alasan dilakukan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024.

Mekanisme dan tahapan penyusunan RPJMD merupakan pijakan awal dalam perencanaan strategis pembangunan daerah sebagai implementasi regulasi yang disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Langkah awal perencanaan pembangunan merupakan indikator penting untuk dipedomani sebagai panduan dalam menyusun berbagai program dan kegiatan yang meliputi peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sublimasi antara rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ditetapkan secara berjangka RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, serta disinkronkan dengan berbagai kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan utamanya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Barat serta RTRW Kabupaten. Dokumen ini juga menyelaraskan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang dipertajam dengan sejumlah kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergisitas kebijakan dan sinkronisasi program secara horisontal maupun vertikal antar tingkat pemerintahan.

Dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang berisikan visi, misi, strategi, dan program yang menjembatani capaian pembangunan saat ini dengan capaian 5 (lima) tahun ke depan secara lebih terarah. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan berarti, yang dimanifestasikan lewat indikator tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif baik walaupun belum optimal, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan tingkat kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara rata-rata, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan. Kinerja berbagai indikator makro tersebut merupakan agregasi dari berbagai capaian dari berbagai kegiatan di berbagai bidang.

Sejalan dengan prinsip dan semangat Pemerintah Daerah Kubu Raya melalui konsep *Kepong Bakol*, perubahan RPJMD juga diharapkan mampu mengakomodir isu-isu strategis pembangunan dengan lebih maksimal. *Kepong Bakol* merupakan pengejawantahan konsep gotong royong berbasis kearifan lokal yang mengelaborasi keterlibatan banyak pihak baik internal maupun eksternal (skala nasional maupun internasional) untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada.

Konsep ini menjadi semangat baru bagi Kabupaten Kubu Raya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Seperti misalnya upaya *kepong bakol* untuk penguatan ketahanan pangan yang meliputi bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui lima upaya, yaitu penguatan UMKM dan industri pengolahan, penguatan sistem ketenagakerjaan, pemulihan aktivitas pariwisata, penguatan kelompok ponpes/masyarakat yang menjadi sentra inovasi ekonomi lokal sekaligus menjadi kelompok/wadah penanggulangan kemiskinan serta penguatan infrastruktur dengan peningkatan interoperabilitas serta transportasi/konektivitas. Inovasi digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik juga menjadi hirauan penting dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan. Tidak pula dilupakan isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, serta perhatian atas penyandang disabilitas.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen terkait lainnya yang bersifat perencanaan sektoral.

Dokumen RPJMD periode 2019-2024 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kubu Raya pada tahun 2029.

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, serta RPJMN Tahun 2020-2024**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 bahwa Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang akan menjadi sasaran dua puluh tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPN dibagi kedalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 memperhatikan RPJMN ke empat yaitu RPJMN Tahun 2020-2024, yang pada saat ini masih merupakan rancangan teknokratik.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, tema yang diusung adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.** Terdapat 5 (lima) fokus pembangunan yang ditetapkan, yaitu:

1. Fokus pembangunan infrastruktur yaitu menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, yaitu: Kawasan Industri Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan, dan Tambak-Tambak Perikanan.
2. Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
3. Fokus mendorong investasi dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.
4. Fokus reformasi birokrasi melalui reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Fokus penggunaan APBN yaitu menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun agenda pembangunan dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024 terdapat 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

### **1.3.2. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029**

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2019-2024, harus berpedoman juga pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD tahap ke tiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Adapun prioritas RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil);
2. Penguatan, peningkatan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah secara merata di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya;

3. Penguatan produk lokal usaha mikro dan kecil dengan jaminan pasar sistemik dan peningkatan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Pemantapan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
5. Penguatan UMKM dan industri pengolahan, penguatan sistem ketenagakerjaan, pemulihan aktivitas pariwisata, penguatan kelompok ponpes/masyarakat yang menjadi sentra inovasi ekonomi lokal sekaligus menjadi kelompok/wadah penanggulangan kemiskinan serta penguatan infrastruktur dengan peningkatan interoperabilitas serta transportasi/konektivitas.
6. Pemasaran produk berbasis digital (digital marketing) dengan membuat aplikasi berbasis web dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan *e-commerce*.
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan pemberdayaan perempuan, serta memperhatikan penyandang disabilitas.

### **1.3.3. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**

RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada tanggal 5 Maret 2019. Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah:

#### **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu:

1. **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa

didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan Masyarakat yang Tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 harus memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terutama untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat namun tidak ada kewenangannya di kabupaten, seperti urusan kelistrikan, ataupun sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat yang memerlukan dukungan daerah seperti penanganan *stunting* dan peningkatan status Desa Mandiri. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 52 sampai dengan pasal 56. Termasuk dalam hal ini adalah penjabarannya dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

#### **1.3.4. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perubahan SKPD**

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dibawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra SKPD.

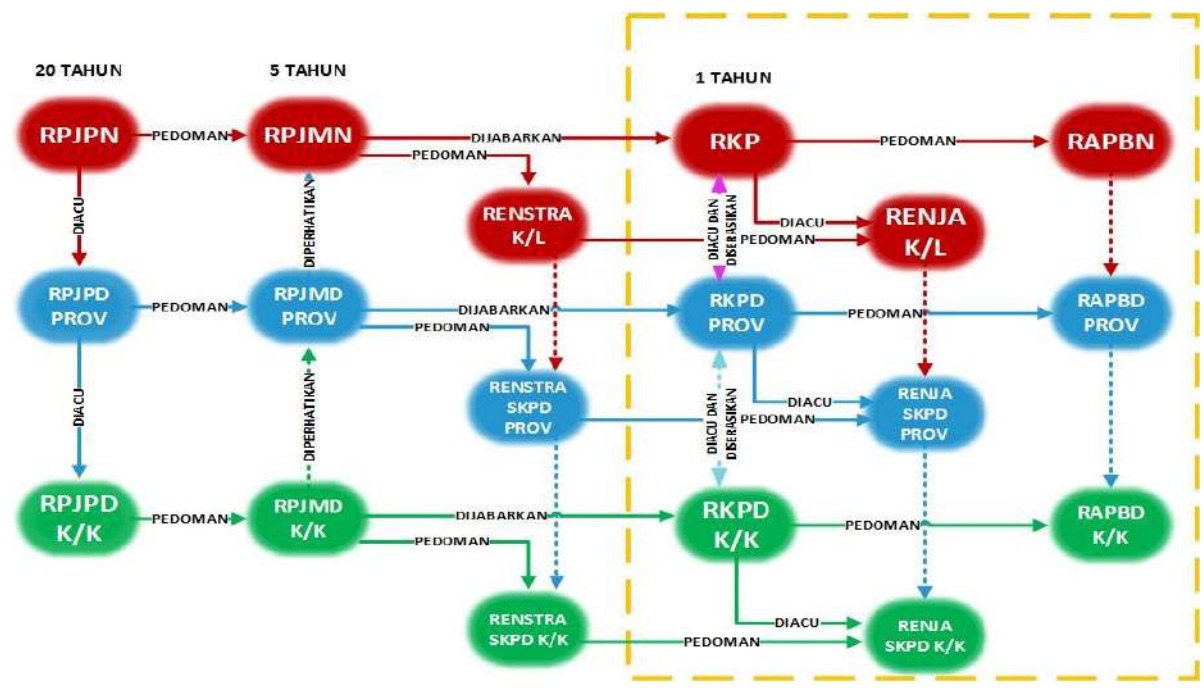
#### **1.3.5. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RKPD**

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD khususnya RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, RKPD juga mengacu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam Rangka memberikan arah dalam pentahapan pencapaian visi jangka menengah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD sesuai dengan periodisasi tahunan dalam RPJMD. Penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut:

**Gambar 1.2.**  
**Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**



**1.3.6. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya**

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Penelaahan rencana tata ruang

bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi:

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga memperhatikan RTRWN, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten/Kota berbatasan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota berbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kawasan Metropolitan Pontianak.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan SKPD Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga terjadi konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, sehingga akan memudahkan dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 antara lain meliputi:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan;

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
10. Menyesuaikan dengan Perubahan dan Perbaikan Regulasi dan Aturan yang Terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019–2024 disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD Perubahan, berisikan tentang latar belakang dengan mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan RPJMD, kedudukan RPJMD dalam RPJP, serta keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek geografi dan demografi memuat penjelasan tentang karakteristik lokasi dan wilayah serta demografi. Aspek kesejahteraan masyarakat memuat penjelasan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum menjelaskan mengenai kondisi umum aspek pelayanan umum yang meliputi fokus layanan urusan wajib konkrue, fokus layanan urusan wajib tidak konkrue dan fokus urusan pilihan. Sedangkan aspek daya saing meliputi fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengelolaan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) kinerja keuangan masa lalu antara lain kinerja pelaksanaan APBD, neraca Daerah; (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu antara lain proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan (3) kerangka pendanaan antara lain proyeksi pendapatan dan belanja dan perhitungan kerangka pendanaan.

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan yang menampilkan masalah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal Perubahan RPJMD. Isu strategis yang diangkat merupakan permasalahan pembangunan yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, dan regional. Dalam penyajian isu strategis dikemukakan mengenai manfaat/pengaruh isu-isu tersebut di masa mendatang.

## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai pernyataan tekad yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Juga mengenai konsistensi, sinergitas antara

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, serta RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, yang selanjutnya memberikan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Restra Perubahan Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi gambaran tentang ukuran pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan rencana pembangunan RPJMD selama 5 tahun sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam regulasi pendukung perencanaan daerah. Penjelasan dalam bab ini juga menjelaskan tentang masa transisi perencanaan program memasuki periode akhir masa jabatan dan tahap awal perencanaan Bupati dan Wakil Bupati terpilih guna menjaga sinergitas dan kesinambungan perencanaan pembangunan di daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke depan.

##### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif  $\pm 6.985,24 \text{ Km}^2$  atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat  $0^{\circ}13'40,83''$  sampai dengan  $1^{\circ}00'53,09''$  Lintang Selatan, serta  $109^{\circ}02'19,32''$  sampai dengan  $109^{\circ}58'32,16''$  Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak

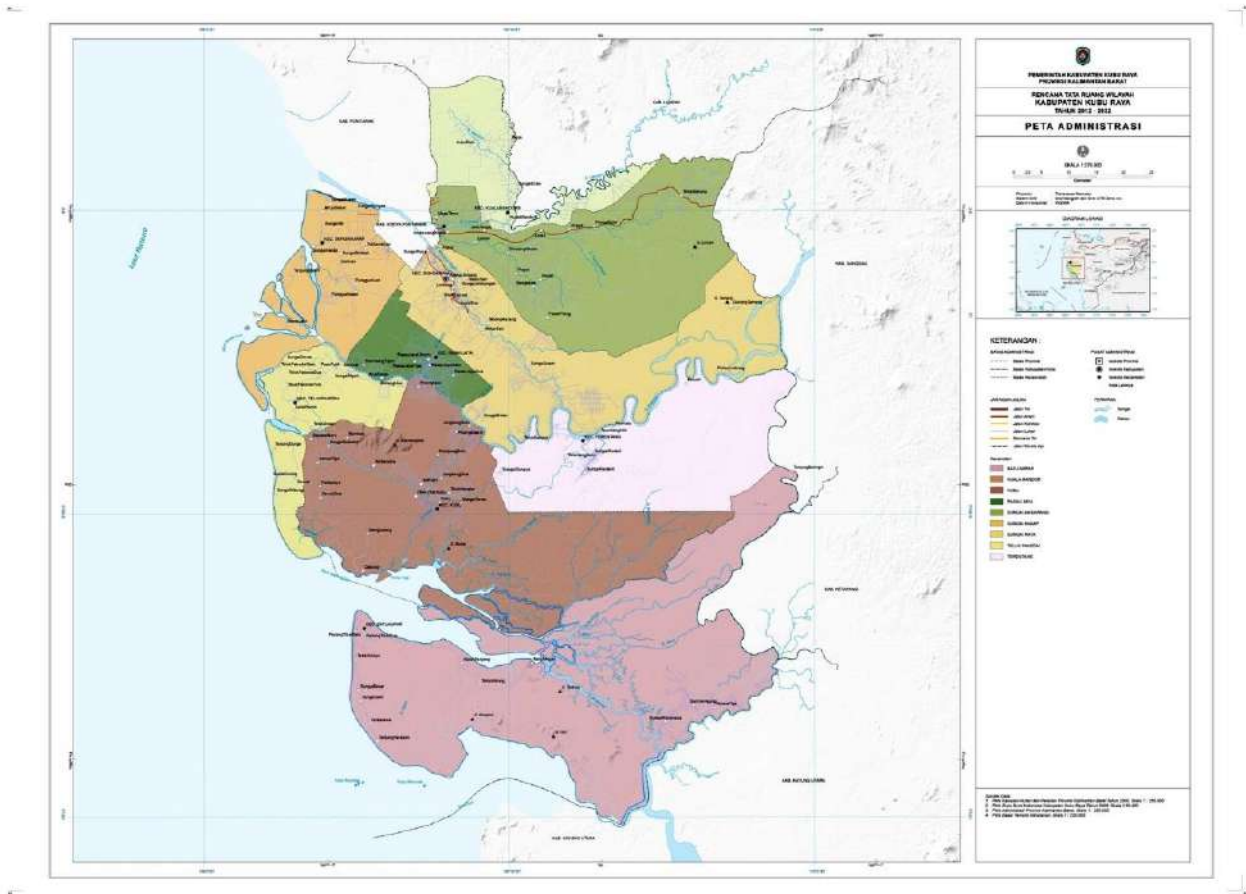
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya



Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 118 desa. Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.  
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan  
Kabupaten Kubu Raya

| No                  | Kecamatan       | Ibukota               | Jumlah Desa | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Persentase (%) |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 1                   | Batu Ampar      | Padang Tikar          | 15          | 2.002,70                | 28,67          |
| 2                   | Terentang       | Terentang             | 10          | 786,40                  | 11,26          |
| 3                   | Kubu            | Kubu                  | 20          | 1.211,60                | 17,35          |
| 4                   | Teluk Pakedai   | Teluk Pakedai         | 14          | 291,90                  | 4,18           |
| 5                   | Sungai Kakap    | Sungai Kakap          | 13          | 453,17                  | 6,49           |
| 6                   | Rasau Jaya      | Rasau Jaya            | 6           | 111,07                  | 1,59           |
| 7                   | Sungai Raya     | Arang Limbung         | 20          | 929,30                  | 13,30          |
| 8                   | Sungai Ambawang | Sungai Ambawang Kuala | 15          | 726,10                  | 10,39          |
| 9                   | Kuala Mandor B  | Kuala Mandor          | 5           | 473,00                  | 6,77           |
| Kabupaten Kubu Raya |                 |                       | 118         | 6.985,24                | 100,00         |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, 2020

Kecamatan dengan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayah 2.002,70 km<sup>2</sup> atau 28,67 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Rasau Jaya dengan luas wilayah 111,07 km<sup>2</sup> atau 1,59 persen dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Sungai Raya dan Kubu dengan jumlah 20 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kuala Mandor B dengan jumlah 5 desa.

#### **2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036, Pasal 8 disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Metropolitan Pontianak, meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu (*Central Bussiness District* atau CBD).

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 Km<sup>2</sup> (7.408 Km × 194 Km = 1.630,68 Km<sup>2</sup>);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;

- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan; Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

**Tabel 2.2.**  
**Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan**  
**Kabupaten Kubu Raya**

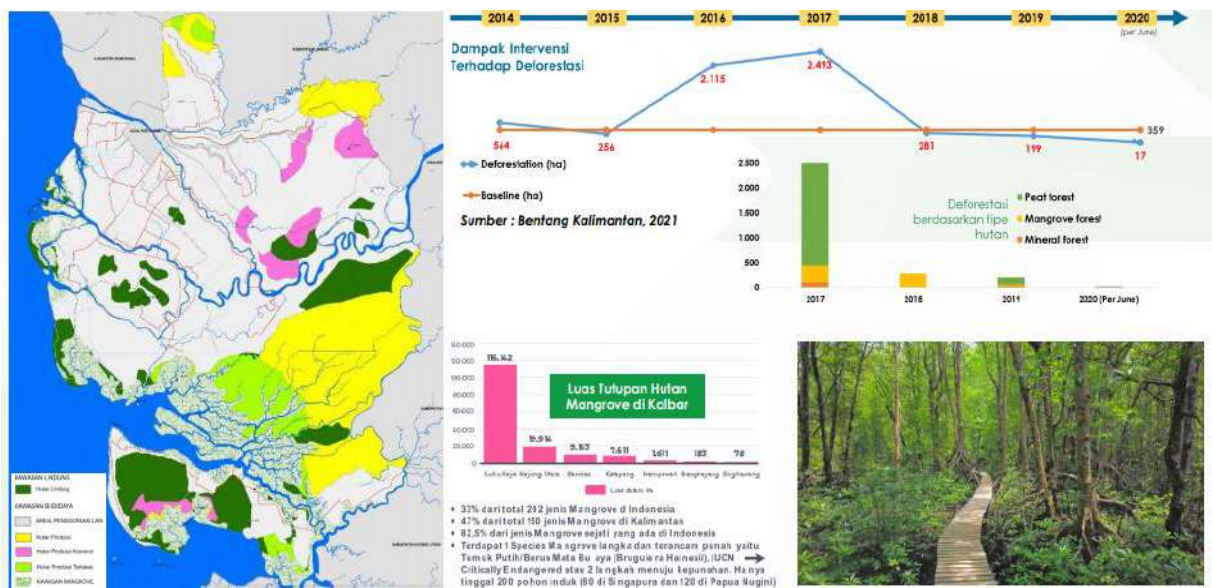
| No       | Kecamatan,<br>Nama Pulau         | Koordinat |           |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|          |                                  | Lintang   | Bujur     |
| <b>A</b> | <b>KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG</b> |           |           |
| 1        | Hanyut                           | 00.01.24  | 109.24.21 |
| <b>B</b> | <b>KECAMATAN BATU AMPAR</b>      |           |           |
| 2        | Gelanggang                       | 00.44.45  | 109.33.36 |
| 3        | Padang Tikar                     | 00.48.37  | 109.20.35 |
| 4        | Selatseh                         | 00.53.42  | 109.21.43 |
| 5        | Tenggara Mandi                   | 00.53.08  | 109.24.25 |
| 6        | Perling                          | 00.39.04  | 109.27.41 |
| 7        | Teluk Air I                      | 00.43.47  | 109.33.51 |
| 8        | Teluk Air II                     | 00.45.32  | 109.36.06 |
| 9        | Teluk Air III                    | 00.43.39  | 109.35.19 |
| 10       | Sejenuh Air Tawar                | 00.41.34  | 109.36.48 |
| 11       | Pulau Buntung                    | 00.41.04  | 109.37.59 |
| 12       | Munggu' Linang                   | 00.44.03  | 109.39.02 |
| <b>C</b> | <b>KECAMATAN SUNGAI KAKAP</b>    |           |           |
| 13       | Kurnia                           | 00.11.12  | 109.07.04 |
| 14       | Nyamok                           | 00.05.37  | 109.10.23 |
| 15       | Keladi                           | 00.11.18  | 109.06.27 |
| 16       | Sepok Laut                       | 00.13.37  | 09.07.22  |
| 17       | Sepok Perupuk                    | 00.08.22  | 109.06.31 |
| 18       | Tanjung Saleh                    | 00.07.10  | 109.09.21 |
| 19       | Tempurung                        | 00.06.39  | 109.07.20 |
| 20       | Tai Minyak                       | 00.05.37  | 109.10.23 |
| 21       | Beting Tengah                    | 00.11.35  | 109.04.11 |

| No       | Kecamatan,<br>Nama Pulau       | Koordinat |            |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|
|          |                                | Lintang   | Bujur      |
| <b>D</b> | <b>KECAMATAN KUBU</b>          | 00.36.45  | 109.18.33  |
| 22       | Burung Besar                   | 00.36.37  | 109.18.42  |
| 23       | Burung Kecil                   | 00.35.57  | 109.16.06  |
| 24       | Dabong                         | 00.36.34  | 109.17.39  |
| 25       | Tiga                           | 00.34.36  | 109.19.46  |
| 26       | Muara Kubu                     | 00.36.37  | 109.22.58  |
| 27       | Bidara                         | 00.40.02  | 109.30.21  |
| 28       | Pakawal                        | 00.41.25  | 109.29.27  |
| 29       | Berembang                      |           |            |
| <b>E</b> | <b>KECAMATAN TELUK PAKEDAI</b> | 00.21.23  | 109.11.30  |
| 30       | Pelombak                       |           |            |
| <b>F</b> | <b>KECAMATAN SUNGAI RAYA</b>   |           |            |
| 31       | Tanjung Sapi                   | 00.22.08  | 109.37.05  |
| 32       | Limbung                        | 00.13.52  | 109.48.58  |
| 33       | Buntut Limbung                 | 00.16.06  | 109.45.59  |
| 34       | Keranji                        | 00.12.35  | 109.47.42  |
| 35       | Teluk Bayur                    | 00.15.05  | 109..54.46 |
| 36       | Jambu                          | 00.13.57  | 109.56.49  |
| 37       | Separoh                        | 00.11.23  | 109.55.23  |
| 38       | Benuang                        | 00.12.34  | 109.53.35  |
| 39       | Sekancil                       | 00.09.33  | 109.54.19  |

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum DEPdagri Tahun 2008

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan *Mangrove* dan gambut. Kawasan *Mangrove* Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun jumlah kawasan *Mangrove* tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2021 menunjukkan tutupan Hutan *Mangrove* di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9 persen diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya (Data Bentang Kalimantan, 2021). Data *Mangrove* di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat di grafik di bawah ini.

Gambar 2.2.  
Hutan Mangrove di Kalimantan Barat



Sumber : Benteng Kalimantan, 2021

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) spesies *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari 33 spesies *mangrove* sejati (*true mangrove*) dan 34 spesies *mangrove* ikutan (*associate mangrove*). Dari 67 spesies tersebut terdapat 1 spesies *mangrove* langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*). Spesies ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nuigini). Di Kabupaten Kubu Raya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu NGO yaitu SAMPAN, spesies Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*) atau istilah lokal masyarakat di Kabupaten Kubu Raya disebut Tumuk Putih hanya terdapat 7 batang pohon saja yang terdapat di Hutan desa Tanjung Harapan dengan status *Critically Endangered* (CN) (SAMPAN, 2018).

Mengingat pentingnya fungsi kawasan *mangrove* tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah negara ke 4 terbesar yang memiliki lahan gambut di dunia (*Wetland International*, 2008). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Departemen Pertanian, di Tahun 2011 tercatat luas lahan gambut di Indonesia ± 14,9 Juta

Ha. Pulau Sumatera memiliki  $\pm 6,4$  Juta Ha (43 persen), Pulau Kalimantan  $\pm 4,8$  Juta Ha (32 persen) dan Papua memiliki  $\pm 3,7$  Juta Ha (25 persen).

Di Kalimantan Barat terdapat  $\pm 1,68$  Juta Ha lahan gambut. Dan dari  $\pm 1,68$  Ha Juta lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80 persen dari target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu:

1. KHG Batu Ampar-1;
2. KHG Batu Ampar-2;
3. KHG Kuala Mandor;
4. KHG Kubu;
5. KHG Kubu-Terentang;
6. KHG Sungai Ambawang;
7. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
8. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
9. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
10. KHG Teluk Pakedai; dan
11. KHG Terentang-Batu Ampar.

Kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

#### **2.1.1.3. Topografi**

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - > 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief > 10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - > 60 m.

#### **2.1.1.4. Kondisi Geologi**

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang

mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial.

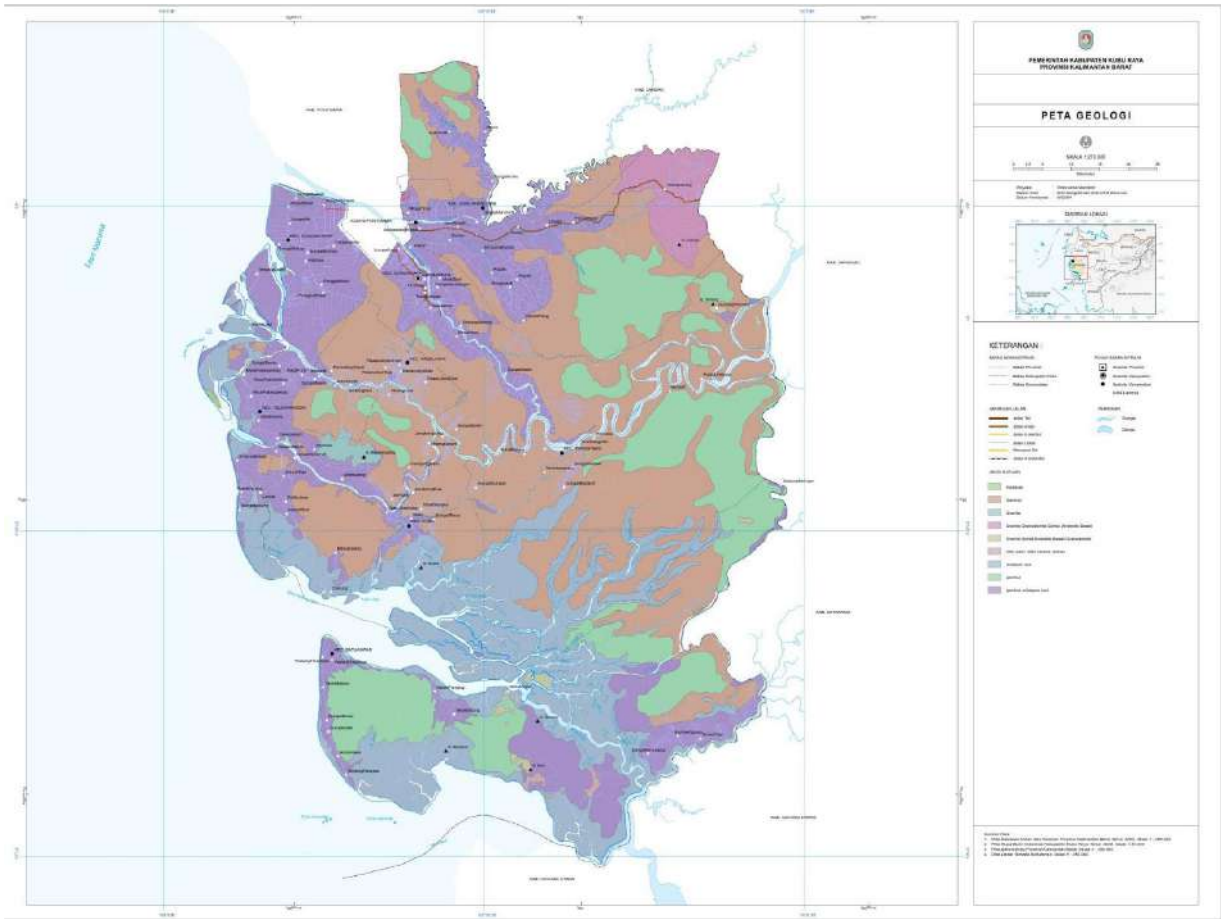
Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada di antara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, *gleisol*, *organosol* dan regosol.

1. Aluvial, jenis tanah aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol*, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau Tanah Gambut atau Tanah Organik, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30 persen untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20 persen untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60 persen, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.3. sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**  
**Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya**



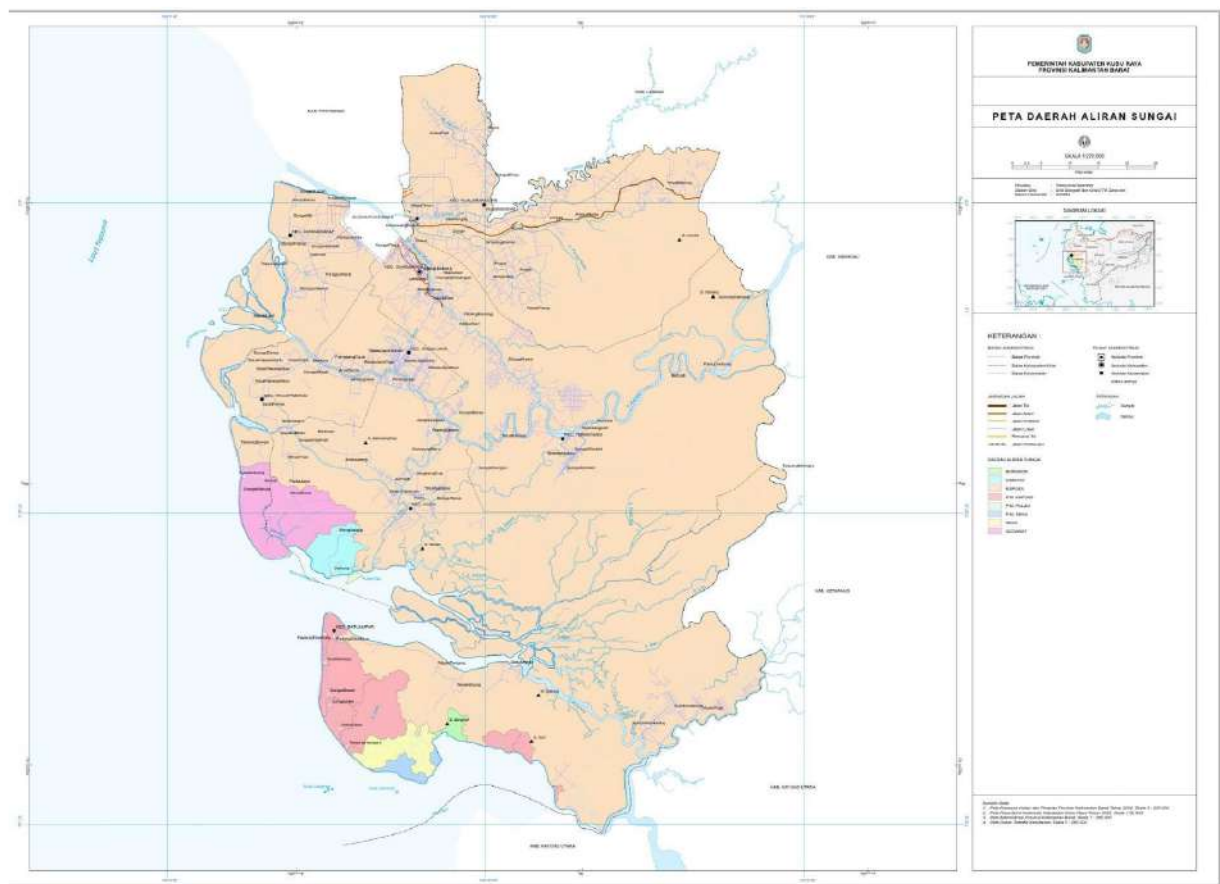
**2.1.1.5. Hidrologi**

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Dayak Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sapar, Sungai Kerawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat, Sungai Nibung, Sungai Tumiang (Kecamatan Kubu), Sungai di Jeruju Kiri (Kecamatan Batu Ampar).

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.4. sebagai berikut:

**Gambar 2.4.**  
**Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya**

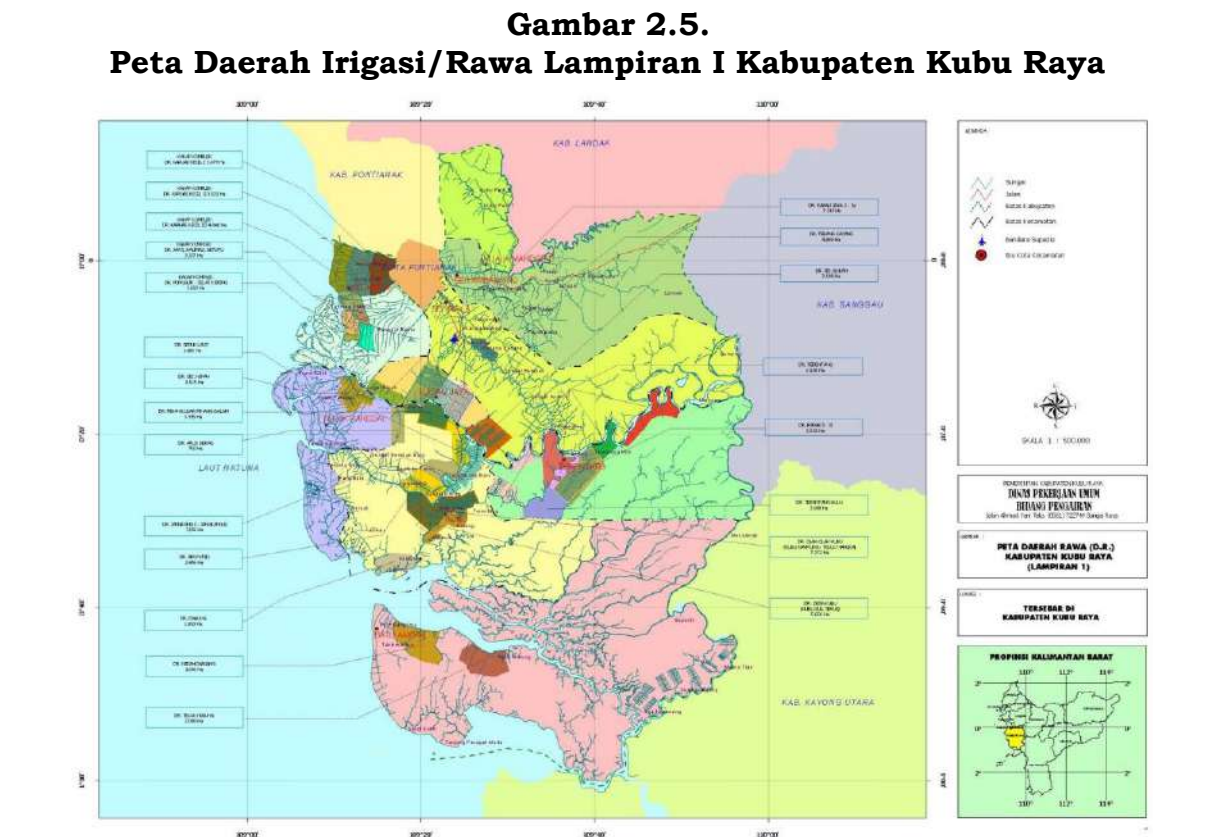


Sedangkan untuk Daerah Irigasi Rawa (DIR) dan Daerah Irigasi (DI) terdiri dari:

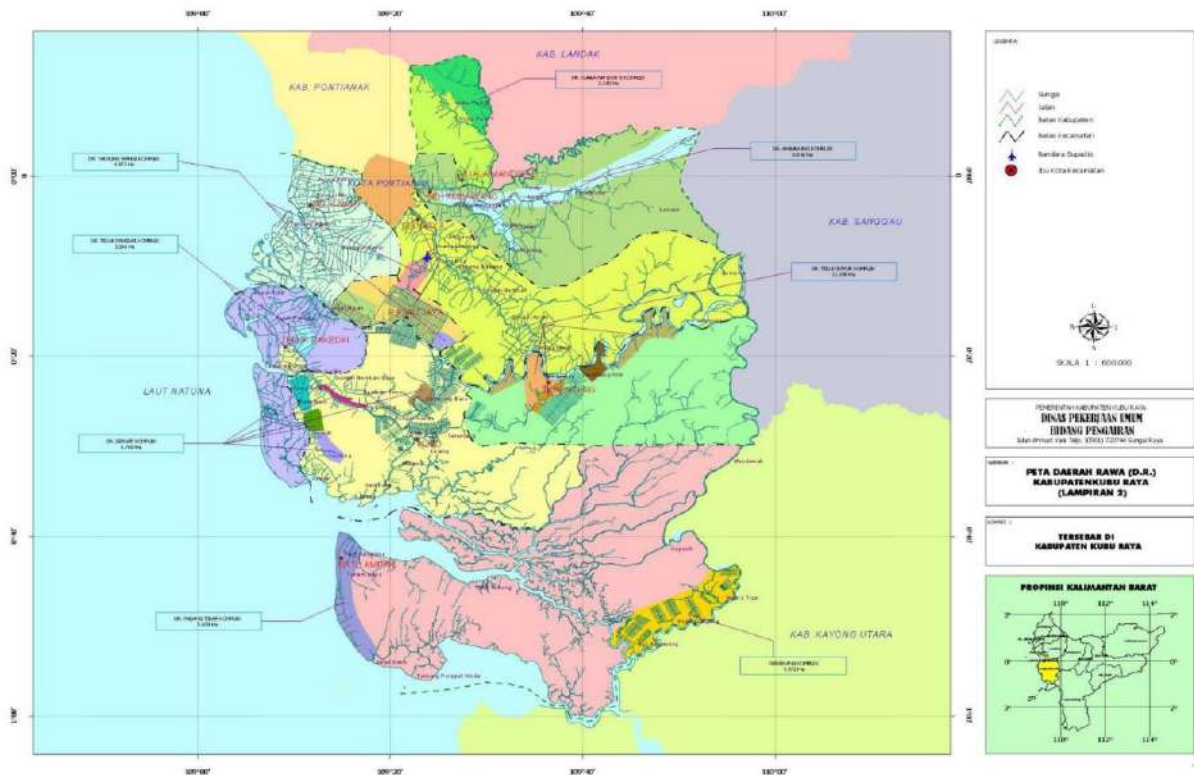
1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Nasional, terdiri atas 3 (tiga) DIR yaitu DIR. Teluk Bayur, DIR. Kubu Komplek dan DIR. Kerawang Komplek.
2. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Provinsi, terdiri atas 9 (sembilan) DIR yaitu DIR. Kapuas Kecil I, DIR. Kapuas Kecil II, DIR. Tebang Kacang, DIR. Rasau Jaya I, II, III dan IV, DIR. Jawi – Kalimas – Betutu, DIR. Punggur Selat Kering, DIR. Pinang Komplek, DIR. Olak-Olak Kubu dan DIR. Teluk Nibung.
3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten, terdiri dari 64 (enam puluh empat) DIR yaitu DIR. Air Putih, DIR. Ambangah, DIR. Ambarawa, DIR. Arus Deras, DIR. Bemban, DIR. Betuah, DIR. Biong, DIR. Dabung, DIR. Durian, DIR. Dusun Obyek S. Durian, DIR. Gunung Tamang, DIR. Jalo, DIR. Jangkang I + II, DIR. Jawa Tengah, DIR. Kapuas Kecil III, DIR. Kapur, DIR. Korek, DIR. Kuala Dua, DIR. Kuala Karang, DIR. Kuala Mandor A, DIR. Kuala Mandor B, DIR. Kubu Padi, DIR. Lais, DIR. Lingga, DIR. Lintang

- Batang, DIR. Loncek, DIR. Mengkalang, DIR. Nipah Panjang, DIR. Padang Tikar, DIR. Padang Tikar I, DIR. Padang Tikar II, DIR. Pancaroba, DIR. Pancaroba Sungai, DIR. Pasak, DIR. Pasak Piang, DIR. Puguk, DIR. Pulau Limbung, DIR. Pulau Nyamuk, DIR. Radak I + II, DIR. Retok, DIR. S. Jawi, DIR. Selat Remis, DIR. Sepuk Keladi, DIR. Sepuk Laut, DIR. Sepuk Perupuk, DIR. Simpang Kanan, DIR. Suka Maju, DIR. Sungai Ambawang Kuala, DIR. Sungai Bulan, DIR. Sungai Enau, DIR. Sungai Nibung, DIR. Sungai Nipah, DIR. Sungai Selamat – Seruat, DIR. Sungai Tempayan, DIR. Tamang, DIR. Tanjung Bunga, DIR. Tanjung Harapan, DIR. Tanjung Saleh, DIR. Tapah, DIR. Tasik Malaya, DIR. Teluk Gelam, DIR. Teluk Kapuas, DIR. Teluk Lerang dan DIR. Terentang.
4. Daerah Irigasi (DI) Kabupaten, terdiri dari 8 (delapan) DI yaitu DI. Baharu Ambawang, DI. Bemban Barat, DI. Bemban Timur, DI. Ence Manan, DI. Nuri, DI. Padu Empat, DI. Samak dan DI. Radak.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.5. sebagai berikut:



**Gambar 2.6.**  
**Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya**



### 2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Kubu Raya Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 284 mm. Jumlah curah hujan berdasarkan catatan BMG Supadio pada tahun 2020 adalah 263 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 27<sup>0</sup> Celsius.

### 2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat
3. Kawasan peruntukan pertanian

- 4. Kawasan peruntukan perkebunan
- 5. Kawasan Peruntukan perikanan
- 6. Kawasan peruntukan pertambangan
- 7. Kawasan peruntukan permukiman
- 8. Kawasan peruntukan industri
- 9. Kawasan peruntukan pariwisata
- 10. Kawasan peruntukan lainnya

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 masih didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,4 persen.

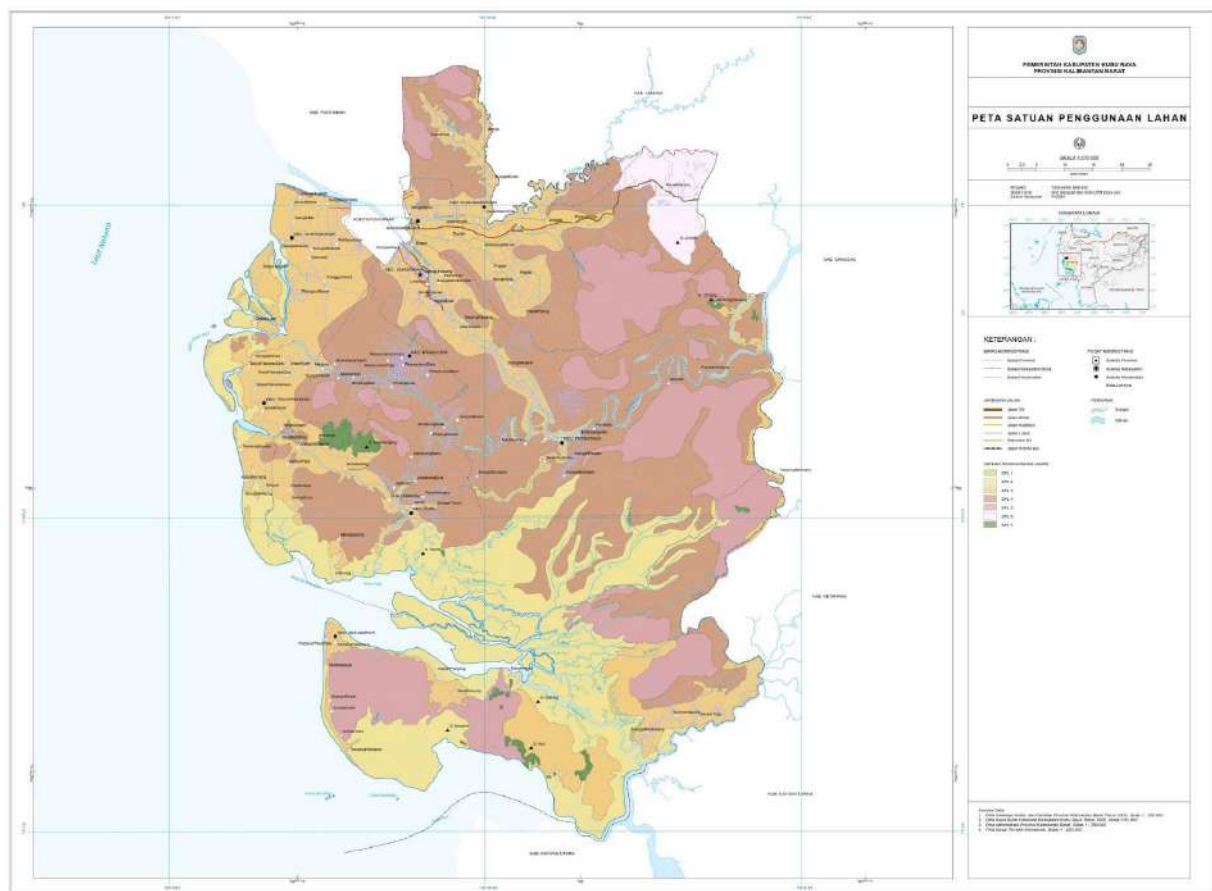
**Tabel 2.3.**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020**

| No.                 | Penggunaan                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                   | Lahan Pertanian                   | 705.083,00 | 324.745,00 | 310.142,00 | 194.297,00 |
|                     | a. LAHAN SAWAH                    | 78.866,00  | 78.866,00  | 78.866,00  | 890,00     |
|                     | - Irigasi                         | 2.111,00   | 2.111,00   | 2.111,00   | 890,00     |
|                     | - Tadah Hujan                     | 16.801,00  | 16.801,00  | 16.801,00  | 0,00       |
|                     | - Pasang Surut                    | 59.133,00  | 59.133,00  | 59.133,00  | 0,00       |
|                     | - Rawat Lebak (polder, rembesan)  | 821,00     | 821,00     | 821,00     | 0,00       |
|                     | b. LAHAN BUKAN SAWAH              | 626.217,00 | 245.879,00 | 231.276,00 | 193.407,00 |
|                     | - Tegal/Kebun                     | 27.002,00  | 27.002,00  | 27.002,00  | 8.338,00   |
|                     | - Ladang/Huma                     | 19.404,00  | 19.404,00  | 19.404,00  | 190,00     |
|                     | - Pekebunan                       | 175.510,00 | 199.473,00 | 184.870,00 | 184.879,00 |
|                     | - Hutan Rakyat                    | 28.621,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | - Padang Pengembalaan/Rumput      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | - Hutan Negara                    | 355.400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | - Sementara tidak Diusahakan      | 11.585,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | - Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) | 8.695,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                   | Lahan Bukan Pertanian             | 67.775,00  | 67.775,00  | 67.775,00  | 67.775,00  |
| KABUPATEN KUBU RAYA |                                   | 772.858,00 | 392.520,00 | 377.917,00 | 262.072,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2021

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Gambar 2.7. berikut:

**Gambar 2.7.**  
**Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kubu Raya**



**2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah *hinterland* Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalaman Sanggau-Kapuas Hulu.

**Tabel 2.4.**  
**Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Kubu Raya**

| No | PKN                                    | No | PKL                             | No | PPK                                       | No | PPL                                    |
|----|----------------------------------------|----|---------------------------------|----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1. | Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1) | 1. | Kec. Sungai Kakap (I-III/B/D/2) | 1. | Desa Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar)   | 1. | Desa Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar) |
|    |                                        | 2. | Kec. Rasau Jaya (I-III/B/D/2)   | 2. | Desa Terentang Hilir (Kec. Terentang)     | 2. | Desa Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)    |
|    |                                        | 3. | Kec. Kubu (I-III/B/D/2)         | 3. | Desa Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)     | 3. | Desa Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap) |
|    |                                        | 4. | Kec. Batu Ampar (I-III/B/D/2)   | 4. | Desa Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B) | 4. | Desa Korek (Kec. Sungai Ambawang)      |

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

- I – IV : Tahapan pengembangan
- A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan
- A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- A/2 Pengembangan baru
- A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
- C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- C/2 Pengembangan baru
- C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
- D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
- D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana
- E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
- E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- E/2 Pengembangan baru
- E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Kakap);
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar;
3. PPK (Pusat Kegiatan Kawasan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Desa Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Desa Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Desa Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Desa Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
4. PPL (Pusat Kegiatan Lingkungan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi Desa Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Desa Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Desa Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Desa Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*central business district*, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang;
2. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar;
3. Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap;

4. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Teluk Pakedai;
5. KTM Terentang meliputi Kecamatan Terentang dan Kecamatan Batu Ampar;
6. Kawasan Peternakan;
7. Kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
8. Kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
  - a. Minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Desa Padang Tikar Dua, Desa Nipah Panjang, Desa Batu Ampar, dan Desa Sungai Jawi;
  - b. Minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
  - c. Minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sepuk Laut; dan
  - d. Minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam, Desa Kuala Karang, dan Desa Tanjung Bunga.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Teluk Pakedai.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa. Pada saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup:

1. Kawasan rawan abrasi.
  - a. Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap; dan
  - b. Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Rasau Jaya.
2. Kawasan rawan gelombang pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.
3. Kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Ambawang.
4. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang.

Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Terentang
5. Kawasan rawan kebakaran.

Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas :

  - a. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; dan
  - b. Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang.

#### **2.1.4. Demografi**

##### **2.1.4.1. Perkembangan Kependudukan**

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpenca-  
rencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 tahun 2020  
tercatat sebanyak 610.103 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak  
312.027 jiwa dan 298.076 jiwa penduduk perempuan. Dapat diketahui bahwa

kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2020 adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu 235.386 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2020 adalah Kecamatan Terentang yaitu 13,743 jiwa.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kecamatan Tahun 2015-2020**

| No.   | Kecamatan       | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|-------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1     | Sungai Raya     | 227.714 | 215.778 | 219.082 | 231.772 | 232.781 | 235.386 |
| 2     | Kuala Mandor B  | 29.025  | 32.154  | 31.978  | 29.624  | 28.919  | 28.211  |
| 3     | Sungai Ambawang | 76.797  | 79.323  | 80.229  | 80.400  | 81.428  | 82.443  |
| 4     | Terentang       | 13.135  | 13.546  | 13.452  | 13.508  | 13.622  | 13.743  |
| 5     | Batu Ampar      | 36.472  | 36.486  | 36.610  | 36.490  | 36.827  | 36.627  |
| 6     | Kubu            | 42.455  | 45.662  | 45.188  | 43.051  | 42.940  | 43.335  |
| 7     | Rasau Jaya      | 30.334  | 31.740  | 31.583  | 30.881  | 30.925  | 30.745  |
| 8     | Teluk Pakedai   | 20.177  | 21.493  | 21.486  | 21.054  | 21.060  | 20.745  |
| 9     | Sungai Kakap    | 121.393 | 123.375 | 122.698 | 117.783 | 119.058 | 118.868 |
| Total |                 | 597.502 | 599.557 | 602.306 | 604.563 | 607.560 | 610.103 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2021

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksi jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (dependency ratio) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 15-19 tahun, diikuti kelompok umur 20-24 tahun dan kelompok usia 5-9 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia produktif yang cukup besar di Kabupaten Kubu Raya. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah.

| Tabel 2.6.<br>Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Kelompok Umur                                                  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |
| 0 – 4 Thn                                                      | 23.423    | 21.611    | 45.034  |
| 5 – 9 Thn                                                      | 30.272    | 28.096    | 58.368  |
| 10 – 14 Thn                                                    | 29.162    | 27.055    | 56.217  |
| 15 – 19 Thn                                                    | 28.862    | 27.295    | 56.157  |
| 20 – 24 Thn                                                    | 29.019    | 27.885    | 56.904  |
| 25 – 29 Thn                                                    | 26.615    | 25.570    | 52.185  |
| 30 – 34 Thn                                                    | 25.818    | 25.229    | 51.047  |
| 35 – 39 Thn                                                    | 24.716    | 24.090    | 48.806  |
| 40 – 44 Thn                                                    | 22.680    | 21.829    | 44.509  |
| 45 – 49 Thn                                                    | 18.806    | 18.338    | 37.144  |
| 50 – 54 Thn                                                    | 16.577    | 16.030    | 32.607  |
| 55 – 59 Thn                                                    | 12.629    | 12.068    | 24.697  |
| 60 – 64 Thn                                                    | 9.385     | 9.041     | 16.541  |
| 65 – 69 Thn                                                    | 5.965     | 5.524     | 18.426  |
| 70 – 74 Thn                                                    | 3.878     | 3.986     | 7.864   |
| > 74 Thn                                                       | 4.220     | 4.429     | 8.649   |
| Jumlah                                                         | 312.027   | 298.076   | 610.103 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

| Tabel 2.7.<br>Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 |                 |           |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| Kode Kecamatan                                                           | Kecamatan       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |
| 611201                                                                   | Sungai Raya     | 120.187   | 115.199   | 235.386 |
| 611202                                                                   | Kuala Mandor B  | 14.531    | 13.680    | 28.211  |
| 611203                                                                   | Sungai Ambawang | 42.223    | 40.220    | 82.443  |
| 611204                                                                   | Terentang       | 7.192     | 6.551     | 13.743  |
| 611205                                                                   | Batu Ampar      | 18.826    | 17.801    | 36.627  |
| 611206                                                                   | Kubu            | 22.243    | 21.092    | 43.335  |
| 611207                                                                   | Rasau Jaya      | 15.602    | 15.143    | 30.745  |
| 611208                                                                   | Teluk Pakedai   | 10.760    | 9.985     | 20.745  |
| 611209                                                                   | Sungai Kakap    | 60.463    | 58.405    | 118.868 |
| Jumlah                                                                   |                 | 312.027   | 298.076   | 610.103 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Wajib KTP Per Kecamatan dan Realisasi Tahun 2020**

| Kode Kecamatan | Kecamatan       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 611201         | Sungai Raya     | 84.238    | 81.950    | 166.188 |
| 611202         | Kuala Mandor B  | 10.149    | 9.507     | 19.656  |
| 611203         | Sungai Ambawang | 29.037    | 27.756    | 56.793  |
| 611204         | Terentang       | 4.912     | 4.530     | 9.442   |
| 611205         | Batu Ampar      | 13.414    | 12.651    | 26.065  |
| 611206         | Kubu            | 15.583    | 14.918    | 30.501  |
| 611207         | Rasau Jaya      | 10.885    | 10.685    | 21.570  |
| 611208         | Teluk Pakedai   | 7.466     | 7.067     | 14.533  |
| 611209         | Sungai Kakap    | 41.570    | 41.152    | 82.722  |
| Jumlah         |                 | 217.254   | 210.216   | 427.470 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2020**

| No.   | Kecamatan       | 2020    |
|-------|-----------------|---------|
| 1     | Sungai Raya     | 67.884  |
| 2     | Kuala Mandor B  | 7.801   |
| 3     | Sungai Ambawang | 22.844  |
| 4     | Terentang       | 4.098   |
| 5     | Batu Ampar      | 10.692  |
| 6     | Kubu            | 12.946  |
| 7     | Rasau Jaya      | 9.402   |
| 8     | Teluk Pakedai   | 6.130   |
| 9     | Sungai Kakap    | 34.692  |
| Total |                 | 176.489 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

**2.1.4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Secara natural, laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena adanya mutasi penduduk yang dikarenakan adanya kelahiran, kematian, datang dan pergi/pindah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang yaitu 3,18 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kubu. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.10.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya**  
**Menurut Kecamatan, 2020**

| No                  | Kecamatan       | Keterangan      |                           |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                     |                 | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| 1                   | Sungai Raya     | 234.087         | 2,15                      |
| 2                   | Kuala Mandor B  | 27.342          | 1,33                      |
| 3                   | Sungai Ambawang | 83.085          | 2,27                      |
| 4                   | Terentang       | 13.235          | 2,68                      |
| 5                   | Batu Ampar      | 35.856          | 0,77                      |
| 6                   | Kubu            | 42.052          | 1,39                      |
| 7                   | Rasau Jaya      | 30.346          | 2,51                      |
| 8                   | Teluk Pakedai   | 20.287          | 0,76                      |
| 9                   | Sungai Kakap    | 123.102         | 1,91                      |
| Kabupaten Kubu Raya |                 | 609.392         | 1,91                      |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

**2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

**2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada 2019 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami kenaikan dari 5,82 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,62 persen. Walaupun secara nominal, PDRB ADHB konstan tahun 2019 meningkat sebesar 50,2 juta per kapita per tahun akan tetapi laju pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen. Walaupun tidak signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun terakhir, akan

tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,83 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 18,28 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,72 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selama 2020 mengalami kontraksi disebabkan adanya penurunan pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, utamanya angkutan udara. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mana terdapat larangan untuk bepergian masuk ataupun keluar Kalbar. Penurunan pertumbuhan Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga menjadi penyebab yang mempengaruhi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 37,49 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tidak mencapai setengah dari semua kategori lapangan usaha. Tujuh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan sisanya tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,88 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,34 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13 persen; Real Estate sebesar 3,46 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,35 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 37,49 persen. Sedangkan empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif lebih dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 32,46 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,72 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,43 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 10,32 persen.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,09 juta rupiah. PDRB Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 50,26 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Namun menurun di tahun 2020 menjadi 47,48 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

**Tabel 2.11.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)**

| Kat.                                  | Lapangan Usaha                                                 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 12,65         | 12,38         | 12,07         | 12,04         | 13,05         |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 3,25          | 3,23          | 3,26          | 3,30          | 3,49          |
| C                                     | Industri Pengolahan                                            | 31,84         | 31,66         | 31,71         | 32,40         | 34,01         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,30          | 0,31          | 0,32          | 0,33          | 0,40          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,04          |
| F                                     | Konstruksi                                                     | 12,06         | 12,14         | 11,92         | 11,75         | 11,84         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 10,12         | 9,84          | 9,75          | 9,86          | 9,87          |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 10,84         | 12,01         | 12,68         | 11,97         | 8,20          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,66          | 1,63          | 1,61          | 1,63          | 1,51          |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 3,20          | 3,21          | 3,20          | 3,23          | 3,56          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,39          | 1,36          | 1,34          | 1,30          | 1,30          |
| L                                     | Real Estat                                                     | 3,02          | 2,90          | 2,89          | 2,87          | 3,02          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 0,43          | 0,42          | 0,42          | 0,41          | 0,40          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,53          | 3,50          | 3,50          | 3,52          | 3,95          |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 4,09          | 3,89          | 3,84          | 3,87          | 3,65          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,71          | 0,66          | 0,63          | 0,64          | 0,92          |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya                                                   | 0,87          | 0,84          | 0,83          | 0,84          | 0,80          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : PDRB Kabupaten Kubu Raya, 2020

Tabel 2.12.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

| Kat.                           | Lapangan Usaha                                                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A                              | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 3,55  | 5,80  | 4,66  | 6,06  | 3,88   |
| B                              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 5,72  | 5,06  | 5,96  | 5,75  | -0,95  |
| C                              | Industri Pengolahan                                            | 5,20  | 5,34  | 4,18  | 8,31  | -0,18  |
| D                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 32,29 | 5,08  | 4,18  | 4,93  | 16,34  |
| E                              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6,41  | 7,13  | 2,00  | 9,33  | 6,89   |
| F                              | Konstruksi                                                     | 9,58  | 8,93  | 5,50  | 3,13  | -0,93  |
| G                              | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5,32  | 5,61  | 4,97  | 7,09  | -3,98  |
| H                              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 10,55 | 13,66 | 10,38 | -2,64 | -32,46 |
| I                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 6,29  | 5,89  | 4,32  | 7,41  | -11,72 |
| J                              | Informasi dan Komunikasi                                       | 11,02 | 7,44  | 7,67  | 6,24  | 8,13   |
| K                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 8,38  | 6,55  | 6,71  | 2,92  | -1,16  |
| L                              | Real Estat                                                     | 4,27  | 4,49  | 2,84  | 5,05  | 3,46   |
| M,N                            | Jasa Perusahaan                                                | 8,11  | 4,33  | 6,24  | 6,41  | -3,21  |
| O                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,39  | 4,44  | 5,21  | 5,02  | 5,35   |
| P                              | Jasa Pendidikan                                                | 6,76  | 5,10  | 3,50  | 6,43  | -6,43  |
| Q                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,20  | 1,76  | 4,10  | 7,67  | 37,49  |
| R,S,T,U                        | Jasa Lainnya                                                   | 4,25  | 4,86  | 4,07  | 9,04  | -10,32 |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                | 6,37  | 6,54  | 5,25  | 5,72  | -2,43  |

Sumber : PDRB Kabupaten Kubu Raya, 2020

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 34,01 persen (angka ini meningkat dari 31,84 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,05 (naik dari 12,65 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,84 persen (turun dari 12,06 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,87 persen (turun dari 10,12 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,20 persen.

**Tabel 2.13.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)**

| Kat.                                  | Lapangan Usaha                                                 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A                                     | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 12,65         | 12,38         | 12,07         | 12,04         | 13,05         |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 3,25          | 3,23          | 3,26          | 3,30          | 3,49          |
| C                                     | Industri Pengolahan                                            | 0,30          | 0,31          | 0,32          | 0,33          | 0,40          |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,30          | 0,31          | 0,32          | 0,33          | 0,40          |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,03          | 0,04          |
| F                                     | Konstruksi                                                     | 12,06         | 12,14         | 11,92         | 11,75         | 11,84         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 10,12         | 9,84          | 9,75          | 9,86          | 9,87          |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 10,84         | 12,01         | 12,68         | 11,97         | 8,20          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,66          | 1,63          | 1,61          | 1,63          | 1,51          |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 3,20          | 3,21          | 3,20          | 3,23          | 3,56          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0,43          | 0,42          | 0,42          | 0,41          | 0,40          |
| L                                     | Real Estat                                                     | 3,02          | 2,90          | 2,89          | 2,87          | 3,02          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 0,43          | 0,42          | 0,42          | 0,41          | 0,40          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,53          | 3,50          | 3,50          | 3,52          | 3,95          |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 4,09          | 3,89          | 3,84          | 3,87          | 3,65          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,71          | 0,66          | 0,63          | 0,64          | 0,92          |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya                                                   | 0,87          | 0,84          | 0,83          | 0,84          | 0,80          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya (data diolah)

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1. Industri Pengolahan, 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan 3. Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 2.14, pada tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar berada pada sub kategori perkebunan yaitu sebesar 9,64 persen. Sementara itu, sub kategori peternakan tumbuh sebesar 5,55 persen, tanaman holtikultura

tumbuh sebesar 7,62 persen, jasa pertanian sebesar 3,10 persen, tanaman pangan tumbuh sebesar 12,11 persen, serta perikanan sebesar 3,89 persen. Di sisi lain, sub kategori kehutanan dan penebangan kayu mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen di tahun 2020. Sub kategori kehutanan dan penebangan kayu mulai membaik seiring dengan pertumbuhan pada sub kategori industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya pada tahun yang sama.

**Tabel 2.14.**  
**Pertumbuhan Sub Kategori Pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (%)**

| Lapangan Usaha                     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,55  | 5,80  | 4,46  | 6,32 | 7,86  |
| 1. Pertanian                       | 3,79  | 6,50  | 4,87  | 7,02 | 8,75  |
| a. Tanaman Pangan                  | -9,72 | 3,45  | -4,53 | 8,27 | 12,11 |
| b. Tanaman Hortikultura            | 8,72  | 6,24  | 5,87  | 5,67 | 7,60  |
| c. Tanaman Perkebunan              | 8,00  | 8,20  | 7,84  | 7,82 | 9,64  |
| d. Peternakan                      | 6,72  | 5,96  | 6,19  | 5,37 | 5,55  |
| e. Jasa Pertanian                  | 6,18  | 4,95  | 4,23  | 3,95 | 3,10  |
| 2. Kehutanan                       | -0,52 | -0,30 | -0,18 | 0,11 | 1,01  |
| 3. Perikanan                       | 4,45  | 3,17  | 3,51  | 3,18 | 3,89  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya masuk dalam konteks diversifikasi Arthur Lewis (teori migrasi) yang membagi perekonomian atas perekonomian perdesaan dan perkotaan. Dalam prespektif perekonomian, transformasi ideal sektor perekonomian ditunjukkan dengan perubahan sektor pertanian ke industri sebagai mesin penggerak ekonomi suatu daerah (*pattern of develomment, hollis chenery*). Terkait dengan hal tersebut, pergerakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya, ditunjang dengan tingginya peran sektor industri yang didukung dengan sektor pertanian dan jasa penunjang lainnya. Namun demikian, secara perlahan terjadi kondisi lompatan, dimana sektor jasa (tersier) mengambil alih peran sektor sekunder, sebagai penunjang sektor pertanian (primer). Dari sisi ini, pergeseran terhadap sektor basis tersebut, diikuti dengan sektor lainnya yang selama ini merupakan sektor dimana cukup besar dalam menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

**Tabel 2.15.**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

| Nilai PDRB (Miliar Rupiah)             |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| ADHB                                   | 21.135,94     | 23.700,99     | 26.343,57     | 29.110,82     | 28.932,31     |
| ADHK                                   | 15.416,53     | 16.424,30     | 17.287,11     | 18.275,88     | 17.832,61     |
| PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)          |               |               |               |               |               |
| ADHB                                   | 38.096,00     | 42.103,00     | 46.143,00     | 50.249,00     | 47.477,00     |
| ADHK                                   | 27.787,00     | 29.177,00     | 30.280,00     | 31.547,00     | 29.263,00     |
| Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010  | 4,56          | 5,00          | 3,78          | 4,18          | -7,24         |
| <b>Jumlah Penduduk (Ribu Orang)</b>    | <b>554,81</b> | <b>562,92</b> | <b>570,91</b> | <b>579,33</b> | <b>609,39</b> |
| <b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)</b> | <b>1,72</b>   | <b>1,46</b>   | <b>1,42</b>   | <b>1,47</b>   | <b>1,91</b>   |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.2.1.2. Laju Inflasi**

Fluktuasi nilai PDRB dapat digunakan untuk mengetahui tingkat daya beli masyarakat di suatu wilayah. Dengan mengetahui angka nilai inflasi maka akan dapat diketahui nilai uang secara riil. Nilai inflasi yang terkendali menunjukkan perekonomian suatu daerah yang berkualitas. Nilai inflasi yang digunakan adalah nilai inflasi Kota Pontianak.

Pada tahun 2020 Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kubu Raya sebesar 144,28 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 137,14 atau mengalami inflasi harga produsen sebesar 5,21 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 13,63 persen, diikuti oleh transportasi dan pergudangan sebesar 8,78 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,32 persen. Sedangkan kategori yang mengalami inflasi paling rendah adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,80 persen, kemudian jasa pendidikan sebesar 2,25 persen.

**Tabel 2.16.**  
**Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kabupaten Kubu Raya (%)**

| No. | Uraian                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
|-----|-------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1.  | Pertumbuhan PDRB              | 6,37 | 6,56 | 5,25 | 5,72 | -2,43 |
| 2.  | Laju Inflasi (Kota Pontianak) | 5,20 | 5,21 | 6,63 | 5,20 | 5,21  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018 = 100 dibandingkan IHK 2012 = 100, khususnya mengenai cakupan kota, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018 = 100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok.

**Tabel 2.17.**  
**Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Tahun 2016-2020 (%)**

| No. | Kelompok Pengeluaran                         | 2016  | 2017 | 2018 |
|-----|----------------------------------------------|-------|------|------|
| 1   | Bahan Makanan                                | 5,31  | 0,77 | 3,82 |
| 2   | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau    | 6,12  | 3,59 | 2,59 |
| 3   | Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | 3,37  | 6,64 | 3,51 |
| 4   | Sandang                                      | 4,95  | 4,48 | 2,84 |
| 5   | Kesehatan                                    | 3,24  | 5,20 | 4,31 |
| 6   | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga            | 4,98  | 8,14 | 5,49 |
| 7   | Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan   | -0,18 | 2,68 | 6,09 |
| 8   | Umum                                         | 3,88  | 3,86 | 3,99 |

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2018

| No. | Kelompok Pengeluaran                                        | 2019   | 2020   |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     | Umum                                                        | 103,86 | 105,98 |
| 1   | Makanan, Minumam dan Tembakau                               | 103,60 | 108,91 |
| 2   | Pakaian dan Alas Kaki                                       | 105,28 | 104,53 |
| 3   | Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar                | 101,61 | 102,18 |
| 4   | Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 104,38 | 105,03 |
| 5   | Kesehatan                                                   | 114,85 | 120,41 |
| 6   | Transportasi                                                | 104,75 | 102,86 |
| 7   | Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan                     | 100,83 | 100,20 |
| 8   | Rekreasi, Olahraga dan Budaya                               | 103,63 | 104,30 |
| 9   | Pendidikan                                                  | 104,87 | 105,72 |

| No. | Kelompok Pengeluaran                    | 2019   | 2020   |
|-----|-----------------------------------------|--------|--------|
| 10  | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 104,06 | 106,90 |
| 11  | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya      | 105,56 | 108,37 |

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2021

Dampak riil pergerakan inflasi yang dihitung berdasarkan IHK akan terasa memberikan dampak secara riil terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Dengan kondisi geografis yang terpisahkan oleh wilayah perairan, tekanan perubahan IHK terhadap biaya distribusi ke wilayah-wilayah pedalaman, akan dibebankan kepada konsumen, sehingga *purchasing power* menjadi rendah.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut.

#### 2.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.

**Tabel 2.18.**  
**Kinerja Pendidikan**

| No. | Uraian                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Angka Melek Huruf (%)     | 92,84  | 92,56  | 92,17  | 91,59  | 90,24  |
| 2.  | Rata Lama sekolah (Thn)   | 6,57   | 6,58   | 8,46   | 8,49   | 7,37   |
| 3.  | Harapan Lama Sekolah      | 12,84  | 13,21  | 13,59  | 13,64  | 13,82  |
| 4.  | Angka Partisipasi Kasar   |        |        |        |        |        |
|     | - SD/MI/Paket A           | 113,83 | 101,61 | 114,18 | 108,24 | 106,40 |
|     | - SMP/MTs/Paket B         | 95,64  | 90,02  | 97,80  | 116,12 | 98,88  |
|     | - SMA/SMK/MA/Paket C      | 72,70  | 61,39  | 97,08  | 80,31  | 99,58  |
| 5.  | Angka Partisipasi Murni   |        |        |        |        |        |
|     | - SD/MI/Paket A           | 99,72  | 91,61  | 96,56  | 96,58  | 97,63  |
|     | - SMP/MTs/Paket B         | 89,08  | 83,85  | 82,26  | 81,11  | 98,88  |
|     | - SMA/SMK/MA/Paket C      | 66,27  | 53,39  | 52,26  | 53,24  | 99,58  |
| 6.  | Angka Partisipasi Sekolah |        |        |        |        |        |
|     | - SD/MI/Paket A           | 92,25  | 92,32  | 93,55  | 92,93  | 92,36  |
|     | - SMP/MTs/Paket B         | 94,58  | 96,40  | 98,16  | 113,89 | 104,48 |
|     | - SMA/SMK/MA/Paket C      | 70,53  | 80,44  | 83,23  | 80,40  | 64,01  |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah berarti jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam dimensi pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, tahun 2019 sebesar 8,49 tahun, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 7,37 tahun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 rata-rata penduduk Kabupaten Kubu Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 1 (satu) SMP. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah cenderung belum menunjukkan perubahan yang signifikan, yakni rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai lulus SD.

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua dengan salah satu strateginya adalah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Semakin tinggi APS semakin terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

**2.2.2.2. Kesehatan**

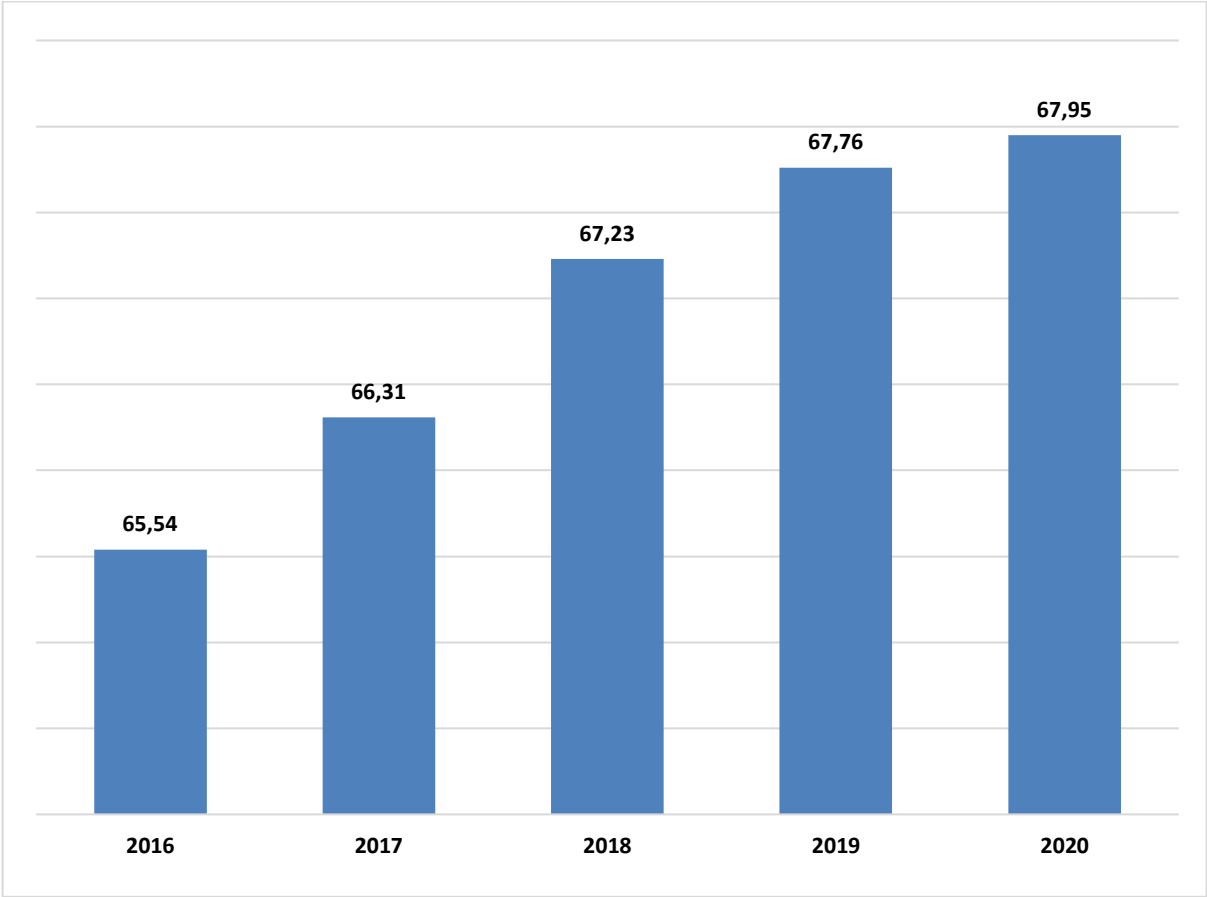
Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2020) Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari metode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2020 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-3 (tiga) dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kendatipun secara relatif terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk angka harapan hidup, komponen IPM pada tahun 2020 mencapai 70,59 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan angka harapan hidup sebesar 70,43 tahun. Peningkatan terhadap angka harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.19.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian                                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Angka IPM                              | 65,54 | 66,31 | 67,23 | 67,76 | 67,95 |
| 2.  | Peringkat di Provinsi Kalimantan Barat | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

**Grafik 2.1.**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

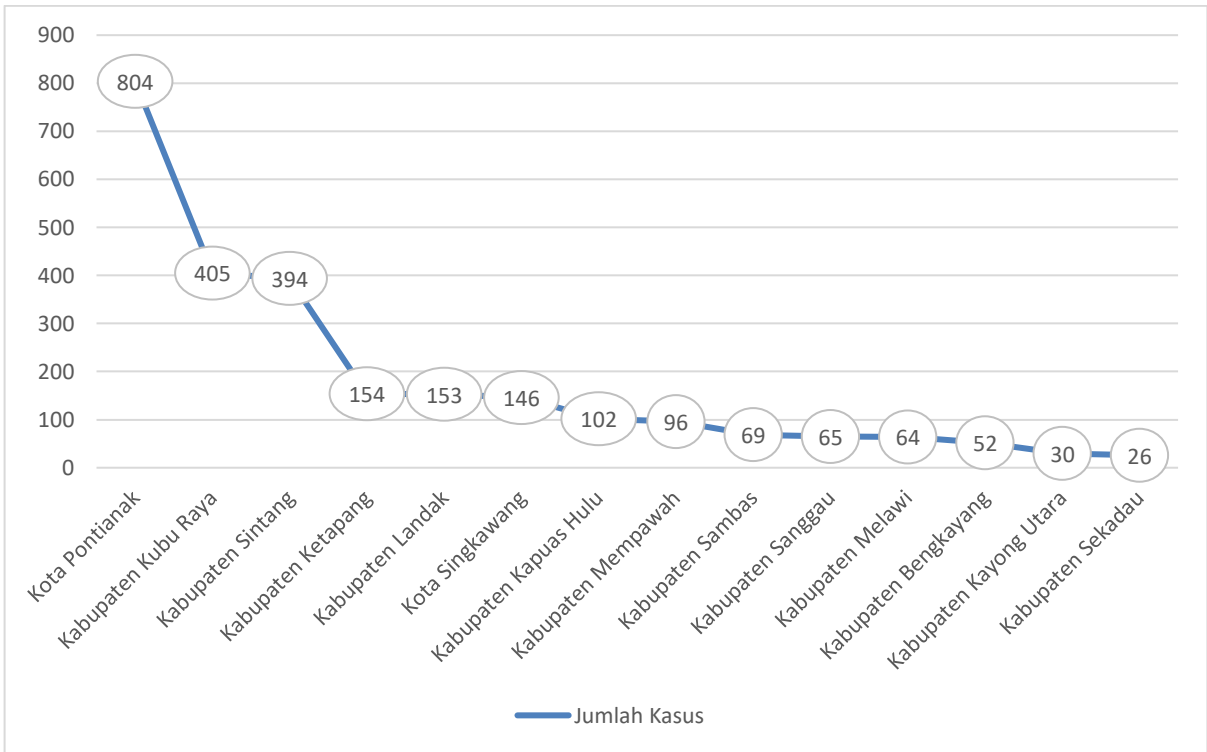


**Tabel 2.20.**  
**Kinerja Kesehatan**

| No. | Uraian                                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus) | 60    | 33    | 38    | 31    | 30    |
| 2.  | Angka Harapan Hidup                                  | 69,77 | 69,80 | 70,04 | 70,69 | 70,59 |
| 3.  | Jumlah Penderita Gizi Buruk                          | 29    | 22    | 16    | 33    | N/A   |
| 4.  | Stunting                                             | 29,30 | 34,80 | 25,60 | 23,63 | 13,40 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2021

Grafik 2.2.  
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2020  
\* Update data pada tanggal 5 Desember 2020

Selain terkait dengan penegakan protokol kesehatan (prokes), pencegahan penularan Virus Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya disebabkan posisinya sebagai kawasan penyangga ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan akibat pandemi Covid-19, termasuk mencari perumusan terbaik guna memastikan roda perekonomian terus berputar. Berikut data sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya per tanggal 25 Oktober 2021.

Tabel 2.21.  
Sebaran Pelaku Perjalanan, Suspek, Kontak Erat *Probable* dan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya

| No. | Puskesmas                  | Konfirmasi   |                  |        |           |              |                  |        |           |
|-----|----------------------------|--------------|------------------|--------|-----------|--------------|------------------|--------|-----------|
|     |                            | Kubu Raya    |                  |        |           | Luar Wilayah |                  |        |           |
|     |                            | Jumlah Kasus | Dirawat/ Isolasi | Sembuh | Meninggal | Jumlah Kasus | Dirawat/ Isolasi | Sembuh | Meninggal |
| 1   | Batu Ampar                 | 94           | 0                | 93     | 1         | 0            | 0                | 0      | 0         |
| 2   | Padang Tikar               | 55           | 1                | 50     | 4         | 0            | 0                | 0      | 0         |
| 3   | Sui Kerawang               | 49           | 1                | 48     | 0         | 0            | 0                | 0      | 0         |
|     | Total Kecamatan Batu Ampar | 198          | 2                | 191    | 5         | 0            | 0                | 0      | 0         |

| No. | Puskesmas                              | Konfirmasi   |                  |              |            |              |                  |           |           |
|-----|----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
|     |                                        | Kubu Raya    |                  |              |            | Luar Wilayah |                  |           |           |
|     |                                        | Jumlah Kasus | Dirawat/ Isolasi | Sembuh       | Meninggal  | Jumlah Kasus | Dirawat/ Isolasi | Sembuh    | Meninggal |
| 4   | Terentang                              | 20           | 0                | 20           | 0          | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 5   | Radak                                  | 50           | 0                | 49           | 1          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Terentang</b>       | <b>70</b>    | <b>0</b>         | <b>69</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 6   | Kubu                                   | 107          | 0                | 105          | 2          | 1            | 0                | 1         | 0         |
| 7   | Air Putih                              | 56           | 0                | 52           | 4          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Kubu</b>            | <b>163</b>   | <b>0</b>         | <b>157</b>   | <b>6</b>   | <b>1</b>     | <b>0</b>         | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| 8   | Teluk Pakedai                          | 50           | 0                | 47           | 3          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Teluk Pakedai</b>   | <b>50</b>    | <b>0</b>         | <b>47</b>    | <b>3</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 9   | Sungai Kakap                           | 360          | 1                | 351          | 8          | 11           | 0                | 11        | 0         |
| 10  | Punggur                                | 47           | 0                | 46           | 1          | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 11  | Sungai Rengas                          | 153          | 1                | 147          | 5          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Sungai Kakap</b>    | <b>560</b>   | <b>2</b>         | <b>544</b>   | <b>14</b>  | <b>11</b>    | <b>0</b>         | <b>11</b> | <b>0</b>  |
| 12  | Rasau Jaya                             | 232          | 1                | 217          | 14         | 2            | 0                | 2         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Rasau Jaya</b>      | <b>232</b>   | <b>1</b>         | <b>217</b>   | <b>14</b>  | <b>2</b>     | <b>0</b>         | <b>2</b>  | <b>0</b>  |
| 13  | Sungai Durian                          | 716          | 0                | 694          | 22         | 6            | 0                | 6         | 0         |
| 14  | Sungai Raya Dalam                      | 653          | 1                | 631          | 21         | 35           | 0                | 35        | 0         |
| 15  | Sungai Asam                            | 90           | 0                | 90           | 0          | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 16  | Korpri                                 | 531          | 0                | 510          | 21         | 1            | 0                | 1         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Sungai Raya</b>     | <b>1.990</b> | <b>1</b>         | <b>1.925</b> | <b>64</b>  | <b>42</b>    | <b>0</b>         | <b>42</b> | <b>0</b>  |
| 17  | Sungai Ambawang                        | 225          | 0                | 215          | 10         | 4            | 0                | 4         | 0         |
| 18  | Lingga                                 | 57           | 0                | 54           | 3          | 0            | 0                | 0         | 0         |
| 19  | Parit Timur                            | 26           | 1                | 25           | 0          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>308</b>   | <b>1</b>         | <b>294</b>   | <b>13</b>  | <b>4</b>     | <b>0</b>         | <b>4</b>  | <b>0</b>  |
| 20  | Kuala Mandor B                         | 43           | 0                | 42           | 1          | 0            | 0                | 0         | 0         |
|     | <b>Total Kecamatan Kuala Mandor B</b>  | <b>43</b>    | <b>0</b>         | <b>42</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|     | <b>TOTAL</b>                           | <b>3.614</b> | <b>7</b>         | <b>3.486</b> | <b>121</b> | <b>60</b>    | <b>0</b>         | <b>60</b> | <b>0</b>  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2021

### 2.2.1.3. Kemiskinan

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang cukup tinggi sayangnya tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003).

Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhannya ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (*basic need*) dengan pendekatan teori Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada beberapa pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minimum Regional (UMR).

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan hingga tiga tahun berturut sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang dapat

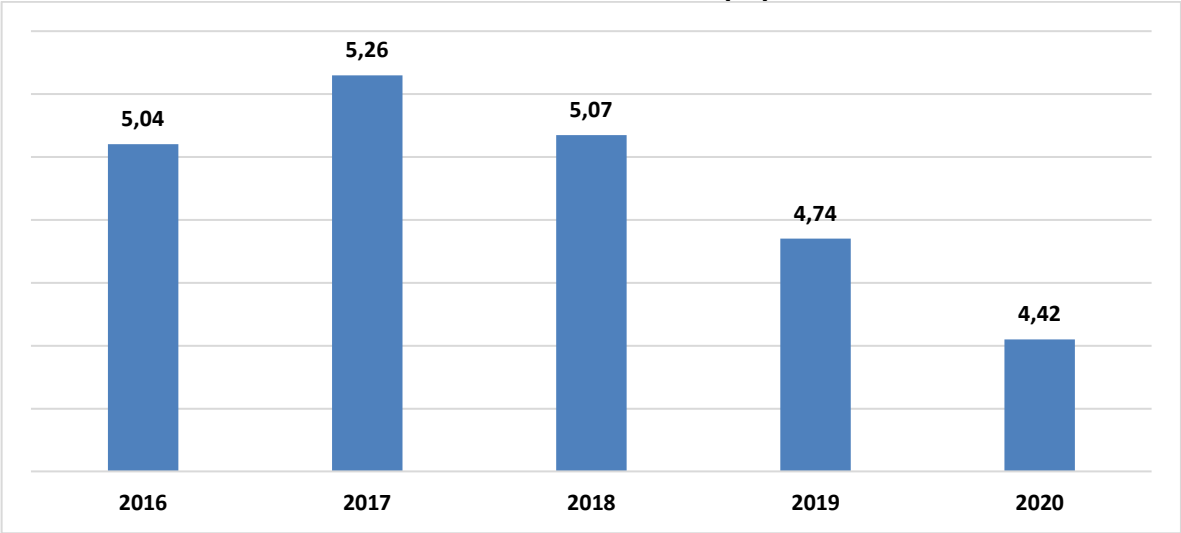
diakibatkan karena Kabupaten Kubu Raya termasuk salah satu kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi. Terdapat penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya yang terjadi dari tahun 2016, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Namun pada tahun berikutnya secara berturut-turut jumlah penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan sehingga berada diangka 4,42 persen di tahun 2020.

**Tabel 2.22.**  
**Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial**  
**Indikator Kemiskinan 2016-2020**

| No. | Indikator                     | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 27.830 | 29.530 | 28.860 | 27.370 | 25.900 |
| 2.  | Persentase Kemiskinan (%)     | 5,04   | 5,26   | 5,07   | 4,74   | 4,41   |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

**Grafik 2.3.**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2015-2020 (%)**



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 merupakan yang terendah selama periode empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok termiskin semakin mendekat dari garis kemiskinan yang artinya akan semakin mudah untuk kelompok termiskin untuk keluar dari kemiskinan. Hal yang sama juga terlihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2018 dan tahun 2020 juga merupakan angka terendah selama periode empat tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin semakin kecil. Dapat diartikan bahwa ketimpangan antara sesama penduduk miskin juga semakin kecil. Meski demikian, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih harus terus ditingkatkan. Hasilnya di tahun 2020 indeks P1 (kedalaman kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya mengalami penurunan dan berada diangka 0,62. Sedangkan indeks P2 (keparahan kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya juga mengalami kenaikan mencapai 0,14. Sementara di rata-rata Provinsi Kalimantan Barat indeks P1 sebesar 1,01 dan P2 sebesar 0,23 di Tahun 2020. Dengan asumsi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berdampak kurang baik kepada upaya mengurangi derajat kesejahteraan diantara penduduk miskin.

**Tabel 2.23.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)**  
**Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) |                  | Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) |                  |
|-------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|       | Kubu Raya                        | Kalimantan Barat | Kubu Raya                          | Kalimantan Barat |
| 2016  | 0,77                             | 1,29             | 0,17                               | 0,32             |
| 2017  | 0,75                             | 1,19             | 0,21                               | 0,27             |
| 2018  | 0,63                             | 1,23             | 0,14                               | 0,29             |
| 2019  | 0,75                             | 1,14             | 0,17                               | 0,26             |
| 2020  | 0,62                             | 1,01             | 0,14                               | 0,23             |

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

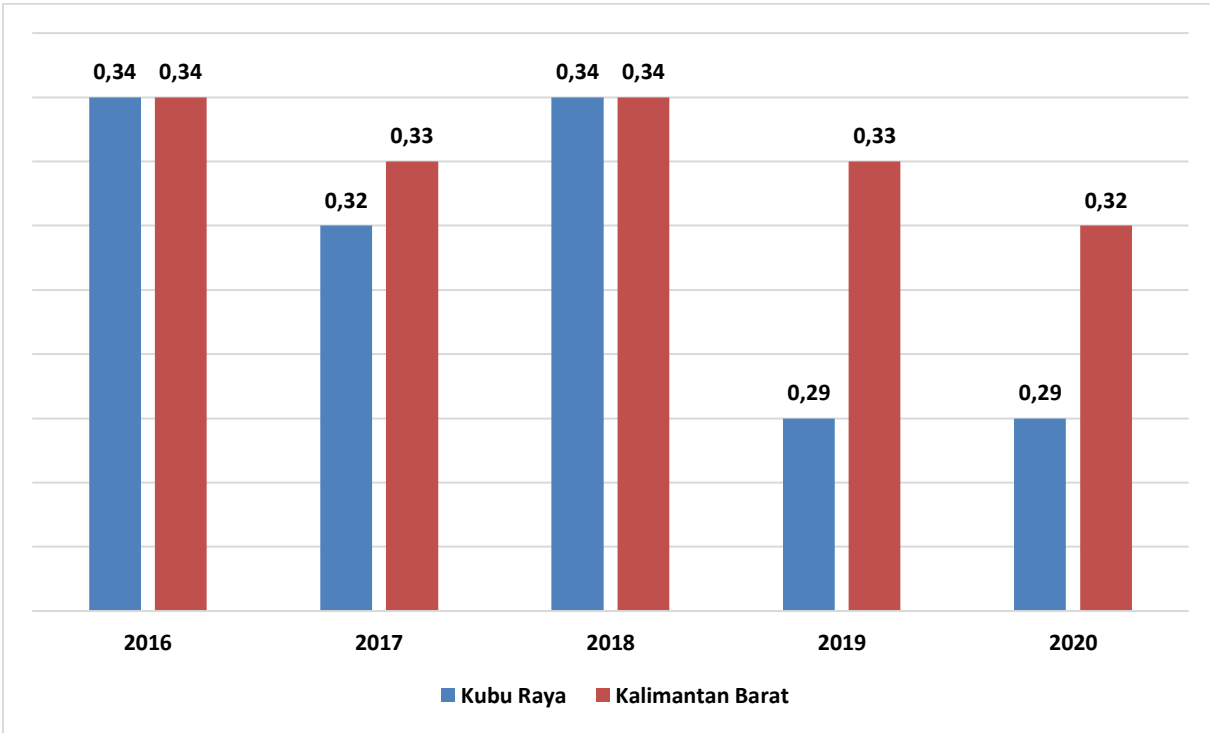
Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh antara seluruh kelompok penduduk berdasarkan pendapatannya. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan 2018 namun kemudian berkurang pada tahun 2019 dan tahun 2020. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Kubu Raya semakin baik.

**Tabel 2.24.**  
**Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2016-2020**

| Tahun | Rasio Gini |                  |
|-------|------------|------------------|
|       | Kubu Raya  | Kalimantan Barat |
| 2016  | 0,34       | 0,34             |
| 2017  | 0,32       | 0,33             |
| 2018  | 0,34       | 0,34             |
| 2019  | 0,29       | 0,33             |
| 2020  | 0,29       | 0,32             |

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

**Grafik 2.4.**  
**Rasio Gini Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021

**2.2.1.4. Kesempatan Kerja**

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas). TPAK Kalimantan Barat pada Agustus 2020 sebesar 68,83 persen dan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,51 persen maka angka TPAK tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan

perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,35 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 53,86 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,24 persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen poin.

**Tabel 2.25.**  
**Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya**

| No | Indikator Ketenagakerjaan                 | 2016 | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Angkatan Kerja                            | N/A  | 254.314 | 252.023 | 518.546 | 290.584 |
|    | Bekerja                                   | N/A  | 239.273 | 239.325 | 266.776 | 269.826 |
|    | Pengangguran                              | N/A  | 15.041  | 12.698  | 251.770 | 20.758  |
| 2. | Bukan Angkatan Kerja                      | N/A  | 143.669 | 153.050 | 145.691 | 138.564 |
|    | Sekolah                                   | N/A  | 47.464  | 42.305  | 38.051  | N/A     |
|    | Mengurus Rumah Tangga                     | N/A  | 80.037  | 96.917  | 85.250  | N/A     |
|    | Lainnya                                   | N/A  | 16.168  | 13.830  | 22.390  | N/A     |
| 3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | N/A  | 63,90   | 62,22   | 64,48   | 67,71   |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 6,42 | 5,91    | 5,04    | 5,62    | 7,14    |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

**2.3. Aspek Pelayanan Umum**  
**2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar**  
**2.3.1.1. Pendidikan**

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2017 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 250 unit dengan jumlah siswa sebanyak 10.635 siswa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka Putus Sekolah idealnya adalah 0 persen. Pada tahun 2017, Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,83 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,57 persen. Angka Putus Sekolah SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP dan SMU, berkorelasi dengan Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonomi untuk membantu orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Perkembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 sebesar 18,00, SMP sebesar 14,00 dan SMU sebesar 18,00. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya cukup ideal.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yakni pada tahun 2015 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya sebesar 66,73 persen, tahun 2016 sebesar 76,58 persen dan pada tahun 2017 persentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan menjadi 78,56 persen. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Persentase guru yang sudah bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 34,86 persen mengalami

peningkatan apabila dibandingkan dari tahun 2016 yang baru sebesar 33,49 persen.

**Tabel 2.26.**  
**Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2020**

| No. | Variabel       | SD           | SMP        | SMU |
|-----|----------------|--------------|------------|-----|
| 1   | Baik           | 798          | 350        | N/A |
| 2   | Rusak Ringan   | 1.690        | 556        | N/A |
| 3   | Rusak Sedang   | 25           | 21         | N/A |
| 4   | Rusak Berat    | 20           | 11         | N/A |
| 5   | Rusak Total    | 0            | 0          | N/A |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>2.533</b> | <b>931</b> |     |
| 1   | % Baik         | 31,50        | 37,59      | N/A |
| 2   | % Rusak Ringan | 66,71        | 59,72      | N/A |
| 3   | % Rusak Sedang | 0,98         | 2,25       | N/A |
| 4   | % Rusak Berat  | 0,78         | 1,18       | N/A |
| 5   | % Rusak Total  | 0,00         | 0,00       | N/A |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.27.**  
**Urusan Konkuren Bidang Pendidikan**

| No | Indikator                               | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     |
|----|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | Angka Melek Huruf (AMH)                 | 97,75    | 97,76    | 92,17    | 91,59    | 90,24    |
| 2  | IPM                                     | 65,54    | 66,31    | 67,23    | 67,76    | 67,95    |
|    | - Angka Harapan Hidup (AHH)             | 69,77    | 69,80    | 70,04    | 70,69    | 70,59    |
|    | - Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)      | 12,84    | 13,21    | 13,59    | 13,64    | 13,89    |
|    | - Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)    | 6,57     | 6,58     | 6,81     | 6,82     | 6,83     |
|    | - Pengeluaran Perkapita (ribuan rupiah) | 8.145,12 | 8.430,21 | 8.532,34 | 8.773,42 | 8.709,08 |
| 3  | Angka Putus Sekolah (APS)               |          |          |          |          |          |
|    | - APS SD/MI                             | 0,57     | 0,83     | 0,43     | 0,08     | 0,05     |
|    | - APS SMP/MTs                           | 0,67     | 1,69     | 0,63     | 0,33     | 0,22     |
|    | - APS SMA/MA/SMK                        | 0,24     | 1,03     | 0,92     | 0,29     | 0,10     |
| 4  | Angka Partisipasi Sekolah (APS)         |          |          |          |          |          |
|    | - APS SD/MI                             | 92,25    | 92,32    | 93,55    | 92,93    | 89,17    |

| No | Indikator                                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | - APS SMP/MTs                                           | 94,58  | 96,40  | 98,16  | 113,89 | 104,48 |
|    | - APS SMA/MA/SMK                                        | 70,53  | 80,44  | 83,23  | 80,40  | 64,01  |
| 5  | Angka Partisipasi Murni (APM)                           |        |        |        |        |        |
|    | - APM SD/MI                                             | 99,72  | 91,61  | 96,56  | 96,58  | 89,17  |
|    | - APM SMP/MTs                                           | 89,08  | 83,85  | 82,26  | 81,11  | 79,56  |
|    | - APM SMA/MA/SMK                                        | 66,27  | 53,39  | 52,26  | 53,24  | 49,99  |
| 6  | Angka Partisipasi Kasar (APK)                           |        |        |        |        |        |
|    | - APK SD/MI                                             | 113,83 | 101,61 | 114,18 | 108,24 | 103,14 |
|    | - APK SMP/MTs                                           | 95,64  | 90,02  | 97,80  | 116,12 | 94,11  |
|    | - APK SMA/MA/SMK                                        | 72,70  | 61,39  | 97,08  | 80,31  | 70,64  |
| 7  | Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)                  |        |        |        |        |        |
|    | - APT SD/MI                                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | - APT SMP/MTs                                           | 99,97  | 98,43  | 99,97  | 99,98  | 100,00 |
|    | - APT SMA/MA/SMK                                        | 99,98  | 99,81  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8  | Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta) |        |        |        |        |        |
|    | - Jumlah Sekolah PAUD/TK                                | 227    | 250    | 250    | 256    | 100    |
|    | - Jumlah Sekolah SD/MI                                  | 533    | 537    | 537    | 544    | 540    |
|    | - Jumlah Sekolah SMP/MTs                                | 227    | 235    | 237    | 240    | 283    |
|    | - Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA                             | 87     | 93     | 127    | 137    | 102    |
| 9  | Jumlah Murid (Negeri/Swasta)                            |        |        |        |        |        |
|    | - Jumlah Murid TK/PAUD                                  | 10.620 | 10.635 | 10.680 | 11.205 | 3.713  |
|    | - Jumlah Murid SD/MI                                    | 76.765 | 74.598 | 71.429 | 71.444 | 73.159 |
|    | - Jumlah Murid SMP/MTs                                  | 33.185 | 33.188 | 32.124 | 32.072 | 32.898 |
|    | - Jumlah Murid SMA/SMK/MA                               | 17.701 | 17.184 | 22.387 | 23.474 | 13.383 |
| 10 | Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)                  |        |        |        |        |        |
|    | - Jumlah Guru TK/PAUD                                   | 977    | 1.086  | 1.086  | 4.164  | 366    |
|    | - Jumlah Guru SD/MI                                     | 4.286  | 4.260  | 4.260  | 2.309  | 4.703  |

| No | Indikator                                      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | - Jumlah Guru SMP/MTs                          | 2.348  | 2.388  | 2.362  | 1.479  | 757    |
|    | - Jumlah Guru SMA/SMK/MA                       | 943    | 951    | 1.360  | 7.952  | 893    |
| 11 | Rasio Murid Terhadap Guru                      |        |        |        |        |        |
|    | - Rasio Murid Terhadap Guru TK/PAUD            | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
|    | - Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI              | 16     | 18     | 17     | 17     | 17     |
|    | - Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs            | 18     | 14     | 14     | 14     | 14     |
|    | - Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA         | 18     | 18     | 16     | 17     | 17     |
| 12 | Angka Melanjutkan (AM)                         |        |        |        |        |        |
|    | - AM SMP                                       | 102,58 | 111,52 | 104,97 | 50,00  | 53,58  |
|    | - AM SMA                                       | 68,26  | 74,67  | 78,55  | 100,00 | 104,61 |
| 13 | Fasilitas Pendidikan                           |        |        |        |        |        |
|    | - Sekolah SD dalam kondisi baik                | 684    | 727    | 766    | 721    | 713    |
|    | - Sekolah SMP dalam kondisi baik               | 403    | 363    | 404    | 395    | 386    |
|    | - Sekolah SMA/SMK/MA dalam kondisi baik        | 318    | 359    | 372    | 368    | 342    |
| 14 | Ketersediaan Sekolah                           |        |        |        |        |        |
|    | - Ketersediaan SD/MI                           | 533    | 537    | 537    | 544    | 545    |
|    | - Ketersediaan SMP/MTS                         | 227    | 235    | 237    | 240    | 240    |
|    | - Ketersediaan SMA/MA                          | 87     | 93     | 95     | N/A    | N/A    |
|    | - Ketersediaan SMK                             | 26     | 30     | 32     | N/A    | N/A    |
|    | - Ketersediaan TK                              | 227    | 250    | 250    | 256    | 263    |
| 15 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV          | 76,58  | 78,56  | 75,67  | 78,48  | 78,92  |
| 16 | Persentase Guru SD dan SMP yang bersertifikasi | 33,49  | 34,86  | 39,11  | 23,75  | 33,75  |

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020  
Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Mengurai permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Dari perhitungan IPM, rata-

rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik dan terus mengalami kenaikan dan sudah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih di bawah angka rata-rata lama sekolah yang diwajibkan yaitu 9 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di tahun 2014 adalah 7,55 tahun dan di tahun 2018 sudah mencapai 8,46 tahun. Artinya peluang peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan tingkat dasar 9 tahun sudah cukup besar dan diharapkan dapat dicapai dalam masa akhir RPJMD ke-3 ini.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya adalah 6,83 tahun, dimana angka ini hanya naik sebesar 0,01 dari tahun 2019. Untuk mencapai target rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2024 mencapai 7,20, maka dibutuhkan terobosan-terobosan yaitu dengan strategi peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai suatu wadah kegiatan pembelajaran masyarakat yang programnya antara lain pendidikan kesetaraan (A, B dan C), pendidikan keaksaraan, pendidikan kewarganegaraan, kerumahtanggaan, dan lain-lain. Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 15 PKBM, tapi dari segi jumlah dirasakan masih kurang dan belum merata di semua kecamatan.

**Tabel 2.28.**  
**Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Sudah dilakukan**  
**Verifikasi dan Validasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021**

| No. | NPSN     | Nama Sekolah        | Kecamatan       | Alamat                                            |
|-----|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1   | P9908484 | PKBM SIMPATI        | Kubu            | Jl. Diponegoro TR 12 Desa Jangkang Satu           |
| 2   | P9908485 | PKBM MARGA JAYA     | Rasau Jaya      | Patok 33 Dusun Banjar Rejo Desa Rasau Jaya II     |
| 3   | P9952915 | SKB KUBU RAYA       | Rasau Jaya      | Jl. Jendral Sudirman No. 45 Rasau Jaya            |
| 4   | P9908486 | PKBM AINUL YAQIN    | Sungai Ambawang | Jl. Trans Kalimantan Gg. Seribut Desa Jawa Tengah |
| 5   | P2970101 | PKBM ANGGREK        | Sungai Ambawang | Jl. Trans Kalimantan                              |
| 6   | P9908780 | PKBM PROKINDO       | Sungai Kakap    | Jl. Primer Desa Jeruju Besar                      |
| 7   | P9948187 | PKBM ADAM           | Sungai Raya     | Jl. Adisucipto Perumahan Teluk Mulus Blok H.11    |
| 8   | P9934733 | PKBM AYO MAJU       | Teluk Pakedai   | Dusun Suka Harja                                  |
| 9   | P9947905 | PKBM MERDEKA        | Terentang       | Jalan Poros Utama No. 09                          |
| 10  | P9996716 | PKBM BERKAT MANDIRI | Sungai Kakap    | Jl. Parit Berkat Rt.15/Rw.06 Punggur Besar        |

| No. | NPSN     | Nama Sekolah        | Kecamatan    | Alamat                              |
|-----|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 11  | P2970104 | PKBM HARAPAN KITA   | Sungai Kakap | Jl. Pramuka Komplek PHK Blok 1/88   |
| 12  | P9970519 | PKBM KHADIJAH       | Sungai Raya  | Jl. Wonodadi 2 No. 22 Rt.004/Rw.011 |
| 13  | P2970519 | PKBM APRILIA        | Sungai Raya  | Jl. A. Yani 2/Arteri Supadio Km 3,5 |
| 14  | P9970252 | PKBM SIRATUL JANNAH | Rasau Jaya   | Jl. Rasau Jaya, Kuala Dua           |
| 15  | P9908490 | PKBM HASANAH        | Terentang    | Desa Teluk Bayur                    |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Indikator pendidikan dapat diklasifikasikan : 95 – 100 berkategori paripurna, 90 – 94,99 berkategori utama, 85 – 89,99 berkategori madya, 80 – 84,99 berkategori pratama, kurang dari 80 berkategori kurang. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, maka kinerja bidang pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya bahwa aspek pendidikan dan mutu pendidikan masih kurang. Akses Pendidikan dengan nilai rata-rata 78,89 persen termasuk kategori kurang, dirinci atas indikator meluas sebesar 68,41 persen termasuk kategori kurang, indikator merata sebesar 70,51 persen termasuk kategori kurang dan indikator berkeadilan sebesar 97,74 persen termasuk kategori paripurna. Sedangkan aspek mutu pendidikan dengan rata-rata nilai 71,86 persen termasuk kategori kurang, yang dirinci menjadi indikator mutu siswa sebesar 90,86 persen termasuk kategori utama, indikator mutu guru sebesar 66,55 persen termasuk kategori kurang dan indikator mutu prasarana sebesar 58,19 persen termasuk kategori kurang. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 78,89 persen termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 84,04 persen termasuk kategori pratama, dan jenjang SMA dengan nilai 73,73 persen termasuk kategori kurang, dengan rata-rata angka dikdasmen sebesar 78,89 persen juga termasuk kategori kurang. Secara umum kinerja Kabupaten Kubu Raya sebesar 78,89 persen dan termasuk kategori kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29.  
Pencapaian Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Kubu Raya 2019/2020

| Aspek            | SD     | SMP     | SMA    | Dikdasmen | Jenis     |
|------------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|
| AKSES PENDIDIKAN |        |         |        |           |           |
| a. Merata        | 65,63  | 71,40   | 57,05  | 64,69     | KURANG    |
| b. Meluas        | 77,83  | 74,73   | 58,93  | 70,50     | KURANG    |
| c. Berkeadilan   | 96,25  | 93,33   | 99,66  | 96,42     | PARIPURNA |
| MUTU PENDIDIKAN  |        |         |        |           |           |
| a. Siswa         | 92,06  | 99,55   | 99,76  | 92,72     | UTAMA     |
| b. Guru          | 71,57  | 67,04   | 62,86  | 67,15     | KURANG    |
| c. Prasarana     | 40,10  | 55,11   | 49,98  | 48,40     | KURANG    |
| Kinerja          | 73,91  | 76,86   | 71,37  | 73,31     | KURANG    |
|                  | KURANG | PRATAMA | KURANG | KURANG    |           |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Adapun data detail sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30.  
Nilai Indikator Pendidikan Tahun 2020

| No.               | Jenis Indikator                                                | SD     | SMP    | SMA    | Dikdasmen |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Akses yang Meluas |                                                                |        |        |        |           |
| 1                 | Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)                                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00    |
| 2                 | Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)                           | 96,55  | 81,92  | 96,03  | 91,50     |
| 3                 | Persentase Perpustakaan (% Perpus)                             | 73,74  | 64,56  | 51,97  | 63,42     |
| 4                 | Persentase Ruang UKS (% RUKS)                                  | 26,63  | 64,14  | 54,33  | 48,37     |
| 5                 | Persentase Tempat Olahraga (% TOR)                             | 99,81  | 95,36  | 88,19  | 94,45     |
| 6                 | Persentase Laboratorium (% Lab)                                | -      | 62,45  | 13,54  | 25,33     |
| Akses yang Merata |                                                                |        |        |        |           |
| 7                 | Angka Partisipasi Murni (APM)                                  | 91,80  | 84,17  | 53,06  | 76,34     |
| 8                 | Angka Partisipasi Kasar (APK)                                  | 100,00 | 91,93  | 63,70  | 85,21     |
| 9                 | Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)                                | 100,00 | 100,00 | 92,33  | 97,44     |
| 10                | Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM) | 77,59  | 100,00 | 71,55  | 83,05     |

| No.                             | Jenis Indikator                                             | SD     | SMP    | SMA    | Dikdasmen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11                              | Satuan Biaya (SB)                                           | -      | -      | -      | -         |
| <b>Akses yang Berkeadilan</b>   |                                                             |        |        |        |           |
| 12                              | Perbedaan Gender APK (PG APK)                               | 94,86  | 98,33  | 97,30  | 96,83     |
| 13                              | Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)                         | 95,15  | 98,20  | 95,85  | 96,40     |
| 14                              | Persentase Siswa Swasta (% S-Swt)                           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00    |
| <b>Mutu dari Segi Siswa</b>     |                                                             |        |        |        |           |
| 1                               | Persentase Siswa Baru TK (% SB TK)                          | 48,55  | -      | -      | 48,55     |
| 2                               | Angka Mengulang (AU)                                        | 98,08  | 98,97  | 99,19  | 98,75     |
| 3                               | Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM) | 100,00 | 99,73  | 99,27  | 99,67     |
| 4                               | Angka Lulusan (AL)                                          | 100,00 | 99,97  | 100,00 | 99,99     |
| 5                               | Angka Putus Sekolah (APS)                                   | 99,57  | 99,37  | 99,08  | 99,34     |
| 6                               | Rata2 Lama Belajar (RLB)                                    | 97,75  | 99,26  | 99,52  | 98,85     |
| <b>Mutu dari Segi Guru</b>      |                                                             |        |        |        |           |
| 7                               | Persentase Guru Layak (% GL)                                | 68,71  | 79,72  | 90,44  | 79,62     |
| 8                               | Persentase Guru Sertifikasi (% GS)                          | 50,82  | 27,27  | 23,01  | 33,70     |
| 9                               | Rasio Siswa per Guru (R-S/G)                                | 95,38  | 90,71  | 72,87  | 86,32     |
| <b>Mutu dari Segi Prasarana</b> |                                                             |        |        |        |           |
| 10                              | Persentase Sekolah Akreditasi A & B (% SA-AB)               | 32,59  | 28,69  | 22,05  | 27,78     |
| 11                              | Persentase Ruang Kelas baik (% RKb)                         | 66,26  | 80,48  | 88,26  | 78,33     |
| 12                              | Persentase Perpustakaan baik (% Perpusb)                    | 60,10  | 54,25  | 81,82  | 65,39     |
| 13                              | Persentase Ruang UKS baik (% RUKSb)                         | 72,73  | 80,26  | 68,12  | 73,70     |
| 14                              | Persentase Laboratorium baik (% Labb)                       | -      | 70,95  | 66,28  | 45,74     |

Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Pertumbuhan pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya semakin baik. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya juga terus bertambah. Pondok pesantren ini juga bisa menjadi pilihan utama bagi para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

**Tabel 2.31.**  
**Daftar Lembaga Pondok Pesantren Umum di Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2020**

| No. | NSPP         | Nama Pondok Pesantren     | Alamat                                                                | Kecamatan       |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 510361120001 | Abdussalam                | Parit Surabaya, Desa Pasak                                            | Sungai Ambawang |
| 2   | 510061120002 | Nahdlatul Athfal          | Parit Adam, RT 02 RW 04, Desa Ambawang Kuala                          | Sungai Ambawang |
| 3   | 510061120003 | Raudhatul Ulum I Meranti  | Dusun Meranti, Desa Puguk                                             | Sungai Ambawang |
| 4   | 510061120004 | Raudhatul Ulum Khaliliyah | Parit Surabaya, Desa Pasak                                            | Sungai Ambawang |
| 5   | 510061120005 | Mambaul Ulum I            | Kampung Baru, Desa Simpang Kanan                                      | Sungai Ambawang |
| 6   | 510061120006 | Tuh Fatul Athfal          | Jl. Rasau Jaya Gang Utama RT 04 RW 06, Dusun Keramat 2 Desa Kuala Dua | Sungai Raya     |
| 7   | 510061120007 | Raudhatul Mubtadiin       | Parit Banyu Ates, Desa Pasak Piang RT 02 RW 02                        | Sungai Ambawang |
| 8   | 510061120008 | Mambaul Ulum              | Parit H. Maksun , Punggur Kecil RT 17 RW 15                           | Sungai Kakap    |
| 9   | 510061120009 | Al Hidayah                | Parit Naim, Desa Sungai Malaya                                        | Sungai Ambawang |
| 10  | 510061120011 | Darul Hidayah             | Jl. Sultan Agung Patok 5, Desa Rasau Jaya Satu                        | Rasau Jaya      |
| 11  | 510061120012 | Al Aziz                   | Jl. Parit Timur Dusun Maju Bersama RT 02 RW 01, Desa Pasak            | Sungai Ambawang |
| 12  | 510061120015 | Haebat Islam              | Jl. Soekarno Hatta,Gang Pesantren Gontong, Desa Parit Baru            | Sungai Raya     |
| 13  | 510061120017 | Hidayatul Muhsinin        | Jl. Perdamaian, Desa Pal Sembilan                                     | Sungai Kakap    |
| 14  | 510061120018 | Mansyaul Ulum             | Dusun Teluk Lerang, Desa Kuala Mandor A                               | Kuala Mandor B  |
| 15  | 510061120019 | Miftahul Ulum             | Jl.Karya Desa Sui Ambangah RT 03 RW 02                                | Sungai Raya     |
| 16  | 510061120020 | Miftahul Ulum             | Jl. Parit Berkat Punggur Besar                                        | Sungai Kakap    |
| 17  | 510061120021 | Nurul Furqon              | Parit Husin Desa Punggur Kecil                                        | Sungai Kakap    |

| No. | NSPP         | Nama Pondok Pesantren | Alamat                                                       | Kecamatan       |
|-----|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18  | 510361120022 | Al Mas'udiyah         | Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Parit Bhakti Suci, Desa Kuala Dua | Sungai Raya     |
| 19  | 510061120023 | Rubath Naqsabandiyah  | Parit Mas, Desa Madusari                                     | Sungai Raya     |
| 20  | 510061120024 | Mambaul Ulum          | Dusun Sui Jawi, Desa Korek                                   | Sungai Ambawang |
| 21  | 510061120025 | Nurul Hikmah          | Dusun II Teluk Harapan, Desa Sepuk Laut                      | Sungai Kakap    |
| 22  | 510061120026 | Nurussyamsi Wal Qomar | RT 04 RW 04 Dusun Kencana Utama, Desa Sungai Malaya          | Sungai Ambawang |
| 23  | 510061120027 | Miftahul Ulum         | Jl. Trans Kalimantan Parit Masigi, Desa Ambawang Kuala       | Sungai Ambawang |
| 24  | 510061120028 | Nahdatut Tullab       | Parit Bunga Baru Darat RT 01 RW 02 Desa Madu Sari            | Sungai Raya     |
| 25  | 510061120029 | Al Khairiyah          | Parit Sampang Baru RT 11 RW 15 Desa Lingga                   | Sungai Ambawang |
| 26  | 510061120030 | Darun Nasyiin         | Sungai Pelaik, Simpang Kanan RT 02 RW 01                     | Sungai Ambawang |
| 27  | 510061120033 | Miftahul Ulum         | Jl. KH. Abdurrahman Wahid, Parit Sumber Bahagia, Sungai Asam | Sungai Raya     |
| 28  | 510061120034 | Sunan Ampel           | Parit Harum, Desa Sui Asam                                   | Sungai Raya     |
| 29  | 510061120036 | Al Muttaqin           | Dusun Belidak Hulu RT 003 RW 004, Desa Pasak Piang           | Sungai Ambawang |
| 30  | 510061120037 | Darud Da'wah          | Jl. Pelita III Desa Punggur Kecil                            | Sungai Kakap    |
| 31  | 510061120038 | Hidayatul Mubtadien   | Jl. Trans Kalimantan, Parit Masigi Desa Ambawang Kuala       | Sungai Ambawang |
| 32  | 510061120039 | Al Ikhlas             | Parit Cahaya Baru, Desa Kuala Mandor B                       | Kuala Mandor B  |
| 33  | 510061120040 | Miftahul Khairat      | Jl. Karya Desa Sungai Ambangah                               | Sungai Raya     |
| 34  | 510061120041 | Nahdatul Ulum         | Jl. Kalimas Hulu, Desa Pal IX                                | Sungai Kakap    |
| 35  | 510061120042 | Darul Musabbihin      | Parit Bakti Suci II, Desa Mekar Sari                         | Sungai Raya     |
| 36  | 510061120043 | Nurul Amin            | Parit Semangat Baru, Desa Kubu Padi                          | Kuala Mandor B  |

| No. | NSPP         | Nama Pondok Pesantren              | Alamat                                                             | Kecamatan       |
|-----|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 37  | 510061120044 | As Shidiqiyah                      | Jl Raya Sungai Itik RT 025 RW 004 , Dusun Melati, Desa Sungai Itik | Sungai Kakap    |
| 38  | 510061120045 | Ainul Ulum                         | Jl. Trans Kalimantan KM 14 Parit Seribut Desa Jawa Tengah          | Sungai Ambawang |
| 39  | 510061120046 | Hidayatul Muslimin I               | Parit Sembin, Jl. Arteri Supadio,Desa Sungai Raya                  | Sungai Raya     |
| 40  | 510061120047 | Mubayyinul Ulum                    | SP I, Dusun Madani RT 02 RW 11 Desa Mekarsari                      | Sungai Raya     |
| 41  | 510061120048 | Bustanul Mubtadiien                | Gang Selat Madura Dusun Keramat II Desa Kuala Dua                  | Sungai Raya     |
| 42  | 510061120049 | Al Habib Sholeh Bin Alwi Al Haddad | Jl. Trans Kalimantan Parit Masigi, Desa Ambawang Kuala             | Sungai Ambawang |
| 43  | 510061120050 | Hidayatul Muttaqin                 | Jl.Zakia Baru, TR I, RT 01 RW 08, Desa Tebang Kacang               | Sungai Raya     |
| 44  | 510061120051 | Hidayatul Mubtadiin                | Kampung Baru, Desa Simpang Kanan                                   | Sungai Ambawang |
| 45  | 510061120052 | Raudlatul Jannah                   | Dusun Meranti, Desa Puguk                                          | Sungai Ambawang |
| 46  | 510061120053 | Hidayatul Mubtadiien               | Jl. Kuala Dua Parit Haji Ali, Desa Kuala Dua                       | Sungai Raya     |
| 47  | 510061120054 | Mambaul Ulum                       | Parit Percis, Desa Sungai Asam                                     | Sungai Raya     |
| 48  | 510061120055 | An Nur                             | Jl. Raya Sungai Berembang RT 04 RW 02 Desa Sungai Rengas           | Sungai Kakap    |
| 49  | 510061120056 | Raudlatul Firdaus                  | Jl. Trans Kalimantan KM 17 Siak Alina, Desa Durian                 | Sungai Ambawang |
| 50  | 510061120057 | Darul Ulum                         | Jl. Soeharto Desa Kuala Dua                                        | Sungai Raya     |
| 51  | 510061120058 | Darut Tauhid                       | Desa Tebang Kacang                                                 | Sungai Raya     |
| 52  | 510061120059 | Hidayatul Muslimin II              | Jl Raya Desa Kapur, Parit Pak Reweng, Desa Kapur                   | Sungai Raya     |
| 53  | 510061120060 | Khulafaur Rasyidin                 | Jl. A Yani II Sungai Raya                                          | Sungai Raya     |
| 54  | 510061120061 | An Nuriyah                         | Dusun Tanjung Pasir, Desa Kuala Mandor A                           | Kuala Mandor B  |

| No. | NSPP         | Nama Pondok Pesantren        | Alamat                                                                             | Kecamatan       |
|-----|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 55  | 510061120062 | Nurul Ulum                   | Jl. Munggu Mas, Desa Sungai Enau                                                   | Kuala Mandor B  |
| 56  | 510061120063 | Al Muhajirin                 | Jl. Sultan Agung Gang Kauman, Desa Rasau Jaya                                      | Rasau Jaya      |
| 57  | 510061120064 | Sunan Ampel                  | Jl. Jenderal Soedirman No. 48 Dusun Suka Damai RT 005 RW 002, Desa Rasau Jaya      | Rasau Jaya      |
| 58  | 510061120065 | Anta Al Amin                 | Parit Tengah, Desa Mekarsari                                                       | Sungai Raya     |
| 59  | 510061120067 | Madrasatul Quran             | Jl. Pramuka Desa Sungai Rengas                                                     | Sungai Kakap    |
| 60  | 510061120068 | Tahfidzul Qur'an             | Parit Bugis Desa Kapur                                                             | Sungai Raya     |
| 61  | 510061120069 | Al Faqihil Muqoddam          | Jl. Parit Gondang Legi, Desa Durian                                                | Sungai Ambawang |
| 62  | 510061120070 | Darul Fikri                  | Jl. Sungai Belidak Gang H. Jelai Dusun Karya Tani RT 04 RW 01, Desa Sungai Belidak | Sungai Kakap    |
| 63  | 510061120071 | Nurul Tauhid                 | Parit Akop Tenaga Baru, Sungai Asam                                                | Sungai Raya     |
| 64  | 510061120072 | Darul Falah                  | Jalan Bujama, Parit Keraka, Desa Pal IX                                            | Sungai Kakap    |
| 65  | 510061120073 | Muinul Islam                 | Jalan Primer Jeruju Darat, RT 02 RW 01, Dusun Karaya Utama, Desa Jeruju Besar      | Sungai Kakap    |
| 66  | 510061120074 | Ad - Da'wah Madinatul Qur'an | Jl. Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda, Kecamatan Sungai Kakap                       | Sungai Kakap    |
| 67  | 510061120075 | Maulana Sulthan Muhammad     | Jl. Mega Timur Parit Selatan                                                       | Sungai Ambawang |
| 68  | 510361120083 | Baitul Mubaroq               | Parit Serong RT 037 RW 010, Desa Pal IX, Kec. Sungai Kakap                         | Sungai Kakap    |
| 69  | 512361120070 | Darul Hijrah                 | Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B                                      | Kuala Mandor B  |
| 70  | 510361120070 | Al Mansyur                   | Jl. Abdurrahman Wahid No. 29, RT 04 RW 04, Desa Kuala Dua                          | Sungai Raya     |

| No. | NSPP               | Nama Pondok Pesantren           | Alamat                                              | Kecamatan       |
|-----|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 71  | 510361120071       | Al Baariq                       | Jl. Trans Kalimantan, Desa Jawa Tengah              | Sungai Ambawang |
| 72  | 510361120175       | Nurussyamsi Wal-Qomar Lil Banat | Jl. Bani Suyuti, Dsn. Kencana Ungu, Desa Sui Malaya | Sungai Ambawang |
| 73  | 510361120174       | Raudlatul Hikam Ismailiyah      | Jl. Selat Bantan Dusun Sejahtera, Desa Sui Kupah    | Sungai Kakap    |
| 74  | Dalam Proses Pusat | Serumpun Cahaya                 | Jl. Parit Jawi, Desa Punggur Besar                  | Sungai Kakap    |
| 75  | Dalam Proses Pusat | Nurul Yaqin                     | Jl. Sui Adung RT 02 RW 06                           | Sungai Raya     |
| 76  | Dalam Proses Pusat | Nurul Jadid                     | Jl. Raya Kumpai, Gang Karang Anyar                  | Sungai Raya     |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2020

### 2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang (UU). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menekan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya penanganan kasus-kasus kematian bayi dan gizi buruk, pada dasarnya

bersifat multisektor yang memerlukan intervensi dari OPD lain. Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan trend yang fluktuatif. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi, faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran BUMIL (Ibu Hamil) dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdektesi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif BUMIL (Ibu Hamil) memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas.

Kondisi gizi buruk memiliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti “Gerakan Masyarakat” sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka penderita gizi buruk yang cenderung meningkat setiap tahun walaupun tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 16 orang, namun jumlahnya Kembali meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 33 orang. Dari aspek derajat kesehatan pada Angka Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dan penanganan balita gizi buruk mengalami peningkatan, namun Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi dan jumlah penderita gizi buruk mengalami fluktuatif. Aspek pelayanan kesehatan keluarga pada pelayanan BUMIL K1, pelayanan BUMIL K4, pemeriksaan BUMIL, Imunisasi (UCI), persalinan Nakes, Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Pelayanan Kontrasepsi mengalami fluktuatif.

**Tabel 2.32.**  
**Urusan Konkuren Bidang Kesehatan**

| No.                      | Indikator                                       | Satuan | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>DERAJAT KESEHATAN</b> |                                                 |        |       |        |        |        |        |
| 1.                       | Angka Usia Harapan Hidup                        | Tahun  | 69,77 | 69,80  | 70,04  | 70,43  | 70,59  |
| 2.                       | Angka Kematian Balita                           | Kasus  | 7     | 1      | 1      | 0      | 3      |
| 3.                       | Angka Kematian Ibu Melahirkan                   | Kasus  | 15    | 11     | 14     | 16     | 12     |
| 4.                       | Angka Kematian Bayi                             | Kasus  | 60    | 33     | 38     | 31     | 32     |
| 5.                       | Jumlah Penderita Gizi Buruk                     | Kasus  | 31    | 22     | 16     | 33     | 35     |
| 6.                       | Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | %      | 96,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No.                                   | Indikator                                    | Satuan | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7.                                    | Jumlah Penderita Gizi Kurang                 | Kasus  | 306   | 382   | 547   | 743   | 913   |
| 8.                                    | Jumlah Penderita <i>Stunting</i>             | %      | 29,30 | 34,80 | 25,60 | 23,63 | 13,40 |
| <b>PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA</b>   |                                              |        |       |       |       |       |       |
| 1.                                    | Pelayanan BUMIL K1                           | %      | 95,40 | 92,50 | 95,76 | 97,05 | 92,64 |
| 2.                                    | Pelayanan BUMIL K4                           | %      | 86,20 | 91,20 | 88,38 | 89,11 | 87,12 |
| 3.                                    | Pemeriksaan BUMIL                            | %      | 90,02 | 84,80 | 80,90 | N/A   | N/A   |
| 4.                                    | Imunisasi (UCI)                              | %      | 72,00 | 97,00 | 90,00 | N/A   | N/A   |
| 5.                                    | Imunisasi Dasar Lengkap                      | %      | 73,60 | 79,00 | 70,40 | N/A   | N/A   |
| 6.                                    | Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan | %      | 85,50 | 84,80 | 88,06 | 88,74 | 86,86 |
| 7.                                    | Rasio Pelayanan Komplikasi Kebidanan         | %      | 37,20 | 42,52 | 62,22 | 57,07 | 46,69 |
| 8.                                    | Pelayanan Kontrasepsi                        | %      | 53,70 | 47,07 | 72,94 | 69,03 | 68,13 |
| <b>KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN</b> |                                              |        |       |       |       |       |       |
| 1.                                    | Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis              | Orang  | 562   | 589   | 589   | 447   | 536   |
|                                       | a. Tenaga Medis (Dokter)                     | Orang  | 14    | 41    | 41    | 30    | 41    |
|                                       | b. Tenaga Kebidanan/Keperawatan              | Orang  | 465   | 465   | 465   | 370   | 412   |
|                                       | c. Tenaga Psikologi Klinis                   | Orang  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                       | d. Tenaga Kesehatan Masyarakat               | Orang  | 3     | 3     | 3     | 3     | 12    |
|                                       | e. Tenaga Kesehatan Lingkungan               | Orang  | 26    | 26    | 26    | 26    | 20    |
|                                       | f. Tenaga Gizi                               | Orang  | 31    | 31    | 31    | 25    | 27    |
|                                       | g. Tenaga Kesehatan Tradisional              | Orang  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                       | h. Apoteker                                  | Orang  | 5     | 5     | 5     | 5     | 0     |
|                                       | i. Teknik Kefarmasian                        | Orang  | 18    | 18    | 18    | 22    | 24    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

**Tabel 2.33.**  
**Jumlah Penderita Wabah Penyakit Menular**

| No. | Wabah Penyakit Menular     | Jumlah Penderita |        |       |       |       |
|-----|----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|
|     |                            | 2016             | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.  | Muntaber                   | 8.392            | 11.399 | 8.712 | 6.711 | 6.162 |
| 2.  | Demam Berdarah             | 603              | 65     | 189   | 383   | 101   |
| 3.  | Infeksi Saluran Pernafasan | 0                | 0      | 0     | 0     | 8.715 |
| 4.  | Campak                     | 85               | 25     | 52    | 7     | 0     |
| 5.  | Malaria                    | 18               | 0      | 0     | 0     | 0     |
| 6.  | Kasus HIV/AIDS             | 25               | 13     | 27    | 31    | 60    |
| 7.  | Covid-19                   | 0                | 0      | 0     | 0     | 405   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

**2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, ditujukan pada upaya peningkatan interkoneksi antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 154/DPUPR/2017 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya, untuk Jalan Kabupaten sebanyak 62 ruas dengan panjang total 646,17 Km. Dimana 18 ruas diusulkan alih status menjadi Jalan Propinsi. Secara detail ruas jalan di Kabupaten Kubu Raya dengan status Jalan Kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.34**  
**Daftar Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Nomor Ruas | Nama Ruas                     | Pengenal Pangkal Ruas                                 | Pengenal Akhir Ruas                         | Panjang Ruas (Km) | Kecamatan yang Dilalui     | Status Jalan Kabupaten (JK) | Keterangan           |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   | 001        | Supadio – Sekunder C          | JN. KM 8,1 / Persimpangan                             | JK. KM 7,7 / Persimpangan                   | 12,25             | Sungai Raya – Rasau Jaya   | JK                          |                      |
| 2   | 002        | Sungai Raya Dalam – Punggur   | JN. KM 0,0 / Persimpangan                             | Jembatan / Persimpangan Parit To’om         | 10,30             | Sungai Raya – Sungai Kakap | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 3   | 003        | Kapur – Kumpai                | Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak | Pasar Kumpai                                | 13,41             | Sungai Raya                | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 4   | 004        | Kumpai – Tebang Kacang        | Tugu AMD / Persimpangan                               | Batas Desa Tebang Kacang – Desa Sungai Asam | 17,44             | Sungai Raya                | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 5   | 005        | Kuala Dua – Mekar Sari        | JP. KM 14,6 / Jembatan                                | Batas Desa Mekar Sari – Sungai Asam         | 15,96             | Sungai Raya                | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 6   | 006        | Sungai Asam – Sukalanting     | Batas Desa Mekar Sari – Sungai Asam                   | Dermaga Penyeberangan                       | 12,75             | Sungai Raya                | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 7   | 007        | Kuala Dua – Parit Ngabeh      | JP. KM 4,5 / Persimpangan                             | Persimpangan Parit Ngabeh                   | 7,46              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 8   | 008        | Jl. Wonodadi I                | JN. KM 6,8 / Persimpangan                             | JP. KM 11,5 / Persimpangan                  | 1,45              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 9   | 009        | Jl. Wonodadi II               | JN. KM 6,8 / Persimpangan                             | Persimpangan Parit Ngabeh                   | 2,27              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 10  | 010        | Jl. Parit Bugis               | JN. KM 5,5 / Persimpangan                             | JP. KM 10,7 / Persimpangan                  | 2,10              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 11  | 011        | Jl. Madu Sari                 | JN. KM 5,5 / Persimpangan                             | JK. KM 3,7 / Persimpangan                   | 5,25              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 12  | 012        | Jl. Parit H. Mukhsin          | JN. KM 6,9 / Persimpangan                             | JK. KM 4,6 / Persimpangan                   | 5,58              | Sungai Raya                | JK                          |                      |
| 13  | 013        | Jalan Hutan Kota – Sekunder C | JK. KM 4,0 / Persimpangan                             | JK. KM 5,5 / Persimpangan                   | 6,87              | Sungai Raya – Rasau Jaya   | JK                          |                      |
| 14  | 014        | Jl. Sungai Durian Laut        | JP. KM 0,0 / Persimpangan                             | Dermaga                                     | 0,70              | Sungai Raya                | JK                          |                      |

| No. | Nomor Ruas | Nama Ruas                      | Pengenal Pangkal Ruas                                 | Pengenal Akhir Ruas                              | Panjang Ruas (Km) | Kecamatan yang Dilalui | Status Jalan Kabupaten (JK) | Keterangan           |
|-----|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 15  | 015        | Nipah Kuning – Jeruju Besar    | Jembatan / Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak | Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar         | 11,12             | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 16  | 016        | Sungai Kakap – Jeruju Besar    | JP. KM 18 / Jembatan                                  | Persimpangan Jembatan Pasar Jeruju Besar         | 5,82              | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 17  | 017        | Sungai Kakap – Punggur         | JP. KM 14,7 / Jembatan                                | Jembatan / Persimpangan Parit To'om              | 13,80             | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 18  | 018        | Punggur – Parit Sarem          | Persimpangan / Jembatan                               | Dermaga Penyeberangan                            | 15,03             | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 19  | 019        | Kota Baru – Punggur            | Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak            | JK. KM 8,1 / Persimpangan                        | 10,55             | Sungai Kakap           | JK                          |                      |
| 20  | 020        | Jl. Cendana                    | JK. KM 3,2 / Persimpangan                             | Parit Keladi / Persimpangan                      | 4,13              | Sungai Kakap           | JK                          |                      |
| 21  | 021        | Jl. Parit Penjara              | JP. KM 9,6 / Persimpangan                             | Parit Keladi / Persimpangan                      | 2,50              | Sungai Kakap           | JK                          |                      |
| 22  | 022        | Jalan Parit Keladi             | JP. KM 12,8 / Persimpangan                            | Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak       | 8,94              | Sungai Kakap           | JK                          |                      |
| 23  | 023        | Sungai Kakap – Tanjung Intan   | Persimpangan Pasar Sungai Kakap                       | Dusun Tanjung Intan                              | 8,81              | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 24  | 024        | Jl. Lingkar Pasar Sungai Kakap | Persimpangan Pasar Sungai Kakap                       | Kantor Polsek Sungai Kakap                       | 0,95              | Sungai Kakap           | JK                          |                      |
| 25  | 025        | Jeruju Besar – Sungai Kupah    | JK. KM 10,9 / Jembatan                                | Dusun Tanjung Intan                              | 10,74             | Sungai Kakap           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 26  | 026        | Mega Timur – Sungai Tempayan   | Batas Kabupaten Kubu Raya – Kota Pontianak            | Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B | 10,57             | Sungai Ambawang        | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 27  | 027        | Jl. Ampera                     | JN. KM 2,2 / Persimpangan                             | JN. KM 5,0 / Persimpangan                        | 3,74              | Sungai Ambawang        | JK                          |                      |
| 28  | 028        | Durian – Pasak Piang           | JN. KM 5,0 / Persimpangan                             | Simpang 3 / Persimpangan                         | 28,38             | Sungai Ambawang        | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |

| No. | Nomor Ruas | Nama Ruas                                 | Pengenal Pangkal Ruas                            | Pengenal Akhir Ruas                             | Panjang Ruas (Km) | Kecamatan yang Dilalui    | Status Jalan Kabupaten (JK) | Keterangan           |
|-----|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 29  | 029        | Korek – Pasak Piang                       | JN. KM 18,2 / Persimpangan                       | Persimpangan                                    | 14,71             | Sungai Ambawang           | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 30  | 030        | Kuala Mandor B – Sungai Enau              | Batas Kecamatan Sungai Ambawang – Kuala Mandor B | Persimpangan Menuju Desa Retok                  | 15,65             | Kuala Mandor B            | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 31  | 031        | Sungai Enau – Kubu Padi                   | Persimpangan Menuju Desa Retok                   | Batas Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Landak    | 21,10             | Kuala Mandor B            | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 32  | 032        | Sungai Enau – Retok                       | Persimpangan Menuju Desa Retok                   | Sungai / Batas Kabupaten Kubu Raya – Landak     | 3,75              | Kuala Mandor B            | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 33  | 033        | Sekunder C – Punggur                      | JP. KM 10,1 / Persimpangan                       | Jembatan / Persimpangan Parit To'om             | 14,45             | Rasau Jaya – Sungai Kakap | JK                          |                      |
| 34  | 034        | Sekunder C – Bintang Mas I                | JK. KM 5,5 / Persimpangan                        | Jembatan Bintang Mas 1                          | 9,57              | Rasau Jaya                | JK                          |                      |
| 35  | 035        | Rasau Jaya – Parit Sarem                  | JP. KM 16,1 / Persimpangan                       | Persimpangan Dermaga Parit Sarem                | 17,33             | Rasau Jaya                | JK                          | Diusulkan Menjadi JP |
| 36  | 036        | Rasau Jaya – Sungai Bulan                 | JP. KM 13,8 / Persimpangan                       | Dermaga Sungai Bulan B                          | 18,42             | Rasau Jaya – Sungai Raya  | JK                          |                      |
| 37  | 037        | Lingkar Pasar Baru Rasau Jaya             | JP. KM 15,7 / Persimpangan                       | JP. KM 15,8 / Persimpangan                      | 0,52              | Rasau Jaya                | JK                          |                      |
| 38  | 038        | Jalan Bhakti                              | JP. KM 14,4 / Persimpangan                       | JK. KM 4,4 / Persimpangan                       | 5,37              | Rasau Jaya                | JK                          |                      |
| 39  | 039        | Sungai Nipah – Selat Remis                | Dermaga Penyeberangan                            | Jembatan / Pasar Sungai Gorah                   | 13,10             | Teluk Pakedai             | JK                          |                      |
| 40  | 040        | Sungai Nipah – Sungai Deras               | JK. KM 1,3 / Jembatan / Persimpangan             | Batas Kecamatan Teluk Pakedai – Kubu / Jembatan | 14,65             | Teluk Pakedai             | JK                          |                      |
| 41  | 041        | Selat Remis – Teluk Gelam                 | Jembatan / Pasar Sungai Gorah                    | Dermaga Penyeberangan                           | 9,33              | Teluk Pakedai             | JK                          |                      |
| 42  | 042        | Dermaga Pinang Luar – Simpang Pinang Luar | Dermaga Penyeberangan                            | Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar          | 2,10              | Kubu                      | JK                          |                      |

| No. | Nomor Ruas | Nama Ruas                        | Pengenal Pangkal Ruas                  | Pengenal Akhir Ruas                    | Panjang Ruas (Km) | Kecamatan yang Dilalui | Status Jalan Kabupaten (JK) | Keterangan |
|-----|------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 43  | 043        | Pinang Luar – Pinang Dalam       | Persimpangan / Kantor Desa Pinang Luar | Batas Desa Pinang Dalam – Kampung Baru | 19,42             | Kubu                   | JK                          |            |
| 44  | 044        | Kampung Baru – Air Putih         | Batas Desa Pinang Dalam – Kampung Baru | Dermaga Penyeberangan                  | 8,83              | Kubu                   | JK                          |            |
| 45  | 045        | Jangkang I – Jangkang II         | Dermaga Penyeberangan                  | Persimpangan Menuju Dermaga            | 11,54             | Kubu                   | JK                          |            |
| 46  | 046        | Jangkang II – Dermaga            | Persimpangan Menuju Dermaga            | Dermaga Penyeberangan                  | 1,60              | Kubu                   | JK                          |            |
| 47  | 047        | Jangkang II – Teluk Nangka       | Dermaga Penyeberangan                  | Jembatan TR 9 / Persimpangan           | 4,62              | Kubu                   | JK                          |            |
| 48  | 048        | Teluk Nangka – Kubu              | Jembatan TR 9 / Persimpangan           | Jembatan Masjid Kubu                   | 1,46              | Kubu                   | JK                          |            |
| 49  | 049        | Lingkar Kota Kubu                | Dermaga Pasar Kubu                     | Dermaga Pasar Kubu                     | 3,05              | Kubu                   | JK                          |            |
| 50  | 050        | Kubu – Sungai Terus              | Jembatan / Persimpangan                | Jembatan Saluran Sekunder              | 3,82              | Kubu                   | JK                          |            |
| 51  | 051        | Air Putih – Ambawang             | Jembatan / Persimpangan                | Jembatan / Persimpangan                | 7,95              | Kubu                   | JK                          |            |
| 52  | 052        | Teluk Empening – Permata         | Dermaga Penyeberangan                  | Jembatan                               | 9,19              | Terentang              | JK                          |            |
| 53  | 053        | Permata – Terentang Hilir        | Dermaga Terentang                      | Persimpangan Menuju SMA                | 1,66              | Terentang              | JK                          |            |
| 54  | 054        | Terentang Hilir – Radak I        | Persimpangan Menuju SMA                | Jembatan TR 16 (Desa Radak I)          | 2,72              | Terentang              | JK                          |            |
| 55  | 055        | Teluk Empening – Teluk Bayur     | Persimpangan                           | Dermaga Penyeberangan                  | 2,41              | Terentang              | JK                          |            |
| 56  | 056        | Terentang Hilir – Terentang Hulu | Persimpangan Menuju SMA                | Sungai                                 | 9,60              | Terentang              | JK                          |            |
| 57  | 057        | Radak II – Terentang Hulu        | Jembatan TR 16 (Desa Radak II)         | Jembatan / Kantor Desa Terentang Hulu  | 14,34             | Terentang              | JK                          |            |
| 58  | 058        | Medan Seri – Padang Tikar        | Dermaga Padang Tikar                   | Persimpangan Masjid                    | 2,58              | Batu Ampar             | JK                          |            |

| No. | Nomor Ruas | Nama Ruas                      | Pengenal Pangkal Ruas | Pengenal Akhir Ruas                                | Panjang Ruas (Km) | Kecamatan yang Dilalui | Status Jalan Kabupaten (JK) | Keterangan |
|-----|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 59  | 059        | Padang Tikar – Tanjung Harapan | Persimpangan Mesjid   | Sungai / Selat Sekh                                | 24,39             | Batu Ampar             | JK                          |            |
| 60  | 060        | Batu Ampar – Padang Tikar      | Dermaga Batu Ampar    | Persimpangan Masjid                                | 43,84             | Batu Ampar             | JK                          |            |
| 61  | 061        | Batu Ampar – Karang Anyar      | Persimpangan          | Dermaga Penyeberangan                              | 34,98             | Batu Ampar             | JK                          |            |
| 62  | 062        | Sungai Kerawang – Muara Tiga   | Dermaga Kerawang      | Batas Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara | 29,30             | Batu Ampar             | JK                          |            |
|     |            |                                |                       |                                                    | <b>646,17</b>     |                        |                             |            |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Kondisi jalan pada tahun 2020 sebagian besar mengalami kerusakan. Dari 646.173 Km panjang jalan keseluruhan, yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik sebesar 43 persen (274,85 Km), kondisi sedang 18 persen, kondisi rusak 22 persen, dan jalan yang mengalami rusak berat mencapai 17 persen dari total panjang jalan yang ada.

**Tabel 2.35.**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020**

| No. | Kondisi       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Baik          | 211,708        | 245,217        | 252,598        | 274,853        |
| 2   | Sedang        | 212,105        | 183,871        | 183,864        | 116,724        |
| 3   | Rusak Ringan  | 113,188        | 56,203         | 53,669         | 138,877        |
| 4   | Rusak Berat   | 109,170        | 160,882        | 156,042        | 115,719        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>529,357</b> | <b>646,173</b> | <b>646,173</b> | <b>646,173</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.36.**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020**

| No. | Jenis Permukaan          | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Aspal / <i>Asphalted</i> | 146,006        | 214,770        | 220,311        | 252,850        |
| 2   | Kerikil / <i>Gravel</i>  | 15,600         | 34,807         | 257,534        | 10,865         |
| 3   | Tanah / <i>Soil</i>      | 157,146        | 143,329        | 30,262         | 151,381        |
| 4   | Lainnya / <i>Others</i>  | 327,421        | 253,267        | 138,006        | 231,077        |
|     | <b>Jumlah / Totals</b>   | <b>529,357</b> | <b>646,173</b> | <b>646,173</b> | <b>646,173</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di lingkungan perumahan. Perkembangan pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut :

**Tabel 2.37.**  
**Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

| NO | Year    | Panjang Jalan      | Number of Location |                      |
|----|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
|    |         | Distance of Street | Desa (Village)     | Kecamatan (District) |
| 1  | 2 0 2 0 | 183,45             | 91                 | 9                    |
| 2  | 2 0 1 9 | 191,70             | 96                 | 9                    |

| NO | Year    | Panjang Jalan      | Number of Location |                      |
|----|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
|    |         | Distance of Street | Desa (Village)     | Kecamatan (District) |
| 3  | 2 0 1 8 | 63,00              | 95                 | 9                    |
| 4  | 2 0 1 7 | 200,90             | 62                 | 9                    |
| 5  | 2 0 1 6 | 58,18              | 53                 | 9                    |

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

**Tabel 2.38.**  
**Jumlah Jembatan Kabupaten Menurut Kondisi**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

| No. | Kondisi       | 2016      | 2017     | 2018         | 2019         | 2020         |
|-----|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Baik          | 0         | N/A      | 1.822        | 1.937        | 2.048        |
| 2   | Sedang        | 12        | N/A      | 9            | 7            | 4            |
| 3   | Rusak Ringan  | 6         | N/A      | 620          | 521          | 415          |
| 4   | Rusak Berat   | 6         | N/A      | 75           | 61           | 49           |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>24</b> | <b>-</b> | <b>2.526</b> | <b>2.526</b> | <b>2.526</b> |

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak, minum, maupun mencuci atau mandi. Bagi daerah Kabupaten Kubu Raya, khususnya di pedalaman, penggunaan air bersih masih secara tradisional bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Atau di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Total air bersih/air minum yang disalurkan pada tahun 2020 mencapai 2.936.197 m³ dengan 18.206 pelanggan. Sebagian besar konsumen PDAM di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 adalah rumah permanen dengan jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 2.398.950 m³. Sedangkan pemakaian terkecil air bersih adalah Hidran Umum sebesar 482 m³. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.39.**  
**Jumlah Sambungan dan Volume Air Bersih Yang Disalurkan Dirinci**  
**Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Jenis Pelanggan            | Jumlah Sambungan | Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³) |
|-----|----------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1   | Hidran Umum/Sosial Umum    | 6                | 482                                    |
| 2   | Rumah Ibadah/Sosial Khusus | 140              | 43.141                                 |
| 3   | WC Umum                    | 0                | 0                                      |

| No. | Jenis Pelanggan       | Jumlah Sambungan | Volume Air Bersih Yang Disalurkan (m³) |
|-----|-----------------------|------------------|----------------------------------------|
| 4   | Panti Asuhan          | 0                | 0                                      |
| 5   | Yayasan Sosial        | 15               | 2.364                                  |
| 6   | Sekolah Negeri        | 16               | 4.901                                  |
| 7   | Rumkit Pemerintah     | 0                | 0                                      |
| 8   | Rumah Kumuh           | 0                | 0                                      |
| 9   | Rumah Semi Permanen   | 69               | 16.214                                 |
| 10  | Rumah Permanen        | 15.357           | 2.398.950                              |
| 11  | Pertokoan Dalam Gang  | 659              | 94.104                                 |
| 12  | Rumah Ruko            | 10               | 669                                    |
| 13  | Ruko Perdagangan      | 1.670            | 274.409                                |
| 14  | Industri Rumah Tangga | 6                | 1.061                                  |
| 15  | Instansi Pemerintah   | 51               | 20.547                                 |
| 16  | Rumah Mewah           | 149              | 17.662                                 |
| 17  | Industri Besar        | 15               | 20.550                                 |
| 18  | Niaga Besar           | 40               | 38.295                                 |
| 19  | Niaga Menengah        | 3                | 2.848                                  |
|     | <b>2 0 2 0</b>        | <b>18.206</b>    | <b>2.936.197</b>                       |
|     | 2 0 1 9               | 17.446           | 2.674.402                              |
|     | 2 0 1 8               | 16.734           | 2.483.439                              |
|     | 2 0 1 7               | 15.544           | 2.094.332                              |
|     | 2 0 1 6               | 14.871           | 1.714.142                              |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana detail terkait pengaturan ruang dan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) saat ini masih dalam tahapan penyusunan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan, maka dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Agar pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berjalan efektif dan efisien diperlukan

penetapan kawasan perdesaan dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2018 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Perdesaan yang sudah berstatus prioritas nasional sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Adapun data selengkapnya adalah seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40.**  
**Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya Sampai Tahun 2020**

| No. | Kawasan Perdesaan                | Penetapan Peraturan Bupati | RPKP      | Status KPPN |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| 1   | Agropolitan Rasau Raya           | Nomor 37 Tahun 2017        | Sudah Ada | Sudah       |
| 2   | Agropolitan Kuala Mandor Terigas | Nomor 37 Tahun 2017        | Sudah Ada | Belum       |
| 3   | Pertanian Terpadu Sungai Kakap   | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |
| 4   | Rice Estate Teluk Pakedai        | Nomor 37 Tahun 2017        | Sudah Ada | Belum       |
| 5   | Pesisir Pantai Teluk Pakedai     | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |
| 6   | Pesisir Batu Ampar               | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |
| 7   | Pesisir Pantai Padang Tikar      | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |
| 8   | Pembangunan Kubu Bertuah         | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |
| 9   | Agropolitan Ambassador           | Nomor 37 Tahun 2017        | Belum Ada | Belum       |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021

**2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat, di mana masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.

Di Kabupaten Kubu Raya, untuk kawasan kumuh, mengacu pada Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 114/DPUPRPRKP/2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2021, terdata seluas 258,92 Ha yang tersebar di 9 kecamatan. Secara detail Kawasan Kumuh di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.41.**  
**Kawasan Kumuh Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021**

| No | Lokasi                      | Luas Kawasan (Ha) | Data Kependudukan |               | Tingkat Kekumuhan |              | Legalitas Tanah | Prioritas Penanganan |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|
|    |                             |                   | Jumlah Penduduk   | Kepadatan     | Nilai             | Tingkat      |                 |                      |
| 1  | Dusun Cempaka               | 24,65             | ± 1.048 KK        | ± 81 Jiwa/Ha  | 16                | Kumuh Ringan | Legal           | C3/6                 |
| 2  | Dusun Merdeka               | 17,91             | ± 217 KK          | ± 31 Jiwa/Ha  | 16                | Kumuh Ringan | Legal           | C3/6                 |
| 3  | Dusun Sungai Ambawang Kuala | 6,78              | ± 255 KK          | ± 191 Jiwa/Ha | 26                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 4  | Kuala Mandor B              | 5,38              | ± 54 KK           | ± 37 Jiwa/Ha  | 16                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 5  | Rasau Jaya Umum             | 13,69             | ± 124 KK          | ± 38 Jiwa/Ha  | 28                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 6  | Selat Remis                 | 14,42             | ± 219 KK          | ± 57 Jiwa/Ha  | 34                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 7  | Padang Tikar Satu           | 46,13             | ± 487 KK          | ± 42 Jiwa/Ha  | 25                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 8  | Padang Tikar Dua            | 17,29             | ± 391 KK          | ± 88 Jiwa/Ha  | 36                | Kumuh Ringan | Legal           | C3/6                 |
| 9  | Batu Ampar                  | 51,99             | ± 367 KK          | ± 31 Jiwa/Ha  | 17                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 10 | Kubu                        | 20,87             | ± 239 KK          | ± 46 Jiwa/Ha  | 32                | Kumuh Ringan | Legal           | C3/6                 |
| 11 | Permata                     | 7,55              | ± 115 KK          | ± 68 Jiwa/Ha  | 26                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
| 12 | Sungai Kakap                | 32,26             | ± 231 KK          | ± 29 Jiwa/Ha  | 16                | Kumuh Ringan | Legal           | C5/9                 |
|    | <b>Total</b>                | <b>37,73</b>      |                   |               |                   |              |                 |                      |

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

Adapun Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kubu Raya secara umum adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42.**  
**Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| Indikator Kinerja                   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Pembangunan Rumah Tinggal (Unit)    | 11.846 | 17.766 | 19.058 | 11.244 | 7.342 |
| Pembangunan Rumah Layak Huni (Unit) | 417    | 363    | 557    | 1.330  | 3.120 |

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kubu Raya, 2021

**2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan aspek ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pembinaan partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan koordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

**Tabel 2.43.**  
**Banyaknya Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat**  
**Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Organisasi Masyarakat | Lembaga Swadaya Masyarakat |
|-----|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1   | Batu Ampar      | 0                     | 1                          |
| 2   | Terentang       | 0                     | 0                          |
| 3   | Kubu            | 1                     | 0                          |
| 4   | Teluk Pakedai   | 1                     | 0                          |
| 5   | Sungai Kakap    | 7                     | 1                          |
| 6   | Rasau Jaya      | 5                     | 0                          |
| 7   | Sungai Raya     | 107                   | 7                          |
| 8   | Sungai Ambawang | 17                    | 1                          |
| 9   | Kuala Mandor B  | 1                     | 0                          |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>139</b>            | <b>10</b>                  |
|     | 2 0 1 9         | 137                   | 8                          |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2021

Perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2020 terdata sebanyak 139 organisasi masyarakat dan 10 lembaga swadaya masyarakat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dengan jumlah 137 organisasi masyarakat dan 8 lembaga swadaya masyarakat. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, rehabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertiban umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan perkebunan skala besar membawa resiko terjadinya penguasaan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi maupun konflik lainnya terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan ketertiban umum dan penegakkan Perda, peran Satpol PP sebagai garda Kabupaten cukup efektif melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejenisnya), maupun dalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.44.  
Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

| No. | Jenis Pelanggaran                       | Jumlah Pelanggaran | Lokasi Pelanggaran  |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Bangunan Liar                           | 227                | Kabupaten Kubu Raya |
| 2   | Pedagang Kaki Lima                      | 227                | Kabupaten Kubu Raya |
| 3   | Gelandangan dan Pengemis                | 18                 | Kabupaten Kubu Raya |
| 4   | Reklame/Spanduk/Baliho/Pamflet Liar     | 0                  | Kabupaten Kubu Raya |
| 5   | Kost/Hotel/Penginapan/Losmen            | 35                 | Kabupaten Kubu Raya |
| 6   | Layang-layang                           | 51                 | Kabupaten Kubu Raya |
| 7   | Anak Sekolah                            | 24                 | Kabupaten Kubu Raya |
| 8   | Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet | 32                 | Kabupaten Kubu Raya |
| 9   | Unjuk Rasa                              | 2                  | Kabupaten Kubu Raya |
|     | 2020                                    | 616                | Kabupaten Kubu Raya |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, 2020

Aspek kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan secara terkoordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Provinsi Kalimantan Barat, BASARNAS Kalimantan Barat, Manggala Agni, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Pihak Swasta/Korporasi dan masyarakat.

**Tabel 2.45.**  
**Banyaknya Bencana Daerah yang Terjadi di Kabupaten Kubu Raya**  
**Dirinci Menurut Kecamatan 2018-2020**

| No. | Kecamatan       | 2018      | 2019      | 2020      |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Batu Ampar      | 0         | 0         | 0         |
| 2   | Terentang       | 0         | 3         | 1         |
| 3   | Kubu            | 0         | 0         | 1         |
| 4   | Teluk Pakedai   | 3         | 1         | 0         |
| 5   | Sungai Kakap    | 7         | 3         | 1         |
| 6   | Rasau Jaya      | 1         | 0         | 0         |
| 7   | Sungai Raya     | 9         | 18        | 8         |
| 8   | Sungai Ambawang | 6         | 3         | 12        |
| 9   | Kuala Mandor B  | 2         | 5         | 7         |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>28</b> | <b>33</b> | <b>31</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.1.6. Sosial**

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurus penderita cacat, sehingga Dinas Sosial belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhabilitasi.

| Tabel 2.46.<br>Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial |    |       |                         |                      |                             |                                    |                    |                     |         |       |
|---------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Indikator Kinerja                                       | No | Tahun | Jumlah Penduduk         | Segmen               |                             |                                    |                    |                     | Total   | %     |
|                                                         |    |       | Data Agregat Semester I | PBI APBN (Jamkesmas) | PPU (Pekerja Penerima Upah) | PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) | BP (Bukan Pekerja) | PBI APBD (Jamkesda) |         |       |
| Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta JKN          | 1  | 2014  | 596.430                 | 184.498              | 30.310                      | 11.092                             | 4.256              | 0                   | 230.156 | 38,59 |
|                                                         | 2  | 2015  | 597.098                 | 184.498              | 45.814                      | 24.284                             | 3.247              | 4.371               | 262.214 | 43,91 |
|                                                         | 3  | 2016  | 597.764                 | 193.135              | 56.025                      | 30.570                             | 3.306              | 4.353               | 287.389 | 48,08 |
|                                                         | 4  | 2017  | 601.356                 | 196.157              | 74.191                      | 41.564                             | 3.410              | 5.434               | 320.756 | 53,34 |
|                                                         | 5  | 2018  | 603.407                 | 205.966              | 92.656                      | 52.235                             | 3.957              | 11.756              | 366.570 | 60,75 |
|                                                         | 6  | 2019  | 605.787                 | 242.926              | 103.316                     | 41.478                             | 4.118              | 54.555              | 446.393 | 73,69 |
|                                                         | 7  | 2020  | 610.103                 | 234.794              | 109.630                     | 44.124                             | 3.422              | 46.065              | 438.035 | 71,80 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 didominasi oleh fakir miskin. Adapun rincian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah.

| Tabel 2.47.<br>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Ditangani Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2020 |                                                                          |             |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| No                                                                                                          | Jenis PPKS                                                               | Jumlah PPKS |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                          | 2017        |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      |
|                                                                                                             |                                                                          | KK          | Jiwa | KK   | Jiwa | KK   | Jiwa | KK   | Jiwa |
| 1                                                                                                           | (ABT) Anak Balita Terlantar Penderita Gizi Buruk dan Kurang              | -           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| 2                                                                                                           | (AT) Anak Terlantar                                                      | -           | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| 3                                                                                                           | (ABHUK) Anak yang Berhadapan Dengan Hukum                                | -           | -    | -    | 59   | 46   | 46   | 46   | 46   |
| 4                                                                                                           | (AJ) Anak Jalanan                                                        | -           | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5                                                                                                           | (ADK) Anak Jalanan Kedisabilitasan                                       | -           | -    | -    | 104  | 90   | 90   | 135  | 135  |
| 6                                                                                                           | (AKTK) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| No | Jenis PPKS                                                       | Jumlah PPKS |       |        |        |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                  | 2017        |       | 2018   |        | 2019   |        | 2020   |        |
|    |                                                                  | KK          | Jiwa  | KK     | Jiwa   | KK     | Jiwa   | KK     | Jiwa   |
| 7  | (AMPK) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus                  | -           | -     | -      | 1      | -      | -      | -      | -      |
| 8  | (LUT) Lanjut Usia Terlantar                                      | -           | 201   | -      | 1.654  | -      | -      | -      | -      |
| 9  | (PD) (Penyandang Disabilitas                                     | -           | 11    | -      | 192    | 360    | 360    | 429    | 429    |
| 10 | (TS) Tuna Susila                                                 | -           | -     | -      | 26     | -      | -      | -      | -      |
| 11 | (GL) Gelandangan                                                 | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 12 | (PM) Pengemis                                                    | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 13 | (PL) Pemulung                                                    | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 14 | (KM) Kelompok Minoritas                                          | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 15 | (BWBLP) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan                | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 16 | (ODHA) Orang Dengan HIV/AIDS                                     | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 17 | (NAPZA) Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Zat Adiktif | -           | 2     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 18 | (KTR) Korban Trafficking                                         | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 19 | (KTK) Korban Tindak Kekerasan                                    | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 20 | (PMBS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial                          | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 21 | (KBA) Korban Bencana Alam                                        | 239         | 1.053 | 2.980  | 12.539 | -      | -      | -      | -      |
| 22 | (KBS) Korban Bencana Sosial                                      | 61          | 364   | 14     | 32     | -      | -      | -      | -      |
| 23 | (PRSE) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi                            | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 24 | (FM) Fakir Miskin                                                | 8.097       | -     | 15.300 | 82.668 | 22.229 | 22.229 | 34.302 | 34.302 |
| 25 | (KBSP) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis                     | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

| No     | Jenis PPKS                           | Jumlah PPKS |       |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                      | 2017        |       | 2018   |        | 2019   |        | 2020   |        |
|        |                                      | KK          | Jiwa  | KK     | Jiwa   | KK     | Jiwa   | KK     | Jiwa   |
| 26     | (KAT)<br>Komunitas Adat<br>Terpencil | -           | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Jumlah |                                      | 8.397       | 1.632 | 18.294 | 97.277 | 22.725 | 22.725 | 34.912 | 34.912 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2020 sebesar 67,71 persen. Hal tersebut berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 33 orang yang tidak terlibat secara aktif dalam Angkatan Kerja (menunggu pekerjaan). Sementara tingkat pengangguran di tahun 2020 sebesar 7,14 persen.

Tabel 2.48.  
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020

| No | Indikator Ketenagakerjaan                 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----|-------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | *    | 63,90 | 62,22 | 64,48 | 67,71 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 6,42 | 5,91  | 5,04  | 5,62  | 7,14  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

\* Tahun 2016 data tidak tersedia

Tabel 2.49.  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

| No.          | Kegiatan Utama       | Jenis Kelamin |           | Jumlah  |
|--------------|----------------------|---------------|-----------|---------|
|              |                      | Laki-Laki     | Perempuan |         |
| 1.           | Angkatan Kerja       | 80.827        | 109.757   | 290.584 |
|              | Bekerja              | 68.018        | 101.808   | 269.826 |
|              | Pengangguran Terbuka | 12.809        | 7.949     | 20.758  |
| 2.           | Bukan Angkatan Kerja | 35.558        | 103.006   | 138.564 |
| Jumlah Total |                      | 216.385       | 212.763   | 429.148 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Dari sisi jumlah usia produktif, angkatan kerja Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 lebih besar dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020 Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya sebanyak 290.584 sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 138.564. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 mencapai 20.758 orang.

**Tabel 2.50.**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja**  
**Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No.    | Status Pekerjaan Utama                                 | Jenis Kelamin |           | Jumlah  |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|
|        |                                                        | Laki-Laki     | Perempuan |         |
| 1      | Berusaha Sendiri                                       | 32.232        | 20.384    | 52.616  |
| 2      | Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar | 26.689        | 17.007    | 43.696  |
| 3      | Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar             | 6.468         | 1.645     | 8.113   |
| 4      | Buruh/Karyawan/Pegawai                                 | 82.901        | 30.186    | 113.087 |
| 5      | Pekerja Bebas di Bidang Pertanian                      | 5.894         | 2.217     | 8.111   |
| 6      | Pekerja Bebas di Bidang Non Pertanian                  | 5.925         | 1.686     | 7.611   |
| 7      | Pekerjaan Keluarga/Tidak Dibayar                       | 7.909         | 28.683    | 36.592  |
| Jumlah |                                                        | 168.018       | 101.808   | 269.826 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 sebanyak 15.041 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan jumlah 6.051 pencari kerja.

**Tabel 2.51.**  
**Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Jenjang Pendidikan | Angkatan Kerja |              | Jumlah  |
|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|
|     |                    | Bekerja        | Pengangguran |         |
| 1   | ≤ SD               | 117.369        | 4.006        | 121.375 |
| 2   | SMP                | 33.613         | 1.841        | 35.454  |
| 3   | SMA                | 47.112         | 4.743        | 51.855  |

| No. | Jenjang Pendidikan | Angkatan Kerja |               | Jumlah         |
|-----|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|     |                    | Bekerja        | Pengangguran  |                |
| 4   | SMK                | 14.266         | 1.308         | 15.574         |
| 5   | D1/D2/D3           | 6.488          | 1.072         | 7.560          |
| 6   | D4/S1/S2/S3        | 20.425         | 2.071         | 22.496         |
|     | <b>Kubu Raya</b>   | <b>239.273</b> | <b>15.041</b> | <b>254.314</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.52.**  
**Aspek Pelayanan Umum**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No. | Indikator                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019    | 2020    |
|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 83,23 | 84,05 | 84,57 | 84,60   | 84,30   |
| 2   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 63,90 | 63,33 | 63,57 | 72,43   | 73,24   |
| 3   | Status Kabupaten Layak Anak      | -     | -     | -     | Pratama | Pratama |
| 4   | Indeks Perlindungan Anak (IPA)   | -     | -     | -     | 53,4    | 53,4    |

Sumber : Dinas P3KB Kabupaten Kubu Raya, 2021

Kabupaten Kubu Raya mendapatkan penilaian Pratama untuk status kabupaten layak anak pada tahun 2019 dan tahun 2020

**2.3.2.3. Pangan**

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih mengandalkan konsumsi pangan pada komoditas beras dengan alternatif makanan pokok pengganti

beras pada komoditas ubi kayu, jagung dan ubi jalar. Hal tersebut tergambar pada tabel 2.51. di bawah ini.

**Tabel 2.53.**  
**Komoditas Pangan Serta Ketersediaan Energi dan Protein**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2020**

| No.   | Jenis                                   | Satuan                 | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1.    | <b>Produksi Komoditas Pangan Nabati</b> |                        |        |         |        |        |        |
| 1.1.  | Beras                                   | Ton                    | 97.643 | 176.225 | 0      | 0      | 0      |
| 1.2.  | Jagung                                  | Ton                    | 3.306  | 6.411   | 4.075  | 9.727  | 3.338  |
| 1.3.  | Kedelai                                 | Ton                    | 7      | 11      | 38     | 6      | 0,7    |
| 1.4.  | Kacang Tanah                            | Ton                    | 62     | 62      | 0      | 0      | 0      |
| 1.5.  | Ubi Kayu                                | Ton                    | 4.223  | 4.068   | 0      | 0      | 0      |
| 1.6.  | Ubi Jalar                               | Ton                    | 2.083  | 2.083   | 0      | 0      | 0      |
| 1.7.  | Sayur                                   | Ton                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 1.8.  | Buah-Buahan                             | Ton                    | 0      | 1.794   | 0      | 65.302 | 57.220 |
| 1.9.  | Minyak Goreng                           | Ton                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 1.10. | Gula                                    | Ton                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 2.    | <b>Produksi Komoditas Pangan Hewani</b> |                        |        |         |        |        |        |
| 2.1.  | Daging Sapi dan Kerbau                  | Ton                    | 227    | 643     | 1.417  | 1.027  | 753    |
| 2.2.  | Daging Ayam                             | Ton                    | 12.593 | 13.701  | 16.293 | 13.266 | 9.846  |
| 2.3.  | Telur                                   | Ton                    | 4.436  | 4.436   | 0      | 0      | 0      |
| 2.4.  | Susu                                    | Ton                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 2.5.  | Ikan                                    | Ton                    | 0      | 20.688  | 0      | 0      | 0      |
| 3.    | <b>Ketersediaan Energi dan Protein</b>  |                        |        |         |        |        |        |
| 3.1.  | Energi                                  | Kalori / Kapita / Hari | 2.027  | 2.027   | 0      | 0      | 0      |
| 3.2.  | Protein                                 | Kalori                 | 60     | 60      | 0      | 0      | 0      |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.2.4. Pertanian**

Berdasarkan data dari Bagian Kerjasama dan Pertanian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, dari tahun 2019-2020, melalui kerjasama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam program Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda) telah menerbitkan 128 sertifikat hak atas tanah dan 51 Sertifikat Hak Pakai (SHP).

**Tabel 2.54.**  
**Sertifikat yang Dikeluarkan Melalui Kerjasama Badan Pertanahan Nasional dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2020**

| No. | Sertifikat                 | 2019 | 2020 |
|-----|----------------------------|------|------|
| 1   | Sertifikat Hak Pakai (SHP) | 35   | 16   |
| 2   | Sertifikat Hak Atas Tanah  | 128  | *    |

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2021  
Keterangan : \* Tahun 2020 tidak ada sertifikat yang terbit karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan pengukuran

**2.3.2.5. Lingkungan Hidup**

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Keterbatasan penanganan permasalahan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel pada titik tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan terhadap aktivitas perusahaan besar, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.55.**  
**Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan     | Jenis Dokumen                      |                                                                     |
|-----|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |               | AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) | UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) |
| 1   | Batu Ampar    | -                                  | 3                                                                   |
| 2   | Terentang     | -                                  | 1                                                                   |
| 3   | Kubu          | -                                  | 1                                                                   |
| 4   | Teluk Pakedai | -                                  | -                                                                   |

| No. | Kecamatan       | Jenis Dokumen                      |                                                                     |
|-----|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                 | AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) | UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) |
| 5   | Sungai Kakap    | -                                  | 2                                                                   |
| 6   | Rasau Jaya      | -                                  | 1                                                                   |
| 7   | Sungai Raya     | 1                                  | 1                                                                   |
| 8   | Sungai Ambawang | -                                  | 8                                                                   |
| 9   | Kuala Mandor B  | -                                  | 2                                                                   |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>1</b>                           | <b>19</b>                                                           |
|     | 2 0 1 9         | 3                                  | 19                                                                  |
|     | 2 0 1 8         | 1                                  | 29                                                                  |
|     | 2 0 1 7         | 1                                  | 10                                                                  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.56.**  
**Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanfaatan Lingkungan) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jenis Kegiatan                               |          |                       |              |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------|
|     |                 | Budidaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit | Industri | Pembangunan Perumahan | Pertambangan | Lain-Lain |
| 1   | Batu Ampar      | -                                            | 1        | -                     | 2            | -         |
| 2   | Terentang       | -                                            | -        | -                     | -            | 1         |
| 3   | Kubu            | -                                            | -        | -                     | 1            | -         |
| 4   | Teluk Pakedai   | -                                            | -        | -                     | -            | -         |
| 5   | Sungai Kakap    | -                                            | 1        | -                     | -            | 1         |
| 6   | Rasau Jaya      | 1                                            | -        | -                     | -            | -         |
| 7   | Sungai Raya     | -                                            | 2        | 1                     | 2            | 10        |
| 8   | Sungai Ambawang | -                                            | 2        | -                     | -            | 6         |
| 9   | Kuala Mandor B  | 1                                            | -        | -                     | -            | 1         |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>2</b>                                     | <b>6</b> | <b>1</b>              | <b>5</b>     | <b>19</b> |
|     | 2 0 1 9         | -                                            | -        | 1                     | 5            | 13        |
|     | 2 0 1 8         | -                                            | 2        | 2                     | 5            | 20        |
|     | 2 0 1 7         | 3                                            | 1        | 1                     | 5            | 1         |
|     | 2 0 1 6         | 1                                            | 4        | 7                     | 3            | 6         |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.57.**  
**Banyaknya Usaha dan Atau Kegiatan yang Telah Memiliki Dokumen**  
**AMDAL Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jenis Kegiatan                                           |                                |                       |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
|     |                 | Budidaya,<br>Perkebunan<br>dan Pabrik<br>Kelapa<br>Sawit | Industri<br>Pengolahan<br>Kayu | Pembangunan<br>Gedung | Lain-Lain |
| 1   | Batu Ampar      | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 2   | Terentang       | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 3   | Kubu            | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 4   | Teluk Pakedai   | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 5   | Sungai Kakap    | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 6   | Rasau Jaya      | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 7   | Sungai Raya     | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 8   | Sungai Ambawang | -                                                        | -                              | -                     | -         |
| 9   | Kuala Mandor B  | -                                                        | -                              | -                     | -         |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | -                                                        | -                              | -                     | -         |
|     | 2 0 1 9         | -                                                        | -                              | 1                     | 2         |
|     | 2 0 1 8         | -                                                        | -                              | -                     | 1         |
|     | 2 0 1 7         | -                                                        | 1                              | -                     | -         |
|     | 2 0 1 6         | -                                                        | -                              | -                     | -         |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut:

| <b>Tabel 2.58.</b><br><b>Pelayanan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil</b> |                                                    |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| No                                                                                | Indikator                                          | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1.                                                                                | Penduduk Memiliki E-KTP                            | 318.257 | 346.379 | 362.476 | 389.859 | 418.335 |
| 2.                                                                                | Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran             | 400.288 | 420.822 | 449.896 | 468.523 | 484.542 |
| 3.                                                                                | Kepemilikan Kartu Keluarga                         | 157.357 | 158.514 | 153.492 | 157.580 | 169.479 |
| 4.                                                                                | Kepemilikan Akta Nikah                             | 34.166  | 38.126  | 52.936  | 71.264  | 89.024  |
| 5.                                                                                | Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten | Ada     | Ada     | Ada     | Ada     | Ada     |
| 6.                                                                                | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK                | Sudah   | Sudah   | Sudah   | Sudah   | Sudah   |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2021

**2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sampai akhir tahun 2020, Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 Kecamatan yang terbagi menjadi 118 desa, 459 dusun, 789 RW dan 3.168 RT. Perangkat desa yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 738 orang.

| <b>Tabel 2.59.</b><br><b>Banyaknya Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b> |                            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| No.                                                                                                                         | Kecamatan                  | Desa       | Dusun      | RW         | RT           |
| 1                                                                                                                           | Batu Ampar                 | 15         | 54         | 95         | 227          |
| 2                                                                                                                           | Terentang                  | 10         | 30         | 47         | 116          |
| 3                                                                                                                           | Kubu                       | 20         | 71         | 128        | 306          |
| 4                                                                                                                           | Teluk Pakedai              | 14         | 46         | 53         | 163          |
| 5                                                                                                                           | Sungai Kakap               | 13         | 58         | 136        | 618          |
| 6                                                                                                                           | Rasau Jaya                 | 6          | 27         | 60         | 223          |
| 7                                                                                                                           | Sungai Raya                | 20         | 81         | 162        | 946          |
| 8                                                                                                                           | Sungai Ambawang            | 15         | 67         | 76         | 391          |
| 9                                                                                                                           | Kuala Mandor B             | 5          | 25         | 32         | 178          |
|                                                                                                                             | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> | <b>118</b> | <b>459</b> | <b>789</b> | <b>3.168</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.60.**  
**Banyaknya Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Kepala Adat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan                  | Jumlah Perangkat Desa |                 |                    | Jumlah Kepala Dusun | Jumlah Kepala Adat |
|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|     |                            | Kepala Desa           | Sekretaris Desa | Kepala Urusan Desa |                     |                    |
| 1   | Batu Ampar                 | 15                    | 15              | -                  | 54                  | -                  |
| 2   | Terentang                  | 10                    | 10              | -                  | 30                  | -                  |
| 3   | Kubu                       | 20                    | 20              | -                  | 71                  | -                  |
| 4   | Teluk Pakedai              | 14                    | 14              | -                  | 46                  | -                  |
| 5   | Sungai Kakap               | 13                    | 13              | -                  | 58                  | -                  |
| 6   | Rasau Jaya                 | 6                     | 6               | -                  | 27                  | -                  |
| 7   | Sungai Raya                | 20                    | 20              | -                  | 81                  | -                  |
| 8   | Sungai Ambawang            | 15                    | 15              | -                  | 67                  | -                  |
| 9   | Kuala Mandor B             | 5                     | 5               | -                  | 25                  | -                  |
|     | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> | <b>118</b>            | <b>118</b>      | <b>-</b>           | <b>459</b>          | <b>-</b>           |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merilis perkembangan Indeks Desa Membangun seluruh Indonesia. Berdasarkan data IDM tersebut, dari 117 desa yang dinilai, sebagian besar desa (43,6 persen) di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam katagori berkembang. Meskipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penguatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembang (desa mandiri). Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2020 terdapat total 25 desa mandiri di Kabupaten Kubu Raya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.61.**  
**Status Kemandirian Desa di Kabupaten Kubu Raya 2020**

| No. | Kecamatan  | Status Desa |      |            |            |                   | Jumlah |
|-----|------------|-------------|------|------------|------------|-------------------|--------|
|     |            | Mandiri     | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |        |
| 1   | Batu Ampar | 0           | 2    | 8          | 5          | 0                 | 15     |
| 2   | Terentang  | 1           | 1    | 6          | 2          | 0                 | 10     |
| 3   | Kubu       | 1           | 13   | 4          | 2          | 0                 | 20     |

| No.    | Kecamatan       | Status Desa |      |            |            |                   | Jumlah |
|--------|-----------------|-------------|------|------------|------------|-------------------|--------|
|        |                 | Mandiri     | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |        |
| 4      | Teluk Pakedai   | 1           | 2    | 11         | 0          | 0                 | 14     |
| 5      | Sungai Kakap    | 6           | 4    | 3          | 0          | 0                 | 13     |
| 6      | Rasau Jaya      | 1           | 3    | 2          | 0          | 0                 | 6      |
| 7      | Sungai Raya     | 10          | 3    | 7          | 0          | 0                 | 20     |
| 8      | Sungai Ambawang | 5           | 2    | 7          | 0          | 0                 | 14     |
| 9      | Kuala Mandor B  | 0           | 0    | 3          | 2          | 0                 | 5      |
| Jumlah |                 | 25          | 28   | 43         | 6          | 1                 | 117    |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, 2021

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap desa yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, yang pada Tahun 2020 mencapai jumlah 475 unit.

**Tabel 2.62.**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

| No | Jumlah Posyandu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Pratama         | 27   | 41   | 35   | 36   | 35   |
| 2  | Madya           | 290  | 300  | 353  | 372  | 341  |
| 3  | Purnama         | 82   | 51   | 52   | 55   | 89   |
| 4  | Mandiri         | 15   | 15   | 15   | 12   | 10   |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2020

**2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan SKPD Dinas Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian

penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan dropping dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relatif terkendala.

**Tabel 2.63.**  
**Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut**  
**Kecamatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Peserta KB Baru | Peserta KB Aktif |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1   | Batu Ampar      | 316             | 4.355            |
| 2   | Terentang       | 187             | 2.440            |
| 3   | Kubu            | 549             | 7.543            |
| 4   | Teluk Pakedai   | 159             | 1.951            |
| 5   | Sungai Kakap    | 1.369           | 12.110           |
| 6   | Rasau Jaya      | 398             | 3.529            |
| 7   | Sungai Raya     | 2.546           | 25.603           |
| 8   | Sungai Ambawang | 2.968           | 8.174            |
| 9   | Kuala Mandor B  | 300             | 2.694            |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>8.792</b>    | <b>68.399</b>    |
|     | 2 0 1 9         | 14.367          | 66.155           |
|     | 2 0 1 8         | 14.121          | 65.283           |
|     | 2 0 1 7         | 18.498          | 62.951           |
|     | 2 0 1 6         | 17.891          | 62.733           |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Gerakan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kesehatan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran. Untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin. Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 68.399 akseptor meningkat dari tahun 2019 yang sejumlah 66.155 akseptor. Menurut metode kontrasepsi akseptor peserta KB aktif yang paling banyak pada tahun 2020 adalah menggunakan suntikan, sebesar 31.158 peserta, pil sebesar 17.294 peserta.

**Tabel 2.64.**  
**Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jenis Kontrasepsi |               |              |               |              |            |               | Jumlah        |
|-----|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|     |                 | IUD               | PIL           | KONDOM       | SUNTIK        | MOW          | MOP        | IMPLANT       |               |
| 1   | Batu Ampar      | 42                | 988           | 73           | 2.632         | 17           | 2          | 600           | <b>4.355</b>  |
| 2   | Terentang       | 122               | 582           | 33           | 1.182         | 42           | 6          | 473           | <b>2.440</b>  |
| 3   | Kubu            | 270               | 2.869         | 158          | 2.838         | 53           | 3          | 1.352         | <b>7.543</b>  |
| 4   | Teluk Pakedai   | 33                | 396           | 17           | 1.334         | 22           | 1          | 148           | <b>1.951</b>  |
| 5   | Sungai Kakap    | 901               | 2.838         | 177          | 7.159         | 147          | 39         | 849           | <b>12.110</b> |
| 6   | Rasau Jaya      | 234               | 730           | 68           | 1.958         | 148          | 9          | 382           | <b>3.529</b>  |
| 7   | Sungai Raya     | 4.413             | 5.571         | 907          | 8.270         | 790          | 194        | 5.458         | <b>25.603</b> |
| 8   | Sungai Ambawang | 128               | 2.422         | 409          | 4.383         | 28           | 2          | 802           | <b>8.174</b>  |
| 9   | Kuala Mandor B  | 57                | 898           | 46           | 1.402         | 14           | 2          | 275           | <b>2.694</b>  |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>6.201</b>      | <b>17.294</b> | <b>1.888</b> | <b>31.158</b> | <b>1.261</b> | <b>258</b> | <b>10.339</b> | <b>68.399</b> |
|     | 2 0 1 9         | 6.030             | 15.816        | 1.789        | 30.578        | 1.330        | 244        | 10.328        | 66.115        |
|     | 2 0 1 8         | 6.296             | 18.619        | 1.832        | 26.944        | 1.361        | 306        | 9.889         | 62.283        |
|     | 2 0 1 7         | 7.432             | 15.522        | 1.288        | 24.686        | 1.315        | 1.302      | 11.406        | 62.951        |
|     | 2 0 1 6         | 8.229             | 14.872        | 1.366        | 22.731        | 1.246        | 1.156      | 13.173        | 62.733        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.65.**  
**Akseptor KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2020**

| No. | Kecamatan     | Jenis Kontrasepsi |     |        |        |     |     |         | Jumlah       |
|-----|---------------|-------------------|-----|--------|--------|-----|-----|---------|--------------|
|     |               | IUD               | PIL | KONDOM | SUNTIK | MOW | MOP | IMPLANT |              |
| 1   | Batu Ampar    | 3                 | 45  | 0      | 193    | 1   | 0   | 74      | <b>316</b>   |
| 2   | Terentang     | 21                | 26  | 2      | 92     | 6   | 0   | 40      | <b>187</b>   |
| 3   | Kubu          | 15                | 96  | 0      | 382    | 0   | 0   | 56      | <b>549</b>   |
| 4   | Teluk Pakedai | 1                 | 19  | 12     | 113    | 0   | 0   | 14      | <b>159</b>   |
| 5   | Sungai Kakap  | 27                | 309 | 15     | 919    | 1   | 0   | 98      | <b>1.369</b> |
| 6   | Rasau Jaya    | 0                 | 131 | 31     | 208    | 6   | 0   | 22      | <b>398</b>   |
| 7   | Sungai Raya   | 190               | 735 | 109    | 1.220  | 57  | 0   | 235     | <b>2.546</b> |

| No. | Kecamatan       | Jenis Kontrasepsi |              |            |              |           |           |              | Jumlah       |
|-----|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|     |                 | IUD               | PIL          | KONDOM     | SUNTIK       | MOW       | MOP       | IMPLANT      |              |
| 8   | Sungai Ambawang | 70                | 422          | 3          | 1.829        | 20        | 10        | 614          | 2.968        |
| 9   | Kuala Mandor B  | 3                 | 136          | 0          | 138          | 0         | 0         | 23           | 300          |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>330</b>        | <b>1.919</b> | <b>172</b> | <b>5.094</b> | <b>91</b> | <b>10</b> | <b>1.176</b> | <b>8.792</b> |
|     | 2 0 1 9         | 726               | 3.816        | 206        | 8.102        | 157       | 1         | 1.359        | 14.367       |
|     | 2 0 1 8         | 1.079             | 3.010        | 225        | 7.142        | 165       | 27        | 2.445        | 14.121       |
|     | 2 0 1 7         | 994               | 4.623        | 427        | 9.505        | 265       | 129       | 2.555        | 18.498       |
|     | 2 0 1 6         | 1.262             | 4.528        | 433        | 9.208        | 251       | 280       | 1.929        | 17.891       |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.66.**  
**Banyaknya Sarana Pelayanan KB Nasional Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | KKB       | PPKBD      | DBS      | Apotik    | Kelompok KB/KS | Jumlah     |
|-----|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|------------|
| 1   | Batu Ampar      | 5         | 20         | 0        | 0         | 0              | 25         |
| 2   | Terentang       | 2         | 10         | 0        | 0         | 0              | 12         |
| 3   | Kubu            | 3         | 20         | 0        | 0         | 0              | 23         |
| 4   | Teluk Pakedai   | 1         | 14         | 0        | 0         | 0              | 15         |
| 5   | Sungai Kakap    | 17        | 13         | 0        | 1         | 0              | 31         |
| 6   | Rasau Jaya      | 1         | 6          | 0        | 1         | 0              | 8          |
| 7   | Sungai Raya     | 32        | 20         | 0        | 10        | 0              | 62         |
| 8   | Sungai Ambawang | 7         | 15         | 0        | 0         | 0              | 22         |
| 9   | Kuala Mandor B  | 1         | 5          | 0        | 0         | 0              | 6          |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>69</b> | <b>123</b> | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>0</b>       | <b>204</b> |
|     | 2 0 1 9         | -         | -          | -        | -         | -              | -          |
|     | 2 0 1 8         | 50        | 123        | 27       | 12        | 57             | 269        |
|     | 2 0 1 7         | 51        | 123        | 38       | 11        | 57             | 280        |
|     | 2 0 1 6         | 51        | 118        | 38       | 11        | 57             | 275        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten

Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

**Tabel 2.67.**  
**Aspek Perhubungan**

| Indikator                                | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Moda Angkutan Barang              | 1.385     | 1.552     | 2.283     | 4.632     | 4.616     |
| Jumlah Moda Angkutan Umum                | 345       | 368       | 91        | 87        | 132       |
| Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe C | 135.756   | 36.142    | 137.353   | 119.497   | 59.824    |
| Jumlah Penumpang Melalui Dermaga         | 17.005    | 16.072    | 67.673    | 107.572   | 17.671    |
| Jumlah Barang Melalui Dermaga            | 78.497    | 693.506   | 1.155.464 | 499.359   | 109.473   |
| Jumlah Perusahaan Angkutan Penyeberangan | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Jumlah Perusahaan Angkutan Sungai        | 121       | 135       | 134       | 148       | 78        |
| Jumlah Penumpang Angkutan Udara          | 3.330.880 | 1.883.549 | 4.206.876 | 4.417.220 | 2.478.944 |
| Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara | 9.102     | N/A       | 23.428    | 25.826    | 18.853    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, 2020

**2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Aktivitas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidang komunikasi dan informatika baik swasta maupun negeri, cukup diminati mengingat memiliki prospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

**Tabel 2.68.**  
**Banyaknya Menara Telekomunikasi Dirinci Menurut Pemiliknya**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 – 2020**

| No. | Pemilik Menara Telekomunikasi | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | PT. TELKOMSEL, Tbk            | 39         | 40         | 40         | 40         |
| 2   | PT. INDOSAT, Tbk              | 30         | 30         | 30         | 30         |
| 3   | PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG) | 17         | 17         | 17         | 17         |
| 4   | PT. PROTELINDO                | 30         | 30         | 30         | 30         |
| 5   | PT. XL AXIATA, Tbk            | 8          | 6          | 6          | 6          |
| 6   | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 8          | 7          | 13         | 13         |
| 7   | PT. HCPT                      | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 8   | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA      | 4          | 4          | 4          | 4          |
|     | <b>Jumlah</b>                 | <b>138</b> | <b>136</b> | <b>142</b> | <b>142</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.69.**  
**Sarana Komunikasi Yang Dapat Digunakan Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Sarana Komunikasi Yang Digunakan       |
|-----|-----------------|----------------------------------------|
| 1   | Batu Ampar      | Telepon Genggam (HP)                   |
| 2   | Terentang       | Telepon Genggam (HP)                   |
| 3   | Kubu            | Telepon Genggam (HP)                   |
| 4   | Teluk Pakedai   | Telepon Genggam (HP)                   |
| 5   | Sungai Kakap    | Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel |
| 6   | Rasau Jaya      | Telepon Genggam (HP)                   |
| 7   | Sungai Raya     | Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel |
| 8   | Sungai Ambawang | Telepon Genggam (HP) dan Telepon Kabel |
| 9   | Kuala Mandor B  | Telepon Genggam (HP)                   |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pengembangan usaha koperasi memiliki kendala utama yang bersifat internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal ini menimbulkan kendala lain yang lebih spesifik, yaitu kelemahan dalam pemodalan. Sebagaimana diketahui modal secara anatomi adalah sebagai darah yang akan mendorong sumber daya ekonomi lainnya dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu pengembangan permodalan oleh koperasi harus diprioritaskan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi. Pada tahun 2017, jumlah anggota yang dimiliki Koperasi KUD sebanyak 7.399 dan 29.253 anggota untuk Koperasi Non KUD.

| <b>Tabel 2.70.</b><br><b>Jumlah Koperasi dan UMKM</b><br><b>Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b> |                  |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>No.</b>                                                                                        | <b>Indikator</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 1                                                                                                 | Jumlah Koperasi  | 440         | 521         |
| 2                                                                                                 | Jumlah UMKM      | 2.951       | 3.037       |

Sumber : DKUMPP Kabupaten Kubu Raya, 2021

| <b>Tabel 2.71.</b><br><b>Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif</b><br><b>Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b> |                  |              |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>No.</b>                                                                                                     | <b>Kecamatan</b> | <b>Aktif</b> | <b>Tidak Aktif</b> | <b>Total Koperasi</b> |
| 1                                                                                                              | Batu Ampar       | 32           | 10                 | <b>42</b>             |
| 2                                                                                                              | Terentang        | 17           | 3                  | <b>21</b>             |
| 3                                                                                                              | Kubu             | 50           | 7                  | <b>57</b>             |
| 4                                                                                                              | Teluk Pakedai    | 16           | 3                  | <b>19</b>             |
| 5                                                                                                              | Sungai Kakap     | 48           | 12                 | <b>60</b>             |
| 6                                                                                                              | Rasau Jaya       | 45           | 8                  | <b>53</b>             |
| 7                                                                                                              | Sungai Raya      | 160          | 24                 | <b>184</b>            |
| 8                                                                                                              | Sungai Ambawang  | 61           | 6                  | <b>67</b>             |
| 9                                                                                                              | Kuala Mandor B   | 16           | 2                  | <b>18</b>             |
|                                                                                                                | <b>2 0 2 0</b>   | <b>445</b>   | <b>75</b>          | <b>521</b>            |
|                                                                                                                | 2 0 1 9          | 440          | 75                 | 515                   |
|                                                                                                                | 2 0 1 8          | 427          | 75                 | 502                   |
|                                                                                                                | 2 0 1 7          | 409          | 76                 | 485                   |
|                                                                                                                | 2 0 1 6          | 409          | 76                 | 485                   |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

| <b>Tabel 2.72.</b><br><b>Banyaknya Anggota KUD dan Non KUD</b><br><b>Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b> |                  |            |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|
| <b>No.</b>                                                                                              | <b>Kecamatan</b> | <b>KUD</b> | <b>Non KUD</b> | <b>Jumlah Anggota</b> |
| 1                                                                                                       | Batu Ampar       | 716        | 1.645          | <b>2.361</b>          |
| 2                                                                                                       | Terentang        | 389        | 583            | <b>972</b>            |
| 3                                                                                                       | Kubu             | 1.684      | 1.999          | <b>3.683</b>          |
| 4                                                                                                       | Teluk Pakedai    | 2.047      | 724            | <b>2.771</b>          |
| 5                                                                                                       | Sungai Kakap     | 376        | 3.350          | <b>3.726</b>          |
| 6                                                                                                       | Rasau Jaya       | 420        | 4.448          | <b>4.868</b>          |
| 7                                                                                                       | Sungai Raya      | 291        | 11.119         | <b>11.410</b>         |

| No. | Kecamatan       | KUD          | Non KUD       | Jumlah Anggota |
|-----|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8   | Sungai Ambawang | 1.478        | 6.380         | <b>7.858</b>   |
| 9   | Kuala Mandor B  | 84           | 544           | <b>628</b>     |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>7.485</b> | <b>30.792</b> | <b>38.277</b>  |
|     | 2 0 1 9         | 7.476        | 30.965        | 38.441         |
|     | 2 0 1 8         | 7.474        | 29.916        | 37.390         |
|     | 2 0 1 7         | 6.758        | 28.466        | 35.204         |
|     | 2 0 1 6         | 6.382        | 27.500        | 33.882         |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

### 2.3.2.12. Penanaman Modal

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah seberapa besar investasi dilaksanakan di daerah tersebut, makin besar investasi akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya investasi akan menambah lapangan kerja baru, perputaran uang di daerah dan akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas, lebih mudah, cepat, terjangkau dan transparan.

Perkembangan nilai realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi.

**Tabel 2.73.**  
**Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

| No. | Indikator   | Tahun                |                      |                    |                    |                    |
|-----|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | 2016                 | 2017                 | 2018               | 2019               | 2020               |
| 1   | Jumlah PMDN | 7.743.131.140.000,00 | 1.233.953.670.000,00 | 955.681.670.000,00 | 743.640.560.000,00 | 451.570.000.000,00 |
| 2   | Jumlah PMA  | 1.595.799.110.000,00 | 95.917.560.000,00    | 16.411.980.000,00  | 0,00               | 0,00               |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.74.**  
**Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Sektor          | Jumlah<br>Proyek | Nilai Investasi      |                        |                        |                          | Penyerapan<br>Tenaga<br>Kerja |     |
|-----|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|
|     |                 |                  | Rencana<br>(Juta Rp) | Realisasi<br>(Juta Rp) | Rencana<br>(RibU US\$) | Realisasi<br>(RibU US\$) | WNI                           | WNA |
| 1   | Sektor Primer   | 13               | -                    | -                      | -                      | 73.145,00                | -                             | -   |
| 2   | Sektor Sekunder | 19               | -                    | -                      | -                      | 2.291,00                 | 12                            | -   |
| 3   | Sektor Tersier  | 29               | -                    | -                      | -                      | 101,00                   | -                             | -   |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>61</b>        | -                    | -                      | <b>35.307,00</b>       | <b>75.537,00</b>         | <b>12</b>                     | -   |
|     | 2 0 1 9         | 15               | -                    | -                      | -                      | 3.414,80                 | 108                           | -   |
|     | 2 0 1 8         | 17               | -                    | 16.411,98              | -                      | 94.705,20                | 234                           | 5   |
|     | 2 0 1 7         | 12               | -                    | 95.917,56              | 79.665,00              | -                        | 689                           | 19  |
|     | 2 0 1 6         | 21               | 10.100,80            | 1.595.799,11           | 149.515,00             | 19.865,83                | 5.133                         | 68  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.75.**  
**Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Sektor          | Jumlah<br>Proyek | Nilai Investasi      |                        |                        |                          | Penyerapan<br>Tenaga Kerja |          |
|-----|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
|     |                 |                  | Rencana<br>(Juta Rp) | Realisasi<br>(Juta Rp) | Rencana<br>(RibU US\$) | Realisasi<br>(RibU US\$) | WNI                        | WNA      |
| 1   | Sektor Primer   | 53               | -                    | 207.547,00             | -                      | -                        | 627                        | 1        |
| 2   | Sektor Sekunder | 85               | -                    | 17.345,00              | -                      | -                        | 165                        | -        |
| 3   | Sektor Tersier  | 275              | -                    | 226.678,00             | -                      | -                        | 230                        | 2        |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>413</b>       | <b>451.985,00</b>    | <b>451.570,00</b>      | -                      | -                        | <b>1.022</b>               | <b>3</b> |
|     | 2 0 1 9         | 180              | -                    | 743.640,56             | -                      | -                        | 887                        | -        |
|     | 2 0 1 8         | 78               | -                    | 955.681,67             | -                      | -                        | 2.060                      | 5        |
|     | 2 0 1 7         | 54               | 516.355,33           | 1.233.953,34           | -                      | -                        | 4.044                      | 19       |
|     | 2 0 1 6         | 382              | 3.922.473,99         | 7.743.131,14           | 149.515,00             | 19.865,83                | 25.551                     | 68       |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga saat ini masih perlu ditingkatkan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mampu menggembleng anggotanya sebagai generasi harapan bangsa. Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga

diarahkan untuk membentuk kepribadian pemuda yang tangguh, bertanggungjawab, cerdas, mandiri dan berprestasi.

**Tabel 2.76.**  
**Data Atlit Berprestasi Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2018-2020**

| No. | Nama                     | Cabang Olahraga    | Prestasi | Tingkat       | Keterangan |
|-----|--------------------------|--------------------|----------|---------------|------------|
| I   | <b>Olahraga Prestasi</b> |                    |          |               |            |
| 1   | Devi Safitri             | Hapkido            | Juara 1  | Internasional | Tahun 2018 |
| 2   | Feri Adurrahman Saleh    | Angkat Berat       | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 3   | Idham Halid Lestaluhu    | Atletik            | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 4   | Idham Halid Lestaluhu    | Atletik            | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 5   | Tim Basket Putri         | Basket             | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 6   | Arva'i dan Hermanti      | Dayung             | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 7   | Kamarullah               | Yudo               | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 8   | Dimas Angga Prayoga      | Karate K 67 Kg     | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 9   | Ridho Drafiان            | Karate K 60 Kg     | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 10  | Tim Putra                | Panahan            | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 11  | Tim Putri                | Panahan            | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 12  | Susilawati               | Panahan Seri 1     | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 13  | Susilawati               | Panahan Seri 1 & 2 | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 14  | Triple Women 2M 1W       | Pentaque           | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 15  | Irvan Nugroho            | Taekwondo          | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 16  | Sri Agustriani           | Taekwondo          | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 17  | Andi Wandira             | Taekwondo          | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 18  | Indah Wulandari          | Tinju              | Juara 3  | Nasional      | Tahun 2019 |
| 19  | Arbaim                   | Angkat Besi        | Juara 3  | Nasional      | Tahun 2019 |
| 20  | Fauzi                    | Atletik            | Juara 3  | Nasional      | Tahun 2019 |
| II  | <b>Olahraga Pelajar</b>  |                    |          |               |            |
| 1   | Josua TB                 | Silat              | Juara 1  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 2   | Ananda Dimas             | Silat              | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 3   | Irja Arfian              | Silat              | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 4   | M. Ridho                 | Bulu Tangkis       | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 5   | Ridho Ramadhan           | Silat              | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 6   | Sartika Dwi Astuti       | Silat              | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 7   | Samsul                   | Silat              | Juara 2  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 8   | Nabila Rizki             | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 9   | Devi Nurvita             | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 10  | Riswanto                 | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 11  | Neggi Rahayu S           | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 12  | Chairul Nugraha P        | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |
| 13  | Cindi Aulia              | Silat              | Juara 3  | Provinsi      | Tahun 2018 |

| No.        | Nama                        | Cabang Olahraga             | Prestasi | Tingkat  | Keterangan |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------|
| 14         | Nurhalizah Aulia            | Silat                       | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 15         | Mirawati                    | Bulu Tangkis                | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 16         | Sri Ekawati                 | Bulu Tangkis                | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 17         | Tim Putra                   | Bola Voly                   | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 18         | M. Fiqri As'ad              | Atletik                     | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2019 |
| 19         | Hajjariah Anggraini         | Karate                      | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2019 |
| 20         | Nurmala                     | Karate                      | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2019 |
| 21         | Nurmala                     | Karate                      | Juara 3  | Nasional | Tahun 2019 |
| 22         | Wuri Asmaul Hasanah         | Angkat Besi                 | Juara 2  | Nasional | Tahun 2019 |
| 23         | Nurlaila                    | Bola Voly Pasir             | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2020 |
| 24         | Wara Prada Anisa            | Angkat Besi                 | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2020 |
| 25         | Elvira Tresia Naikef        | Bola Voly Pasir             | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2020 |
| 26         | Khairiyah                   | Karate                      | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2020 |
| <b>III</b> | <b>Olahraga Tradisional</b> |                             |          |          |            |
| 1          | Sofiansyah                  | Panahan OR Putra            | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 2          | Sofiansyah                  | Panahan Kualifikasi 1 Ronde | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 3          | Sofiansyah                  | Panahan Kualifikasi 2 Ronde | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 4          | Sofiansyah                  | Panahan Total Ronde Putra   | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 5          | Nurjanah                    | Panahan OR Nasional         | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 6          | Nurjanah                    | Panahan Kualifikasi 1 Ronde | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 7          | Habil Mursidi               | Lari 400 m Kelas T.37       | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 8          | Sri Suryani                 | Lempar Cakram K.F.44        | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 9          | Sri Suryani                 | Tolak Peluru K.F.44         | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 10         | Sri Suryani                 | Lempar Lembing K.F.44       | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 11         | Ismail                      | Lempar Lembing K.F.55       | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 12         | Abdul Hadi                  | Angkat Berat Kelas 55 Kg    | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 13         | Abdul Hadi                  | Angkat Berat Kelas 49 Kg    | Juara 1  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 14         | Eko Sumarsono Hadi          | Panahan OR Aduan Putra      | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 15         | Yusriadi                    | Panahan Ronde Nasional      | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 16         | Yusriadi                    | Panahan Kualifikasi 1 Ronde | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018 |
| 17         | Nurjanah                    | Panahan Total Ronde         | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018 |

| No. | Nama                 | Cabang Olahraga             | Prestasi | Tingkat  | Keterangan           |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------|
| 18  | Nurjanah             | Panahan Kualifikasi 2 Ronde | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 19  | Ismail               | Tolak Peluru                | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 20  | Abdul Hadi           | Tolak Peluru K.F.56         | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 21  | Meriana              | Bulu Tangkis Tunggal        | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 22  | Efendi               | Renang 50 m Gaya Dada       | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 23  | Annisa Fenti Pratiwi | Lari 100 m                  | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 24  | Rachmad              | Lempar Cakram               | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 25  | Susanto              | Lempar Lembing              | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 26  | Efendi               | Renang 50 m Gaya Bebas      | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 27  | Susanto              | Angkat Berat Kelas 80 Kg    | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 28  | Novel                | Tenis Meja                  | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 29  | Fitri Feriansyah     | Lompat Jauh K.TRW           | Juara 3  | Provinsi | Tahun 2018           |
| 30  | Tim Sumpit           | Sumpit Tradisional          | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2019 (Sintang) |
| 31  | Tim Sumpit           | Sumpit Beregu               | Juara 2  | Provinsi | Tahun 2019 (Kalbar)  |

Sumber : Dinas Porapar, 2021

### 2.3.2.14. Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun untuk kepentingan lainnya. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan.

Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistik, data lainnya yang dihasilkan oleh SKPD teknis dalam bentuk data pokok, profil juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2016-2020 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

| <b>Tabel 2.77.</b><br><b>Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik</b> |                                 |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>No.</b>                                                               | <b>Indikator</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| 1                                                                        | Buku "Kabupaten Dalam Angka"    | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |
| 2                                                                        | Buku "PDRB Kabupaten"           | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |
| 3                                                                        | Buku Kecamatan Dalam Angka      | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |
| 4                                                                        | Indikator Makro pembangunan KKR | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |
| 5                                                                        | Perekonomian Daerah             | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         | Ada         |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

2.3.2.15. Persandian

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini masih terbatas dalam segi kuantitas sehingga dirasakan kurang memadai dalam mengamankan informasi berbasis IT.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Gambaran umum penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta intensitas kegiatannya dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

| <b>Tabel 2.78.</b><br><b>Invetarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b> |                                                           |                                     |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                                        | <b>Jenis Kegiatan</b>                                     | <b>Lokasi Kegiatan</b>              | <b>Keterangan</b>                                                                       |
| 1.                                                                                                                               | Keikutsertaan Promosi Seni dan Budaya ke Tingkat Nasional | Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta | Memperkenalkan karya kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ke Tingkat Nasional |

| No | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Keterangan                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Gelar seni dan Budaya Daerah (6 etnis besar di Kubu Raya) dan Lomba Drumband Tingkat Sekolah Dasar                                                                                                                                                         | Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya                                                                                                                                                                                      | Perlunya ditingkatkan lagi intensitasnya gelaran apresiasi Seni Budaya                                  |
| 3. | Pelestarian aktualisasi adat dan budaya daerah :<br><br>a. Wayang Kulit<br>b. Bakar Wangkang<br>c. Festival Sekapur Sirih<br>- Qasidah<br>- Hadrah<br>d. Gawai Rakyat<br>e. Naik Dango<br><br>f. Makan Saprahan<br>g. Robo'-Robo'<br><br>h. Haul Raja Kubu | Kec. Sungai Raya<br>Kec. Sungai Raya<br><br>Kec. Sungai Raya<br>Kec. Sungai Raya<br>Kec. Rasau Jaya<br>Kec. Sungai Ambawang<br>Kec. Sungai Raya<br>Kec. Sungai Raya,<br>Kec. Teluk Pakedai,<br>Kec. Sungai Kakap,<br>Kec. Kubu<br>Kec. Kubu | Perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi kegiatan seni budaya Kabupaten Kubu Raya                       |
| 4. | Pengiriman tim kreatif ke tingkat provinsi                                                                                                                                                                                                                 | Kota Singkawang                                                                                                                                                                                                                             | Pagelaran seni budaya yang bertujuan menjadikan seni budaya Kab. Kubu Raya agar dikenal masyarakat luas |
| 5. | Pembentukan komunitas kreatif :<br>a. Generasi pesona indonesia (Genpi) KKR<br>b. Komunitas fashion dan tata rias<br>c. Komunitas musik KKR                                                                                                                | Kec. Sungai Raya                                                                                                                                                                                                                            | Perlunya pembinaan dan perhatian khusus                                                                 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, 2021

**Tabel 2.79.**  
**Benda Cagar Budaya yang Sudah Dilestarikan di Kabupaten Kubu Raya**

| No | Nama Cagar Budaya                      | Lokasi                                    |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | Makam Ismail Mundu                     | Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai |
| 2. | Makam Panglima Raja Kubu               | Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar   |
| 3. | Keraton Kubu                           | Desa Kubu, Kecamatan Kubu                 |
| 4. | Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut) | Sui Kakap, Kecamatan Sungai Kakap         |

| No  | Nama Cagar Budaya                 | Lokasi                                 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 5.  | Padogi                            | Sui Samak, Kecamatan Sungai Ambawang   |
| 6.  | Rumah Panjang (Betang)            | Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang |
| 7.  | Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya | Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya     |
| 8.  | Makam Sultan Manggis              | Suka Lanting, Kecamatan Sungai Raya    |
| 9.  | Guci                              | Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang  |
| 10. | Masjid Nasrullah                  | Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

### 2.3.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan, meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan budaya baca masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Perkembangan teknologi bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah buku yang dipinjam, demikian pula dengan penambahan fasilitas di perpustakaan seperti internet. Ada kecenderungan masyarakat mengunjungi perpustakaan untuk memanfaatkan teknologi internet sebagai sumber bacaan ataupun penggunaan media *e-book*. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di selama periode 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.80.**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan**

| No | Indikator                                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang) | 2.446 | 9.659 | 5.161 | 7.551 | 2.171 |
| 2. | Jumlah Buku                                      | 4.609 | 1.500 | 2.455 | 6.247 | 2.830 |

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Kubu Raya, 2021

### 2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip belum adanya dukungan ketersediaan gedung arsip Kabupaten. Selain itu, pengelolaan arsiparis masih bersifat manual, belum dilakukan duplikasi secara digital. Tenaga pengelola yang berasal dari

fungsional hanya berjumlah 40 orang, yang keberadaannya tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

**2.3.3. Fokus Urusan Pilihan**

**2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan**

Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan. Produksi penangkapan ikan pada tahun 2016-2020 adalah fluktuatif dan tertinggi di tahun 2020 berjumlah 24.019,36 ton. Demikian pula, produksi budidaya ikan mengalami fluktuatif dan tertinggi di tahun 2020 berjumlah 2.388,00 ton.

**Tabel 2.81.**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan**

| No | Indikator                                                              | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Produksi Penangkapan Ikan (ton)                                        | 23.805,00 | 23.594,68 | 23.311,44 | 23.381,33 | 24.019,36 |
| 2. | Produksi Budidaya Ikan (ton)                                           | 355,30    | 306,40    | 304,34    | 312,92    | 2.388,00  |
| 3. | Kontribusi Sektor Pertanian (Perikanan dan Kelautan) Terhadap PDRB (%) | 12,65     | 12,38     | 12,07     | 12,04     | 13.05     |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021  
Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, 2020

**2.3.3.2. Pariwisata**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata, mengingat Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa jenis wisata, yaitu Wisata Alam (*mangrove* terbaik kedua di Indonesia setelah Papua dan habitat terlengkap di dunia), Wisata 13 Perhutanan Sosial, Wisata Pantai, Wisata Agro (kafe sawah dan buah-buah tropis), Wisata Belanja dan Kuliner, Wisata Budaya 6 etnis besar dengan total 36 event per tahunnya (masing-masing etnis ada event musik dan kesenian etnis, event permainan dan olahraga tradisional, event kuliner

tradisional, pakaian tradisional, upacara adat, foto dan lukisan etnik), Wisata Rohani dalam rangka revolusi moral (bukan hanya religi untuk agama tertentu saja), Wisata Olahraga (*track* sensasi gambut dan *track* sensasi *mangrove*).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Kubu Raya akan menimbulkan *multiplier effect*, yakni menumbuhkan kegairahan ekonomi masyarakat sekaligus memperbesar kesempatan/lapangan kerja di bidang-bidang:

- Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Usaha Penyediaan Akomodasi
- Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Usaha Kawasan Pariwisata
- Usaha Jasa Transportasi Wisata
- Usaha Daya Tarik Wisata
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Usaha Jasa Pariwisata
- Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- Usaha Jasa Tirta
- Usaha Spa

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang tercatat adalah sebanyak 19.339 wisatawan nusantara (lokal) dan 77 wisatawan mancanegara (asing). Jumlah tersebut menurun dari jumlah wisatawan di tahun 2019 dikarenakan terjadi pandemi covid-19.

**Tabel 2.82.**  
**Banyaknya Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

| No. | Jenis Wisatawan       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | Wisatawan Nusantara   | 47.166 | 49.578 | 54.280 | 28.288 | 19.339 |
| 2   | Wisatawan Mancanegara | 1.642  | 1.736  | 2.120  | 486    | 77     |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

| <p><b>Tabel 2.83.</b><br/> <b>Pertumbuhan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang Berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (%)</b></p> |                       |        |      |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|-------|--------|--------|
| No.                                                                                                                                                                          | Jenis Wisatawan       | 2016   | 2017 | 2018  | 2019   | 2020   |
| 1                                                                                                                                                                            | Wisatawan Nusantara   | -18,86 | 5,11 | 9,48  | -47,89 | -31,64 |
| 2                                                                                                                                                                            | Wisatawan Mancanegara | -34,76 | 5,72 | 22,12 | -77,08 | -84,16 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

| <p><b>Tabel 2.84.</b><br/> <b>Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Menurut Jenisnya Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020</b></p> |                                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| No.                                                                                                                        | Nama Tempat Rekreasi                    | Lokasi                             |
| <b>A.</b>                                                                                                                  | <b>Wisata Alam</b>                      |                                    |
| 1.                                                                                                                         | Batu Gajah                              | Batu Ampar                         |
| 2.                                                                                                                         | Dermaga Batu Ampar                      | Batu Ampar                         |
| 3.                                                                                                                         | Pantai Tasikmalaya                      | Batu Ampar                         |
| 4.                                                                                                                         | Selat Teluk Air                         | Batu Ampar                         |
| 5.                                                                                                                         | Selat Padang Tikar                      | Batu Ampar                         |
| 6.                                                                                                                         | Hutan <i>Mangrove</i>                   | Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Kubu |
| 7.                                                                                                                         | Bukit Ambawang                          | Kubu                               |
| 8.                                                                                                                         | Gunung Wangkang                         | Kubu                               |
| 9.                                                                                                                         | Pulau Bidara                            | Kubu                               |
| 10.                                                                                                                        | Pulau Gelanggang                        | Kubu                               |
| 11.                                                                                                                        | Pantai Patok 20                         | Rasau Jaya                         |
| 12.                                                                                                                        | Bukit Tunggal                           | Sungai Ambawang                    |
| 13.                                                                                                                        | Pulau Hanyut                            | Sungai Ambawang                    |
| 14.                                                                                                                        | Danau Kongsu                            | Sungai Kakap                       |
| 15.                                                                                                                        | Taman Agro Rekadana                     | Sungai Kakap                       |
| 16.                                                                                                                        | Pantai TengkuYung di Desa Sungai Nibung | Teluk Pakedai                      |
| 17.                                                                                                                        | Danau Tujuh                             | Terentang                          |
| 18.                                                                                                                        | Pulau Binga                             | Terentang                          |
| <b>B.</b>                                                                                                                  | <b>Wisata Minat Khusus</b>              |                                    |
| 1.                                                                                                                         | Taman Fantasi Gardenia                  | Sungai Raya                        |
| 2.                                                                                                                         | <i>Waterpark Paradise Q</i>             | Sungai Raya                        |
| 3.                                                                                                                         | Transmart Studio Mini                   | Sungai Raya                        |
| 4.                                                                                                                         | Habitat Buaya di Sungai Kering          | Teluk Pakedai                      |
| 5.                                                                                                                         | Habitat Buaya Muara                     | Sungai Kakap                       |
| 6.                                                                                                                         | Rumah <i>Retret Constantine</i>         | Sungai Ambawang                    |
| 7.                                                                                                                         | Rumah Pelangi                           | Sungai Ambawang                    |
| <b>C.</b>                                                                                                                  | <b>Situs Budaya</b>                     |                                    |
| 1.                                                                                                                         | Makam Panglima Raja                     | Batu Ampar                         |
| 2.                                                                                                                         | Makam Panglima Raja Kubu/Situs          | Kubu                               |
| 3.                                                                                                                         | Replika Istana Raja Kubu                | Kubu                               |
| 4.                                                                                                                         | Batu Masjid                             | Kubu                               |
| 5.                                                                                                                         | Bekas Keraton/Situs                     | Kubu                               |
| 6.                                                                                                                         | Guci/Artefak                            | Sungai Ambawang                    |
| 7.                                                                                                                         | Padogi/Situs                            | Sungai Ambawang                    |

| No.       | Nama Tempat Rekreasi                      | Lokasi          |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 8.        | Rumah Panjang/Situs                       | Sungai Ambawang |
| 9.        | Bekas Keraton/Situs                       | Sungai Kakap    |
| 10.       | Hien Bu Cheng Hua (Klenteng Tengah Laut)  | Sungai Kakap    |
| 11.       | Makam H. Fatah Mumbung                    | Sungai Kakap    |
| 12.       | Mungguk Mas/Situs                         | Sungai Kakap    |
| 13.       | Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya         | Sungai Raya     |
| 14.       | Makam Sultan Manggis                      | Sungai Raya     |
| 15.       | Vihara Maitreya                           | Sungai Raya     |
| 16.       | Makam H. Ismail Mundu                     | Teluk Pakedai   |
| 17.       | Makam Kerajaan Kerta Mulia                | Teluk Pakedai   |
| 18.       | Masjid Nasrullah/Situs                    | Teluk Pakedai   |
| 19.       | Masjid Batu                               | Teluk Pakedai   |
| <b>D.</b> | <b>Industri Pariwisata</b>                |                 |
| 1.        | Hotel Dangau                              | Sungai Raya     |
| 2.        | Gardenia Resort & Spa                     | Sungai Raya     |
| 3.        | Hotel/Villa Harmony In                    | Sungai Raya     |
| 4.        | Penginapan <i>Family</i>                  | Sungai Raya     |
| 5.        | <i>Homestay Family</i>                    | Sungai Raya     |
| 6.        | Sun Set Restoran & Bar                    | Sungai Raya     |
| 7.        | Rumah Makan Periuk                        | Sungai Raya     |
| 8.        | Restoran Teratai Indah                    | Sungai Kakap    |
| 9.        | Restoran Pantai Indah Kakap               | Sungai Kakap    |
| 10.       | Restoran Harmony In                       | Sungai Raya     |
| 11.       | <i>Fresh Resto</i>                        | Sungai Raya     |
| 12.       | Restoran Dangau                           | Sungai Raya     |
| 13.       | <i>King's Crab</i> Restoran               | Sungai Raya     |
| 14.       | <i>Cafe Tanggoe</i>                       | Sungai Raya     |
| 15.       | Restoran Papyrus                          | Sungai Raya     |
| 16.       | Penangkaran Arwana                        | Sungai Raya     |
| 17.       | Kerajinan Tikar Lampit                    | Sungai Ambawang |
| 18.       | Industri Pengolahan Sagu                  | Sungai Ambawang |
| 19.       | Industri Kerajina Keladi Air              | Sungai Ambawang |
| 20.       | Industri Pembuatan Rebana                 | Rasau Jaya      |
| 21.       | Industri Pembuatan Marning dan Rengginang | Rasau Jaya      |
| 22.       | Industri Pengolahan Kelapa                | Sungai Kakap    |
| 23.       | Industri Pengolahan Arang Kelapa          | Sungai Kakap    |
| 24.       | Kerajinan Tikat Bede                      | Kuala Mandor B  |
| 25.       | Industri Makanan Onde Ceplis              | Terentang       |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.85.**  
**Banyaknya Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2020**

| No. | Jenis Usaha Pariwisata         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Usaha Jasa Perjalanan Wisata   | 13   | 13   | 10   | 10   | 10   |
| 2   | Usaha Penyediaan Akomodasi     | 10   | 11   | 11   | 14   | 14   |
| 3   | Usaha Jasa Makanan dan Minuman | 173  | 175  | 188  | 272  | -    |

| No. | Jenis Usaha Pariwisata                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 4   | Usaha Kawasan Wisata                                                              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5   | Usaha Jasa Transportasi Wisata                                                    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6   | Usaha Daya Tarik Wisata                                                           | 20   | 21   | 25   | 25   | 25   |
| 7   | Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi                               | 17   | 17   | 18   | 20   | -    |
| 8   | Usaha Jasa Pariwisata                                                             | -    | -    | -    | -    | -    |
| 9   | Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran | -    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 10  | Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata                                                  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11  | Usaha Jasa Informasi Pariwisata                                                   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12  | Usaha Jasa Tirta                                                                  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13  | Usaha Spa                                                                         | 21   | 21   | 21   | 21   | 22   |

Sumber : Dinas Porapar Kabupaten Kubu Raya, 2021

### 2.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya. Potensi sumber daya alam di sektor ini cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai.

**Tabel 2.86.**  
**Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020**

| No.  | Uraian                | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      |
|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1.   | PADI                  |            |            |            |            |           |
| 1.1  | Luas Tanam (Ha)       | 55.120,00  | 48.252,00  | 39.187,00  | 34.375,00  | 31.223,00 |
| 1.2  | Luas Panen (Ha)       | 44.783,00  | 51.863,00  | 50.039,00  | 38.443,00  | 33.371,00 |
| 1.3  | Produktivitas (Kw/Ha) | 34,56      | 31,72      | 31,72      | 29,85      | 29,85     |
| 1.4  | Produksi (Ton)        | 154.770,00 | 164.509,00 | 158.722,00 | 114.753,00 | 99.613,00 |
| 2.   | JAGUNG                |            |            |            |            |           |
| 2.1. | Luas Tanam (Ha)       | 1.720,00   | 2.901,30   | 1.661,40   | 1.418,00   | 1.629,00  |
| 2.2. | Luas Panen (Ha)       | 1.148,00   | 2.226,00   | 1.415,00   | 2.385,00   | 821,00    |
| 2.3. | Produktivitas (Kw/Ha) | 28,80      | 28,80      | 28,80      | 40,61      | 40,61     |
| 2.4. | Produksi (Ton)        | 3.306,00   | 6.411,00   | 4.075,00   | 9.727,00   | 3.338,00  |

| No.  | Uraian                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.   | KEDELAI               |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Luas Tanam (Ha)       | 14,00 | 39,00 | 5,00  | 4,20  | 0,50  |
| 3.2. | Luas Panen (Ha)       | 6,00  | 10,00 | 32,00 | 5,60  | 0,70  |
| 3.3. | Produktivitas (Kw/Ha) | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 10,70 | 10,70 |
| 3.4. | Produksi (Ton)        | 7,00  | 11,00 | 38,00 | 6,00  | 0,70  |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, 2021

Berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020 oleh Bank Indonesia, dalam program pengendalian inflasi triwulan 2 tahun 2020 dengan strategi ketersediaan pasokan pangan lewat program penguatan produksi, cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan perdagangan komoditas pangan, Kubu Raya telah menjadi salah satu bagian dari pencapaian pada program ini lewat tujuh Gabungan Kelompok Tani (yang terdiri dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang) yang telah berhasil melakukan panen raya padi yang menggunakan bibit unggul tropiko. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya benar-benar memperhatikan kualitas dan terus melakukan pengembangan di sektor pertanian. Dengan keunggulan sektor pertanian tersebut, kabupaten Kubu Raya dapat menghasilkan beras-beras lokal yang berkualitas.

**Tabel 2.87.**  
**Hasil Produksi Beras Setiap Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Barat (Ton)**

| Kabupaten / Kota       | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Kabupaten Sambas       | 81.090 | 99.247 | 88.413 |
| Kabupaten Bengkayang   | 13.669 | 21.336 | 18.648 |
| Kabupaten Landak       | 47.440 | 60.536 | 58.345 |
| Kabupaten Mempawah     | 30.939 | 40.057 | 41.266 |
| Kabupaten Sanggau      | 30.802 | 50.104 | 38.826 |
| Kabupaten Ketapang     | 36.631 | 64.061 | 61.070 |
| Kabupaten Sintang      | 9.416  | 21.055 | 13.357 |
| Kabupaten Kapuas Hulu  | 12.652 | 14.459 | 13.740 |
| Kabupaten Sekadau      | 12.989 | 20.276 | 17.710 |
| Kabupaten Melawi       | 2.416  | 6.881  | 5.782  |
| Kabupaten Kayong Utara | 27.160 | 24.939 | 28.973 |

| Kabupaten / Kota        | 2018           | 2019           | 2020           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabupaten Kubu Raya     | 54.412         | 68.539         | 63.321         |
| Kota Pontianak          | 507            | 278            | 420            |
| Kota Singkawang         | 5.975          | 7.244          | 8.117          |
| <b>Kalimantan Barat</b> | <b>366.098</b> | <b>499.012</b> | <b>457.987</b> |

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018-2020) Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah tertinggi kedua penghasil beras setelah Kabupaten Sambas, dengan jumlah produksi beras mencapai 63.321 ton di tahun 2020 atau sebesar 14 persen dari total produksi beras Provinsi Kalimantan Barat.

Selain keunggulan di bidang pertanian, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki keunggulan di bidang perkebunan yaitu salah satunya perkebunan kelapa. Kabupaten Kubu Raya merupakan sentra penghasil kelapa terbesar di Kalimantan Barat.

**Tabel 2.88.**  
**Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Kelapa Dalam Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019**

| Kab/Kota     | Luas Areal Menurut Keadaan Tanaman (Ha) |          |           | Total Luas Areal (Ha) | Jumlah Produksi (Ton) | Rerata Produksi (Kg/Ha/Thn) | Jumlah Petani (KK) |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|              | Tanaman                                 |          |           |                       |                       |                             |                    |
|              | Muda                                    | Produksi | Tua/Rusak |                       |                       |                             |                    |
| Sambas       | 2.080                                   | 15.636   | 4.768     | 22.484                | 13.596                | 870                         | 12.234             |
| Bengkayang   | 675                                     | 3.024    | 578       | 4.277                 | 2.623                 | 867                         | 5.163              |
| Landak       | -                                       | -        | -         | -                     | -                     | -                           | -                  |
| Mempawah     | 1.730                                   | 12.950   | 5.008     | 19.688                | 16.937                | 1.308                       | 14.974             |
| Sanggau      | 30                                      | 228      | 362       | 620                   | 147                   | 645                         | 3.173              |
| Ketapang     | 390                                     | 2.443    | 1.170     | 4.003                 | 1.730                 | 708                         | 7.106              |
| Sintang      | -                                       | 386      | 322       | 708                   | 144                   | 373                         | 1.378              |
| Kapuas Hulu  | 3                                       | 105      | 30        | 138                   | 21                    | 200                         | 231                |
| Sekadau      | -                                       | 3        | 10        | 13                    | 1                     | 333                         | 45                 |
| Melawi       | 47                                      | 402      | 233       | 682                   | 86                    | 214                         | 1.319              |
| Kayong Utara | 1.170                                   | 5.917    | 709       | 7.796                 | 5.330                 | 901                         | 6.530              |
| Kubu Raya    | 1.772                                   | 32.489   | 2.566     | 36.827                | 39.105                | 1.204                       | 11.639             |
| Singkawang   | 237                                     | 1.952    | 541       | 2.730                 | 1.581                 | 810                         | 2.367              |
| TOTAL        | 8.134                                   | 75.535   | 16.297    | 99.966                | 81.301                | 1.076                       | 66.159             |

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat untuk perkebunan tanaman jenis kelapa dalam, kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan luas areal dan jumlah produksi kelapa dalam terbesar di Kalimantan Barat. Luas areal perkebunan sebesar 36.827 Ha dan total produksi kelapa dalam yang dihasilkan sebanyak 39.105 ton (angka sementara). Secara persentase kabupaten Kubu Raya menyumbangkan sebesar 48 persen dari keseluruhan produksi kelapa dalam yang dihasilkan di provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk luas areal sebesar 37 persen dari total keseluruhan areal lahan perkebunan kelapa dalam di provinsi Kalimantan Barat.

Jenis tanaman sayur dan buah semusim yang menjadi komoditas utama Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 adalah ketimun, kacang panjang dan semangka. Produksi ketimun pada tahun 2020 sebesar 13.858 kuintal, luas panen sebesar 271 hektar dengan demikian produktivitasnya mencapai 51,13 kuintal/hektar. Untuk komoditi kacang panjang memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 6.282 kuintal, 232 hektar dan 27,08 kuintal/hektar. Sedangkan komoditi semangka memiliki produksi, luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 6.230 kuintal, 133 hektar dan 46,84 kuintal/hektar.

**Tabel 2.89.**  
**Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan Semusim di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Jenis Produksi | Luas Panan (Ha) | Produksi Panen (Kuintal) | Rata-Rata Produksi (Ton) |
|-----|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Bawang Daun    | 67,00           | 1.052,00                 | 15,70                    |
| 2   | Bawang Merah   | 6,00            | 78,00                    | 13,00                    |
| 3   | Bawang Putih   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| 4   | Bayam          | 19,00           | 122,00                   | 6,42                     |
| 5   | Cabai Besar    | 77,00           | 856,00                   | 11,12                    |
| 6   | Cabai Rawit    | 226,00          | 3.255,00                 | 14,40                    |
| 7   | Kacang Panjang | 232,00          | 6.282,00                 | 27,08                    |
| 8   | Kangkung       | 95,00           | 1.048,00                 | 11,03                    |
| 9   | Kentang        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                     |
| 10  | Ketimun        | 271,00          | 13.858,00                | 51,14                    |
| 11  | Kubis          | 1,00            | 5,00                     | 5,00                     |
| 12  | Melon          | 13,00           | 307,00                   | 23,62                    |
| 13  | Kol            | 34,00           | 347,00                   | 10,21                    |
| 14  | Semangka       | 133,00          | 6.230,00                 | 46,84                    |

| No. | Jenis Produksi | Luas Panan (Ha) | Produksi Panen (Kuintal) | Rata-Rata Produksi (Ton) |
|-----|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 15  | Terung         | 96,00           | 774,00                   | 8,06                     |
| 16  | Tomat          | 51,00           | 660,00                   | 12,94                    |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Untuk tanaman perkebunan, dibagi menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan usaha/hukum di atas tanah negara dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang, sedangkan diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Tanaman yang diusahakan oleh perkebunan besar adalah kelapa sawit yang sudah memproduksi secara konsisten. Pada tahun 2019 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 184.064 ton, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 236.293 ton. Sedangkan untuk luas tanaman produktif kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 72.747 hektar, artinya rata-rata produksi kelapa sawit mencapai 32,48 kuintal per hektar.

Produksi tanaman perkebunan lainnya seperti komoditi karet, kelapa dalam, dan kopi tidak mengalami peningkatan produksi yang signifikat. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan drastis yakni tanaman kelapa hibrida yang pada tahun 2019 mencapai 2.779 ton, menurun pada tahun 2020 dengan produksi sebanyak 1.446 ton.

**Tabel 2.90.**  
**Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (Ton)**

| No. | Jenis Tanaman  | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Karet          | 14.436         | 15.353         | 15.353         | 15.380         | 15.422         |
| 2   | Kelapa Dalam   | 36.585         | 39.105         | 39.105         | 39.105         | 38.810         |
| 3   | Kelapa Hibrida | 2.983          | 2.983          | 1.584          | 2.779          | 1.446          |
| 4   | Kelapa Sawit   | 96.697         | 97.045         | 147.887        | 184.064        | 236.293        |
| 5   | Kakao          | 37             | 37             | 39             | 39             | 33             |
| 6   | Lada           | 215            | 235            | 230            | 230            | 186            |
| 7   | Kopi           | 1.348          | 1.388          | 1.368          | 1.369          | 1.292          |
| 8   | Pinang         | 527            | 608            | 608            | 608            | 652            |
| 9   | Sagu           | 52             | 89             | 89             | 89             | 2.489          |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>152.880</b> | <b>156.843</b> | <b>206.263</b> | <b>243.663</b> | <b>296.623</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Untuk peternakan, dibedakan menjadi golongan ternak besar dan golongan ternak kecil. Pada tahun 2020 untuk golongan ternak besar, produksi sapi tercatat sebanyak 278.480 kg, turun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 402.047 kg. Untuk golongan ternak kecil, produksi ternak yang terbanyak adalah babi yang mencapai 320.848 kg, sedangkan produksi kambing pada tahun 2020 adalah 52.449 kg. Sedangkan untuk produksi ayam pedaging pada juga mengalami penurunan, dari sebelumnya mencapai 13.266.551 kg pada tahun 2019, turun menjadi 9.846.466 pada tahun 2020. Untuk produksi ayam ras potong di Kabupaten Kubu Raya merupakan yang terbesar di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2.91.**  
**Produksi Ternak dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 (Kg)**

| No. | Kecamatan       | Ternak Besar   |              | Ternak Kecil   |               |
|-----|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|     |                 | Sapi           | Kerbau       | Babi           | Kambing       |
| 1   | Batu Ampar      | 8.499          | -            | 3.419          | 2.917         |
| 2   | Terentang       | 5.463          | 4.400        | 2.512          | 1.756         |
| 3   | Kubu            | 10.927         | -            | -              | 4.050         |
| 4   | Teluk Pakedai   | 10.623         | -            | 4.954          | 2.223         |
| 5   | Sungai Kakap    | 17.604         | -            | 1.256          | 6.599         |
| 6   | Rasau Jaya      | 13.507         | -            | 54.498         | 5.310         |
| 7   | Sungai Raya     | 201.082        | -            | 5.234          | 12.942        |
| 8   | Sungai Ambawang | 8.802          | -            | 217.155        | 15.590        |
| 9   | Kuala Mandor B  | 1.973          | -            | 31.820         | 1.062         |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>278.480</b> | <b>4.400</b> | <b>320.848</b> | <b>52.449</b> |
|     | 2 0 1 9         | 402.047        | 12.480       | 655.723        | 45.496        |
|     | 2 0 1 8         | 398.066        | 5.000        | 375.846        | 44.788        |
|     | 2 0 1 7         | 283.032        | 3.000        | 360.065        | 52.647        |
|     | 2 0 1 6         | 221.266        | 5.200        | 171.659        | 9.020         |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.92.**  
**Produksi Unggas dan Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 (Kg)**

| No. | Kecamatan       | Ayam Ras         |                | Ayam Buras       | Itik          |
|-----|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|     |                 | Pedaging         | Petelur        |                  |               |
| 1   | Batu Ampar      | 102.500          | -              | 113.369          | 890           |
| 2   | Terentang       | 23.340           | 425            | 7.809            | 392           |
| 3   | Kubu            | 88.087           | -              | 569.160          | 690           |
| 4   | Teluk Pakedai   | 180.943          | -              | 40.210           | 3.603         |
| 5   | Sungai Kakap    | 497.133          | -              | 321.574          | 8.460         |
| 6   | Rasau Jaya      | 4.126.114        | 70.560         | 368.500          | 1.400         |
| 7   | Sungai Raya     | 1.520.895        | -              | 52.827           | 3.130         |
| 8   | Sungai Ambawang | 2.565.626        | 189.840        | 87.039           | 4.026         |
| 9   | Kuala Mandor B  | 741.828          | -              | 100.330          | 2.907         |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>9.846.466</b> | <b>260.825</b> | <b>1.660.818</b> | <b>25.498</b> |
|     | 2 0 1 9         | 13.266.551       | 359.520        | 1.646.287        | 31.911        |
|     | 2 0 1 8         | 16.293.403       | 206.640        | 1.653.089        | 24.725        |
|     | 2 0 1 7         | 13.866.532       | 85.445         | 1.514.908        | 28.276        |
|     | 2 0 1 6         | 12.217.665       | 32.760         | 1.530.209        | 11.785        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.93.**  
**Produksi Daging Menurut Jenis Ternak**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 (Ton)**

| No.    | Jenis Ternak      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | Sapi              | 221    | 283    | 398    | 402    | 278    |
| 2      | Kambing           | 9      | 53     | 44     | 45     | 52     |
| 3      | Babi              | 172    | 360    | 375    | 655    | 320    |
| 4      | Ayam Buras        | 1.530  | 1.515  | 1.653  | 1.645  | 1.660  |
| 5      | Ayam Ras Pedaging | 12.593 | 13.701 | 16.293 | 13.266 | 9.848  |
| 6      | Ayam Ras Petelur  | 33     | 190    | 206    | 359    | 260    |
| 7      | Itik/Itik Manila  | 12     | 28     | 24     | 31     | 25     |
| Jumlah |                   | 10.445 | 14.570 | 18.993 | 16.403 | 12.443 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.94.**  
**Produksi Daging Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (Ton)**

| No. | Kabupaten/Kota         | Sapi         | Kambing    | Babi          | Ayam Buras   | Ayam Ras Pedaging | Ayam Ras Petelur | Itik/Itik Manila |
|-----|------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1   | Kabupaten Sambas       | 897          | 73         | 202           | 367          | 3.933             | 293              | 43               |
| 2   | Kabupaten Bengkayang   | 151          | 35         | 469           | 56           | 3.011             | 78               | 4                |
| 3   | Kabupaten Landak       | 144          | 20         | 2.206         | 76           | 3.374             | 8                | 1                |
| 4   | Kabupaten Mempawah     | 567          | 21         | 690           | 15           | 690               | 3                | 18               |
| 5   | Kabupaten Sanggau      | 484          | 26         | 1.741         | 237          | 2.189             | 6                | 14               |
| 6   | Kabupaten Ketapang     | 394          | 14         | 374           | 145          | 4.382             | 8                | 29               |
| 7   | Kabupaten Sintang      | 334          | 32         | 494           | 70           | 4.432             | 4                | 7                |
| 8   | Kabupaten Kapuas Hulu  | 139          | 3          | 210           | 155          | 1.017             | -                | 1                |
| 9   | Kabupaten Sekadau      | 174          | 6          | 444           | 82           | 1.623             | 8                | 3                |
| 10  | Kabupaten Melawi       | 145          | 8          | 159           | 37           | 820               | -                | 2                |
| 11  | Kabupaten Kayong Utara | 87           | 2          | 124           | 107          | 620               | 1                | 20               |
| 12  | Kabupaten Kubu Raya    | 287          | 46         | 387           | 1.703        | 16.785            | 213              | 25               |
| 13  | Kota Pontianak         | 1.126        | 122        | 893           | 77           | 8.912             | -                | 96               |
| 14  | Kota Singkawang        | 474          | 13         | 3.083         | 80           | 4.303             | 2.562            | 32               |
|     | <b>2 0 2 0</b>         | <b>5.403</b> | <b>421</b> | <b>11.476</b> | <b>3.207</b> | <b>56.091</b>     | <b>3.184</b>     | <b>295</b>       |
|     | 2 0 1 9                | 5.445        | 422        | 12.078        | 3.619        | 53.394            | 3.084            | 286              |
|     | 2 0 1 8                | 5.535        | 421        | 11.620        | 3.175        | 54.943            | 3.151            | 670              |
|     | 2 0 1 7                | 5.123        | 465        | 11.274        | 3.470        | 48.723            | 2.256            | 256              |
|     | 2 0 1 6                | 5.306        | 358        | 18.058        | 3.744        | 40.771            | 2.367            | 221              |

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2018

Adapun data kelompok tani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Kubu Raya per kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.95.**  
**Data Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jumlah Desa | Jenis        |            |                                    |
|-----|-----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------------|
|     |                 |             | Poktan       | Gapoktan   | Jumlah Anggota Poktan dan Gapoktan |
| 1   | Batu Ampar      | 15          | 198          | 15         | 4.222                              |
| 2   | Terentang       | 10          | 140          | 13         | 2.573                              |
| 3   | Kubu            | 20          | 215          | 18         | 5.390                              |
| 4   | Teluk Pakedai   | 14          | 102          | 15         | 2.419                              |
| 5   | Sungai Kakap    | 13          | 336          | 29         | 7.893                              |
| 6   | Rasau Jaya      | 6           | 124          | 7          | 3.011                              |
| 7   | Sungai Raya     | 20          | 337          | 29         | 7.880                              |
| 8   | Sungai Ambawang | 15          | 300          | 34         | 6.801                              |
| 9   | Kuala Mandor B  | 5           | 73           | 5          | 1.771                              |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>118</b>  | <b>1.825</b> | <b>165</b> | <b>41.960</b>                      |
|     | 2 0 1 9         | 121         | 1.688        | 154        | 35.233                             |
|     | 2 0 1 8         | 118         | 1.451        | 152        | 31.143                             |
|     | 2 0 1 7         | 118         | 1.451        | 149        | 26.045                             |
|     | 2 0 1 6         | 118         | 1.332        | 142        | 30.701                             |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.96.**  
**Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jumlah Desa | PNS | Non PNS | Swadaya |
|-----|-----------------|-------------|-----|---------|---------|
| 1   | Batu Ampar      | 15          | 6   | 1       | 9       |
| 2   | Terentang       | 10          | 4   | 2       | 7       |
| 3   | Kubu            | 20          | 9   | -       | 10      |
| 4   | Teluk Pakedai   | 14          | 4   | 1       | 8       |
| 5   | Sungai Kakap    | 13          | 10  | -       | 14      |
| 6   | Rasau Jaya      | 6           | 3   | 2       | 7       |
| 7   | Sungai Raya     | 20          | 7   | 4       | 19      |
| 8   | Sungai Ambawang | 15          | 7   | 1       | 17      |

| No.    | Kecamatan      | Jumlah Desa | PNS | Non PNS | Swadaya |
|--------|----------------|-------------|-----|---------|---------|
| 9      | Kuala Mandor B | 5           | 4   | 1       | 7       |
| Jumlah |                | 118         | 54  | 12      | 98      |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

#### 2.3.3.4. Kehutanan

Di Kabupaten Kubu Raya terdapat 4 (empat) jenis hutan yang termasuk dalam Areal Dalam Kawasan yang luasannya mengalami perubahan dari tahun 2016. Untuk Hutan Lindung (HL), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 171.477 Ha menjadi 143.124 Ha. Untuk Hutan Produksi (HP), luas kawasannya mengalami penambahan dari 98.104 Ha menjadi 134.136 Ha. Untuk Hutan Produksi Konversi (HPK), luas kawasannya mengalami pengurangan dari 53.042 Ha menjadi 27.877 Ha. Sedangkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), luas kawasannya mengalami penambahan dari 65.770 Ha menjadi 66.916 Ha.

**Tabel 2.97.**  
**Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Kubu Raya (Ha)**  
**Tahun 2020**

| No.                            | Jenis Kawasan Hutan             | Luas (Ha) |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1                              | Hutan Lindung                   | 143.124   |
| 2                              | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | -         |
| 3                              | Hutan Produksi Terbatas         | 66.916    |
| 4                              | Hutan Produksi Tetap            | 134.136   |
| 5                              | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | 27.877    |
| 6                              | Perairan                        | 13.054    |
| Jumlah Luas Hutan dan Perairan |                                 | 385.107   |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

#### 2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan di segala bidang pembangunan. Hal tersebut akan meningkatkan aktifitas pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang terbatas. Dengan kondisi tersebut maka perlu direncanakan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan baik untuk menjamin ketersediaannya yang

berkelanjutan guna kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Potensi pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.98.**  
**Potensi Pertambangan dan Penggalian Dirinci Menurut Jenis Bahan Tambang dan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Kecamatan       | Jenis Tambang/Galian                                           | Keterangan |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Batu Ampar      | Andesit/Dasit (AM), Granit/Diorit/Granodiorit, Batuan, Bauksit | -          |
| 2   | Terentang       | Bauksit, Batu Bara, Pasir Sungai                               | -          |
| 3   | Kubu            | Granit, Pasir Sungai, Batuan, Tanah Urug                       | -          |
| 4   | Teluk Pakedai   | Pasir Kuarsa, Tanah Urug                                       | -          |
| 5   | Sungai Kakap    | Gas Methan (CH4)                                               | -          |
| 6   | Rasau Jaya      | Gambut                                                         | -          |
| 7   | Sungai Raya     | Pasir Sungai, Gambut                                           | -          |
| 8   | Sungai Ambawang | Bauksit, Pasir Kuarsa, Gambut                                  | -          |
| 9   | Kuala Mandor B  | Pasir Sungai                                                   | -          |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.3.6. Perdagangan**

Kabupaten Kubu Raya secara geografis berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup penting. Berdasarkan data perusahaan perdagangan di Kabupaten Kubu Raya yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sejumlah 180 perusahaan perdagangan dengan jumlah SIUP terbesar dimiliki oleh jenis pedagang menengah sejumlah 99 usaha atau 55,00 persen dari total SIUP yang dikeluarkan.

**Tabel 2.99.**  
**Banyaknya Perusahaan Perdagangan yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019**

| No. | Kecamatan     | Perdagangan Besar | Perdagangan Menengah | Perdagangan Kecil | Perdagangan Mikro | Jumlah    |
|-----|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1   | Batu Ampar    | -                 | -                    | -                 | -                 | -         |
| 2   | Terentang     | -                 | -                    | -                 | -                 | -         |
| 3   | Kubu          | -                 | -                    | -                 | -                 | -         |
| 4   | Teluk Pakedai | -                 | 1                    | -                 | -                 | <b>1</b>  |
| 5   | Sungai Kakap  | 2                 | 8                    | -                 | -                 | <b>10</b> |
| 6   | Rasau Jaya    | 2                 | -                    | -                 | -                 | <b>2</b>  |

| No. | Kecamatan       | Perdagangan Besar | Perdagangan Menengah | Perdagangan Kecil | Perdagangan Mikro | Jumlah     |
|-----|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 7   | Sungai Raya     | 41                | 91                   | 11                | -                 | <b>143</b> |
| 8   | Sungai Ambawang | 11                | 9                    | 3                 | -                 | <b>23</b>  |
| 9   | Kuala Mandor B  | -                 | -                    | -                 | -                 | -          |
|     | <b>2 0 1 9</b>  | <b>56</b>         | <b>109</b>           | <b>14</b>         | -                 | <b>179</b> |
|     | 2 0 1 8         | 9                 | 65                   | -                 | -                 | 74         |
|     | 2 0 1 7         | 104               | 14                   | 158               | -                 | 276        |
|     | 2 0 1 6         | 120               | 35                   | 234               | -                 | 389        |
|     | 2 0 1 5         | 101               | 25                   | 289               | -                 | 415        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2019

**Tabel 2.100.**  
**Banyaknya Perusahaan UTTP Menurut Jumlah Pedagang yang Masuk Dalam Program Tera dan Tera Ulang Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Jumlah Pedagang | Jumlah UTTP  |
|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| 1   | Batu Ampar      | 278             | 490          |
| 2   | Terentang       | 74              | 154          |
| 3   | Kubu            | 59              | 59           |
| 4   | Teluk Pakedai   | 59              | 76           |
| 5   | Sungai Kakap    | 349             | 569          |
| 6   | Rasau Jaya      | 267             | 229          |
| 7   | Sungai Raya     | 267             | 441          |
| 8   | Sungai Ambawang | 65              | 89           |
| 9   | Kuala Mandor B  | 107             | 153          |
|     | <b>2 0 2 0</b>  | <b>1.525</b>    | <b>2.260</b> |
|     | 2 0 1 9         | 1.525           | 2.260        |
|     | 2 0 1 8         | 1.525           | 2.260        |
|     | 2 0 1 7         | 1.525           | 2.260        |
|     | 2 0 1 6         | 1.774           | 2.966        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.3.3.7. Perindustrian**

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sektor industri yang berkembang di Kabupaten Kubu Raya adalah sektor industri kecil yang didominasi oleh Industri Makan dan Minum.

Jumlah perusahaan Industri Besar dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 561 perusahaan, dimana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang hanya 485 perusahaan/usaha, atau meningkat 15,67 persen. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap perusahaan Industri Besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 tercatat sebesar 17.898 orang, naik sekitar 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai investasinya pada kelompok industri kecil menengah, dari nilai total investasi tahun 2020 sebesar 94,72 miliar rupiah, dengan nilai investasi terbesar pada industri makanan sebesar 23,17 miliar rupiah. Sedangkan pada golongan industri besar, nilai investasi terbesar terdapat pada jenis usaha industri kelapa sawit dengan nilai investasi 427 miliar rupiah atau 28,67 persen dari total nilai investasi industri besar di tahun 2020 yang berjumlah 1.489,52 miliar rupiah.

**Tabel 2.101.**  
**Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Industri Kecil Menengah Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Jenis Industri                             | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.) |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1   | Makanan                                    | 343        | 1.069        | 23.170.654.000        |
| 2   | Minuman                                    | 25         | 140          | 5.613.076.000         |
| 3   | Pengolahan Tembakau                        | 2          | 12           | 381.600.000           |
| 4   | Pakaian Jadi                               | 1          | 4            | 36.750.000            |
| 5   | Tekstil                                    | 14         | 43           | 253.300.000           |
| 6   | Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki     | 1          | 10           | 48.950.000            |
| 7   | Barang dari Kayu, Gabus, Rotan dan Bambu   | 56         | 332          | 2.401.864.000         |
| 8   | Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman    | 10         | 17           | 237.146.000           |
| 9   | Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia    | 6          | 29           | 4.172.000.000         |
| 10  | Industri Karet dan Bahan dari Karet        | 2          | 8            | 168.000.000           |
| 11  | Industri Barang dari Plastik               | 3          | 42           | 1.595.000.000         |
| 12  | Barang Galian Bukan Logam                  | 6          | 118          | 17.404.318.000        |
| 13  | Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 20         | 109          | 15.194.788.000        |

| No. | Jenis Industri                                           | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.) |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 14  | Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer    | 2          | 4            | 200.000.000           |
| 15  | Industri Alat Angkutan Lainnya                           | 5          | 38           | 10.139.197.000        |
| 16  | Furniture                                                | 29         | 156          | 3.514.178.000         |
| 17  | Pengolahan Lainnya                                       | 30         | 77           | 109.138.000           |
| 18  | Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan         | 4          | 58           | 2.288.745.000         |
| 19  | Industri Mesin dan Perlengkapannya                       | 1          | 5            | 200.000.000           |
| 20  | Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional | 1          | 24           | 7.600.000.000         |
|     | <b>2 0 2 0</b>                                           | <b>561</b> | <b>2.295</b> | <b>94.728.704.000</b> |
|     | 2 0 1 9                                                  | 485        | 1.532        | 10.724.351.000        |
|     | 2 0 1 8                                                  | 462        | 1.611        | 11.945.236.000        |
|     | 2 0 1 7                                                  | 457        | 1.576        | 10.607.236.000        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.102.**  
**Banyaknya Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Industri Besar**  
**Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020**

| No. | Jenis Industri           | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (Rp.) |
|-----|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1   | Kayu Lapis               | 7          | 5.760        | 177.832.560.000       |
| 2   | Sawmill                  | 17         | 3.389        | 52.379.525.000        |
| 3   | Dowel, Moulding          | 20         | 4.367        | 61.786.119.000        |
| 4   | Furniture                | 6          | 532          | 10.279.807.000        |
| 5   | <i>Particle Board</i>    | 5          | 1.516        | 175.448.200.000       |
| 6   | Pengetaman               | 3          | 32           | 540.378.000           |
| 7   | Kusen/Daun Pintu Jendela | 3          | 171          | 20.556.700.000        |
| 8   | Baja Lapis Seng          | 2          | 92           | 12.196.851.000        |
| 9   | Galangan Kapal           | 4          | 144          | 12.728.225.000        |
| 10  | Kimia                    | 7          | 367          | 55.953.775.000        |
| 11  | <i>Crum Rubber</i>       | 3          | 528          | 226.120.000.000       |
| 12  | Remiling Karet           | 2          | 262          | 193.136.100.000       |
| 13  | Percetakan               | 2          | 117          | 16.534.120.000        |
| 14  | Garam Beryodium          | 1          | 29           | 162.000.000           |

| No. | Jenis Industri                                      | Unit Usaha | Tenaga Kerja  | Nilai Investasi (Rp.)    |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 15  | Air Minum Dalam Kemasan                             | 3          | 14            | 1.071.000.000            |
| 16  | Industri Kelapa Sawit                               | 3          | 251           | 427.230.432.000          |
| 17  | Industri Penyosohan Beras                           | 1          | 16            | 14.075.000.000           |
| 18  | Industri Alat Angkut Lainnya                        | 1          | 25            | 218.000.000              |
| 19  | Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 3          | 67            | 15.599.612.000           |
| 20  | Industri Barang dari Semen, Kapus, Gips dan Asbes   | 3          | 152           | 10.950.000.000           |
| 21  | Industri Mainan Anak                                | 1          | 52            | 3.416.454.000            |
| 22  | Industri Pengolahan Es Krim                         | 1          | 15            | 1.311.750.000            |
|     | <b>2 0 2 0</b>                                      | <b>98</b>  | <b>17.898</b> | <b>1.489.526.507.000</b> |
|     | 2 0 1 9                                             | 97         | 17.763        | 1.402.296.076.000        |
|     | 2 0 1 8                                             | 97         | 16.863        | 1.402.292.584.000        |
|     | 2 0 1 7                                             | 97         | 17.763        | 1.402.296.176.000        |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

### 2.3.3.8. Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan diadakannya transmigrasi adalah untuk meratakan penyebaran penduduk di wilayah nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib

Realisasi dari target yang ditetapkan belum memenuhi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
  - a. Desa Sungai Radak Dua SP 1, target 224 dan realisasi 200 (tahun 2006/2007)
  - b. Desa Sungai Radak Dua SP 2, target 275 dan realisasi 205 (tahun 2007/2009)
  - c. Desa Terentang Hulu SP 1, target 250 dan realisasi 200 (tahun 2010/2011)

Realisasi dari target yang ditetapkan yang memenuhi/melebihi adalah :

1. Kecamatan Terentang :
  - a. Desa Permata, target 300 dan realisasi 300 (tahun 2012)
  - b. Desa Sungai Radak Satu SP 1, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2013)
2. Kecamatan Kubu :
  - a. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2004)
  - b. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2006)
  - c. Desa Dabung, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2007)
3. Kecamatan Sungai Raya :
  - a. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2010)
  - b. Desa Sungai Bulan C, target 100 dan realisasi 100 (tahun 2012)
  - c. Desa Sungai Bulan C, target 40 dan realisasi 40 (tahun 2014)
4. Kecamatan Teluk Pakedai :
  - a. Desa Teluk Pakedai Hulu, target 100 dan realisasi 150 (tahun 2012)

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita. Konsumsi per kapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (*basic needs*), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, serta penunjang lainnya.

Dengan angka kondisi ekonomi makro yang dibayangi dengan inflasi sebesar 5,17 persen akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya cenderung meningkat, dibandingkan dengan tahun 2015 dimana dengan inflasi sebesar 6,63 persen pengeluaran masyarakat hanya sebesar 9.890,21. Pada tahun dengan rasio pengeluaran Rumah Tangga sebesar 116,21 persen, yang berarti kenaikan TDL, kendatipun berdampak pada daya beli akan tetapi relatif tidak terlalu mengganggu pengeluaran penduduk. Dengan membandingkan rata-rata pengeluaran terhadap inflasi, terlihat bahwa angka inflasi berpengaruh besar terhadap tingkat pengeluaran penduduk

**Tabel 2.103.**  
**Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

| No. | Uraian               | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Total Pengeluaran RT | 11.052,21  | 12.253,38  | 13.320,77 | 14.224,68 | 14.474,97 |
| 2.  | Jumlah RT            | 128.435,00 | 131.161,00 | N/A       | N/A       | N/A       |
| 3.  | Rasio                | 116,21     | 107,04     | N/A       | N/A       | N/A       |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Sementara itu, rasio pengeluaran untuk keperluan non rumah tangga berfluktuatif dan rata-rata pengeluaran non makanan selama tahun 2019-2020 rasionya sebesar 1,85 persen.

**Tabel 2.104.**  
**Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Rumah Tangga Non Makanan 2019 dan 2020**

| No. | Uraian                          | 2019       | 2020         |
|-----|---------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Total Pengeluaran RT Non Pangan | 446.349,00 | 481.387,00   |
| 2.  | Total Pengeluaran               | 963.157,00 | 1.015.328,00 |
| 3.  | Rasio                           | 2,16       | 2,11         |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

**Tabel 2.105.**  
**Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dan 2020**

| No | Kelompok Barang | 2019           | 2020           |
|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | <b>Makanan</b>  | <b>516.608</b> | <b>533.941</b> |
|    | a. Padi-padian  | 67.508         | 71.855         |

| No            | Kelompok Barang                         | 2019           | 2020             |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
|               | b. Umbi-umbian                          | 3.925          | 4.404            |
|               | c. Ikan                                 | 60.156         | 59.532           |
|               | d. Daging                               | 18.897         | 18.312           |
|               | e. Telur                                | 30.517         | 32.143           |
|               | f. Sayur-sayuran                        | 33.695         | 38.139           |
|               | g. Kacang-kacangan                      | 7.561          | 8.914            |
|               | h. Buah-buahan                          | 15.968         | 15.891           |
|               | i. Minyak dan lemak                     | 11.281         | 13.248           |
|               | j. Bahan minuman                        | 17.719         | 18.947           |
|               | k. Bumbu-bumbuan                        | 13.041         | 12.332           |
|               | l. Konsumsi lainnya                     | 12.561         | 12.491           |
|               | m. Makanan dan minuman                  | 142.860        | 151.356          |
|               | n. Rokok                                | 75.919         | 76.376           |
| <b>2.</b>     | <b>Non Makanan</b>                      | <b>446.349</b> | <b>481.387</b>   |
|               | a. Perumahan dan fasilitas rumah tangga | 249.849        | 247.485          |
|               | b. Barang dan jasa                      | 99.116         | 116.674          |
|               | c. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala | 31.573         | 28.446           |
|               | d. Barang-barang tahan lama             | 22.471         | 28.432           |
|               | e. Pajak dan asuransi                   | 26.544         | 47.908           |
|               | f. Keperluan pesta dan upacara          | 16.995         | 12.451           |
| <b>JUMLAH</b> |                                         | <b>963.157</b> | <b>1.015.328</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

Di sisi lain besarnya angka konsumsi berarti kemampuan investasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi relatif kecil, karena sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari prespektif ekonomi pembangunan (P.Todaro), besarnya angka konsumsi justru kontra produktif dengan kemajuan daerah. Persentase pengeluaran makanan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 mengalami peningkatan sementara pengeluaran non makanan mengalami penurunan. Dengan melihat perbandingan pengeluaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa indeks kesejahteraan penduduk Kabupaten Kubu Raya secara bertahap sudah relatif semakin membaik.

**Tabel 2.106.**  
**Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**  
**Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kubu Raya 2019-2020**

| No. | Uraian                             | 2019  | 2020  |
|-----|------------------------------------|-------|-------|
| 1.  | Persentase Pengeluaran Makanan     | 53,64 | 52,59 |
| 2.  | Persentase Pengeluaran Non Makanan | 46,34 | 47,41 |

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021

**2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

**2.4.2.1. Ketersediaan Air Bersih**

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melaui jaringan Perumda Air Minum Tirta Raya mengalami peningkatan dari 2016-2020. Permasalahan utama Perumda Air Minum Tirta Raya selain dari aspek finansial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

**Tabel 2.107.**  
**Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih**

| No. | Persentase Menggunakan Air Bersih             | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.  | Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Raya | 14.871 | 15.544 | 16.734 | 17.446 | 251.887 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**2.4.2.2. Fasilitas Listrik**

Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut data PT. PLN (Persero) Wilayah V Rayon Rasau Jaya pada tahun 2017, banyaknya produksi listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4.814.392 KWH dengan jumlah daya tersambung sebesar 29.491.256 VA. Adapun jumlah pelanggan untuk tahun 2017 sebanyak 40.440 pelanggan, naik 5,80 persen dibandingkan tahun 2016.

**Tabel 2.108.**  
**Jumlah RT yang telah teraliri dan belum teraliri listrik PLN**  
**Tahun 2020**

| No. | Kecamatan                  | Jumlah RT     | Jumlah RT yang Sudah Teraliri PLN | Jumlah RT yang Belum Teraliri PLN | Persentase (%) |
|-----|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1   | Batu Ampar                 | 8.152         | 5.958                             | 2.194                             | 73,09          |
| 2   | Terentang                  | 1.072         | 0                                 | 1.072                             | 0,00           |
| 3   | Kubu                       | 112           | 0                                 | 112                               | 0,00           |
| 4   | Teluk Pakedai              | 383           | 0                                 | 383                               | 0,00           |
| 5   | Sungai Kakap               | 528           | 203                               | 325                               | 38,45          |
| 6   | Rasau Jaya                 | 4             | 0                                 | 4                                 | 0,00           |
| 7   | Sungai Raya                | 0             | 0                                 | 0                                 | 0,00           |
| 8   | Sungai Ambawang            | 0             | 0                                 | 0                                 | 0,00           |
| 9   | Kuala Mandor B             | 1.640         | 1.114                             | 526                               | 67,93          |
|     | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> | <b>11.891</b> | <b>7.275</b>                      | <b>4.616</b>                      | <b>61,18</b>   |

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kubu Raya, 2021

**Tabel 2.109.**  
**Daftar Kecamatan yang Belum/Sudah Menyampaikan**  
**Data Kebutuhan Listrik (PLN)**  
**Tahun 2020**

| No. | Kecamatan       | Belum | Sudah | Lengkap/Belum Lengkap |
|-----|-----------------|-------|-------|-----------------------|
| 1   | Batu Ampar      |       | √     | Belum Lengkap         |
| 2   | Terentang       |       | √     | Belum Lengkap         |
| 3   | Kubu            |       | √     | Belum Lengkap         |
| 4   | Teluk Pakedai   |       | √     | Belum Lengkap         |
| 5   | Sungai Kakap    |       | √     | Lengkap               |
| 6   | Rasau Jaya      |       | √     | Lengkap               |
| 7   | Sungai Raya     |       | √     | Lengkap               |
| 8   | Sungai Ambawang |       | √     | Belum Lengkap         |
| 9   | Kuala Mandor B  |       | √     | Belum Lengkap         |

Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kubu Raya, 2021

Tabel 2.110.

Persentase Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Untuk Memasak di Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2020

| No. | Rincian                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Sumber Penerangan         |       |       |       |       |       |
|     | a. Listrik PLN            | 97,57 | 97,54 | 92,30 | 97,00 | 97,50 |
|     | b. Listrik Non-PLN        | 1,75  | 1,71  | 7,50  | 2,50  | 1,20  |
|     | c. Bukan Listrik          | 0,68  | 0,75  | 0,20  | 0,50  | 1,30  |
| 2   | Bahan Bakar Untuk Memasak |       |       |       |       |       |
|     | a. Listrik                | -     | -     | -     | 0,50  | -     |
|     | b. Gas/Elpiji             | 96,24 | 95,71 | 93,30 | 94,50 | 95,10 |
|     | c. Minyak Tanah           | -     | 0,33  | 0,20  | 0,60  | -     |
|     | d. Arang/Briket           | -     | -     | -     | -     | -     |
|     | e. Kayu Bakar             | 3,76  | 3,76  | 6,10  | 4,40  | 5,0   |
|     | f. Lainnya                | -     | -     | 0,40  | -     | -     |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Dengan makin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kubu Raya, menyebabkan bertambahnya wisatawan yang datang. Dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kubu Raya, otomatis meningkatkan kebutuhan akan tempat menginap.

Tabel 2.111.

Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Penginapan

| No. | Uraian               | Tahun |      |      |      |      |
|-----|----------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                      | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1   | Hotel Berbintang     | 3     | 3    | 3    | 3    | 4    |
| 2   | Hotel Non Berbintang | 1     | 2    | 2    | 2    | 2    |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Tabel 2.112.

Jumlah Akomodasi Hotel Berbintang Menurut Bulan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

| No. | Bulan    | Hotel | Kamar | Tamu  |
|-----|----------|-------|-------|-------|
| 1   | Januari  | 3     | 171   | 2.095 |
| 2   | Pebruari | 3     | 171   | 2.024 |
| 3   | Maret    | 3     | 171   | 1.329 |
| 4   | April    | 3     | 171   | 629   |

| No.   | Bulan     | Hotel | Kamar | Tamu   |
|-------|-----------|-------|-------|--------|
| 5     | Mei       | 3     | 171   | 538    |
| 6     | Juni      | 4     | 210   | 1.012  |
| 7     | Juli      | 4     | 210   | 1.760  |
| 8     | Agustus   | 4     | 210   | 1.759  |
| 9     | September | 4     | 210   | 1.461  |
| 10    | Oktober   | 4     | 210   | 2.232  |
| 11    | Nopember  | 4     | 210   | 2.212  |
| 12    | Desember  | 4     | 210   | 2.365  |
| Total |           |       |       | 19.416 |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

### 2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan periode 2016-2020 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.113.**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal**

| No | Indikator                                                    | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) (Juta) | 8.010.306,71       | 9.240.159,61       | 10.312.253,36      | 11.211.964,35      | 12.751.262,63      |
| 2. | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)               | 361 PMDN<br>21 PMA | 374 PMDN<br>21 PMA | 386 PMDN<br>21 PMA | 179 PMDN<br>17 PMA | 210 PMDN<br>23 PMA |

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kubu Raya, 2021

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya didukung tenaga oleh Aparatur Sipil Negara yang berkompeten. Data mengenai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kubu Raya terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.114.**  
**PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Golongan Tahun 2020**

| No. | Golongan      | Jenis Kelamin |              | Jumlah       |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|
|     |               | Laki-Laki     | Perempuan    |              |
| 1   | I             | 17            | 0            | 17           |
| 2   | II            | 321           | 427          | 748          |
| 3   | III           | 1.194         | 1.687        | 2.881        |
| 4   | IV            | 732           | 941          | 1.673        |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>2.264</b>  | <b>3.055</b> | <b>5.319</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.115.**  
**PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

| No. | Golongan                          | Jenis Kelamin |              | Jumlah       |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|     |                                   | Laki-Laki     | Perempuan    |              |
| 1   | SD                                | 24            | 0            | 24           |
| 2   | SLTP                              | 29            | 6            | 35           |
| 3   | SLTA                              | 593           | 650          | 1.243        |
| 4   | Diploma I, II/Akta I, II          | 323           | 504          | 827          |
| 5   | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 241           | 477          | 718          |
| 6   | Diploma IV/Sarjana/Doktor /Ph.D   | 1.054         | 1.418        | 2.472        |
|     | <b>Jumlah</b>                     | <b>2.264</b>  | <b>3.055</b> | <b>5.319</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.116.**  
**PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Esselonering Tahun 2020**

| No. | Tingkat Esselonering | Jenis Kelamin |            | Jumlah     |
|-----|----------------------|---------------|------------|------------|
|     |                      | Laki-Laki     | Perempuan  |            |
| 1   | Eselon V             | 0             | 0          | 0          |
| 2   | Eselon IV            | 286           | 161        | 447        |
| 3   | Eselon III           | 114           | 28         | 142        |
| 4   | Eselon II            | 24            | 4          | 28         |
| 5   | Eselon I             | 0             | 0          | 0          |
|     | <b>Jumlah</b>        | <b>424</b>    | <b>193</b> | <b>617</b> |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

**Tabel 2.117.**  
**PNS Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Jabatan Tahun 2020**

| No. | Jabatan             | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------|
|     |                     | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1   | Struktural          | 424           | 193       | 617    |
| 2   | Fungsional Tertentu | 1.116         | 1.950     | 3.066  |
| 3   | Fungsional Umum     | 724           | 911       | 1.635  |
|     | Jumlah              | 2.264         | 3.054     | 5.318  |

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

### **BAB III**

## **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Sistem perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program, kegiatan dan subkegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya mengandung makna bahwa:

1. Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Belanja Daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
3. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan pelaksanaan kebijakan belanja melalui tahapan analisis belanja, standar pelayanan minimal, standar harga satuan barang dan harga satuan pokok kegiatan atas komponen belanja tiap kegiatan, sehingga dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Kubu Raya, pada prinsipnya digunakan untuk penyelenggaran urusan wajib yang memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja yang kurang strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*no value added*) harus diminimalisir.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah

Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya khususnya Tahun 2019-2024, dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Masa lalu keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2014-2018 berdasarkan data kinerja keuangan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

**3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018**

| No.         | Uraian                                                             | Realisasi (Rp.)             |                             |                             |                             |                             | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                    | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        |                                 |
| <b>1.</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                                  | <b>1.094.841.843.919,30</b> | <b>1.293.812.364.171,48</b> | <b>1.386.340.689.953,25</b> | <b>1.404.723.995.630,05</b> | <b>1.577.257.039.764,53</b> | <b>9,73%</b>                    |
| <b>1.1.</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                      | <b>97.407.483.796,39</b>    | <b>86.469.772.434,38</b>    | <b>101.310.299.207,01</b>   | <b>152.023.127.898,99</b>   | <b>184.531.274.752,15</b>   | <b>19,34%</b>                   |
| 1.1.1.      | Penerimaan Pajak Daerah                                            | 64.729.599.444,05           | 54.285.086.430,52           | 67.629.094.584,60           | 113.686.725.465,28          | 133.593.217.033,31          | 23,51%                          |
| 1.1.2.      | Hasil Retribusi Daerah                                             | 25.180.126.655,62           | 6.003.747.900,46            | 6.645.572.802,78            | 10.900.974.165,00           | 9.374.653.868,50            | -3,86%                          |
| 1.1.3.      | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan                  | 563.736.663,41              | 1.724.724.757,82            | 2.117.382.258,00            | 3.341.143.372,00            | 4.118.712.047,00            | 77,44%                          |
| 1.1.4.      | Lain-Lain PAD yang Sah                                             | 6.934.021.033,31            | 24.456.213.345,58           | 24.918.249.561,63           | 24.094.284.896,71           | 37.444.691.803,34           | 76,67%                          |
| <b>1.2.</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                            | <b>841.715.445.482,00</b>   | <b>891.952.775.958,00</b>   | <b>1.053.065.317.850,00</b> | <b>1.043.885.758.961,00</b> | <b>1.140.511.991.712,00</b> | <b>8,10%</b>                    |
| 1.2.1.      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                            | 59.938.735.482,00           | 38.796.383.958,00           | 26.471.101.564,00           | 20.135.986.681,00           | 35.479.908.427,00           | -3,69%                          |
| 1.2.2.      | Dana Alokasi Umum                                                  | 699.700.430.000,00          | 732.770.242.000,00          | 787.062.196.000,00          | 779.055.508.000,00          | 782.647.725.000,00          | 2,89%                           |
| 1.2.3.      | Dana Alokasi Khusus                                                | 82.076.280.000,00           | 120.386.150.000,00          | 239.532.020.286,00          | 244.694.264.280,00          | 322.384.358.285,00          | 44,89%                          |
| <b>1.3.</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                        | <b>155.718.914.640,91</b>   | <b>315.389.815.779,10</b>   | <b>231.965.072.896,24</b>   | <b>208.815.108.770,06</b>   | <b>252.213.773.300,38</b>   | <b>21,72%</b>                   |
| 1.3.1.      | Pendapatan Hibah                                                   | 2.962.933.000,00            | 67.074.250.000,00           | 98.965.072.896,24           | 58.439.043.075,06           | 56.703.146.267,38           | 541,85%                         |
| 1.3.2.      | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  | 27.118.612.640,91           | 68.862.470.779,10           | 38.684.149.707,00           | 44.545.676.695,00           | 58.930.202.033,00           | 39,39%                          |
| 1.3.3.      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | -                           | 170.479.095.000,00          | 77.211.484.000,00           | -                           | -                           | -54,71%                         |
| 1.3.4.      | Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | -                           | 8.974.000.000,00            | 12.478.800.000,00           | -                           | -                           | 39,06%                          |
| 1.3.5.      | Pendapatan Lainnya                                                 | 125.637.369.000,00          | -                           | 5.000.000.000,00            | 7.500.000.000,00            | 26.250.000.000,00           | 150,00%                         |

| No.         | Uraian                                                                                                    | Realisasi (Rp.)             |                             |                             |                             |                             | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                           | 2014                        | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        |                                 |
| 1.3.6.      | Dana Desa                                                                                                 | -                           | -                           | -                           | 98.330.389.000,00           | 110.330.425.000,00          | 12,20%                          |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                                            | <b>1.095.222.447.811,57</b> | <b>1.308.457.979.940,00</b> | <b>1.312.796.446.926,06</b> | <b>1.403.224.521.931,88</b> | <b>1.538.247.120.981,21</b> | <b>9,08%</b>                    |
| <b>2.1.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                             | <b>492.507.388.266,33</b>   | <b>602.949.645.810,00</b>   | <b>701.293.442.050,00</b>   | <b>716.327.378.363,00</b>   | <b>792.622.755.434,80</b>   | <b>12,88%</b>                   |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai                                                                                           | 459.863.440.395,00          | 528.724.696.223,00          | 538.676.298.768,00          | 507.401.696.500,00          | 527.868.825.762,00          | 3,77%                           |
| 2.1.2.      | Belanja Bunga                                                                                             | -                           | -                           | -                           | -                           | 128.166.666,80              | 0,00%                           |
| 2.1.3.      | Belanja Hibah                                                                                             | 4.766.077.440,00            | 4.688.000.000,00            | 8.919.439.025,00            | 13.441.420.000,00           | 60.126.404.665,00           | 121,66%                         |
| 2.1.4.      | Belanja Bantuan Sosial                                                                                    | 2.961.527.608,33            | 1.271.525.585,00            | 825.199.000,00              | 1.295.000.000,00            | 1.612.500.000,00            | -2,68%                          |
| 2.1.5.      | Belanja Bagi Hasil Kepada<br>Provinsi/Kabupaten/Kota dan<br>Pemerintahan Desa                             | -                           | -                           | -                           | 8.184.404.600,00            | 14.040.314.328,00           | 71,55%                          |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Keuangan<br>Kepada<br>Provinsi/Kabupaten/Kota,<br>Pemerintahan Desa dan Partai<br>Politik | 24.688.805.000,00           | 68.265.424.002,00           | 145.328.885.200,00          | 180.323.787.100,00          | 188.845.249.120,00          | 79,55%                          |
| 2.1.7.      | Belanja Tidak Terduga                                                                                     | 227.537.823,00              | -                           | 7.543.620.057,00            | 5.681.070.163,00            | 1.294.893,00                | -62,33%                         |
| <b>2.2.</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                                   | <b>602.715.059.545,24</b>   | <b>705.508.334.130,00</b>   | <b>611.503.004.876,06</b>   | <b>686.897.143.568,88</b>   | <b>745.624.365.546,41</b>   | <b>6,15%</b>                    |
| 2.2.1.      | Belanja Pegawai                                                                                           | 48.813.960.114,00           | 44.464.306.041,00           | 46.120.205.650,00           | 57.085.914.400,00           | 74.048.888.650,00           | 12,08%                          |
| 2.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 180.298.581.264,00          | 294.845.345.559,00          | 264.535.097.640,06          | 373.637.834.631,88          | 355.491.404.098,41          | 22,41%                          |
| 2.2.3.      | Belanja Modal                                                                                             | 312.815.279.985,00          | 366.198.682.530,00          | 300.847.701.586,00          | 256.173.394.537,00          | 316.084.072.798,00          | 1,94%                           |
| <b>3.</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                                         | <b>1.210.627.130,32</b>     | <b>58.206.161.419,39</b>    | <b>6.937.467.020,87</b>     | <b>84.971.540.048,06</b>    | <b>74.002.286.638,15</b>    | <b>1432,94%</b>                 |
| <b>3.1.</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                                                                       | <b>8.210.627.130,32</b>     | <b>61.617.261.419,39</b>    | <b>43.560.545.650,87</b>    | <b>90.481.710.048,06</b>    | <b>86.002.286.638,15</b>    | <b>180,98%</b>                  |
| <b>3.2.</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan<br/>Daerah</b>                                                                  | <b>7.000.000.000,00</b>     | <b>3.411.100.000,00</b>     | <b>36.623.078.630,00</b>    | <b>5.510.170.000,00</b>     | <b>12.000.000.000,00</b>    | <b>238,80%</b>                  |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 9,73 persen, berasal dari:
  - a. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,34 persen, dari:
    - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014: Rp97.407.483.796,39
    - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015: Rp86.469.772.434,34
    - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016: Rp101.310.299.207,01
    - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017: Rp152.023.127.898,99
    - Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018: Rp184.531.274.752,15,15
  - b. Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 8,10 persen, dari:
    - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014: Rp841.715.445.482,00
    - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2015: Rp891.952.775.958,00
    - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2016: Rp1.053.065.317.850,00
    - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2017: Rp1.043.885.758.961,00
    - Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2018: Rp1.140.511.991.71,00
  - c. Rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,72 persen, dari:
    - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014: Rp155.718.914.640,91
    - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015: Rp315.389.815.779,10
    - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016: Rp231.965.072.896,24
    - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017: Rp208.815.108.770,06
    - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018: Rp252.213.773.300,38
2. Rata-rata pertumbuhan Belanja sebesar 9,08 persen, berasal dari :
  - a. Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 12,88 persen, dari:

- Belanja Tidak Langsung Tahun 2014: Rp492.507.388.266,33
  - Belanja Tidak Langsung Tahun 2015: Rp602.949.645.810,00
  - Belanja Tidak Langsung Tahun 2016: Rp701.293.442.050,00
  - Belanja Tidak Langsung Tahun 2017: Rp716.327.378.363,00
  - Belanja Tidak Langsung Tahun 2018: Rp792.622.755.434,80
- b. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 6,15 persen, dari:
- Belanja Langsung Tahun 2014: Rp602.715.059.545,24
  - Belanja Langsung Tahun 2015: Rp705.508.334.130,00
  - Belanja Langsung Tahun 2016: Rp611.503.004.876,06
  - Belanja Langsung Tahun 2017: Rp686.897.143.568,88
  - Belanja Langsung Tahun 2018: Rp745.624.365.546,41
3. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan sebesar 143,94 persen, berasal dari:
- a. Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan sebesar 180,98 persen, dari:
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014: Rp8.210.627.130,32
  - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015: Rp61.617.261.419,39
  - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016: Rp43.560.545.650,87
  - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017: Rp90.481.710.048,06
  - Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018: Rp86.002.286.638,15
- b. Rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 238,80 persen, dari:
- Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2014: Rp7.000.000.000,00
  - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015: Rp3.411.100.000,00
  - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016: Rp36.623.078.630,00
  - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017: Rp5.510.170.000,00
  - Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018: Rp12.000.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018 sebagian besar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah. Kedepannya diharapkan bahwa sumber pendapatan dapat dikembangkan melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD merupakan salah satu bentuk investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pendapatan daerah menjadi bertambah. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya

2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain
3. Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta
4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas
5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi PMA dan PMDN.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur (pemberi pinjaman) kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari Neraca Daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan rata-rata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017**

| No.         | Uraian                                | Tahun 2014<br>(Rp.)         | Tahun 2015<br>(Rp.)         | Tahun 2016<br>(Rp.)         | Tahun 2017<br>(Rp.)         | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ASET</b>                           | <b>1.927.576.942.888,64</b> | <b>1.856.551.691.794,80</b> | <b>2.112.568.599.035,70</b> | <b>2.307.753.195.190,84</b> | <b>6,18</b>                     |
| 1.1.        | Aset Lancar                           | 127.932.874.300,19          | 86.151.424.095,08           | 125.531.866.493,75          | 125.337.071.516,71          | -0,68                           |
| 1.1.1.      | Kas dan Setara Kas                    | 61.617.261.419,39           | 43.562.487.842,87           | 80.520.135.381,06           | 86.008.294.706,15           |                                 |
| 1.1.2.      | Investasi Jangka Pendek               | -                           | -                           | -                           | -                           |                                 |
| 1.1.3.      | Piutang Pendapatan                    | 41.498.285.752,65           | 50.050.936.528,72           | 53.822.391.776,45           | 38.055.625.912,46           |                                 |
| 1.1.4.      | Piutang Lainnya                       | 17.439.152.505,00           | 8.817.501.213,20            | 12.021.756.173,20           | 4.326.900.786,72            |                                 |
| 1.1.5.      | Penyisihan Piutang                    | -                           | (25.120.741.735,78)         | (29.208.399.424,33)         | (11.183.331.405,58)         |                                 |
| 1.1.6.      | Beban Dibayar Dimuka                  | -                           | 896.867.373,72              | 988.429.809,72              | 1.541.792.195,86            |                                 |
| 1.1.7.      | Persediaan                            | 7.378.174.623,15            | 7.944.372.872,35            | 7.387.552.777,65            | 6.587.789.321,10            |                                 |
| 1.1.8.      | Aset Untuk Dikonsolidasikan           | -                           | -                           | -                           | -                           |                                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Investasi Jangka Panjang</b>       | <b>9.500.000.000,00</b>     | <b>12.000.000.000,00</b>    | <b>48.623.078.630,00</b>    | <b>54.123.078.630,00</b>    | <b>78,60</b>                    |
| 1.2.1.      | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | -                           | -                           | -                           | -                           |                                 |
| 1.2.2.      | Investasi Jangka Panjang Permanen     | 9.500.000.000,00            | 12.000.000.000,00           | 48.623.078.630,00           | 54.123.078.630,00           |                                 |
| <b>1.3.</b> | <b>Aset Tetap</b>                     | <b>1.782.740.813.533,47</b> | <b>1.750.214.221.060,73</b> | <b>1.837.853.469.624,45</b> | <b>1.540.124.428.246,55</b> | <b>-4,76</b>                    |
| 1.3.1.      | Tanah                                 | 99.680.110.328,33           | 104.868.520.603,33          | 110.202.161.373,33          | 93.251.438.623,92           |                                 |
| 1.3.2.      | Peralatan dan Mesin                   | 134.698.648.789,04          | 186.901.918.240,03          | 196.937.364.107,02          | 216.113.937.348,45          |                                 |
| 1.3.3.      | Gedung dan Bangunan                   | 512.606.101.215,92          | 613.102.100.792,23          | 599.970.218.863,86          | 649.913.622.012,59          |                                 |
| 1.3.4.      | Jalan, Irigasi dan Jaringan           | 983.350.620.132,32          | 1.204.411.971.508,66        | 1.416.793.229.880,66        | 970.242.941.581,94          |                                 |
| 1.3.5.      | Aset Tetap Lainnya                    | 35.190.450.694,99           | 45.039.184.863,99           | 45.341.640.502,99           | 53.487.656.469,99           |                                 |
| 1.3.6.      | Konstruksi Dalam Pengerjaan           | 17.214.882.372,87           | 19.025.298.650,00           | 10.924.866.650,00           | 31.998.248.521,11           |                                 |
| 1.3.7.      | Akumulasi Penyusutan                  | -                           | (423.134.773.597,51)        | (542.316.011.753,41)        | (474.883.416.311,45)        |                                 |

| No.         | Uraian                               | Tahun 2014<br>(Rp.)         | Tahun 2015<br>(Rp.)         | Tahun 2016<br>(Rp.)         | Tahun 2017<br>(Rp.)         | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>1.4.</b> | <b>Dana Cadangan</b>                 | -                           | -                           | -                           | -                           | <b>0,00</b>                     |
| 1.4.1.      | Dana Cadangan                        | -                           | -                           | -                           | -                           |                                 |
| 1.5.        | Aset Lainnya                         | 7.403.255.054,98            | 8.186.046.638,99            | 100.560.184.287,50          | 588.168.616.797,58          | 329,89                          |
| 1.5.1.      | Tagihan Jangka Panjang               | -                           | 220.165.300,00              | -                           | -                           |                                 |
| 1.5.2.      | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga        | -                           | -                           | -                           | -                           |                                 |
| 1.5.3.      | Aset Tidak Berwujud                  | 5.800.234.439,25            | 6.539.762.715,25            | 1.502.681.309,38            | 1.198.066.788,28            |                                 |
| 1.5.4.      | Aset Lain-Lain                       | 1.603.020.615,73            | 1.426.118.623,74            | 99.057.502.978,12           | 586.970.550.009,30          |                                 |
| <b>2</b>    | <b>KEWAJIBAN</b>                     | <b>14.322.194.998,00</b>    | <b>23.449.021.064,85</b>    | <b>14.386.344.901,21</b>    | <b>17.930.080.334,73</b>    | <b>7,78</b>                     |
| <b>2.1.</b> | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>       | <b>14.322.194.998,00</b>    | <b>23.449.021.064,85</b>    | <b>14.386.344.901,21</b>    | <b>17.930.080.334,73</b>    | <b>7,78</b>                     |
| 2.1.1.      | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 434.651.370,00              | 1.942.192,00                | 38.425.333,00               | 6.008.068,00                |                                 |
| 2.1.2.      | Utang Bunga                          | -                           | -                           | -                           | 8.333.333,33                |                                 |
| 2.1.4.      | Pendapatan Diterima Dimuka           | -                           | 381.381.525,85              | 349.430.729,21              | 493.026.671,40              |                                 |
| 2.1.5.      | Utang Beban/Utang Belanja            | -                           | 3.158.894.953,00            | 1.889.441.038,00            | 2.227.331.128,00            |                                 |
| 2.1.6.      | Utang Jangka Pendek Lainnya          | 13.887.543.628,00           | 19.906.802.394,00           | 12.109.047.801,00           | 15.195.381.134,00           |                                 |
| <b>3</b>    | <b>EKUITAS</b>                       | <b>1.913.254.747.890,64</b> | <b>1.833.102.670.729,95</b> | <b>2.098.182.254.134,49</b> | <b>2.289.823.114.856,11</b> | <b>6,17</b>                     |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan data pada Tabel 3.2. tersebut di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aset daerah dari Tahun 2014-2017 mencapai 6,18 persen, sedangkan kewajiban daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,78 persen, dan ekuitas rata-rata pertumbuhannya mencapai 6,17 persen.

Adapun analisis rasio keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:

**Tabel 3.3.**  
**Analisis Rasio Keuangan**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017**

| No. | Uraian                                 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
|-----|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Rasio Lancar                           | 893,25%    | 367,40%    | 872,58%    | 699,03%    |
| 2   | Rasio Quick                            | 893,25%    | 367,40%    | 872,58%    | 662,29%    |
| 3   | Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset | 0,74%      | 1,26%      | 0,68%      | 0,78%      |
| 4   | Rasio Hutang Terhadap Modal            | 0,91%      | 1,28%      | 0,69%      | 0,78%      |
| 5   | Rata-rata Umur Piutang                 | -          | -          | -          |            |
| 6   | Rata-rata Umur Persediaan              | -          | -          | -          |            |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

**3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah, harus mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak

pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak

ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2018 adalah data yang telah diaudit oleh BPK RI, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun APBD Kabupaten Kubu Raya masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik.

Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4. sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018**

| No. | Uraian              | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Tahun Anggaran 2014 | 508.677.400.509,00                                    | 1.102.222.447.811,57                                      | 46,15          |
| 2   | Tahun Anggaran 2015 | 573.189.002.264,00                                    | 1.311.869.079.940,00                                      | 43,69          |
| 3   | Tahun Anggaran 2016 | 584.796.504.418,00                                    | 1.349.419.525.556,06                                      | 43,34          |
| 4   | Tahun Anggaran 2017 | 564.487.610.900,00                                    | 1.408.734.691.931,88                                      | 40,07          |
| 5   | Tahun Anggaran 2018 | 601.917.714.412,00                                    | 1.550.247.120.981,21                                      | 38,83          |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 cenderung meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 juga meningkat. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.4 tersebut di atas, menunjukkan bahwa persentase Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur:

- Tahun 2014 sebesar 46,15 persen
- Tahun 2015 sebesar 43,69 persen turun sebesar 2,46 persen dibandingkan tahun 2014
- Tahun 2016 sebesar 43,34 persen turun sebesar 0,36 persen dibandingkan Tahun 2015
- Tahun 2017 sebesar 40,07 persen turun sebesar 3,27 persen dibandingkan Tahun 2016
- Tahun 2018 sebesar 38,83 persen turun sebesar 1,24 persen dibandingkan tahun 2017

Jadi kecenderungan proporsi Belanja Aparatur turun dalam kurun waktu 2014-2018 rata-rata sebesar 1,83 persen.

**3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya**  
**Tahun 2014-2018**

| No. | Uraian                        | Tahun                     |                            |                          |                           |                          |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|     |                               | 2014                      | 2015                       | 2016                     | 2017                      | 2018                     |
| 1   | Realisasi Pendapatan Daerah   | 1.094.841.843.919,30      | 1.293.812.364.171,48       | 1.386.340.689.953,25     | 1.404.723.995.630,05      | 1.577.257.039.764,53     |
|     | Dikurangi Realisasi:          |                           |                            |                          |                           |                          |
| 2   | Belanja Daerah                | 1.095.222.447.811,57      | 1.308.457.979.940,00       | 1.312.796.446.926,06     | 1.403.224.521.931,88      | 1.538.247.120.981,21     |
| 3   | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 7.000.000.000,00          | 3.411.100.000,00           | 36.623.078.630,00        | 5.510.170.000,00          | 12.000.000.000,00        |
|     | <b>Defisit Riil</b>           | <b>(7.380.603.892,27)</b> | <b>(18.056.715.768,52)</b> | <b>36.921.164.397,19</b> | <b>(4.010.696.301,83)</b> | <b>27.009.918.783,32</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6.**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2018**

| No. | Uraian                                                            | Proporsi Dari Total Defisit Riil |            |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                   | Tahun 2014                       | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|     |                                                                   | (%)                              | (%)        | (%)        | (%)        | (%)        |
| 1.  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | -111,25%                         | -341,24%   | 117,98%    | -2256,01%  | 318,41%    |
| 2.  | Pencairan Dana Cadangan                                           |                                  |            | -          | -          | -          |
| 3.  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   |                                  |            | -          | -          | -          |
| 4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        |                                  |            | -          | -249,33    | -          |
| 5.  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      |                                  |            | -          | -          | -          |
| 6.  | Penerimaan Piutang Daerah                                         |                                  |            | -          | -          | -          |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 3.6. tersebut di atas, diketahui bahwa komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2014-2018 hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang persentase kontribusi menutupi defisit anggaran berfluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar -111,25 persen menurun pada Tahun 2015 sebesar -341,24 persen, meningkat menjadi 117,98 persen pada Tahun 2016, menurun tajam menjadi -2.256,01 persen pada Tahun 2017 dan di Tahun 2018 kontribusinya meningkat menjadi 318,41 persen.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang

terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

Adapun realisasi SiLPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Uraian                                                                      | Tahun 2016          |              | Tahun 2017          |              | Tahun 2018        |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
|     |                                                                             | Rp                  | % dari SiLPA | Rp                  | % dari SiLPA | Rp                | % dari SiLPA |
| 1   | Jumlah SiLPA                                                                | 43.560.545.650,87   | 100,00       | 80.481.710.048,06   | 100,00       | 86.008.294.706,15 | 100,00       |
| 2   | Pelampauan Penerimaan PAD                                                   | (35.327.272.303,48) | -81,10       | (32.178.730.903,27) | -39,98       | -                 | 0,00         |
| 3   | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan                                      | (29.380.125.578,00) | -67,45       | (23.168.993.141,06) | -28,79       | -                 | 0,00         |
| 4   | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                  | 68.767.559.189,24   | 157,87       | 59.092.777.484,06   | 73,42        | -                 | 0,00         |
| 5   | Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya                                | -                   | 0,00         | -                   | 0,00         | -                 | 0,00         |
| 6   | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan | -                   | 0,00         | -                   | 0,00         | -                 | 0,00         |
| 7   | Kegiatan Lanjutan                                                           | -                   | 0,00         | -                   | 0,00         | -                 | 0,00         |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan Tabel 3.7. tersebut di atas, Tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi SiLPA. Terhitung SiLPA Tahun 2016 berjumlah Rp43.560.545.650,87, pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp80.481.710.048,06, dan Tahun 2018 meningkat menjadi Rp86.008.294.706,15.

3.3. Kerangka Pendanaan

Gambaran kerangka pendanaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam RPJMD Perubahan ini menggunakan analisis tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2014-2018 sebagai dasar estimasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2024.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Realisasi dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8. dan Tabel 3.9. sebagai berikut:

Tabel 3.8.  
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2020

| No.    | Uraian                                                             | Jumlah (Rp.)         |                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                                                                    | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun (2020) *) |
| 1.     | PENDAPATAN                                                         | 1.533.365.324.188,15 | 1.477.079.359.390,54      |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                                             | 172.841.166.395,36   | 151.008.894.728,78        |
| 1.1.1. | Penerimaan Pajak Daerah                                            | 126.455.410.972,73   | 108.258.139.705,97        |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah                                             | 7.860.087.470,00     | 6.535.379.088,00          |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan                  | 3.814.712.897,00     | 4.148.708.997,00          |
| 1.1.4. | Lain-Lain PAD yang Sah                                             | 34.710.955.055,63    | 32.066.666.937,81         |
| 1.2.   | Dana Perimbangan                                                   | 1.084.951.262.629,00 | 964.995.503.675,00        |
| 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                            | 22.944.680.500,00    | 24.628.649.807,00         |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum                                                  | 810.858.494.000,00   | 726.710.379.000,00        |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus                                                | 251.148.088.129,00   | 213.656.474.868,00        |
| 1.3.   | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah                               | 275.572.895.163,79   | 361.074.960.986,76        |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah                                                   | 70.300.626.490,79    | 93.442.321.273,76         |
| 1.3.2. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  | 58.990.735.473,00    | 73.961.016.713,00         |
| 1.3.3. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | -                    | -                         |
| 1.3.4. | Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | -                    | -                         |
| 1.3.5. | Pendapatan Lainnya                                                 | 10.482.860.000,00    | 193.671.623.000,00        |
| 1.3.6. | Dana Desa                                                          | 131.658.673.200,00   | -                         |
| 2.     | BELANJA                                                            | 1.580.265.429.953,77 | 1.487.430.828.191,27      |
| 2.1.   | Belanja Tidak Langsung                                             | 794.927.858.913,59   | 795.728.523.684,81        |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai                                                    | 549.026.260.713,59   | 542.278.362.971,81        |
| 2.1.2. | Belanja Bunga                                                      | -                    | -                         |
| 2.1.3. | Belanja Hibah                                                      | 12.455.610.000,00    | 21.011.558.000,00         |
| 2.1.4. | Belanja Bantuan Sosial                                             | 1.876.400.000,00     | 993.300.000,00            |

| No.         | Uraian                                                                                          | Jumlah (Rp.)              |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                                 | Realisasi Tahun 2019      | Realisasi Tahun (2020) *) |
| 2.1.5.      | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa                       | 12.213.858.500,00         | 11.176.172.675,00         |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 219.355.729.700,00        | 211.129.940.600,00        |
| 2.1.7.      | Belanja Tidak Terduga                                                                           | 0,00                      | 9.139.189.438,00          |
| <b>2.2.</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                         | <b>785.337.571.040,18</b> | <b>691.702.304.506,46</b> |
| 2.2.1.      | Belanja Pegawai                                                                                 | 83.302.724.300,00         | 98.177.916.884,00         |
| 2.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 496.405.558.028,42        | 453.140.817.627,53        |
| 2.2.3.      | Belanja Modal                                                                                   | 205.629.288.711,76        | 140.383.569.994,93        |
| <b>3.</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                               | <b>74.002.286.638,15</b>  | <b>62.078.310.356,79</b>  |
| <b>3.1.</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                                                             | <b>86.002.286.638,15</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>3.2.</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                                                            | <b>12.000.000.000,00</b>  | <b>1.000.000.000,00</b>   |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

**Tabel 3.9.**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021-2024**

| No.        | Uraian                                            | Proyeksi (Rp.)              |                             |                             |                             |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |                                                   | Tahun 2021                  | Tahun 2022                  | Tahun 2023                  | Tahun 2024                  |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.425.563.846.863,00</b> | <b>1.412.283.397.517,00</b> | <b>1.563.636.526.550,93</b> | <b>1.682.941.993.526,76</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>160.800.238.390,00</b>   | <b>160.877.537.935,00</b>   | <b>178.118.637.561,71</b>   | <b>191.709.089.607,67</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 115.401.417.867,00          | 115.401.417.867,00          | 127.768.883.008,79          | 137.517.648.782,36          |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 7.895.216.750,00            | 7.972.516.295,00            | 8.826.923.625,46            | 9.500.417.898,08            |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.643.414.250,00            | 4.643.414.250,00            | 5.141.044.737,88            | 5.533.306.451,39            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 32.860.189.523,00           | 32.860.189.523,00           | 36.381.786.189,57           | 39.157.716.475,84           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.264.763.608.473,00</b> | <b>1.251.405.859.582,00</b> | <b>1.385.517.888.989,22</b> | <b>1.491.232.903.919,09</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.205.772.873.000,00        | 1.182.772.873.000,00        | 1.309.529.567.569,75        | 1.409.446.673.575,33        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 58.990.735.473,00           | 68.632.986.582,00           | 75.988.321.419,46           | 81.786.230.343,77           |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1.425.563.846.863,00</b> | <b>1.412.283.397.517,00</b> | <b>1.563.636.526.550,93</b> | <b>1.682.941.993.526,76</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                                    | <b>1.588.942.509.194,00</b> | <b>1.589.950.239.933,00</b> | <b>1.760.419.642.222,89</b> | <b>1.894.739.660.924,19</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>1.129.453.607.516,00</b> | <b>1.129.453.607.516,00</b> | <b>1.250.550.027.109,08</b> | <b>1.345.966.994.177,50</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                   | 592.710.672.045,00          | 592.710.672.045,00          | 656.259.223.098,03          | 706.331.801.820,41          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                           | 515.413.129.471,00          | 515.413.129.471,00          | 570.674.084.126,29          | 614.216.516.745,13          |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                     | 20.334.600.000,00           | 20.334.600.000,00           | 22.514.811.066,19           | 24.232.691.150,54           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                            | 995.206.000,00              | 995.206.000,00              | 1.101.908.818,56            | 1.185.984.461,42            |

| No.    | Uraian                                                | Proyeksi (Rp.)       |                      |                      |                      |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                       | Tahun 2021           | Tahun 2022           | Tahun 2023           | Tahun 2024           |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                         | 228.338.257.001,00   | 228.338.257.001,00   | 257.356.041.962,68   | 277.068.607.964,13   |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                                 | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00     | 1.000.0000.000,00    | 1.000.000.000,00     |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                                 | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                      | 226.150.644.677,00   | 227.158.375.416,00   | 251.513.573.151,13   | 270.704.058.782,56   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                    | 11.329.662.677,00    | 12.337.393.416,00    | 13.660.169.455,76    | 14.702.440.385,23    |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                              | 214.820.982.000,00   | 214.820.982.000,00   | 237.853.403.695,37   | 256.001.618.397,33   |
|        | Jumlah Belanja                                        | 1.588.942.509.194,00 | 1.589.950.239.933,00 | 1.760.419.642.222,89 | 1.894.739.660.924,19 |
|        | Total Surplus/(Defisit)                               | (163.378.662.331,00) | (177.666.842.416,00) | (196.783.115.671,96) | (211.797.667.397,43) |
| 6      | PEMBIAYAAN                                            | 163.378.662.331,00   | 177.666.842.416,00   | 196.783.115.671,85   | 211.797.667.397,62   |
| 6.1    | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                          | 163.378.662.331,00   | 177.666.842.416,00   | 195.383.115.671,85   | 209.797.667.397,62   |
| 6.2    | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                         | 0,00                 | 0,00                 | 1.400.000.000,00     | 2.000.000.000,00     |
|        | Pembiayaan Netto                                      | 163.378.662.331,00   | 177.666.842.416,00   | 196.783.115.671,85   | 211.797.667.397,62   |
|        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | TOTAL APBD                                            | 1.588.942.509.194,00 | 1.589.950.239.933,00 | 1.759.019.642.222,78 | 1.892.739.660.924,38 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.9. di atas, proyeksi dilakukan berdasarkan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa secara umum proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2024 kecenderungan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,63 persen. Proyeksi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan Kabupaten Kubu Raya termasuk pertumbuhan ekonomi yang berada di atas Provinsi dan Nasional, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, daerah perbatasan, terdepan, terluar dan daerah terpencil. Disamping itu juga untuk Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya difokuskan pembangunan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pemukiman dan perumahan sehingga alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat meningkat yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Tetapi pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan APBD yang dikarenakan Pandemi Covid-19, yang berdampak sangat besar terhadap penerimaan pendapatan. Sedangkan pada Tahun 2022-2024 APBD diproyeksikan kembali ke kondisi normal.

### **3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk mengetahui gambaran perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2014-2019.

**Tabel 3.10.**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian                                   | Proyeksi (Rp.)              |                             |                             |                             |                             |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                                          | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| 1   | Pendapatan                               | 1.591.088.970.504,62        | 1.425.563.846.863,00        | 1.412.283.397.517,00        | 1.563.636.526.550,93        | 1.682.941.993.526,76        |
| 2   | Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 3   | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|     | <b>Total Penerimaan</b>                  | <b>1.591.088.970.504,62</b> | <b>1.425.563.846.863,00</b> | <b>1.412.283.397.516,00</b> | <b>1.563.636.526.550,93</b> | <b>1.682.941.993.526,76</b> |
|     | Dikurangi :                              |                             |                             |                             |                             |                             |
| 4   | Belanja Tidak Langsung                   | 892.322.439.741,30          |                             |                             |                             |                             |
| 5   | Belanja Pegawai                          |                             | 592.710.672.045,00          | 592.710.672.045,00          | 656.259.223.098,03          | 706.331.801.820,41          |
| 6   | Belanja Hibah                            |                             | 20.334.600.000,00           | 20.334.600.000,00           | 22.514.811.066,19           | 24.232.691.150,54           |
| 7   | Belanja Bantuan Sosial                   |                             | 995.206.000,00              | 995.206.000,00              | 1.101.908.818,56            | 1.185.984.461,42            |
| 8   | Belanja Tidak Terduga                    |                             | 5.000.000.000,00            | 5.000.000.000,00            | 1.000.000.000,00            | 1.000.000.000,00            |
| 9   | Belanja Transfer                         |                             | 226.150.644.677,00          | 227.158.375.416,00          | 251.513.573.151,13          | 270.704.058.782,56          |
| 10  | Pengeluaran Pembiayaan                   | 7.311.104.457,09            | 0,00                        | 0,00                        | 1.400.000.000,00            | 2.000.000.000,00            |
|     | <b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b> | <b>691.455.426.306,23</b>   | <b>580.372.724.141,00</b>   | <b>566.084.544.055,00</b>   | <b>629.847.010.417,02</b>   | <b>677.487.457.311,83</b>   |

Sumber: Bappeda Kabupaten Kubu Raya (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.10. tersebut di atas, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mencapai Rp691.455.426.306,23, pada tahun 2021 sebesar Rp580.372.724.141,00, pada tahun 2022 sebesar Rp566.084.544.055,00, pada tahun 2023 sebesar Rp629.847.010.417,02 dan pada tahun 2024 sebesar Rp677.487.457.311,83.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2020-2024 yang sangat terbatas tersebut, diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung Bupati bersama SKPD terkait yang dikelompokkan ke dalam dua prioritas. Prioritas I digunakan untuk membiayai tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah. Prioritas I ini juga membiayai program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar, serta memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi daerah. Sedangkan Prioritas II digunakan untuk membiayai yang berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

**Tabel 3.11.**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

| No | Uraian                            | Proyeksi           |                    |                    |                    |                    |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |                                   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|    |                                   | (Rp)               | (Rp)               | (Rp)               | (Rp)               | (Rp)               |
| 1. | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 691.455.426.306,23 | 580.372.724.141,00 | 566.084.544.055,00 | 629.847.010.417,02 | 677.487.457.311,83 |
|    | Prioritas I                       | 542.278.362.971,81 | 452.690.724.829,98 | 441.545.944.362,90 | 491.280.668.125,27 | 528.440.216.703,22 |
|    | Prioritas II                      | 140.383.569.994,93 | 127.681.999.311,02 | 124.538.599.692,10 | 138.566.342.291,75 | 149.047.240.608,61 |

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya tidak lepas dari berbagai isu strategis daerah yang mendasari suatu gagasan untuk menganalisis kondisi-kondisi daerah menuju pada perbaikan ke arah yang lebih baik. Analisis isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya diuraikan berdasarkan masukan berbagai unsur perencanaan serta kajian sinergitas dan keterkaitan berbagai elemen daerah.

Perubahan RPJMD diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan saat ini dan di masa mendatang dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dalam dua tahun sisa dari periode 5 (lima) tahun RPJMD. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap permasalahan pembangunan, baik yang dihadapi saat ini maupun berpotensi terjadi di masa depan merupakan suatu prasyarat penting dalam perencanaan yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi isu-isu strategis ataupun sebagai dasar untuk merespons isu-isu tersebut.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (*existing*) dengan kondisi yang diharapkan (*gap expectation*). Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah; sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu dan permasalahan pembangunan nasional, isu dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 juga

terdapat isu besar mengenai adanya wabah virus Covid-19 di tahun 2020, sehingga perencanaan yang dibuat mengantisipasi terjadinya virus dan dampak yang diakibatkan pasca berakhirnya virus terutama perbaikan perekonomian dan target-target capaian di tahun 2022, 2023 dan 2024. Di Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.237 orang dimana 1.031 orang dinyatakan sembuh dan 33 orang diantaranya meninggal. Jika dilihat dari perkembangan kasus di Kabupaten Kubu Raya maka sebanyak 83,35 persen dari total kasus terkonfirmasi sembuh sehingga ada keoptimisan pemerintah daerah dapat melakukan recovery ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Rincian permasalahan pembangunan yang dipilah menjadi beberapa urusan, seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus, penjabaran keempatnya disajikan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Permasalahan Pembangunan**

| NO. | URUSAN                       | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | Urusan Pendidikan            | 1. Masih adanya kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                                                                     |
|     |                              | 2. Belum adanya pemerataan guru antar sekolah maupun antar wilayah                                                                                                                              |
|     |                              | 3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan                                                                                                                      |
|     |                              | 4. Tidak memadainya aksesibilitas siswa dan guru dari dan ke lokasi pendidikan di daerah terpencil, di samping itu tidak tersedianya sarana angkutan maupun akomodasi guru dan siswa            |
|     |                              | 5. Belum adanya konsep dan strategi penanganan yang komprehensif dalam mengatasi siswa putus sekolah, termasuk penyediaan lembaga kursus yang memberdayakan dan meningkatkan keterampilan hidup |
|     |                              | 6. Perlunya standarisasi dan kesetaraan kualitas sekolah antar wilayah kecamatan                                                                                                                |
|     |                              | 7. Masih kurang berkualitasnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)                                                                                                                                  |
|     |                              | 8. Tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap yang masih rendah                                                                                                                                     |
|     |                              | 9. Masih rendahnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan                                                                                               |
|     |                              | 10. Masih kurangnya pengembangan pembinaan karakter siswa                                                                                                                                       |
|     |                              | 11. Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi                                                                                                                |

| NO. | URUSAN                | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | <p>12. Pembinaan minat dan bakat siswa belum dilakukan secara berkesinambungan</p> <p>13. Belum adanya dukungan yang optimal bagi siswa miskin</p> <p>14. Belum optimalnya peran PKBM dalam mendukung pendidikan non formal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Urusan Kesehatan      | <p>1. Pelayanan kesehatan masyarakat belum optimal</p> <p>2. Rasio dokter/tenaga medis dan Paramedis masih kurang</p> <p>3. Cakupan pelayanan rujukan masih rendah</p> <p>4. Kurang memadainya alat kesehatan</p> <p>5. Kondisi/bangunan fisik sarana kesehatan yang belum memadai</p> <p>6. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat</p> <p>8. Belum optimalnya promosi dan advokasi kesehatan</p> <p>9. Tingginya keluhan masyarakat terhadap kualitas dan intensitas pelayanan kesehatan pada setiap satuan pelayanan</p> <p>10. Rendahnya etos kerja dan motivasi tenaga medis, khusus tenaga ahli untuk ditempatkan di pulau ataupun di daerah terpencil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Urusan Pekerjaan Umum | <p>1. Jalan dan Jembatan</p> <p>a. Rasio jalan dan jembatan dalam kondisi rusak yang masih banyak dan belum tertangani</p> <p>b. Belum optimalnya penanganan jalan/jembatan Poros Kabupaten dan jalan/jembatan lingkungan</p> <p>2. Drainase</p> <p>a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting</p> <p>b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai)</p> <p>c. Belum terintegrasinya sistem jaringan drainase dalam skala kawasan.</p> <p>3. Irigasi/Rawa</p> <p>a. Kurangnya sinergisitas penanganan masalah-masalah irigasi/rawa antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta antar OPD dalam Kabupaten</p> <p>b. Masih terbatasnya perawatan saluran Irigasi/Rawa Kabupaten</p> <p>c. Kurangnya SDM/pengawas dan kelembagaan terkait pengaturan dan perawatan irigasi/rawa</p> <p>4. Air Minum</p> <p>a. Cakupan pelayanan air minum perkotaan masih rendah</p> <p>b. Di musim kemarau panjang terjadi kedangkalan dan intrusi air baku</p> <p>c. Keterbatasan sumber air perdesaan di beberapa desa</p> <p>d. Belum optimalnya penguatan kelembagaan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di desa</p> <p>5. Persampahan</p> <p>a. Belum optimalnya penanganan pengangkutan dan pengelolaan sampah</p> |

| NO. | URUSAN                                         | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Belum adanya Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) untuk mengurangi volume sampah</li> <li>c. TPA yang ada masih bersifat open dumping</li> <li>d. Belum optimalnya kewenangan kecamatan dalam pengelolaan kebersihan berbasis partisipatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                | 6. Bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik baru maupun perubahan fungsi/fisik</li> <li>b. Belum diimplementasikannya pengendalian Bangunan Gedung (Perda Bangunan Gedung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                | 7. Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya kepemilikan fasilitas pengolahan air limbah setempat yang layak</li> <li>b. Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi, persentase desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>) masih rendah</li> <li>c. Belum adanya penerapan teknologi untuk penanganan air limbah di daerah pesisir</li> <li>d. Belum ada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                | 8. Air Baku <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Air Permukaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>)</li> </ul> </li> <li>b. Air Tanah               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pengendalian pemanfaatan air tanah</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Urusan Penataan Ruang                          | 1. Masih belum tersusunnya RDTRK dan Peraturan Zonasi pada kawasan yang selaras dengan rencana pengembangan kawasan, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya<br>2. Masih belum tersusunnya RDTRK pada kawasan strategis daerah, sesuai kebijakan Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya<br>3. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya<br>4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM tata ruang<br>5. Belum ada pemetaan secara definitif kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kubu Raya<br>4. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang<br>5. Tingginya potensi alih fungsi lahan dan adanya kendala terkait dengan aturan tata ruang (misalnya aturan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru)<br>6. Minimnya Ruang Terbuka Hijau<br>7. Belum tertibnya pengendalian Ruang Terbuka Non Hijau |
| 5   | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh<br>2. Rendahnya daya dukung sarana dan prasarana wilayah permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO. | URUSAN                                                          | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | 3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi<br>4. Masih adanya bangunan-bangunan liar di daerah sempadan sungai dan sempadan jalan<br>5. Belum tersedianya database kawasan perumahan dan permukiman<br>6. Belum adanya tindakan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Produk Hukum Daerah<br>2. Masih tingginya pelanggaran ketertiban umum<br>3. Belum efektifnya peran lembaga swakarsa masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban<br>4. Belum tersedianya <i>Early Warning System</i> di daerah rawan bencana (kebakaran hutan dan lahan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Urusan Sosial                                                   | 1. Belum optimalnya penerapanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)/Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu<br>2. Masih rendahnya keterampilan/keahlian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)<br>3. Verifikasi dan validasi data Basis Data Terpadu (BDT) belum optimal<br>4. Masih terbatasnya penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain)<br>5. Masih rendahnya perhatian dan penanganan atas penduduk lanjut usia<br>6. Belum maksimalnya penanganan pasca bencana secara terpadu<br>7. Masih minimnya sarana dan prasarana penanganan pasca bencana<br>8. Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pasca bencana belum memadai dan terlatih<br>9. Belum berkembangnya kelembagaan di masyarakat yang turut membantu penanganan pasca bencana<br>10. Masih minimnya penanganan dan pemberdayaan kaum disabilitas |
| II  | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | Urusan Tenaga Kerja                                             | 1. Meningkatnya angka pengangguran<br>2. Belum tersedianya Balai Pelatihan Kerja<br>3. Belum adanya data lengkap ketenagakerjaan yang didukung sistem.<br>4. Belum adanya rencana strategi yang komprehensif bagi penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja<br>5. Terbatasnya lapangan kerja yang variatif<br>6. Masih minimnya upaya kesehatan dan keselamatan tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak             | 1. Masih rendahnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender<br>2. Pengarusutamaan gender masih lemah<br>3. Belum optimalnya implementasi data terpilah dalam pengarusutamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | URUSAN                                                | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | 4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih terbatas<br>5. Advokasi terhadap perempuan rentan masih rendah<br>6. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam ketahanan rumah tangga<br>7. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan<br>8. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Urusan Pangan                                         | 1. Belum optimalnya pengelolaan pangan non beras<br>2. Penggunaan alat teknologi pangan masih rendah<br>3. Belum meratanya pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)<br>4. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan Kabupaten<br>5. Minimnya pengendalian harga bahan pangan yang sering fluktuatif                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Urusan Pertanahan                                     | 1. Belum tersedianya data secara menyeluruh mengenai kepemilikan tanah bersertifikat oleh masyarakat<br>2. Masih sering muncul sengketa atas tanah dan masalah sertifikat ganda terkait dengan kepemilikan tanah di tingkat desa dan kabupaten/kota<br>3. Masih rendahnya peran lembaga dan institusi yang berwenang dalam legalitas dan keabsahan serta koordinasi lintas lembaga dari desa, kecamatan dan kabupaten                                                                                                                                                        |
| 5   | Urusan Lingkungan Hidup                               | 1. Belum optimalnya penerapan regulasi dalam pelestarian lingkungan hidup<br>2. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin kurang terkontrol<br>3. Kondisi kultur agronomi dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat<br>4. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut<br>5. Belum adanya SDM yang bersertifikasi auditor lingkungan hidup<br>6. Belum diwujudkannya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan |
| 6   | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan<br>2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan<br>3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | 1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemerintah Desa<br>2. Pembinaan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di tingkat desa masih kurang<br>3. Jumlah status Desa Mandiri dan Desa Maju masih relatif sedikit dibandingkan Desa Berkembang dan Desa Tertinggal                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | URUSAN                                              | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     | 4. Belum optimalnya penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa secara partisipatif dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten                                                                                          |
|     |                                                     | 5. Masih banyaknya sengketa batas Desa                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                     | 6. Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)                                                                                                          |
|     |                                                     | 7. Belum optimalnya pengelolaan dan sistem yang mendukung pengelolaan keuangan desa                                                                                                                                                     |
|     |                                                     | 8. Belum maksimalnya pendataan dan pengelolaan aset desa                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     | 9. Belum optimalnya perencanaan, pemetaan dan pengembangan potensi desa                                                                                                                                                                 |
|     |                                                     | 10. Belum optimalnya penyusunan Produk Hukum Desa                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                     | 11. Belum optimalnya partisipasi <i>stakeholder</i> dan analisa masalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes                                                                                  |
|     |                                                     | 12. Tidak proporsionalnya alokasi program, kegiatan dan penganggaran terhadap urusan-urusan desa                                                                                                                                        |
|     |                                                     | 13. Belum maksimalnya implementasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa                                                                                                      |
|     |                                                     | 14. Belum optimalnya hubungan kerjasama antar lembaga yang menyelenggarakan dan mendukung pemerintahan desa sesuai dengan peran dan fungsinya                                                                                           |
|     |                                                     | 15. Belum maksimalnya pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes)                                                                                                                                                         |
|     |                                                     | 16. Terbatasnya sarana dan prasarana desa                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                     | 17. Minimnya kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, dengan mengembangkan berbagai sentra produksi berdasarkan potensi unggulan lokal                                                            |
|     |                                                     | 18. Terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan perkantoran desa yang terkoneksi secara teknologi baik sistem kerja maupun jaringan komunikasi dan teknologi informasi                                                                     |
| 8   | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1. Cakupan layanan dan intervensi program KB yang menyentuh bagi keluarga miskin dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada peningkatan keluarga miskin serta upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera |
|     |                                                     | 2. Belum ditetapkan standar klinis pelayanan KB yang harus diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ataupun yang harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, termasuk tubektomi interval                  |
|     |                                                     | 3. Belum berkembangnya kelompok masyarakat peduli KB yang diharapkan dapat memfasilitasi dan menopang program pemerintah                                                                                                                |
|     |                                                     | 4. Kurangnya sarana dan prasarana serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB                                                                                                            |

| NO. | URUSAN                                    | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | 5. Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja<br>6. Belum optimalnya komitmen dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan kampung KB yang mempromosikan dan melaksanakan manajemen keluarga berencana secara holistic<br>7. Belum adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | Urusan Perhubungan                        | 1. Belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, dan perdesaan<br>2. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, serta tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah<br>3. Kuantitas dan kualitas jalan masih belum memadai terutama di daerah terpencil dan ke sentra-sentra produksi<br>4. Tingginya potensi daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb<br>5. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil<br>6. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku kegiatan dalam melaksanakan dokumen andalalin yang dimiliki |
| 10  | Urusan Komunikasi dan Informatika         | 1. Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah<br>3. Pelayanan jaringan komunikasi belum merata, akses jaringan komunikasi antar desa masih terbatas<br>4. Kapasitas media lokal sebagai sarana informasi bagi masyarakat masih terbatas, selain itu penguasaan Teknologi Informasi masih rendah<br>5. Belum seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki penguasaan komprehensif tentang TIK<br>6. Masih terbatasnya sarana pendukung untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ <i>Smart City</i>                                                                                                                                                                |
| 11  | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Masih tingginya ketergantungan usaha mikro, kecil, dan koperasi pada bantuan pemerintah<br>2. Masih banyaknya koperasi yang tidak berlegalitas<br>3. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM<br>4. Sulitnya akses permodalan usaha terutama untuk usaha mikro dan kecil, serta koperasi, sehingga menyulitkan mereka mengakses ke lembaga keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NO. | URUSAN                         | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | 5. Sarana dan Prasarana IT untuk pengelolaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas                                                                                      |
|     |                                | 6. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Koperasi dan UMKM                                                                                             |
| 12  | Urusan Penanaman Modal         | 1. Adanya prosedur perijinan investasi yang belum kondusif dan menghambat kegiatan investasi dan operasional dunia usaha yang berimbas pada daya saing investasi daerah |
|     |                                | 2. Belum optimalnya promosi investasi daerah                                                                                                                            |
|     |                                | 3. Masih lemahnya koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi daerah                                                                                    |
| 13  | Urusan Kepemudaan dan Olahraga | 1. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga                                                                                                          |
|     |                                | 2. Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik                                                                                                                |
|     |                                | 3. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai                                                                             |
|     |                                | 4. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan                                                                                                                               |
| 14  | Urusan Statistik               | 1. Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang <i>update</i> dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan                                         |
|     |                                | 2. Lemahnya kontribusi data institusi yang didukung dengan kurangnya kompetensi aparatur terhadap ketersediaan data                                                     |
|     |                                | 3. Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan Kabupaten Kubu Raya disertai kemudahan akses dan distribusinya                                                  |
| 15  | Urusan Persandian              | 1. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM persandian                                                                                                               |
|     |                                | 2. Belum memadainya sarana dan prasarana persandian                                                                                                                     |
| 16  | Urusan Kebudayaan              | 1. Kurikulum pada institusi pendidikan belum memberi bobot yang besar pada pengembangan kebudayaan dan kesenian lokal                                                   |
|     |                                | 2. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah                                                                                                    |
|     |                                | 3. Minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal relatif rendah                                                     |
|     |                                | 4. Relatif terbatasnya kuantitas dan kualitas sanggar seni                                                                                                              |
| 17  | Urusan Perpustakaan            | 1. Masih rendahnya minat baca masyarakat                                                                                                                                |
|     |                                | 2. Masih terbatasnya berbagai literatur dan sarana penunjang keperpustakaan                                                                                             |
|     |                                | 3. Kurang terorganisirnya perpustakaan sesuai dengan aturan kearsipan                                                                                                   |
|     |                                | 4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sekolah                                                                                                                    |
|     |                                | 5. Kurangnya tenaga fungsional Pustakawan                                                                                                                               |
| 18  | Urusan Kearsipan               | 1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip daerah                                                                                                               |
|     |                                | 2. Kurangnya tenaga fungsional Arsiparis                                                                                                                                |
|     |                                | 3. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip                                                                                                                 |

| NO. | URUSAN                        | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | URUSAN PILIHAN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Urusan Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data potensi perikanan yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya terutama disebabkan oleh penjualan ilegal nelayan lokal dan <i>illegal fishing</i></li> <li>2. Terbatasnya penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) yang lebih maju</li> <li>3. Belum memadainya peralatan pendukung usaha perikanan, seperti kapal penangkap yang representatif, sarana pasar untuk komoditas perikanan, <i>cold storage</i>, dan pabrik pengolahan hasil perikanan</li> <li>4. Masih rendahnya produksi perikanan</li> <li>5. Masih terdapatnya bantuan operasional nelayan yang salah sasaran</li> <li>6. Pembinaan dan pendampingan bagi nelayan belum berlangsung secara berkelanjutan</li> <li>7. Masih rendahnya konsumsi ikan di masyarakat</li> <li>8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan</li> </ol> |
| 2   | Urusan Pariwisata             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kunjungan wisatawan manca negara di Kabupaten Kubu Raya</li> <li>2. Objek-objek wisata belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal</li> <li>3. Belum memadainya utilitas dan infrastruktur pariwisata sesuai standar di berbagai destinasi pariwisata</li> <li>4. Masih rendahnya minat investor untuk menanamkan modal pada bisnis pariwisata di Kabupaten Kubu Raya</li> <li>5. Masih lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku bisnis pariwisata, baik yang ada di Kabupaten Kubu Raya maupun di luar daerah</li> <li>6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosi pariwisata Kabupaten Kubu Raya</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |
| 3   | Urusan Pertanian              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tata kelola air</li> <li>2. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna, baik untuk kegiatan sebelum panen, saat panen, dan pasca panen untuk menunjang produktivitas pertanian</li> <li>3. Masih terdapat kendala dalam pemasaran hasil pertanian dan perkebunan secara berkesinambungan</li> <li>4. Keterlibatan pihak perbankan untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan masih sangat rendah, terkait risiko bisnis dan persoalan teknis lapangan</li> <li>5. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit <i>zoonosis</i></li> <li>6. Pembinaan dan pendampingan bagi petani belum berlangsung secara berkelanjutan</li> <li>7. Belum adanya rencana aksi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan peternakan</li> </ol>                                                     |

| NO. | URUSAN                                | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | 8. Belum terinventarisasi data lahan pertanian sebagai dasar penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Urusan Kehutanan                      | 1. Belum optimalnya pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis Kabupaten<br>2. Belum terimplementasikannya penetapan 13 (tiga belas) kawasan perhutanan sosial<br>3. Masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan pengamanan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1. Masih lemahnya data potensi, eksplorasi dan eksploitasi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kubu Raya<br>2. Insentif untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai sementara disinsentif untuk pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi energi dan konservasi energi belum dilaksanakan secara konsisten<br>3. Pasokan listrik PLN bagi konsumen belum optimal (kurang tersedianya listrik di daerah terpencil)<br>4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik                                                                              |
| 6   | Urusan Perdagangan                    | 1. Belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan di setiap kecamatan<br>2. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta pengembangan keunggulan lokal<br>3. Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif<br>4. Kurang terintegrasinya promosi perdagangan produk unggulan baik dari sisi hulu hilir<br>5. Belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan)<br>6. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pasar lokal                                                                                             |
| 7   | Urusan Perindustrian                  | 1. Masih lemahnya daya saing industri daerah<br>2. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif<br>3. Dalam pembinaan industri kecil dan menengah belum berkembangnya keterampilan tenaga kerja, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi, dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik<br>4. Agroindustri yang ada belum kreatif dan inovatif untuk membuat produk-produk turunan yang lebih bervariasi dari komoditas unggulan yang dimiliki<br>6. Belum adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)<br>7. Masih rendahnya produk industri kecil menengah yang memperoleh fasilitas HaKI |
| 8   | Urusan Transmigrasi                   | 1. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) sering mengabaikan penyelesaian legalitas lahan dan persetujuan masyarakat, sehingga berpotensi menjadi masalah hukum atas kepemilikan lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO. | URUSAN                   | PERMASALAHAN PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | 2. Kurangnya koordinasi lintas lembaga serta sosialisasi dan pemahaman terkait dengan program transmigrasi sehingga sering menimbulkan multitafsir seperti halnya pembebasan lahan; tuntutan ganti rugi tanah atas lahan transmigrasi oleh masyarakat                                                                                                                                                                            |
| IV  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | Pendapatan Daerah        | 1. Belum optimalnya penerimaan daerah dari pajak dan retribusi (dari sektor bahan galian dan jual beli tanah serta bangunan)<br>2. Belum tergalinya potensi penerimaan daerah lainnya<br>3. Masih rendahnya kesiapan SDM dan kelembagaan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak yang dialihkan pemerintah pusat ke daerah<br>4. Masih minimnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum terbentuknya BUMD |

#### 4.2. Isu Strategis

##### 4.2.1. Isu Strategis Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 disebutkan bahwa isu strategis nasional adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sumber daya alam
2. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi
3. Transformasi struktural berjalan lambat
4. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital

##### 4.2.2. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dirumuskan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

1. Perlambatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berasal dari penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus dan terjadinya penurunan permintaan ekspor akan barang dari luar negeri
2. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran
3. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah
4. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian

5. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan
6. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi
7. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal
8. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah

#### **4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Kubu Raya**

Isu-isu strategis merupakan acuan pemerintah dalam penentuan prioritas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Penetapan isu-isu strategis Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada analisis kondisi aktual dan permasalahan-permasalahan saat ini maupun yang berpotensi muncul di masa depan. Penetapan ini juga mengakomodasi isu-isu strategis dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang relevan dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya.

Dari penjabaran permasalahan pembangunan di Kubu Raya secara umum yang dijabarkan berdasarkan urusan, kemudian dilakukan penapisan melalui kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kondisi riil masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan KLHS difokuskan pada pencapaian tujuan *Sustainability Development Goals (SDG's)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS merupakan suatu kajian dampak dari sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Oleh karena itu, hasil dari kajian ini bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan kata lain, dengan adanya Pengendalian Lingkungan KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Kubu Raya. Untuk Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 masih menggunakan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 karena data kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup masih relevan untuk digunakan.

Ketercapaian indikator tujuan *Sustainability Development Goals* (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**  
**di Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Tujuan                                                                                                                                                   | Indikator | Pencapaian Indikator TPB |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                          |           | Tercapai                 | Tidak Tercapai | Tidak Ada Data |
| 1.  | Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, dimanapun                                                                                                     | 18        | 5                        | 8              | 5              |
| 2.  | Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan                                        | 10        | 8                        | 2              | 0              |
| 3.  | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia                                                                 | 26        | 9                        | 8              | 9              |
| 4.  | Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua                                  | 9         | 2                        | 6              | 1              |
| 5.  | Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan                                                                                              | 6         | 3                        | 3              | 0              |
| 6.  | Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua                                                           | 12        | 1                        | 7              | 4              |
| 7.  | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua                                                                       | 3         | 2                        | 0              | 1              |
| 8.  | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | 9         | 2                        | 5              | 2              |
| 9.  | Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi                                           | 8         | 3                        | 1              | 4              |
| 10. | Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara                                                                                                            | 9         | 4                        | 0              | 5              |
| 11. | Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan                                                                                  | 11        | 0                        | 1              | 10             |
| 12. | Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan                                                                                                   | 5         | 1                        | 2              | 2              |
| 13. | Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya                                                     | 2         | 0                        | 0              | 2              |
| 14. | Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan                                     | 2         | 0                        | 2              | 0              |

| No. | Tujuan                                                                                                                                                                                                  | Indikator  | Pencapaian Indikator TPB |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         |            | Tercapai                 | Tidak Tercapai | Tidak Ada Data |
| 15. | Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati | 3          | 1                        | 2              | 0              |
| 16. | Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan | 12         | 5                        | 4              | 3              |
| 17. | Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan                                                                                                       | 4          | 2                        | 0              | 2              |
|     | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                            | <b>149</b> | <b>48</b>                | <b>51</b>      | <b>50</b>      |

Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) indikator di 17 (tujuh belas) tujuan tersebut, 48 (empat puluh delapan) indikator tercapai (32,21 persen), 51 (lima puluh satu) indikator tidak tercapai (34,22 persen) dan 50 (lima puluh) indikator tidak tersedia datanya (33,56 persen). Tingginya angka indikator tujuan TPB yang tidak tercapai kemungkinan terkait kewenangan, dimana beberapa indikator dalam tujuan TPB bukan kewenangan Kabupaten sehingga sulit bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan intervensi lebih jauh.

Adapun permasalahan yang berasal dari kondisi riil Kabupaten Kubu Raya antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Permasalahan Kemiskinan**

Dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2020. Terlihat pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya sebesar 4,74 persen, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,42 persen. Menurun 0,32 poin dari tahun 2019. Atau jumlah penduduk miskin tahun 2020 tinggal sebesar 25,90 ribu jiwa. Menurun 1.470 jiwa terhadap tahun 2019.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah angka Provinsi dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,19 dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,17 persen.

Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Kubu Raya lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun angka kemiskinan yang masih berada di atas 4 persen antara lain disebabkan oleh:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terjangkau secara optimal
- b. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin
- c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin
- d. Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah

## **2. Permasalahan Pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,04 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 5,62 persen. Kondisi ini berubah pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Jumlah pengangguran di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 sebesar 7,14 persen, meningkat 1,52 persen dari tahun 2019. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya menduduki peringkat kelima tingkat Pengangguran Terbuka setelah Kabupaten Mempawah sebesar 7,55 persen, Kabupaten Ketapang sebesar 7,30 persen, Kota Singkawang 8,78 persen, dan peringkat tertinggi yaitu Kota Pontianak sebesar 12,36 persen.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pengangguran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan jumlah pengangguran di Kabupaten Kubu Raya pada 2020 sebesar 1,52 persen dari tahun 2019. Kondisi ini tidak lebih buruk dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya seperti Kabupaten Mempawah naik sebesar 2,36 persen, Kota Singkawang sebesar 2,34 persen, serta kenaikan tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 3,23 persen.

## **3. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah**

Masalah utama dalam meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi makro Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain:

- a. Pertumbuhan PDRB
- b. PDRB Per Kapita

- c. Laju Inflasi
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas jika tidak segera dikelola secara *komprehensif*, maka baik langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada lemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan, yang akan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan pada akhirnya akan melemahkan daya saing pemerintah daerah.

#### **4. Permasalahan Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur dasar yang dimaksud di sini adalah fasilitas jalan, jembatan, dermaga dan irigasi. Di Kabupaten Kubu Raya, dermaga masuk menjadi kelompok infrastruktur dasar karena wilayahnya yang didominasi oleh wilayah pesisir. Irigasi juga masuk dalam kelompok infrastruktur dasar tidak hanya karena masyarakatnya mayoritas petani, tapi juga karena wilayahnya didominasi lahan gambut yang memerlukan tata air yang baik.

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan, jembatan dan dermaga tidak hanya membuka keterisolasian masyarakat di wilayah pedalaman, tapi juga menjadi faktor penting dalam rantai pemasaran produk-produk desa. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih dalam kondisi belum memadai.

Pertumbuhan jalan masih sangat lambat secara umum. Penambahan ruas jalan baru per tahun hanya 100 km, tidak berimbang dengan pertambahan jumlah kendaraan. Demikian pula dengan pertambahan jumlah jembatan. Jembatan menjadi salah satu sarana infrastruktur vital di Kabupaten Kubu Raya mengingat kondisi wilayah yang memiliki banyak sungai dan anak sungai.

Rendahnya daya dukung infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat secara umum. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya telah dibagi posisi masing-masing kecamatan dan desa dalam tata struktur wilayah. Hal tersebut hendaknya menjadi acuan bagi perencana dalam meletakkan fasilitas-fasilitas infrastruktur sesuai tingkatan struktur wilayah sehingga tidak terjadi kesalahan perencanaan dan wilayah-wilayah yang direncanakan menjadi wilayah pendorong atau pemicu bagi wilayah

sekitarnya dapat dicapai. Dengan demikian efisiensi penganggaran dapat dioptimalkan.

## **5. Permasalahan di Bidang Pelayanan Dasar**

Masalah pokok di bidang pembangunan kemasyarakatan adalah masih belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat. Jenis layanan dasar masyarakat terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Di bidang pendidikan, pemerataan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu isu utama. Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terbagi antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan membuat disparitas ketersediaan fasilitas pelayanan dasar terlihat lebih mencolok. Fasilitas dan tenaga pendidik terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan sedangkan di daerah perdesaan masih kekurangan keduanya.

Di bidang kesehatan, sarana kesehatan sudah cukup memadai dari segi fisik gedung pelayanan. Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type D, dan juga terdapat beberapa rumah sakit vertikal milik TNI dan beberapa klinik swasta, bahkan puskesmas yang ada di Kecamatan juga sudah berfungsi sebagai Puskesmas Rawat Inap. Hanya masalah tenaga kesehatan terutama dokter/dokter spesialis yang belum merata, demikian pula dengan prasarana unit kesehatan standar seperti pelayanan USG bagi ibu hamil atau pun sarana X Ray atau alat-alat laboratorium di puskesmas-puskesmas di kecamatan, fasilitas kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular terutama Covid-19 juga masih perlu banyak penambahan.

Penyakit menular juga menjadi salah satu permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Kubu Raya. Penyakit-penyakit menular ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kabupaten Kubu Raya, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (Covid-19) yang tertular dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya atau penularan dari warga yang berkunjung dari kota lain, antara lain:

- a. Penyakit menular potensial mewabah: diare, demam berdarah (*dengue*), dan malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor, konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi, dan kebiasaan sebagian kecil masyarakat yang masih menerapkan budaya

- buang air besar (BAB) di sungai sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Penyakit menular endemik tinggi: tuberkulosis paru, di mana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
  - c. Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit: penyakit menular seksual, sifilis (raja singa), gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
  - d. Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan secara khusus Kabupaten Kubu Raya mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun *Work From Home* (WFH) maupun *School From Home* (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan sosial (*social distancing*) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatas sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan sosial meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi Covid-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang membuat urusan ketataruangan di Kabupaten Kubu Raya sedikit terlambat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Perda Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya baru ditetapkan pada tahun 2016 dan saat ini belum memiliki peraturan detail tata ruang (RDTR).

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, saat ini urusan tata ruang di Kabupaten Kubu Raya baru berada di tahapan perencanaan dan mulai bergerak pada tahapan pemanfaatan. Sedangkan

tahapan pengendalian masih sangat rendah dan hampir tidak tersentuh. Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pada tahun 2014 yang berkedudukan di BAPPEDA, dan sejak tahun 2019 berganti menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) berkedudukan di Dinas PUPRPRKP. Tim ini merupakan tim *ad hoc* yang dibentuk untuk membahas persoalan-persoalan tata ruang di tingkat kabupaten.

Di bidang sosial, kemiskinan juga merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Dimana kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi, dimana hal ini juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

## **6. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kapasitas fiskal daerah merupakan faktor utama pendukung kegiatan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dan terjadinya *loss of income* pada sektor bahan galian dan BPHTB. Hal ini menyebabkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masih besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal

394 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan.

## **7. Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup**

Kualitas kelestarian lingkungan hidup harus tetap dijaga dalam kerangka mencegah dan mengendalikan kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) dari dampak aktivitas sosial perekonomian. SDA Kabupaten Kubu Raya yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

### **a. *Mangrove***

Ekosistem *mangrove* di Kabupaten Kubu Raya terus menerus mengalami penurunan. *Mangrove* yang memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengurangi emisi karbon dan penahan abrasi pantai mutlak harus dilindungi. Meskipun Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW-nya, namun upaya penyelamatan *mangrove* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih sangat lambat. Kesejahteraan masyarakat di kawasan *mangrove* berkaitan erat dengan penyelamatan kawasan *mangrove* karena ketidakadaan alternatif ekonomi bagi masyarakat di kawasan *mangrove* membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain merambah *mangrove* sebagai sumber mata pencaharian.

### **b. Gambut**

Sama halnya dengan *mangrove*, gambut juga menjadi ciri khas Kabupaten Kubu Raya dan memegang peranan penting dalam penyimpanan cadangan karbon. Gambut di Kabupaten Kubu Raya meliputi hampir 80 persen wilayah dan tersebar tidak hanya di desa-desa namun juga daerah perkotaan dengan kedalaman yang bervariasi. Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah *hinterland* Kota Pontianak saat ini menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan wilayah perkotaan terutama kebutuhan akan pengembangan pemukiman. Banyak wilayah-wilayah gambut di perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang telah dirambah dan dibuka secara besar-besaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam pengelolaan kawasan gambut sehingga dalam 2 tahun terakhir sering terjadi kebakaran lahan saat musim kering dan banjir saat musim penghujan.

c. Air tanah dan air permukaan

Pembangunan industri hiburan dan pariwisata serta kawasan pemukiman di Kabupaten Kubu Raya dalam tiga tahun belakangan ini sangat masif. Bertambahnya aktivitas masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan membuat kebutuhan air meningkat dan perusahaan daerah yang memberikan layanan air bersih juga masih sangat terbatas cakupan pelayanannya. Hal ini mendorong masyarakat dan pengusaha memanfaatkan air tanah dan air permukaan secara berlebihan. Dikhawatirkan jika pemanfaatan air tanah dan air permukaan tidak dikendalikan, dalam arti hanya sebatas eksploitasi saja sementara pengendalian dan perlindungan tidak dilakukan dapat berdampak negatif pada lingkungan.

## **8. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi**

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi juga masih perlu mendapatkan perhatian. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan belum dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengembangan kompetensi dan kemampuan manajerial ASN juga menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang peningkatan kompetensi ASN. ASN dituntut untuk tidak hanya mengikuti pelatihan dan Diklat-diklat keahlian namun juga wajib mengikuti pelatihan dan diklat-diklat struktural. Di Kabupaten Kubu Raya, jumlah pejabat struktural yang sudah menempuh diklat struktural masih sangat minim dan perkembangannya sangat lambat. Data keikutsertaan ASN dalam diklat struktural dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3.**  
**Data Pejabat Struktural yang Sudah dan Belum Mengikuti**  
**Diklat Kepemimpinan di Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Jenis Diklat   | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020       |            |
|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                | Sudah      | Belum      | Sudah      | Belum      | Sudah      | Belum      | Sudah      | Belum      |
| 1.  | Diklat PIM II  | 11         | 20         | 11         | 12         | 12         | 10         | 8          | 20         |
| 2.  | Diklat PIM III | 35         | 73         | 47         | 72         | 99         | 41         | 24         | 118        |
| 3.  | Diklat PIM IV  | 152        | 273        | 149        | 259        | 215        | 133        | 105        | 345        |
|     | <b>TOTAL</b>   | <b>198</b> | <b>366</b> | <b>207</b> | <b>343</b> | <b>326</b> | <b>184</b> | <b>137</b> | <b>483</b> |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya, 2021

Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar SKPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

**9. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berkolerasi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan selanjutnya berdampak domino terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

- a. Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel
- b. Penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, cepat, tepat, mudah dan murah
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
- e. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan benar perlu

terus menerus diwujudkan, terutama meliputi perundang-undangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta *mind set* dan *culture set*. Perlunya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

**10. Permasalahan dalam Penegakan Peraturan Daerah**

Penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti dengan Lembaga Legislatif (DPRD), akan terus didorong dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

**11. Kerja Sama Antar Daerah dan Dunia Usaha**

Permasalahan di bidang kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah, sejauh ini masih belum optimal. Kerangka kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara konkrit, masih ditemui berbagai kendala baik teknis maupun administratif. Dengan demikian, Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU)/*Memorandum of Understanding* yang telah disepakati oleh berbagai pihak, terhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan daya saing pemerintah daerah, maka berbagai kesepakatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama akan diimplementasikan. Dengan implementasi tersebut diharapkan akan mendorong terjadinya berbagai kemajuan, diantaranya meningkatnya arus investasi, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan terbukanya lapangan kerja baru.

Permasalahan pembangunan di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Permasalahan                          | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kemiskinan                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi kenaikan angka kemiskinan dalam pada tahun 2016 dan 2017, tapi kemudian di tahun 2018-2020 mengalami penurunan</li> <li>• Indeks Gini dari tahun 2016-2020 secara garis besar mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 sempat meningkat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Pengangguran                          | Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, tapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan terutama disebabkan karena adanya pandemi Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | Pertumbuhan Ekonomi Makro Daerah      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita cenderung melambat, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan</li> <li>• Angka Inflasi berfluktuasi tapi cenderung meningkat pada kebutuhan dasar seperti Listrik dan Gas serta sektor Transportasi</li> <li>• Angka Pengangguran Terbuka cenderung tinggi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Infrastruktur Dasar                   | Jalan, Jembatan, Dermaga dan sarana Irigasi yang ada masih dalam kondisi buruk dan penyebarannya tidak merata di setiap kecamatan dan desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | Pelayanan Dasar                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan : tidak meratanya sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan</li> <li>• Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan terutama untuk penanganan kesehatan ibu hamil dan pemeriksaan laboratorium dasar</li> <li>- Masih belum selesainya pandemi Covid-19</li> </ul> </li> <li>• Penataan Ruang : RDTR belum ada. Masalah penataan ruang baru pada tataran perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang masih sangat terbatas dan belum sampai pada pengendalian tata ruang</li> <li>• Sosial : penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum optimal</li> </ul> |
| 6   | Pengelolaan Keuangan Daerah           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kapasitas fiskal daerah</li> <li>• Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah belum optimal</li> <li>• Informasi keuangan daerah belum terpublikasi dengan baik</li> <li>• Pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah belum optimal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem <i>mangrove</i> terancam demikian pula dengan perekonomian masyarakat di sekitarnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | Permasalahan                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lahan gambut mengalami eksploitasi besar-besaran sehingga rawan akan bencana kebakaran dan banjir</li><li>• Air Tanah dan air permukaan mengalami peningkatan eksploitasi seiring berkembangnya industri hiburan dan rekreasi serta sektor pemukiman</li></ul>                                                             |
| 8   | Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penempatan aparatur belum sesuai dengan kebutuhan organisasi</li><li>• Penempatan aparatur belum proporsional antar kecamatan</li><li>• Penerapan manajemen aparatur sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN belum optimal</li><li>• Pengembangan kompetensi dan kemampuan manajerial ASN masih sangat terbatas</li></ul> |
| 9   | Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel</li><li>• Perlu peningkatan pelayanan publik</li><li>• Harus berorientasi pada pemenuhan SPM dan SOP</li></ul>                                              |
| 10  | Penegakan Peraturan Daerah                    | Penegakan peraturan daerah belum optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha        | Belum ada kerangka kerjasama yang konkrit antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal, maka rumusan isu strategis Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

**1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien**

Dalam rangka menjawab isu strategis belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*one data-one entry-one solution*), yang berimplikasi pada:
  - 1) Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan terintegrasi (*e-government*)
  - 2) Percepatan penguatan manajemen sekolah yang sistemik dan terintegrasi
  - 3) Penguatan manajemen persampahan

- 4) Penguatan manajemen penanggulangan kemiskinan terpadu
  - 5) Penataan ulang data dan pengelolaan pendapatan asli daerah
  - 6) Kemudahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan
  - 7) Sarjana kembali ke desa melalui rekrutmen admin desa, kecamatan, puskesmas, UPT pendidikan dan organisasi perangkat daerah
  - 8) Menerapkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang terintegrasi dengan program-program unggulan daerah
- b. Pemenuhan fasilitas layanan pemerintahan dengan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dan beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - c. Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
  - d. Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
  - e. Reviu peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan
  - f. Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) indikator
  - g. Meningkatkan ruang kerja sama dan kemitraan (*government to government, government to corporations, dan government to non-governmental organizations*)
  - h. Pengembangan kelompok-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan
  - i. Peningkatan tertib administrasi kependudukan
  - j. Penerapan sistem non-tunai dalam pengelolaan Dana Desa melalui inovasi *Cash Management System* (CMS)
  - k. Penerapan kurikulum wakaf
  - l. Pemekaran Kecamatan dan Desa

## **2. Belum optimalnya pelayanan mendasar serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

### **a. Bidang Pendidikan**

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang pendidikan, khususnya yang menjadi kewenangan pemda kabupaten sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
- 2) Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- 4) Peningkatan kualitas pembelajaran yang bertujuan meningkatkan daya saing lulusan untuk memasuki pasar kerja
- 5) Pemerataan kualifikasi dan penempatan guru
- 6) Pemantapan kesejahteraan guru

### **b. Bidang Kesehatan**

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
- 2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis
- 4) Kepastian layanan jaminan kesehatan
- 5) Pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis
- 6) Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)
- 7) Layanan “jemput bola” untuk mengatasi masalah *stunting* (berat badan rendah/BBR) dan gizi buruk untuk mendukung Program Kesehatan Selasa Jum’at Terpadu (Salju Terpadu)
- 8) Pencegahan dan penurunan angka terkonfirmasi Covid-19

### **c. Bidang Sosial**

Dalam rangka menjawab isu strategis bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- 1) Fasilitasi kebijakan peningkatan penanganan PPKS
- 2) Penguatan keterpaduan penanggulangan kemiskinan daerah
- 3) Pemberdayaan kelembagaan sosial
- 4) Penguatan jejaring pengaman sosial
- 5) Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba

### **3. Belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata**

Dalam rangka menjawab isu strategis pada sektor infrastruktur dasar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan penanganan jalan poros dan jalan lingkungan)
- b. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD
- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas jembatan
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas irigasi
- e. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih
- f. Penanganan banjir dan abrasi
- g. Pembangunan fasilitas umum milik pemerintah, yaitu Masjid Agung dan GOR Kabupaten Kubu Raya

### **4. Belum memadainya penguatan struktur ekonomi melalui perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian**

Dalam rangka menjawab isu strategis pada sektor penguatan struktur ekonomi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dasar, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- b. Peningkatan iklim investasi perdagangan dan perindustrian di semua tingkatan/skala
- c. Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi

- d. Pembangunan, peningkatan, penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
- e. Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect*
- f. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian
- g. Pengembangan hortikultura, peternakan, budi daya perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis kelompok dan rumah tangga yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
- h. Pembangunan dan/atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi
- i. Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya

Selain itu untuk penguatan struktur ekonomi juga dilakukan dengan membangun perekonomian berbasis pesantren, dimana saat ini jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak. Untuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini dilakukan melalui pemberdayaan santri, pesantren serta alumni pondok pesantren. Program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan yang Islami kepada para santri, mendorong menjadi *start up* bisnis di sektor ekonomi syariah serta menghasilkan produk pesantren yang unggul, berdaya saing, inovatif dan kompetitif. Selain itu juga bertujuan menjadikan pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat sekitar yang saling menguntungkan bagi masyarakat, mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi dalam pemberdayaan ekonomi pesantren serta membangun sinergi antar pondok pesantren untuk ekosistem bisnis yang berkualitas. Program pembangunan ekonomi berbasis pesantren ini disinergikan dengan program-program yang ada di SKPD dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan perekonomian Kabupaten Kubu Raya.

## **5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan berkelanjutan**

Dalam rangka menjawab isu strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan

berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup
- c. Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut

**6. Belum optimalnya penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan lokal**

Dalam rangka menjawab isu strategis pada penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada:

- a. Fasilitasi kebijakan penguatan kelompok kerja pengelolaan keuangan dan aset desa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
- b. Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun (IDM) melalui strategi “*Kepong Bakol*” guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal
- c. Pemberdayaan masyarakat di perdesaan dalam mengurangi derasnya arus urbanisasi
- d. Optimalisasi aset-aset sumber daya alam perdesaan (lahan desa)
- e. Penguatan produktivitas pangan perdesaan yang dikuasai non warga perdesaan
- f. Pemberdayaan kaum muda di perdesaan
- g. Pengembangan dan pemberdayaan Bumdes dan Bumdesma
- h. Pengembangan potensi atau Produk Unggulan Desa (Prokudes)

**7. Belum optimalnya pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budaya lokal**

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan yang bertumpu pada:

- a. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan partisipasi rohaniwan

- b. Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji
- c. Peningkatan dorongan pembinaan dan kegiatan kerohanian
- d. Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan
- e. Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
- f. Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan pembinaan kerohanian
- g. Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti

**8. Belum optimalnya peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga**

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Fasilitasi kebijakan pengembangan model peningkatan kemandirian pangan
- b. Fasilitasi kebijakan pengembangan model peningkatan kemandirian ekonomi dan daya beli keluarga

**9. Belum optimalnya pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi Pasangan Usia Subur (laki-laki dan perempuan) sebagai akseptor KB
- b. Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu
- c. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis *home industry*
- d. Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
- e. Fasilitasi kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas Kampung KB

#### **10. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif**

Dalam rangka menjawab isu strategis pengoptimalan peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
- b. Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa
- c. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan

#### **11. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah**

Kabupaten Kubu Raya mempunyai potensi yang cukup besar di sektor pertanian, sektor perkebunan tanaman jenis kelapa dalam dan sektor perikanan. Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang investasi bagi para investor sehingga dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Dalam mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya ini diperlukan pengelolaan yang mandiri dan profesional, selain memberikan kesempatan usaha secara umum dan utamanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan pengelolaan yang optimal dapat menjadikan potensi dan keunggulan memberikan manfaat dan menunjang keberlangsungan layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tetapi saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bekerjasama dan menjadi wadah (*holding*) bagi BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan potensi sektor-sektor unggulan.

Di sektor Penerangan Jalan Umum, pada situasi dan kondisi dimana jaringan kabel PLN tidak tersedia optimal dan dengan biaya yang sangat mahal, sistem lampu penerangan jalan tenaga surya merupakan salah satu solusi permasalahan dan dibutuhkan pembentukan BLUD untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya.

Sebelas isu strategis sebagaimana terdapat dalam daftar di atas merupakan elaborasi antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis provinsi (regional), nasional dan internasional. Hal tersebut berarti bahwa kesebelas isu tersebut sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Secara ringkas elaborasi isu-isu strategis daerah, nasional dan internasional tersaji dalam Tabel 4.5 berikut.

**TABEL 4.5.**  
**Isu-Isu Strategis**

| Isu-Isu Strategis Global                                                                                                         | Isu-Isu Strategis Nasional                                                                                                                                                        | Isu-Isu Strategis Propinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isu-Isu Strategis KLHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Isu-Isu Strategis Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perlambatan ekonomi global<br>2. SDG's<br><i>Transforming our world :<br/>The 2030 Agenda for<br/>Sustainable Development</i> | 1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam<br>2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi<br>3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat<br>4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital | 1. Perlambatan ekonomi menjadi dampak covid-19 yang berasal dari penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus dan terjadinya penurunan permintaan ekspor akan barang dari luar negeri<br>2. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran<br>3. Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relative rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah | 1. Peningkatan ketahanan pangan, penurunan <i>stunting</i> , dan pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui<br>2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat<br>3. Meningkatkan pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar<br>4. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan<br>5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang layak dan produktif<br>6. Membangun infrastruktur yang layak, meningkatkan akses dan konektivitas guna mengurangi kesenjangan antar wilayah | 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif, efektif dan efisien<br>2. Belum optimalnya pelayanan dasar serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)<br>3. Belum memadainya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata<br>4. Belum memadainya penguatan struktur ekonomi melalui perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian<br>5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis spasial dan pembangunan berkelanjutan |

| Isu-Isu Strategis Global | Isu-Isu Strategis Nasional | Isu-Isu Strategis Propinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Isu-Isu Strategis KLHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isu-Isu Strategis Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                            | <p>4. Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian</p> <p>5. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>6. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi</p> <p>7. Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal</p> | <p>7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dan para pemangku kepentingan</p> <p>8. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan</p> <p>9. Penanganan kawasan kumuh, mewujudkan Kota Layak Huni dan meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</p> <p>10. Penyusunan dokumen kebencanaan dan mitigasi bencana</p> <p>11. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya perikanan</p> <p>12. Pengendalian pemanfaatan tata ruang</p> <p>13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik</p> | <p>6. Belum optimalnya penguatan kemandirian desa berbasis potensi desa dan kearifan local</p> <p>7. Belum optimalnya pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budaya lokal</p> <p>8. Belum optimalnya peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>9. Belum optimalnya pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>10. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif</p> <p>11. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah</p> |

| Isu-Isu Strategis Global | Isu-Isu Strategis Nasional | Isu-Isu Strategis Propinsi                                                                                                                                                                              | Isu-Isu Strategis KLHS | Isu-Isu Strategis Kabupaten |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                          |                            | 8. Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah |                        |                             |

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara *sustainable* atau berkelanjutan. Perencanaan pembangunan diselaraskan dengan visi dan misi daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya Visi, maka segala sumber daya dapat dipergunakan secara terarah dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan hidup/berwawasan kelestarian lingkungan (*sustainable*) guna mewujudkan kondisi akhir yang diinginkan bersama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai:

1. Arah bagi semua kebijakan pembangunan;
2. Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai dalam kebijakan pembangunan;
3. Acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan;
4. Sarana untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan.

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,  
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS**

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah:

- 1. Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:
  - a. Peningkatan derajat kesehatan
  - b. Peningkatan derajat pendidikan
  - c. Pekerjaan yang memadai
  - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
  - e. Ketersediaan waktu luang
  - f. Keharmonisan hubungan sosial
  - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
  - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
  - i. Keamanan yang kondusif
- 2. Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
  - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
  - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
  - d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - e. Jaminan keadilan yang meliputi:
    - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan
    - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*)
    - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat

3. **Terdepan;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.
4. **Berkualitas;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. **Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

## 5.2. Misi

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, artinya Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan,

Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya sistem pendeteksian dini (*early warning system*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundangundangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup:

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

**Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**

Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar.
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun yang terpenting adalah sebagai subyek utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan produktif menentukan keberhasilan pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menciptakan manusia-manusia yang unggul, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, serta Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat peningkatan daya beli, serta penurunan angka kemiskinan.

Dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia memerlukan aksesibilitas dalam membuka konektivitas wilayah-wilayah yang terisolir dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Penunjang utama dalam pembangunan adalah ketersediaan dan kemajuan infrastruktur. Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur pada satu sisi akan mendukung kemajuan di bidang kemajuan bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta di sisi lain akan mendukung kemajuan bidang ekonomi dan aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan

perkotaan dan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan, serta memberikan kegairahan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pada kondisi era pandemi Covid-19, percepatan pembangunan infrastruktur akan membantu konektivitas antar daerah bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kualitas hidup mencakup juga upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga mencakup upaya-upaya menciptakan kondisi yang kondusif, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya keamanan, ketertiban dan keindahan, serta mencerminkan masyarakat yang tertib hukum.

**Misi Ketiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Otonomi Desa merupakan kemampuan nyata pemerintahan desa dan masyarakat desa guna mengatur dan mengelola sumber daya desa melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan otonomi desa memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta pengelolaan dana pembangunan desa. Selain itu, penguatan otonomi desa juga memerlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan mencerminkan pemberdayaan: penguatan ekonomi kerakyatan; kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi usaha pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM); daya tarik investasi desa; pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan perdagangan; serta kapasitas dan perluasan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

**Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**

Kabupaten Kubu Raya mempunyai kekayaan nilai-nilai agamis. Nilai-nilai agamis tersebut menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat

Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan dan memelihara kehidupan berdampingan dengan latar belakang agama. Sikap dan perilaku toleransi tersebut perlu dikembangkan sehingga menjadi penyemangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka memperkuat pilar-pilar kebangsaan (nasionalisme).

**Misi Kelima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Perempuan sebagai tiang negara mempunyai peran yang sangat penting, maka perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi sosial-ekonomi perempuan di Kabupaten Kubu Raya yakni upaya-upaya yang menggambarkan:

1. Pengarusutamaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat.
2. Perumusan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.
3. Dorongan tumbuhnya komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumber daya dan informasi program-program pemberdayaan, baik pemerintah, swasta maupun organisasi non pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam bentuk:

1. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian keberpihakan pada peningkatan ekonomi perempuan.
2. Peningkatan fungsi dan organisasi perempuan dalam pemasaran soal program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
3. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

#### **Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)**

##### Tujuan:

Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

##### Sasaran:

1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

#### **Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**

##### Tujuan:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah
3. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

##### Sasaran:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan konektivitas wilayah
4. Meningkatkan kualitas perumahan yang sehat

5. Meningkatnya daya saing daerah
6. Meningkatnya sektor UMKM
7. Meningkatnya investasi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
10. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana

**Misi Ketiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Tujuan:

Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran:

Meningkatnya status desa

**Misi Keempat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**

Tujuan:

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
2. Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)

**Misi Kelima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Tujuan:

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak

Sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak

Tabel 5.1.  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS

| No. | Misi                                                                                                                  | Tujuan |                                                                                                    | Indikator Tujuan |                                  | Sasaran |                                                    | Indikator Sasaran |                                   | Satuan   | Realisasi Capaian |                 | Target Capaian  |                 |                 |                 | Kondisi Akhir   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  |         |                                                    |                   |                                   |          | 2019              | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |                 |
| 1.  | Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> ) | T.1    | Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa | 1                | Indeks Reformasi Birokrasi       |         |                                                    |                   |                                   | -        | CC<br>(50,35)     | CC<br>(51,56)   | B<br>(60,00)    | B<br>(62,00)    | B<br>(64,00)    | B<br>(66,00)    | B<br>(66,00)    |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  | S.1     | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat  | 1                 | Indeks Kepuasan Masyarakat        | -        | Baik<br>(83,48)   | Baik<br>(84,14) | Baik<br>(85,00) | Baik<br>(86,00) | Baik<br>(87,00) | Baik<br>(88,00) | Baik<br>(88,00) |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  | S.2     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan    | 2                 | Nilai SAKIP                       | -        | CC<br>(56,32)     | CC<br>(58,66)   | B<br>(61,00)    | B<br>(64,50)    | B<br>(68,00)    | BB<br>(71,50)   | BB<br>(71,50)   |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  |         |                                                    | 3                 | Opini BPK                         | Predikat | WTP               | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             |
| 2   | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat                                   | T.2    | Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing                                                | 2                | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |         |                                                    |                   |                                   | -        | 67,65             | 67,95           | 68,13           | 68,72           | 69,41           | 70,01           | 70,01           |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  | S.3     | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | 4                 | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) | Tahun    | 13,64             | 13,85           | 13,95           | 14,09           | 14,26           | 14,41           | 14,41           |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  |         |                                                    | 5                 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)      | Tahun    | 6,82              | 6,83            | 6,84            | 7,00            | 7,10            | 7,20            | 7,20            |
|     |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |                  |                                  | S.4     | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat          | 6                 | Angka Usia Harapan Hidup          | Tahun    | 70,43             | 70,59           | 70,72           | 70,89           | 71,03           | 71,25           | 71,25           |

| No. | Misi | Tujuan                                                   |    | Indikator Tujuan                 |                                            | Sasaran                                |                              | Indikator Sasaran                |               | Satuan         | Realisasi Capaian |                | Target Capaian |                |                |       | Kondisi Akhir |
|-----|------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
|     |      |                                                          |    |                                  |                                            |                                        |                              |                                  |               |                | 2019              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024  |               |
|     | T.3  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah | 3  | Indeks Infrastruktur             |                                            |                                        |                              |                                  | -             | 59,64          | 59,19             | 61,54          | 63,22          | 65,01          | 66,74          | 66,74 |               |
|     |      |                                                          |    |                                  | S.5                                        | Meningkatnya konektivitas wilayah      | 7                            | Indeks Konektivitas              | -             | 4,00           | 3,11              | 3,78           | 4,22           | 4,67           | 5,00           | 5,00  |               |
|     |      |                                                          |    | 8                                |                                            |                                        | Indeks Moblitas              | -                                | 0,44          | 0,39           | 0,42              | 0,45           | 0,47           | 0,48           | 0,48           |       |               |
|     |      |                                                          |    | S.6                              | Meningkatnya kualitas perumahan yang sehat | 9                                      | Persentase Rumah Layak Huni  | %                                | N/A           | 89,00          | 90,00             | 91,00          | 92,00          | 93,00          | 93,00          |       |               |
|     |      |                                                          | 10 |                                  |                                            | Persentase Daerah Bebas Genangan       | %                            | 32,05                            | 38,52         | 39,00          | 40,00             | 45,00          | 50,00          | 50,00          |                |       |               |
|     | T.4  | Meningkatnya kualitas perekonomian daerah                | 4  | Laju Pertumbuhan Ekonomi         |                                            |                                        |                              |                                  | %             | 5,72           | -2,43             | 4,28           | 4,99           | 6,07           | 6,59           | 6,59  |               |
|     |      |                                                          | 5  | Angka Kemiskinan                 |                                            |                                        |                              |                                  | %             | 4,74           | 4,42              | 4,39           | 4,16           | 4,03           | 3,97           | 3,97  |               |
|     |      |                                                          |    | S.7                              | Meningkatnya daya saing daerah             | 11                                     | Pertumbuhan PDRB             | %                                | 5,72          | -2,43          | 4,28              | 4,99           | 6,07           | 6,59           | 6,59           |       |               |
|     |      |                                                          |    | S.8                              | Meningkatnya sektorUMKM                    | 12                                     | Laju pertumbuhan UMKM        | Omset                            | 8.035.540.000 | 13.451.800.000 | 45.430.612.675    | 54.971.041.337 | 60.468.145.470 | 66.514.960.017 | 66.514.960.017 |       |               |
|     |      |                                                          |    | S.9                              | Meningkatnya investasi                     | 13                                     | Nilai investasi              | Juta                             | 11.211.964,25 | 12.751.262,63  | 13.902.444,49     | 15.053.626,36  | 16.204.808,23  | 17.355.990,10  | 17.355.990,10  |       |               |
|     |      |                                                          |    | S.10                             | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja       | 14                                     | Tingkat pengangguran terbuka | %                                | 5,62          | 7,14           | 6,89              | 6,13           | 5,67           | 5,31           | 5,31           |       |               |
|     | T.5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                   | 6  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |                                            |                                        |                              |                                  | -             | N/A            | N/A               | 68,87          | 69,30          | 69,74          | 70,17          | 70,17 |               |
|     |      |                                                          |    |                                  | S.11                                       | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 15                           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | -             | N/A            | N/A               | 68,87          | 69,30          | 69,74          | 70,17          | 70,17 |               |

| No. | Misi                                                                                                                   | Tujuan |                                                              | Indikator Tujuan |                                                   | Sasaran |                                                  | Indikator Sasaran |                                  | Satuan | Realisasi Capaian   |               | Target Capaian |               |                                                           |                  | Kondisi Akhir    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   |         |                                                  |                   |                                  |        | 2019                | 2020          | 2021           | 2022          | 2023                                                      | 2024             |                  |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   |         |                                                  |                   |                                  |        |                     |               |                | 16            | Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten | %                | 80,12            |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   | S.12    | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana          | 17                | Indeks Resiko Bencana            | -      | 168,40              | 168,38        | 167,97         | 164,92        | 162,84                                                    | 161,36           | 161,36           |
| 3   | Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal | T.6    | Meningkatnya kemandirian desa                                | 7                | Indeks Desa Membangun                             |         |                                                  |                   |                                  | -      | Berkembang (0,6751) | Maju (0,7168) | Maju (0,7590)  | Maju (0,8008) | Mandiri (0,8448)                                          | Mandiri (0,8912) | Mandiri (0,8912) |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   | S.13    | Meningkatnya status desa                         | 18                | Jumlah Desa Mandiri              | Desa   | 14                  | 21            | 42             | 55            | 65                                                        | 75               | 75               |
| 4   | Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat                      | T.7    | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat | 8                | Indeks Kerukunan Umat Beragama                    |         |                                                  |                   |                                  | -      | 0                   | 0             | 0              | 0             | 0                                                         | 0                | 0                |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   | S.14    | Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama | 19                | Jumlah kasus konflik antar agama | Kasus  | 0                   | 0             | 0              | 0             | 0                                                         | 0                | 0                |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              | 9                | Indeks Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) |         |                                                  |                   |                                  | -      | 92,80               | 92,51         | 100,00         | 100,00        | 100,00                                                    | 100,00           | 100,00           |
|     |                                                                                                                        |        |                                                              |                  |                                                   | S.15    | Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)           | 20                | Jumlah kasus Pekat               | Kasus  | 45                  | 40            | 35             | 30            | 25                                                        | 20               | 20               |

| No. | Misi                                                                                      | Tujuan |                                                                                   | Indikator Tujuan |                                 | Sasaran |                                                      | Indikator Sasaran |                                  | Satuan | Realisasi Capaian |               | Target Capaian |               |               |               | Kondisi Akhir |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                           |        |                                                                                   |                  |                                 |         |                                                      |                   |                                  |        | 2019              | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          |               |
| 5   | Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi | T.8    | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak | 10               | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |         |                                                      |                   |                                  | -      | 84,60             | 84,30         | 85,13          | 85,96         | 86,79         | 87,62         | 87,62         |
|     |                                                                                           |        |                                                                                   |                  |                                 | S.16    | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | 21                | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | -      | 72,43             | 73,24         | 73,54          | 73,84         | 74,14         | 74,44         | 74,44         |
|     |                                                                                           |        |                                                                                   | 11               | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  |         |                                                      |                   |                                  | -      | 53,73             | 55,87         | 59,87          | 64,47         | 65,55         | 69,29         | 69,29         |
|     |                                                                                           |        |                                                                                   |                  |                                 | S.17    | Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak     | 22                | Status Kabupaten Layak Anak      | -      | Pratama (500)     | Pratama (520) | Pratama (550)  | Pratama (600) | Pratama (610) | Pratama (650) | Pratama (650) |

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi **Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius**, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

#### **6.1. Strategi**

Strategi pembangunan daerah tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi yang digunakan untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

**Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja

3. Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel
4. Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja
5. Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja
6. Meningkatkan kompetensi APIP

**Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
2. Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
4. Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah
5. Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung pendidikan non formal atau kesetaraan
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan
7. Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat
8. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan seperti TB, HIV/AIDS dan Covid-19
9. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan
10. Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat
11. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
12. Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga
13. Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa
14. Mengembangkan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni
15. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi
16. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
17. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian

18. Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan
19. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung
20. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri
21. Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen
22. Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
23. Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
24. Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM
25. Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
26. Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
27. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup
28. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW
29. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan

**Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Strategi yang dilakukan adalah:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa bersatatus mandiri

**Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan lembaga/aparat penegak hukum beragama

**Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Strategi yang dilakukan adalah:

- 1. Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender
- 2. Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
- 4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

**Tabel 6.1.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berlualitas dan Religius                           |                                                                                                    |         |                                                    |          |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                                                                                                                        |                                                                                                    | Sasaran |                                                    | Strategi |                                                                                        |
| MISI 1: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> ) |                                                                                                    |         |                                                    |          |                                                                                        |
| T.1                                                                                                                           | Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa | S.1     | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat  | ST.1     | Meningkatkan pelayanan publik                                                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                    | S.2     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan    | ST.2     | Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.3     | Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel                                             |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.4     | Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.5     | Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.6     | Meningkatkan kompetensi APIP                                                           |
| MISI 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat                                    |                                                                                                    |         |                                                    |          |                                                                                        |
| T.2                                                                                                                           | Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing                                                | S.3     | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | ST.7     | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan                                           |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.8     | Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.9     | Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                            |
|                                                                                                                               |                                                                                                    |         |                                                    | ST.10    | Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah                                 |

|     |                                                          |     |                                            |       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |     |                                            | ST.11 | Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung Pendidikan non formal atau kesetaraan                                                                                             |
|     |                                                          | S.4 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | ST.12 | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan                                                                                                                                 |
|     |                                                          |     |                                            | ST.13 | Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat                                                                                                                                                             |
|     |                                                          |     |                                            | ST.14 | Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, seperti TB, HIV/AIDS dan COVID-19                                                                      |
|     |                                                          |     |                                            | ST.15 | Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan                                                                                                                  |
|     |                                                          |     |                                            | ST.16 | Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat                                                                                                                                                 |
| T.3 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah | S.5 | Meningkatnya konektivitas wilayah          | ST.17 | Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan                                                                                                                                                          |
|     |                                                          |     |                                            | ST.18 | Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga |
|     |                                                          |     |                                            | ST.19 | Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa                                                                                                                                                                 |
|     |                                                          | S.6 | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan | ST.20 | Mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni                                                                                                                                                       |
|     |                                                          |     |                                            | ST.21 | Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi                                                                                                                                  |
|     |                                                          |     |                                            | ST.22 | Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                       |
| T.4 | Meningkatnya kualitas perekonomian daerah                | S.7 | Meningkatnya daya saing daerah             | ST.23 | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                       |                               |      |                                         |       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.24 | Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan                                                    |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.25 | Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung                          |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.26 | Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri                                                                         |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.27 | Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen                                                      |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.28 | Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah                                                     |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.29 | Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial                                                                        |
|                                                                                                                                       |                               | S.8  | Meningkatnya sektor UMKM                | ST.29 | Meningkatkan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangn pelaku UMKM                                             |
|                                                                                                                                       |                               | S.9  | Meningkatnya investasi                  | ST.30 | Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah                                                  |
|                                                                                                                                       |                               | S.10 | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja    | ST.31 | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja                               |
|                                                                                                                                       |                               | T.5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | S.11  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                                                    |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.32 | Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup                                                                  |
|                                                                                                                                       |                               |      |                                         | ST.33 | Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah seduai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW |
|                                                                                                                                       |                               | S.12 | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | ST.34 | Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan                                                                 |
| <b>MISI 3: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal</b> |                               |      |                                         |       |                                                                                                                           |
| T.6                                                                                                                                   | Meningkatnya kemandirian desa | S.13 | Meningkatnya status desa                | ST.35 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandiri                                                                |

| MISI 4: Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat |                                                                                   |      |                                                      |       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.7                                                                                                       | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat                      | S.14 | Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama     | ST.36 | Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama                                           |
|                                                                                                           |                                                                                   | S.15 | Menurunnya penyakit masyarakat (PEKAT)               | ST.37 | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan lembaga/aparat penegak hukum |
| MISI 5: Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi         |                                                                                   |      |                                                      |       |                                                                                          |
| T.8                                                                                                       | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak | S.16 | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | ST.38 | Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender                                      |
|                                                                                                           |                                                                                   |      |                                                      | ST.39 | Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik                                     |
|                                                                                                           |                                                                                   | S.17 | Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak             | ST.40 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak                  |
|                                                                                                           |                                                                                   |      |                                                      | ST.41 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak                                  |

### 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

### Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)

Arah kebijakan:

1. Peningkatan kinerja *One Stop Service* dan kepuasan masyarakat
2. Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*one data-one entry-one solution*)
3. Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat
4. Peningkatan tertib administrasi kependudukan

5. Meningkatkan ruang kerja sama dan kemitraan (*government to governments, government to corporations, dan government to non government organizations*)
6. Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) indikator SDG's
7. Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "A"
8. Peningkatan komitmen memenuhi penilaian WTP
9. Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan
10. Peningkatan komitmen SKPD mampu melakukan pengendalian internal
11. Pengembangan kelompok kerja-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan
12. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional
13. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi

**Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**

Arah kebijakan:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
2. Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat pendidikan berbasis pemenuhan indikator-indikator standar pelayanan minimal
3. Peningkatan pemenuhan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (wajib belajar 9 tahun)
4. Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Penguatan Pendidikan Non Formal
6. Penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
7. Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
9. Pengembangan dan peningkatan sekolah berakreditasi
10. Pengembangan dan peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
11. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer

12. Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
13. Percepatan pelayanan kesehatan keliling terpadu
14. Percepatan taman beraktivitas bagi warga lanjut usia
15. Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan yang berkelanjutan
16. Peningkatan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
17. Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata
18. Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
19. Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalan penghubung antar kabupaten)
20. Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD
21. Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan, baik jembatan antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten
22. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dermaga
23. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet di desa
24. Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan layak huni
25. Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan
26. Penanganan air limbah domestik
27. Peningkatan pengelolaan sampah
28. Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perkotaan
29. Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perdesaan
30. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian
31. Pengembangan hortikultura berbasis kelompok dan rumah tangga
32. Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya
33. Pengembangan *food estate*
34. Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan serta berbasis kelompok rumah tangga

35. Pengembangan budi daya perikanan berbasis kelompok dan rumah tangga
36. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
37. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
38. Peningkatan iklim investasi perindustrian di semua tingkatan/skala
39. Menumbuhkan industri kecil menengah dan industri pengolahan serta manufaktur berbasis sumber daya lokal
40. Peningkatan iklim investasi perdagangan di semua tingkatan/skala
41. Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan
42. Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya *multiplier effect* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (*safe travel*)
43. Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi kesejahteraan sosial
44. Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi
45. Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
46. Kemudahan proses perizinan
47. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
48. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja
49. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
50. Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup
51. Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup
52. Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan *mangrove*
53. Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan
54. Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan
55. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan

**Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**

Arah kebijakan:

Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal

**Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**

Arah kebijakan:

1. Fasilitasi peningkatan kehidupan toleransi umat beragama
2. Peningkatan fasilitasi kerjasama dan partisipasi rohaniwan
3. Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji
4. Peningkatan dorongan pembinaan dan event-event kerohanian
5. Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan
6. Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah)
7. Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan event-event pembinaan kerohanian
8. Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti
9. Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba
10. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah
11. Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
12. Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa

**Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk  
Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Arah kebijakan:

1. Peningkatan anggaran responsif gender
2. Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu
3. Peningkatan kompetensi perempuan pada sektor publik
4. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis *home industry*
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak
6. Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
7. Peningkatan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

**Tabel 6.2.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| Visi                                                                                         | Misi |                                                                                                                       | Tujuan |                                                                                                    | Sasaran |                                                   | Strategi |                               | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                          | (2)  |                                                                                                                       | (3)    |                                                                                                    | (4)     |                                                   | (5)      |                               | (6)            |                                                                                                                                                             |
| Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat Terdepan, Berkualitas dan Religius | 1    | Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> ) | T.1    | Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa | S.1     | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat | ST.1     | Meningkatkan pelayanan publik | AK.1           | Peningkatan kinerja <i>One Stop Service</i> dan kepuasan masyarakat                                                                                         |
|                                                                                              |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |         |                                                   |          |                               | AK.2           | Fasilitasi kebijakan pengembangan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik ( <i>one data-one entry-one solution</i> )                             |
|                                                                                              |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |         |                                                   |          |                               | AK.3           | Penataan ulang perangkat daerah dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat                                                                                 |
|                                                                                              |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |         |                                                   |          |                               | AK.4           | Peningkatan tertib administrasi kependudukan                                                                                                                |
|                                                                                              |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |         |                                                   |          |                               | AK.5           | Meningkatkan ruang kerjasama dan kemitraan ( <i>government to governments, government to corporations, dan government to non government organizations</i> ) |
|                                                                                              |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                    |         |                                                   |          |                               | AK.6           | Mempercepat pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) indikator SDG's                                                        |

| Visi | Misi |                                    | Tujuan |                          | Sasaran |                                                    | Strategi |                                                             | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                                  |
|------|------|------------------------------------|--------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |                                    | (3)    |                          | (4)     |                                                    | (5)      |                                                             | (6)            |                                                                                                                                                                                  |
|      |      |                                    |        |                          | S.2     | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan    | ST.2     | Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja                    | AK.7           | Peningkatan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "A"                                                                                                           |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    | ST.3     | Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel                  | AK.8           | Peningkatan komitmen memenuhi penilaian WTP                                                                                                                                      |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    |          |                                                             | AK.9           | Efektifitas dan efisiensi penganggaran dengan komposisi belanja publik lebih besar dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan berbasis ekonomi kerakyatan |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    | ST.4     | Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja | AK.10          | Peningkatan komitmen SKPD mampu melakukan pengendalian internal                                                                                                                  |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    |          |                                                             | AK.11          | Pengembangan kelompok kerja-kelompok kerja terintegrasi dalam rangka percepatan implementasi program dan kegiatan                                                                |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    | ST.5     | Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja    | AK.12          | Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional                                                                                             |
|      |      |                                    |        |                          |         |                                                    | ST.6     | Meningkatkan kompetensi APIP                                | AK.13          | Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi                                                                                                                                |
|      | 2    | Meningkatkan Pelayanan Publik yang | T.2    | Meningkatnya sumber daya | S.3     | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | ST.7     | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan                | AK.14          | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak                                                                                                                            |

| Visi | Misi |                                                  | Tujuan |                            | Sasaran |  | Strategi |                                                                                        | Arah Kebijakan |                                                                                                                            |
|------|------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |                                                  | (3)    |                            | (4)     |  | (5)      |                                                                                        | (6)            |                                                                                                                            |
|      |      | Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat |        | manusia yang berdaya saing |         |  |          |                                                                                        | AK.15          | Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat pendidikan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  |          |                                                                                        | AK.16          | Peningkatan pemenuhan hak penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (wajib belajar 9 tahun)                |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  |          |                                                                                        | AK.17          | Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                 |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  |          |                                                                                        | AK.18          | Penguatan Pendidikan Non Formal                                                                                            |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  |          |                                                                                        | AK.19          | Penataan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan                    |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  | ST.8     | Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman | AK.20          | Penempatan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata                                                                  |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  | ST.9     | Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                            | AK.21          | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik                                                                         |
|      |      |                                                  |        |                            |         |  | ST.10    | Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah                                 | AK.22          | Pengembangan dan peningkatan sekolah berakreditasi                                                                         |

| Visi | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran |                                           | Strategi |                                                                                                                                            | Arah Kebijakan |                                                                                                                           |
|------|------|--|--------|--|---------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |  | (4)     |                                           | (5)      |                                                                                                                                            | (6)            |                                                                                                                           |
|      |      |  |        |  | S.4     | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | ST.11    | Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung pendidikan non formal atau kesetaraan                        | AK.23          | Pengembangan dan peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)                                                     |
|      |      |  |        |  |         |                                           | ST.12    | Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan                                                            | AK.24          | Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer                                              |
|      |      |  |        |  |         |                                           |          |                                                                                                                                            | AK.25          | Fasilitasi kebijakan peningkatan derajat kesehatan berbasis pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
|      |      |  |        |  |         |                                           |          |                                                                                                                                            | AK.26          | Percepatan pelayanan kesehatan keliling terpadu                                                                           |
|      |      |  |        |  |         |                                           |          |                                                                                                                                            | AK.27          | Percepatan taman beraktivitas bagi warga lanjut usia                                                                      |
|      |      |  |        |  |         |                                           | ST.13    | Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat                                                                                        | AK.28          | Peningkatan kesehatan keluarga dengan pendekatan siklus kehidupan yang berkelanjutan                                      |
|      |      |  |        |  |         |                                           | ST.14    | Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, seperti TB, HIV/AIDS dan Covid-19 | AK.29          | Peningkatan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat                                               |

| Visi | Misi |  | Tujuan |                                                          | Sasaran |                                   | Strategi |                                                                                                | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                             |
|------|------|--|--------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |                                                          | (4)     |                                   | (5)      |                                                                                                | (6)            |                                                                                                                                                                             |
|      |      |  |        |                                                          |         |                                   | ST.15    | Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan | AK.30          | Peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata                                         |
|      |      |  |        |                                                          |         |                                   | ST.16    | Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat                                | AK.31          | Peningkatan kualitas dan cakupan jaminan kesehatan, termasuk peningkatan fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)                                                     |
|      |      |  | T.3    | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah | S.5     | Meningkatnya konektivitas wilayah | ST.17    | Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan                                         | AK.32          | Peningkatan kualitas dan sebaran pembangunan dan pemeliharaan jalan (keseimbangan pembangunan jalan poros dan lingkungan serta penambahan jalan penghubung antar kabupaten) |
|      |      |  |        |                                                          |         |                                   |          |                                                                                                | AK.33          | Pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi berorientasi pengalihan beban penganggaran dan penguatan struktur APBD                                             |
|      |      |  |        |                                                          |         |                                   |          |                                                                                                | AK.34          | Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan, baik jembatan antar desa, antar kecamatan maupun antar kabupaten                                                               |
|      |      |  |        |                                                          |         |                                   |          |                                                                                                |                |                                                                                                                                                                             |

| Visi | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran |                                            | Strategi |                                                                                                                                                                                                                 | Arah Kebijakan |                                                                                           |
|------|------|--|--------|--|---------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |  | (4)     |                                            | (5)      |                                                                                                                                                                                                                 | (6)            |                                                                                           |
|      |      |  |        |  |         |                                            | ST.18    | Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga | AK.35          | Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dermaga                   |
|      |      |  |        |  |         |                                            | ST.19    | Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa                                                                                                                                                                 | AK.36          | Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet di desa |
|      |      |  |        |  | S.6     | Meningkatnya kualitas perumahan yang sehat | ST.20    | Mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni                                                                                                                                                       | AK.37          | Fasilitasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan layak huni                        |
|      |      |  |        |  |         |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                 | AK.38          | Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan                                               |
|      |      |  |        |  |         |                                            | ST.21    | Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi                                                                                                                                  | AK.39          | Penanganan air limbah domestik                                                            |
|      |      |  |        |  |         |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                 | AK.40          | Peningkatan pengelolaan sampah                                                            |
|      |      |  |        |  |         |                                            | ST.22    | Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                       | AK.41          | Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perkotaan                                |
|      |      |  |        |  |         |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                 | AK.42          | Peningkatan jaringan perpipaan dan non perpipaan perdesaan                                |
|      |      |  |        |  | T.4     | Meningkatnya kualitas perekonomian daerah  | S.7      | Meningkatnya daya saing daerah                                                                                                                                                                                  | ST.23          | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian                                         |
|      |      |  |        |  |         |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                 | AK.43          | Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian                     |

| Visi | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran |  | Strategi |                                                                                                  | Arah Kebijakan |                                                                                                         |
|------|------|--|--------|--|---------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |  | (4)     |  | (5)      |                                                                                                  | (6)            |                                                                                                         |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK.44          | Pengembangan hortikultura berbasis kelompok dan rumah tangga                                            |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK.45          | Pengembangan ikon beras lokal Kubu Raya                                                                 |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK.46          | Pengembangan <i>food estate</i>                                                                         |
|      |      |  |        |  |         |  | ST.24    | Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan                           | AK.47          | Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan serta berbasis kelompok dan rumah tangga     |
|      |      |  |        |  |         |  | ST.25    | Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung | AK.48          | Pengembangan budi daya perikanan berbasis kelompok dan rumah tangga                                     |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK.49          | Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan                                                  |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK. 50         | Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan                               |
|      |      |  |        |  |         |  | ST.26    | Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri                                                | AK.51          | Peningkatan iklim investasi perindustrian di semua tingkatan/skala                                      |
|      |      |  |        |  |         |  |          |                                                                                                  | AK.52          | Menumbuhkan industri kecil menengah dan industri pengolahan serta manufaktur berbasis sumber daya lokal |
|      |      |  |        |  |         |  | ST.27    | Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen                             | AK.53          | Peningkatan iklim investasi perdagangan di semua tingkatan/skala                                        |

| Visi | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran |                          | Strategi |                                                                               | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|--|--------|--|---------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |  | (4)     |                          | (5)      |                                                                               | (6)            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |  |        |  |         |                          |          |                                                                               | AK.54          | Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar rakyat di perkotaan dan perdesaan                                                                                                                                                                                 |
|      |      |  |        |  |         |                          | ST.28    | Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah         | AK.55          | Pengembangan destinasi dan magnet wisata (wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi dan wisata kreatif/buatan), ekonomi kreatif serta terpadu dan berdaya <i>multiplier effect</i> dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ( <i>safe travel</i> ) |
|      |      |  |        |  |         |                          | ST.29    | Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial                            | AK.56          | Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi kesejahteraan sosial                                                                                                                                                                                         |
|      |      |  |        |  | S.8     | Meningkatnya sektor UMKM | ST.30    | Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM | AK.57          | Penguatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM berbasis teknologi informasi/digital                                                                                                                                                                 |
|      |      |  |        |  | S.9     | Meningkatnya investasi   | ST.31    | Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah      | AK.58          | Fasilitasi kebijakan percepatan reposisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)                                                                                                                            |
|      |      |  |        |  |         |                          |          |                                                                               | AK.59          | Kemudahan proses perizinan                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      |  |        |  |         |                          |          |                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Visi | Misi |  | Tujuan |                                        | Sasaran |                                         | Strategi |                                                                                                                           | Arah Kebijakan |                                                                                                                               |
|------|------|--|--------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |                                        | (4)     |                                         | (5)      |                                                                                                                           | (6)            |                                                                                                                               |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         |          |                                                                                                                           | AK.60          | Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                                                                                   |
|      |      |  |        |                                        | S.10    | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja    | ST.32    | Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja                               | AK.61          | Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja                                                                               |
|      |      |  | T.5.   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | S.11    | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  | ST.33    | Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup                                                                  | AK.62          | Peningkatan kualitas lingkungan hidup                                                                                         |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         |          |                                                                                                                           | AK.63          | Peningkatan kesadaran masyarakat berwawasan lingkungan hidup                                                                  |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         |          |                                                                                                                           | AK.64          | Meningkatkan kepatuhan implementasi dokumen lingkungan hidup                                                                  |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         |          |                                                                                                                           | AK.65          | Peningkatan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan <i>mangrove</i>                                        |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         | ST.34    | Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah seduai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW | AK.66          | Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan                                                                    |
|      |      |  |        |                                        |         |                                         |          |                                                                                                                           | AK.67          | Review peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang dan zonasi-zonasi yang dibutuhkan |
|      |      |  |        |                                        | S.12    | Meningkatnya ketahanan terhadap bencana | ST.35    | Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan                                                                 | AK.68          | Peningkatan keterpaduan pencegahan dan penanganan kebencanaan                                                                 |

| Visi | Misi |                                                                                                                        | Tujuan |                                                              | Sasaran |                                                  | Strategi |                                                            | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |                                                                                                                        | (3)    |                                                              | (4)     |                                                  | (5)      |                                                            | (6)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 3.   | Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal | T.6    | Meningkatnya kemandirian desa                                | S.13    | Meningkatnya status desa                         | ST.36    | Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandiri | AK.69          | Percepatan pencapaian 52 (lima puluh dua) indikator Indeks Desa Membangun guna peningkatan secara kuantitas dan kualitas dari desa maju menjadi desa mandiri, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi desa yang berstatus desa sangat tertinggal |
|      | 4.   | Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat                      | T.7    | Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat | S.14    | Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama | ST.37    | Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama             | AK.70          | Fasilitasi peningkatan kehidupan toleransi umat beragama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |      |                                                                                                                        |        |                                                              |         |                                                  |          |                                                            | AK.71          | Peningkatan fasilitasi kerja sama dan partisipasi rohaniwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |      |                                                                                                                        |        |                                                              |         |                                                  |          |                                                            | AK.72          | Peningkatan fasilitasi guru-guru mengaji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |      |                                                                                                                        |        |                                                              |         |                                                  |          |                                                            | AK.73          | Peningkatan dorongan pembinaan dan event-event kerohanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      |                                                                                                                        |        |                                                              |         |                                                  |          |                                                            | AK.74          | Peningkatan fasilitasi tempat peribadatan dan pendidikan berbasis keagamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Visi | Misi |  | Tujuan |  | Sasaran |                                        | Strategi |                                                                                         | Arah Kebijakan |                                                                                                            |
|------|------|--|--------|--|---------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |  | (3)    |  | (4)     |                                        | (5)      |                                                                                         | (6)            |                                                                                                            |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.75          | Penguatan pendidikan karakter dan wirausaha bagi pelajar sekolah keagamaan (pondok pesantren dan madrasah) |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.76          | Penguatan fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan dan event-event pembinaan kerohanian             |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.77          | Pemberdayaan rohaniwan dalam rangka internalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan keluhuran budi pekerti  |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.78          | Peningkatan keterpaduan pencegahan dan rehabilitasi korban peredaran narkoba                               |
|      |      |  |        |  | S.15    | Menurunnya penyakit masyarakat (PEKAT) | ST.38    | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum | AK.79          | Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah                                |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.80          | Peningkatan sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah                                                  |
|      |      |  |        |  |         |                                        |          |                                                                                         | AK.81          | Fasilitasi kebijakan penguatan kembali pemeliharaan keamanan dan ketertiban berbasis swakarsa              |

| Visi | Misi |                                                                                           | Tujuan |                                                                                   | Sasaran |                                                      | Strategi |                                                                         | Arah Kebijakan |                                                                                          |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)  |                                                                                           | (3)    |                                                                                   | (4)     |                                                      | (5)      |                                                                         | (6)            |                                                                                          |
|      | 5.   | Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi | T.8    | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak | S.16    | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan | ST.39    | Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender                     | AK.82          | Peningkatan anggaran responsif gender                                                    |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   |         |                                                      |          |                                                                         | AK.83          | Penguatan pengarusutamaan gender secara terpadu                                          |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   |         |                                                      |          | Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik                    | AK.84          | Peningkatan kompetensi perempuan pada sektor publik                                      |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   |         |                                                      |          |                                                                         | AK.85          | Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan perempuan berbasis <i>home industry</i> |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   | S.17    | Meningkatnya pemenuhan dan hak anak                  | ST.41    | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak | AK.86          | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak                   |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   |         |                                                      |          |                                                                         | AK.87          | Fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak                                                |
|      |      |                                                                                           |        |                                                                                   |         |                                                      | ST.42    | Meningkatkan kualitas khusus perlindungan terhadap anak                 | AK.88          | Peningkatan kualitas khusus perlindungan terhadap anak                                   |

Dalam rangka mewujudkan Visi dan merealisasikan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka dirumuskan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Tahapan arah kebijakan tahunan tersebut untuk Tahun 2019 merupakan arah kebijakan transisi dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 periode akhir dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 periode awal, yakni melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan, dan daya saing daerah yang sudah dicapai.

Memperhatikan keseluruhan data-data dan informasi yang tercakup dalam gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, dan strategi, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2020 adalah Peningkatan Infrastruktur Mendasar, Pelayanan Sosial Dasar, serta Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 adalah membangun kerangka dasar untuk pembangunan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, pada awalnya arah pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan kemandirian desa. Namun, kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 menuntut adanya respon terkait dampak ekonomi dan sosial yang terjadi. Sehingga akan menjadi logis pada tahun 2021 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah Peningkatan Perekonomian Daerah, Sumber Daya Manusia, Kemandirian Desa Didukung Infrastruktur Mendasar Dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 diharapkan akan memperkuat struktur perekonomian, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di bidang kesehatan, dan mendorong penguatan Indeks Desa Mandiri sehingga menciptakan kemandirian desa secara kuantitatif dan kualitatif, yang kesemuanya berjalan secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2022 direncanakan akan mulai melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta pengarusutamaan gender. Dengan demikian, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun

2022 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan serta Pengarusutamaan Gender Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 diharapkan semakin memperkuat daya saing daerah serta dapat mendorong tumbuh-kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kemandirian ekonomi keluarga serta pengembangan perdagangan digital pasca fase pemulihan pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan adanya penguatan strategi dalam mengintegrasikan perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Pada Tahun 2023 masih melanjutkan peningkatan infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis partisipatif dan bernuansa religius. Oleh karena itu, yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah Peningkatan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Partisipatif dan Bernuansa Religius Didukung Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 diharapkan semakin meningkat tingkat kesejahteraan berdimensikan kebahagiaan, yakni antara lain adanya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, pekerjaan bernilai tambah pada pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga dan hubungan sosial, kelayakan hunian dan asetnya, kelestarian lingkungan hidup, dan keamanan yang kondusif. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 diharapkan juga dapat mendorong tumbuh-kembangnya partisipatif masyarakat Kubu Raya dari semua tingkatan dan kalangan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk melakukan akselerasi setelah pada tahun 2020 terjadi masalah pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan dapat terpeliharanya pengembangan karakter Sumber Daya Manusia yang belandaskan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, serta keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Pada Tahun 2024 adalah akhir periode pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan sekaligus adalah tahun transisi untuk RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024-2029. Adapun arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sosial Budaya, Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Kebahagiaan dan Religius. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yakni terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius; serta terealisasinya Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, yakni meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

**Tabel 6.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

| <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tahun 2019</b>                                                                                                                                                                         | <b>Tahun 2020</b>                                                                                                                     | <b>Tahun 2021</b>                                                                                                                 | <b>Tahun 2022</b>                                                                                                                                                        | <b>Tahun 2023</b>                                                                                                                                                | <b>Tahun 2024</b>                                                                                                                                       |
| Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi dan ekspansi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan dan daya saing daerah yang sudah dicapai | Peningkatkan infrastruktur mendasar, pelayanan sosial dasar, serta budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beribawa | Peningkatan perekonomian daerah, Sumber Daya Manusia, kemandirian desa didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar | Peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pengarusutamaan gender didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar | Peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis partisipatif dan bernuansa religius didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar | Peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial budaya, perekonomian daerah, serta daya saing daerah yang berkelanjutan berbasis kebahagiaan dan religius |

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD akan menjadi pedoman bagi prioritas pembangunan tahunan. Dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya akan ditetapkan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari RPJMD. Adapun prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan terutama terhadap penanganan pandemi Covid-19
2. Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan
4. Sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
5. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
6. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
9. Peningkatan daya saing kepariwisataan
10. Peningkatan kesempatan kerja

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Bupati.

Berkenaan dengan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra Perubahan SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 7.1. di bawah. Sedangkan berkenaan dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada Tabel 7.2. di bawah.

**Tabel 7.1.**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**  
**Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024**

| No.         | Uraian                                                                                          | Realisasi (Rp.)             |                             | Proyeksi (Rp.)           |                          |                          |                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |                                                                                                 | 2019                        | 2020                        | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                                  | <b>1.580.265.429.953,77</b> | <b>1.487.430.828.191,27</b> |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.1.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                   | <b>794.927.858.913,59</b>   | <b>795.728.523.684,81</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai                                                                                 | 549.026.260.713,59          | 542.278.362.971,81          |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.2.      | Belanja Bunga                                                                                   | -                           | -                           |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.3.      | Belanja Hibah                                                                                   | 12.455.610.000,00           | 21.011.558.000,00           |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.4.      | Belanja Bantuan Sosial                                                                          | 1.876.400.000,00            | 993.300.000,00              |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.5.      | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa                       | 12.213.858.500,00           | 11.176.172.675,00           |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 219.355.729.700,00          | 211.129.940.600,00          |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.7.      | Belanja Tidak Terduga                                                                           | 0,00                        | 9.139.189.438,00            |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.2.</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                         | <b>785.337.571.040,18</b>   | <b>691.702.304.506,46</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.1.      | Belanja Pegawai                                                                                 | 83.302.724.300,00           | 98.177.916.884,00           |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 496.405.558.028,42          | 453.140.817.627,53          |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.3.      | Belanja Modal                                                                                   | 205.629.288.711,76          | 140.383.569.994,93          |                          |                          |                          |                          |
|             |                                                                                                 |                             |                             |                          |                          |                          |                          |
| <b>5</b>    | <b>BELANJA</b>                                                                                  |                             |                             | <b>1.588.942.509.194</b> | <b>1.999.720.819.028</b> | <b>2.234.199.243.638</b> | <b>2.535.413.465.956</b> |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                          |                             |                             | <b>1.129.453.607.516</b> | <b>1.390.904.912.964</b> | <b>1.552.183.509.853</b> | <b>1.758.572.074.183</b> |
| 5.1.01      | Belanja Pegawai                                                                                 |                             |                             | 592.710.672.045          | 818.373.960.886          | 891.428.622.945          | 975.266.872.999          |
| 5.1.02      | Belanja Barang dan Jasa                                                                         |                             |                             | 515.413.129.471          | 545.039.628.299          | 631.068.614.425          | 751.248.731.988          |
| 5.1.05      | Belanja Hibah                                                                                   |                             |                             | 20.334.600.000           | 24.941.529.882           | 26.932.899.199           | 29.083.262.442           |

| No.        | Uraian                       | Realisasi (Rp.) |      | Proyeksi (Rp.)           |                          |                          |                          |
|------------|------------------------------|-----------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                              | 2019            | 2020 | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial       |                 |      | 995.206.000              | 2.549.793.898            | 2.753.373.284            | 2.973.206.754            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>         |                 |      | <b>228.338.257.001</b>   | <b>315.276.453.811</b>   | <b>365.039.649.481</b>   | <b>434.557.459.409</b>   |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> |                 |      | <b>5.000.000.000</b>     | <b>1.007.325.984</b>     | <b>1.087.752.408</b>     | <b>1.174.600.199</b>     |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga        |                 |      | 5.000.000.000            | 1.007.325.984            | 1.087.752.408            | 1.174.600.199            |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>      |                 |      | <b>226.150.644.677</b>   | <b>292.532.126.269</b>   | <b>315.888.331.897</b>   | <b>341.109.332.164</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil           |                 |      | 11.329.662.677           | 15.411.516.534           | 16.641.995.229           | 17.970.717.198           |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan     |                 |      | 214.820.982.000          | 277.120.609.736          | 299.246.336.667          | 323.138.614.967          |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>        |                 |      | <b>1.588.942.509.194</b> | <b>1.999.720.819.028</b> | <b>2.234.199.243.638</b> | <b>2.535.413.465.956</b> |

**Tabel 7.2.**

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan                                                                                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                 |            |      |            |      |            |      |                                          |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                               |                                                                                           |                                         | Tahun 2019                                     |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|                                                              |                                               |                                                                                           |                                         | Target                                         | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.             | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target                                   | Rp.             |                                   |
| (1)                                                          | (2)                                           | (3)                                                                                       | (4)                                     | (5)                                            | (6)            | (7)        | (8)            | (9)        | (10)            | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)                                     | (18)            | (19)                              |
| URUSAN WAJIB                                                 |                                               |                                                                                           |                                         |                                                |                |            |                |            |                 |            |      |            |      |            |      |                                          |                 |                                   |
| 1                                                            | Pelayanan Dasar                               |                                                                                           |                                         |                                                |                |            |                |            |                 |            |      |            |      |            |      |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 1                                             | Pendidikan                                                                                |                                         |                                                |                |            |                |            |                 |            |      |            |      |            |      |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 1                                             | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                                         |                                         |                                                | 3.856.556.900  |            | 4.708.966.574  |            | 5.749.783.232   |            |      |            |      |            |      |                                          | 14.315.306.706  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Peningkatan APK TK/RA/PAUD                                                                | -                                       | 98,36                                          | 95,22          |            | 92,17          |            | 89,23           |            |      |            |      |            |      |                                          | 80,94           |                                   |
|                                                              | 2                                             | Peningkatan APM TK/RA/PAUD                                                                | -                                       | 90,28                                          | 88,97          |            | 87,68          |            | 86,41           |            |      |            |      |            |      |                                          | 82,71           |                                   |
|                                                              | 2                                             | Program Pendidikan Non Formal                                                             |                                         |                                                | 1.397.692.700  |            | 1.341.681.252  |            | 1.287.914.420   |            |      |            |      |            |      |                                          | 4.027.288.372   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Angka Melek Huruf                                                                         | %                                       | 93,23                                          | 93,91          |            | 94,60          |            | 95,29           |            |      |            |      |            |      |                                          | 97,39           |                                   |
|                                                              | 3                                             | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                 |                                         |                                                | 3.302.993.250  |            | 3.949.454.205  |            | 4.722.440.325   |            |      |            |      |            |      |                                          | 11.974.887.780  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/D4                                                 | %                                       | 85,00                                          | 87,50          |            | 90,00          |            | 92,50           |            |      |            |      |            |      |                                          | 100,00          |                                   |
|                                                              | 4                                             | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                    |                                         |                                                | 6.047.551.000  |            | 11.696.761.950 |            | 22.623.081.658  |            |      |            |      |            |      |                                          | 40.367.394.608  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Persentase Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)               | %                                       | 75,00                                          | 77,50          |            | 80,00          |            | 82,50           |            |      |            |      |            |      |                                          | 90,00           |                                   |
|                                                              | 5                                             | Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas                                                |                                         |                                                | 180.000.000    |            | 180.606.074    |            | 181.214.189     |            |      |            |      |            |      |                                          | 541.820.263     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Jumlah Sekolah Berprestasi                                                                | Sekolah                                 | 5,00                                           | 5,00           |            | 5,00           |            | 5,00            |            |      |            |      |            |      |                                          | 15,00           |                                   |
|                                                              | 6                                             | Program Pendidikan Sekolah Dasar                                                          |                                         |                                                | 48.306.329.200 |            | 43.180.768.512 |            | 38.599.057.312  |            |      |            |      |            |      |                                          | 130.086.155.024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A                                                        | -                                       | 98,36                                          | 95,22          |            | 92,17          |            | 89,23           |            |      |            |      |            |      |                                          | 80,94           |                                   |
|                                                              | 2                                             | Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A                                                        | -                                       | 90,28                                          | 88,97          |            | 87,68          |            | 86,41           |            |      |            |      |            |      |                                          | 82,71           |                                   |
|                                                              | 7                                             | Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                               |                                         |                                                | 16.082.471.190 |            | 12.192.290.071 |            | 9.243.102.967   |            |      |            |      |            |      |                                          | 37.517.864.228  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              | 1                                             | Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B                                                    | -                                       | 9,27                                           | 90,51          |            | 90,76          |            | 91,01           |            |      |            |      |            |      |                                          | 91,76           |                                   |
|                                                              | 2                                             | Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B                                                    | -                                       | 86,78                                          | 89,82          |            | 92,97          |            | 96,22           |            |      |            |      |            |      |                                          | 106,68          |                                   |
|                                                              | 3                                             | Peningkatan rata-rata lama sekolah                                                        | Tahun                                   | 6,81                                           | 6,92           |            | 7,04           |            | 7,16            |            |      |            |      |            |      |                                          | 7,52            |                                   |
| 2                                                            | Kesehatan                                     |                                                                                           |                                         |                                                |                |            |                |            |                 |            |      |            |      |            |      |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 1                                             | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                     |                                         |                                                | 4.678.760.140  |            | 4.891.140.616  |            | 5.113.161.566   |            |      |            |      |            |      |                                          | 14.683.062.322  | Dinas Kesehatan                   |
|                                                              | 1                                             | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial                                    | %                                       | 93,00                                          | 100,00         |            | 100,00         |            | 100,00          |            |      |            |      |            |      |                                          | 100,00          |                                   |
|                                                              | 2                                             | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat                                                      | %                                       | 80,90                                          | 82,00          |            | 85,00          |            | 87,00           |            |      |            |      |            |      |                                          | 92,30           |                                   |
|                                                              | 3                                             | Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas                                          | %                                       | 70,00                                          | 90,00          |            | 100,00         |            | 100,00          |            |      |            |      |            |      |                                          | 100,00          |                                   |
|                                                              | 4                                             | Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar | %                                       | 0,00                                           | 0,00           |            | 65,00          |            | 70,00           |            |      |            |      |            |      |                                          | 85,00           |                                   |
|                                                              | 2                                             | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                        |                                         |                                                | 52.843.624.660 |            | 75.292.479.807 |            | 107.277.983.901 |            |      |            |      |            |      |                                          | 235.414.088.368 | Dinas Kesehatan                   |
|                                                              | 1                                             | Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned                                              | Puskesmas                               | 5,00                                           | 5,00           |            | 5,00           |            | 6,00            |            |      |            |      |            |      |                                          | 7,00            |                                   |
|                                                              | 2                                             | Jumlah Puskesmas Dengan Kesiapsiagaan Akses Layanan Rujukan                               | Puskesmas                               | 5,00                                           | 5,00           |            | 5,00           |            | 5,00            |            |      |            |      |            |      |                                          | 7,00            |                                   |
|                                                              | 3                                             | Persentase Penurunan Rujukan Masyarakat Miskin                                            | %                                       | 40,00                                          | 35,00          |            | 30,00          |            | 30,00           |            |      |            |      |            |      |                                          | 10,00           |                                   |
|                                                              | 4                                             | Cakupan Rumah Sakit Umum Daerah yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar  | %                                       | 0,00                                           | 0,00           |            | 100,00         |            | 100,00          |            |      |            |      |            |      |                                          | 100,00          |                                   |
|                                                              | 5                                             | Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) Sesuai Standar      | %                                       | 61,00                                          | 75,00          |            | 80,00          |            | 80,00           |            |      |            |      |            |      |                                          | 100,00          |                                   |
|                                                              | 3                                             | Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                       |                                         |                                                | 128.110.250    |            | 140.486.147    |            | 154.057.599     |            |      |            |      |            |      |                                          | 422.653.996     | Dinas Kesehatan                   |
|                                                              | 1                                             | Persentase Makanan Memenuhi Syarat/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)                    | %                                       | 60,40                                          | 70,00          |            | 75,00          |            | 80,00           |            |      |            |      |            |      |                                          | 95,00           |                                   |





| Bidang Urusan<br>Pemerintahan dan<br>Program Prioritas<br>Pembangunan |                                         |                                                                                                        | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan   | Kondisi<br>Kinerja Awal<br>RPJMD (Tahun<br>2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |      |            |      |            |      |            |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                                                                       |                                         |                                                                                                        |                                               |          |                                                  | Tahun 2019                                     |                | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |                 |                                                                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode<br>RPJMD |     |
|                                                                       |                                         |                                                                                                        |                                               |          |                                                  | Target                                         | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.             |                                                                 | Target                                      | Rp. |
| (1)                                                                   | (2)                                     | (3)                                                                                                    | (4)                                           | (5)      | (6)                                              | (7)                                            | (8)            | (9)        | (10)           | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)       | (18)            | (19)                                                            |                                             |     |
|                                                                       | 2                                       | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong                                                    |                                               |          | 13.147.625.200                                   |                                                | 14.280.913.459 |            | 15.511.887.973 |            |      |            |      |            |      |            | 42.940.426.632  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan | %                                             | 45,00    | 50,00                                            | 55,00                                          |                | 60,00      |                |            |      |            |      |            |      | 75,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 3                                       | Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong                                                             |                                               |          | -                                                |                                                | 14.280.913.459 |            | 15.511.887.973 |            |      |            |      |            |      |            | 29.792.801.432  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Turap/ Talud/ Bronjong Dalam Kondisi Baik                                                   | %                                             | 40,00    | 45,00                                            | 50,00                                          |                | 55,00      |                |            |      |            |      |            |      | 70,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 4                                       | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                                  |                                               |          | 7.782.667.100                                    |                                                | 5.961.441.332  |            | 4.566.401.504  |            |      |            |      |            |      |            | 18.310.509.936  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / Jembatan Kabupaten                                         | Km                                            | 2,94     | 3,56                                             | 5,00                                           |                | 5,00       |                |            |      |            |      |            |      | 13,56      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 5                                       | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan                                                             |                                               |          | 8.930.000.000                                    |                                                | -              |            | -              |            |      |            |      |            |      |            | 8.930.000.000   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi                              | %                                             | 53,00    | 56,00                                            | 59,00                                          |                | 62,00      |                |            |      |            |      |            |      | 65,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 6                                       | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya             |                                               |          | 40.691.828.000                                   |                                                | 43.460.423.152 |            | 46.417.388.291 |            |      |            |      |            |      |            | 130.569.639.443 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Luas Daerah Irigasi dan Rawa yang Fungsional                                                           | Ha                                            | 3.144,00 | 628,00                                           | 628,00                                         |                | 628,00     |                |            |      |            |      |            |      | 1.884,00   |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 2                                       | Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang Berfungsi Dengan Baik                                           | M                                             | 7.165,00 | 145,00                                           | 145,00                                         |                | 145,00     |                |            |      |            |      |            |      | 435,00     |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 3                                       | Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik                                                                    | Unit                                          | 82,00    | 16,00                                            | 16,00                                          |                | 16,00      |                |            |      |            |      |            |      | 48,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 7                                       | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                                      |                                               |          | 4.326.949.000                                    |                                                | 4.197.603.159  |            | 4.072.123.864  |            |      |            |      |            |      |            | 12.596.676.023  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak                            | %                                             | 18,00    | 19,00                                            | 20,00                                          |                | 21,00      |                |            |      |            |      |            |      | 24,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 2                                       | Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan                  | %                                             | 48,00    | 49,00                                            | 50,00                                          |                | 51,00      |                |            |      |            |      |            |      | 55,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 3                                       | Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal                       | %                                             | 60,00    | 62,00                                            | 64,00                                          |                | 66,00      |                |            |      |            |      |            |      | 72,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 8                                       | Program Perencanaan Tata Ruang                                                                         |                                               |          | 2.905.722.050                                    |                                                | 3.588.542.265  |            | 4.431.819.481  |            |      |            |      |            |      |            | 10.926.083.796  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Kesesuaian Tata Ruang                                                                       | %                                             | 80,00    | 82,50                                            | 85,00                                          |                | 87,50      |                |            |      |            |      |            |      | 95,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 2                                       | Tersedianya RDTR                                                                                       | Dokumen                                       | 0,00     | 0,00                                             | 1,00                                           |                | 1,00       |                |            |      |            |      |            |      | 2,00       |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 9                                       | Program Pemanfaatan Ruang                                                                              |                                               |          | 1.025.605.000                                    |                                                | 1.269.114.952  |            | 1.570.441.604  |            |      |            |      |            |      |            | 3.865.161.556   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang                                           | -                                             | Tersedia | Tersedia                                         | Tersedia                                       |                | Tersedia   |                |            |      |            |      |            |      | Tersedia   |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 10                                      | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                                                                 |                                               |          | 408.716.000                                      |                                                | 413.956.344    |            | 419.263.876    |            |      |            |      |            |      |            | 1.241.936.220   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Ketaatan Terhadap RTRW                                                                                 | Objek / Kasus                                 | -        | 35,00                                            | 35,00                                          |                | 35,00      |                |            |      |            |      |            |      | 105,00     |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 11                                      | Program Pengaturan Jasa Konstruksi                                                                     |                                               |          | 100.800.000                                      |                                                | 159.129.230    |            | 251.211.426    |            |      |            |      |            |      |            | 511.140.656     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi                                                          | %                                             | 98,00    | 98,00                                            | 98,00                                          |                | 98,00      |                |            |      |            |      |            |      | 100,00     |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 12                                      | Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                                   |                                               |          | 417.242.850                                      |                                                | 1.007.153.949  |            | 2.431.099.963  |            |      |            |      |            |      |            | 3.855.496.762   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                    | %                                             | 100,00   | 100,00                                           | 100,00                                         |                | 100,00     |                |            |      |            |      |            |      | 100,00     |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 13                                      | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                          |                                               |          | -                                                |                                                | 3.338.554.319  |            | 1.248.146.130  |            |      |            |      |            |      |            | 4.586.700.449   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi                              | %                                             | 53,00    | 56,00                                            | 59,00                                          |                | 62,00      |                |            |      |            |      |            |      | 71,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
| 4                                                                     | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                                                                                        |                                               |          |                                                  |                                                |                |            |                |            |      |            |      |            |      |            |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Program Pengembangan Perumahan                                                                         |                                               |          | 400.049.550                                      |                                                | 428.033.278    |            | 457.974.487    |            |      |            |      |            |      |            | 1.286.057.315   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                 | %                                             | 75,00    | 77,50                                            | 80,00                                          |                | 82,50      |                |            |      |            |      |            |      | 90,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 2                                       | Program Lingkungan Sehat Perumahan                                                                     |                                               |          | 3.637.425.000                                    |                                                | 4.166.383.943  |            | 4.772.264.764  |            |      |            |      |            |      |            | 12.576.073.707  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar                                          | %                                             | 65,00    | 67,00                                            | 69,00                                          |                | 71,00      |                |            |      |            |      |            |      | 77,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 3                                       | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                          |                                               |          | 858.053.100                                      |                                                | 716.167.951    |            | 597.744.515    |            |      |            |      |            |      |            | 2.171.965.566   | Satuan Polisi Pamong Praja                                      |                                             |     |
|                                                                       | 1                                       | Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)                                               | Menit                                         | 20,00    | 20,00                                            | 18,00                                          |                | 16,00      |                |            |      |            |      |            |      | 11,00      |                 |                                                                 |                                             |     |
|                                                                       | 4                                       | Program Pengelolaan Areal Pemakaman                                                                    |                                               |          | -                                                |                                                | 428.033.278    |            | 457.974.487    |            |      |            |      |            |      |            | 886.007.765     | Dinas Pekerjaan                                                 |                                             |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |   |                                                                                                                              | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |             |               |      |            |      |            |      |            |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |   |                                                                                                                              |                                               |             |                                         | Tahun 2019                                     |             | Tahun 2020    |             | Tahun 2021    |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |             |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD                                                                               |     |
|                                                              |     |   |                                                                                                                              |                                               |             |                                         | Target                                         | Rp.         | Target        | Rp.         | Target        | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.         |                                   | Target                                                                                                                 | Rp. |
|                                                              | (1) |   | (2)                                                                                                                          | (3)                                           | (4)         | (5)                                     | (6)                                            | (7)         | (8)           | (9)         | (10)          | (11) | (12)       | (13) | (14)       | (15) | (16)       | (17)        | (18)                              | (19)                                                                                                                   |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase Areal Pemukiman yang Dikelola Dengan Baik                                                                         | %                                             | -           | -                                       |                                                | 40,00       |               | 42,50       |               |      |            |      |            |      |            | 50,00       |                                   | Umum dan Penataan Ruang                                                                                                |     |
|                                                              |     | 5 | Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                        |                                               |             |                                         | 549.945.000                                    |             | 1.006.873.085 |             | 1.843.445.090 |      |            |      |            |      |            |             | 3.400.263.175                     | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup                                                        |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase Peningkatan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                         | %                                             | 100,00      | 100,00                                  |                                                | 100,00      |               | 100,00      |               |      |            |      |            |      |            | 100,00      |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 2 | Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan                                                                                           | %                                             | 50,00       | 55,00                                   |                                                | 60,00       |               | 65,00       |               |      |            |      |            |      |            | 80,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 5 | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                    |                                               |             |                                         |                                                |             |               |             |               |      |            |      |            |      |            |             |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 1 | Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan                                                                       |                                               |             |                                         | 3.932.602.200                                  |             | 4.332.415.148 |             | 4.772.875.582 |      |            |      |            |      |            |             | 13.037.892.930                    | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                             |     |
|                                                              |     | 1 | Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah/Per Satuan Wilayah                                                                        | -                                             | 2 Kali/Hari | 3 Kali/Bulan                            |                                                | 1 Kali/Hari |               | 2 Kali/Hari |               |      |            |      |            |      |            | 3 Kali/Hari |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 2 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                                            |                                               |             |                                         | 210.253.600                                    |             | 220.766.280   |             | 231.804.594   |      |            |      |            |      |            |             | 662.824.474                       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                     |     |
|                                                              |     | 1 | Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat                                                                            | Kali                                          | 10,00       | 10,00                                   |                                                | 10,00       |               | 10,00       |               |      |            |      |            |      |            | 30,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 3 | Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                                                        |                                               |             |                                         | 79.073.500                                     |             | 68.808.527    |             | 59.876.108    |      |            |      |            |      |            |             | 207.758.135                       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                     |     |
|                                                              |     | 1 | Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah                                                                                     | Kali                                          | 5,00        | 5,00                                    |                                                | 5,00        |               | 5,00        |               |      |            |      |            |      |            | 15,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 4 | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam                                                               |                                               |             |                                         | 241.724.360                                    |             | 332.910.618   |             | 458.495.286   |      |            |      |            |      |            |             | 1.033.130.264                     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                    |     |
|                                                              |     | 1 | Angka Kejadian Bencana                                                                                                       | -                                             | 20,00       | 18,00                                   |                                                | 16,00       |               | 14,00       |               |      |            |      |            |      |            | 8,00        |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 2 | Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah                                                | Dokumen                                       | 1,00        | 1,00                                    |                                                | 1,00        |               | 1,00        |               |      |            |      |            |      |            | 1,00        |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 3 | Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan                                                              | -                                             | 1,00        | 1,00                                    |                                                | 1,00        |               | 1,00        |               |      |            |      |            |      |            | 1,00        |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 4 | Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang                                                 | Orang                                         | 40,00       | 35,00                                   |                                                | 30,00       |               | 25,00       |               |      |            |      |            |      |            | 10,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 5 | Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana                                                                              | Juta                                          | 1.000,00    | 900,00                                  |                                                | 800,00      |               | 700,00      |               |      |            |      |            |      |            | 2.400,00    |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 5 | Program Kewaspadaan Dini/Daerah                                                                                              |                                               |             |                                         | 126.236.900                                    |             | 135.620.646   |             | 145.701.927   |      |            |      |            |      |            |             | 407.559.473                       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                               |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat                                                                              | %                                             | 0,00        | 0,00                                    |                                                | 0,00        |               | 0,00        |               |      |            |      |            |      |            | 0,00        |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 2 | Angka Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk                                                                       | -                                             | 0,00        | 0,00                                    |                                                | 0,00        |               | 0,00        |               |      |            |      |            |      |            | 0,00        |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 6 | Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah                                                            |                                               |             |                                         | 424.925.000                                    |             | 950.322.398   |             | 2.125.346.026 |      |            |      |            |      |            |             | 3.500.593.424                     | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                             |     |
|                                                              |     | 1 | Jumlah Kegiatan Penegakan Perda                                                                                              | Kali                                          | 18,00       | 18,00                                   |                                                | 18,00       |               | 18,00       |               |      |            |      |            |      |            | 54,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 6 | Sosial                                                                                                                       |                                               |             |                                         |                                                |             |               |             |               |      |            |      |            |      |            |             |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 1 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |                                               |             |                                         | 193.515.150                                    |             | 344.959.382   |             | 614.923.302   |      |            |      |            |      |            |             | 1.153.397.834                     | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                      |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar                                               | %                                             | 100,00      | 100,00                                  |                                                | 100,00      |               | 100,00      |               |      |            |      |            |      |            | 100,00      |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 2 | Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      |                                               |             |                                         | 166.844.300                                    |             | 151.564.572   |             | 137.684.173   |      |            |      |            |      |            |             | 456.093.045                       | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                      |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial                                                                                | %                                             | 33,00       | 33,00                                   |                                                | 40,00       |               | 50,00       |               |      |            |      |            |      |            | 80,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 3 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                  |                                               |             |                                         | 27.355.550                                     |             | 21.380.746    |             | 16.710.916    |      |            |      |            |      |            |             | 65.447.212                        | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                      |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)   | %                                             | 100,00      | 100,00                                  |                                                | 100,00      |               | 100,00      |               |      |            |      |            |      |            | 100,00      |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 4 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                                        |                                               |             |                                         | 48.144.250                                     |             | 35.143.357    |             | 25.653.231    |      |            |      |            |      |            |             | 108.940.838                       | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |     |
|                                                              |     | 1 | Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri                                                                  | %                                             | 75,00       | 77,50                                   |                                                | 80,00       |               | 82,50       |               |      |            |      |            |      |            | 90,00       |                                   |                                                                                                                        |     |
|                                                              |     | 5 | Program Keluarga Harapan                                                                                                     |                                               |             |                                         | 311.908.400                                    |             | 362.309.605   |             | 420.855.129   |      |            |      |            |      |            |             | 1.095.073.134                     | Dinas Sosial dan                                                                                                       |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                                                |   | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                      | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                          |      |                                                                                               |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                                                              |                                                |   |                                                                                                    |        |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020     |     | Tahun 2021     |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                |   |                                                                                                    |        |                                         | Target                                         | Rp. | Target         | Rp. | Target         | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target                                   | Rp.  |                                                                                               |  |                                   |
| (1)                                                          |                                                |   | (2)                                                                                                | (3)    | (4)                                     | (5)                                            | (6) | (7)            | (8) | (9)            | (10) | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)                                     | (18) | (19)                                                                                          |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Jumlah peserta PKH                                                                                 | KK     | 150,00                                  | 200,00                                         |     | 250,00         |     | 300,00         |      |            |      |            |      |            |      | 750,00                                   |      | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                              |  |                                   |
|                                                              |                                                | 6 | Program Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan                                                        |        |                                         | 138.587.000                                    |     | 385.282.980    |     | 1.071.117.601  |      |            |      |            |      |            |      | 1.594.987.581                            |      | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan                                                | Orang  | 100,00                                  | 150,00                                         |     | 200,00         |     | 250,00         |      |            |      |            |      |            |      | 600,00                                   |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 7 | Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial                                                       |        |                                         | 5.125.651.800                                  |     | 13.558.939.095 |     | 35.867.600.172 |      |            |      |            |      |            |      | 54.552.191.067                           |      | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah                         |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)                                                | Orang  | 10,00                                   | 15,00                                          |     | 20,00          |     | 25,00          |      |            |      |            |      |            |      | 60,00                                    |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Jumlah Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji yang Difasilitasi                                     | Orang  | 1.545,00                                | 1.545,00                                       |     | 1.545,00       |     | 1.545,00       |      |            |      |            |      |            |      | 4.635,00                                 |      |                                                                                               |  |                                   |
| 2                                                            | Non Pelayanan Dasar                            |   |                                                                                                    |        |                                         |                                                |     |                |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                          |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Tenaga Kerja                                                                                       |        |                                         |                                                |     |                |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                          |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                        |        |                                         | 92.618.300                                     |     | 93.558.520     |     | 94.508.305     |      |            |      |            |      |            |      | 280.685.125                              |      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                                 | Orang  | -                                       | 10,00                                          |     | 15,00          |     | 15,00          |      |            |      |            |      |            |      | 40,00                                    |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Jumlah Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET) | Orang  | -                                       | 25,00                                          |     | 25,00          |     | 30,00          |      |            |      |            |      |            |      | 80,00                                    |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja                                                               |        |                                         | 206.506.100                                    |     | 216.002.191    |     | 225.934.956    |      |            |      |            |      |            |      | 648.443.247                              |      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Jumlah Peningkatan Kesempatan Kerja                                                                | -      | -                                       | 574.725,00                                     |     | 586.308,00     |     | 598.426,00     |      |            |      |            |      |            |      | 1.759.459,00                             |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 3 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                      |        |                                         | 150.896.000                                    |     | 152.396.525    |     | 153.911.971    |      |            |      |            |      |            |      | 457.204.496                              |      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Nilai Upah Minimum Kabupaten                                                                       | -      | 2.075.000,00                            | 2.242.000,00                                   |     | 2.442.000,00   |     | 2.615.000,00   |      |            |      |            |      |            |      | 3.295.000,00                             |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan                                       | Orang  | -                                       | 27.900,00                                      |     | 30.800,00      |     | 33.700,00      |      |            |      |            |      |            |      | 92.400,00                                |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 4 | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan                                    |        |                                         | -                                              |     | 3.000.000      |     | -              |      |            |      |            |      |            |      | 3.000.000                                |      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Persentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan                                 | %      | 100,00                                  | 100,00                                         |     | 100,00         |     | 100,00         |      |            |      |            |      |            |      | 100,00                                   |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              | 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |   |                                                                                                    |        |                                         |                                                |     |                |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                          |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Program Perlindungan Anak                                                                          |        |                                         | 572.600.000                                    |     | -              |     | -              |      |            |      |            |      |            |      | 572.600.000                              |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Persentase Peningkatan Perlindungan Anak                                                           | %      | 100,00                                  | 100,00                                         |     | 100,00         |     | 100,00         |      |            |      |            |      |            |      | 100,00                                   |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan                                                       | -      | 1/100                                   | 1/150                                          |     | 1/200          |     | 1/250          |      |            |      |            |      |            |      | 1/400                                    |      |                                                                                               |  |                                   |
|                                                              |                                                | 2 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                               |        |                                         | 314.275.000                                    |     | -              |     | -              |      |            |      |            |      |            |      | 314.275.000                              |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |                                   |
|                                                              |                                                | 1 | Persentase Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                | %      | 100,00                                  | 100,00                                         |     | 100,00         |     | 100,00         |      |            |      |            |      |            |      | 100,00                                   |      |                                                                                               |  |                                   |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |   |                                                                                                                   | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)  | Satuan             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                    |     |                |      |            |      |            |      |            |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|----------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                                                                   |                                                |                    |                                         | Tahun 2019                                     |                    | Tahun 2020         |     | Tahun 2021     |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |      |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                                                    |
|                                                              |   |                                                                                                                   |                                                |                    |                                         | Target                                         | Rp.                | Target             | Rp. | Target         | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  |                                   | Target                                   | Rp.                                                                |
| (1)                                                          |   |                                                                                                                   | (2)                                            | (3)                | (4)                                     | (5)                                            | (6)                | (7)                | (8) | (9)            | (10) | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)                              | (18)                                     | (19)                                                               |
|                                                              | 3 | Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam                                                              |                                                |                    |                                         | 220.200.000                                    |                    | 215.270.226        |     | 210.450.818    |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 645.921.044                              | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup    |
|                                                              | 1 | Indeks Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan                                                                    | -                                              | DDL < 1            | DDL < 1                                 |                                                | DDL < 1            | DDL < 1            |     |                |      |            |      |            |      |            |      | DDL < 1                           |                                          |                                                                    |
|                                                              | 4 | Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup                            |                                                |                    |                                         | 93.400.000                                     |                    | 91.740.279         |     | 90.110.052     |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 275.250.331                              | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup    |
|                                                              | 1 | Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten                               | Dokumen                                        | 1,00               | 1,00                                    |                                                | 1,00               | 1,00               |     |                |      |            |      |            |      |            |      | 3,00                              |                                          |                                                                    |
|                                                              | 5 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi                                                                           |                                                |                    |                                         | 85.445.000                                     |                    | 104.913.059        |     | 128.816.782    |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 319.174.841                              | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup    |
|                                                              | 1 | Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup                                                                               | -                                              | Di bawah Baku Mutu | Di bawah Baku Mutu                      |                                                | Di bawah Baku Mutu | Di bawah Baku Mutu |     |                |      |            |      |            |      |            |      | Di bawah Baku Mutu                |                                          |                                                                    |
|                                                              | 2 | Jumlah Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru                                                          | Peserta                                        | 5,00               | 7,00                                    |                                                | 9,00               | 11,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 27,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 3 | Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri) | %                                              | 5,00               | 7,50                                    |                                                | 10,00              | 12,50              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 20,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 4 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001                                                       | Perusahaan                                     | 5,00               | 7,00                                    |                                                | 9,00               | 11,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 17,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 6 | Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                    |                                                |                    |                                         | 799.152.350                                    |                    | 1.667.201.902      |     | 3.478.138.030  |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 5.944.492.282                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                |
|                                                              | 1 | Jumlah Titik Hotspot                                                                                              | Titik                                          | 50,00              | 45,00                                   |                                                | 40,00              | 35,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 20,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 7 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                     |                                                |                    |                                         | 6.013.634.200                                  |                    | 7.903.855.311      |     | 10.388.215.628 |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 24.305.705.139                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|                                                              | 1 | Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan                                                                               | %                                              | 0,25               | 0,30                                    |                                                | 0,35               | 0,40               |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 0,55                                     |                                                                    |
|                                                              | 8 | Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan                                                                        |                                                |                    |                                         | 907.606.000                                    |                    | 984.429.396        |     | 1.067.755.430  |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 2.959.790.826                            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            |
|                                                              | 1 | Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan                                                            | %                                              | 80,00              | 82,50                                   |                                                | 85,00              | 87,50              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 95,00                                    |                                                                    |
| 6                                                            |   |                                                                                                                   | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                    |                                         |                                                |                    |                    |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   |                                          |                                                                    |
|                                                              | 1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                                                        |                                                |                    |                                         | 3.594.613.210                                  |                    | 4.487.390.847      |     | 5.601.903.580  |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 13.683.907.637                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            |
|                                                              | 1 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                  | %                                              | 100,00             | 100,00                                  |                                                | 100,00             | 100,00             |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 100,00                                   |                                                                    |
|                                                              | 2 | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Kependudukan                                                  |                                                |                    |                                         | 32.596.000                                     |                    | 35.855.600         |     | 39.441.160     |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 107.892.760                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                            |
|                                                              | 1 | Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diarsipkan                                                  | Dokumen                                        | 10.000,00          | 20.000,00                               |                                                | 30.000,00          | 40.000,00          |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 90.000,00                                |                                                                    |
| 7                                                            |   |                                                                                                                   | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               |                    |                                         |                                                |                    |                    |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   |                                          |                                                                    |
|                                                              | 1 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                                                               |                                                |                    |                                         | 218.076.350                                    |                    | 328.587.749        |     | 495.101.412    |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 1.041.765.511                            | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  |
|                                                              | 1 | Jumlah Kelompok Binaan LPM                                                                                        | Kelompok                                       | 75,00              | 80,00                                   |                                                | 85,00              | 90,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 255,00                                   |                                                                    |
|                                                              | 2 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                                                     |                                                |                    |                                         | 135.598.800                                    |                    | 152.768.663        |     | 172.112.617    |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 460.480.080                              | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  |
|                                                              | 1 | Jumlah BUMDes/BUMADES                                                                                             | -                                              | 31,00              | 55,00                                   |                                                | 69,00              | 82,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 117,00                                   |                                                                    |
|                                                              | 3 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                                                   |                                                |                    |                                         | 868.929.400                                    |                    | 984.276.258        |     | 1.114.934.944  |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 2.968.140.602                            | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Senua Kecamatan |
|                                                              | 1 | Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa                                                                          | %                                              | 100,00             | 100,00                                  |                                                | 100,00             | 100,00             |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 100,00                                   |                                                                    |
|                                                              | 2 | Jumlah Desa Sangat Tertinggal                                                                                     | Desa                                           | 16,00              | 13,00                                   |                                                | 10,00              | 7,00               |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 0,00                                     |                                                                    |
|                                                              | 3 | Jumlah Desa Tertinggal                                                                                            | Desa                                           | 60,00              | 55,00                                   |                                                | 50,00              | 40,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 8,00                                     |                                                                    |
|                                                              | 4 | Jumlah Desa Berkembang                                                                                            | Desa                                           | 31,00              | 31,00                                   |                                                | 27,00              | 25,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 15,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 5 | Jumlah Desa Maju                                                                                                  | Desa                                           | 10,00              | 10,00                                   |                                                | 14,00              | 21,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 46,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 6 | Jumlah Desa Mandiri                                                                                               | Desa                                           | 0,00               | 8,00                                    |                                                | 16,00              | 24,00              |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 48,00                                    |                                                                    |
|                                                              | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                            |                                                |                    |                                         | 3.669.570.450                                  |                    | 6.016.474.357      |     | 9.864.359.926  |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 19.550.404.733                           | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  |
|                                                              | 1 | Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan                                                      | %                                              | 100,00             | 100,00                                  |                                                | 100,00             | 100,00             |     |                |      |            |      |            |      |            |      |                                   | 100,00                                   |                                                                    |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |     |                                                                                                                      |     | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |      |            |      |            |      |             |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                             |            |     |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |     |                                                                                                                      |     |                                               |            |                                         | Tahun 2019                                     |               | Tahun 2020 |      | Tahun 2021 |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023  |               |                                                                                               | Tahun 2024 |     | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |     |                                                                                                                      |     |                                               |            |                                         | Target                                         | Rp.           | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target      | Rp.           |                                                                                               | Target     | Rp. | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2) | (3) | (4)                                                                                                                  | (5) | (6)                                           | (7)        | (8)                                     | (9)                                            | (10)          | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)        | (18)          | (19)                                                                                          |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 5   | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan                                                                     |     | 65.057.100                                    |            | 66.279.727                              |                                                | 67.525.332    |            |      |            |      |            |      |             | 198.862.159   | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)                  | %   | 100,00                                        | 100,00     |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |      |            |      |            |      | 100,00      |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 6   | Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                           |     | 312.497.450                                   |            | 363.953.314                             |                                                | 423.881.907   |            |      |            |      |            |      |             | 1.100.332.671 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Desa yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan | %   | 100,00                                        | 100,00     |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |      |            |      |            |      | 100,00      |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 7   | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPMD                                                          |     | 128.735.200                                   |            | -                                       |                                                | -             |            |      |            |      |            |      |             | 128.735.200   | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPMD                                           | %   | 100,00                                        | 100,00     |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |      |            |      |            |      | 100,00      |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 8   | Program Penataan Wilayah Administrasi Desa                                                                           |     | 177.166.650                                   |            | 157.962.779                             |                                                | 140.840.500   |            |      |            |      |            |      |             | 475.969.929   | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa                                                                              | %   | 100,00                                        | 100,00     |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |      |            |      |            |      | 100,00      |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 9   | Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa                                                           |     | 176.133.400                                   |            | 196.817.729                             |                                                | 219.931.134   |            |      |            |      |            |      |             | 592.882.263   | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                             |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Inventarisasi Aset Desa                                                      | %   | 100,00                                        | 100,00     |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |      |            |      |            |      | 100,00      |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 8   | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                         |     |                                               |            |                                         |                                                |               |            |      |            |      |            |      |             |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Program Keluarga Berencana                                                                                           |     | 427.439.950                                   |            | 450.363.932                             |                                                | 474.517.348   |            |      |            |      |            |      |             | 1.352.321.230 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Cakupan Sasaran PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif (67 = 100%)                                                        | -   | 64,00                                         | 64,42      |                                         | 64,95                                          |               | 65,25      |      |            |      |            |      | 66,21       |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                                                  |     | 40.144.000                                    |            | 50.259.960                              |                                                | 62.925.059    |            |      |            |      |            |      |             | 153.329.019   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Cakupan Sekolah Siaga Kependudukan                                                                                   | -   | 1,00                                          | 4,00       |                                         | 4,00                                           |               | 6,00       |      |            |      |            |      | 8,00        |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Program Pelayanan Kontrasepsi                                                                                        |     | -                                             |            | 75.000.000                              |                                                | 75.000.000    |            |      |            |      |            |      |             | 150.000.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                              | %   | 27,00                                         | 27,34      |                                         | 27,45                                          |               | 27,60      |      |            |      |            |      | 28,00       |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri                                          |     | 2.378.500.600                                 |            | 2.919.843.130                           |                                                | 3.584.394.263 |            |      |            |      |            |      |             | 8.882.737.993 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |            |     |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB                                                                                | -   | 1 Desa 20%                                    | 1 Desa 20% |                                         | 1 Desa 20%                                     |               | 1 Desa 40% |      |            |      |            |      | 1 Desa 100% |               |                                                                                               |            |     |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |   |                                                                                      | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                     | Satuan               | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                           |     |                           |                |            |      |            |                |            |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------|----------------|------------|------|------------|----------------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                                      |                                                                   |                      |                                         | Tahun 2019                                     |               | Tahun 2020                |     | Tahun 2021                |                | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |      |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |                                                                                               |
|                                                              |   |                                                                                      |                                                                   |                      |                                         | Target                                         | Rp.           | Target                    | Rp. | Target                    | Rp.            | Target     | Rp.  | Target     | Rp.            | Target     | Rp.  |                                   | Target                                   | Rp.            |                                                                                               |
| (1)                                                          |   |                                                                                      | (2)                                                               | (3)                  | (4)                                     | (5)                                            | (6)           | (7)                       | (8) | (9)                       | (10)           | (11)       | (12) | (13)       | (14)           | (15)       | (16) | (17)                              | (18)                                     | (19)           |                                                                                               |
|                                                              | 5 | Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat |                                                                   |                      |                                         |                                                | 8.230.000     |                           |     |                           | 7.193.236      |            |      |            | 6.287.077      |            |      |                                   |                                          | 21.710.313     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase PPKBD dan Sub PPKBD yang Dibentuk                      | %                    | 64,00                                   | 65,00                                          |               | 66,00                     |     | 67,00                     |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 70,00                                    |                |                                                                                               |
|                                                              | 6 | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR                     |                                                                   |                      |                                         |                                                | 172.189.300   |                           |     |                           | 237.153.724    |            |      |            | 326.628.246    |            |      |                                   |                                          | 735.971.270    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Jumlah Kelompok PIK Remaja                                        | Kelompok             | 65,00                                   | 70,00                                          |               | 75,00                     |     | 78,00                     |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 87,00                                    |                |                                                                                               |
|                                                              | 7 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                           |                                                                   |                      |                                         |                                                | 202.830.750   |                           |     |                           | 341.799.850    |            |      |            | 575.983.364    |            |      |                                   |                                          | 1.120.613.964  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Cakupan PUS Peserta KB/ Anggota UPPKS yang ber-KB (87 = 100%)     | -                    | 76,00                                   | 76,34                                          |               | 77,00                     |     | 77,30                     |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 78,20                                    |                |                                                                                               |
|                                                              | 8 | Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB                                  |                                                                   |                      |                                         |                                                | 2.784.150.000 |                           |     |                           | 3.178.681.574  |            |      |            | 3.629.120.755  |            |      |                                   |                                          | 9.591.952.329  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Cakupan Balai Penyuluh KB dan Kampung KB                          | -                    | 9 Balai dan 20 Kampung KB               | 9 Balai dan 20 Kampung KB                      |               | 9 Balai dan 20 Kampung KB |     | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 9 Balai dan 20 Kampung KB                |                |                                                                                               |
| 9                                                            |   |                                                                                      | Perhubungan                                                       |                      |                                         |                                                |               |                           |     |                           |                |            |      |            |                |            |      |                                   |                                          |                |                                                                                               |
|                                                              | 1 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (LLASDP)      |                                                                   |                      |                                         |                                                | 497.142.400   |                           |     | -                         |                |            |      |            | -              |            |      |                                   |                                          | 497.142.400    | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase/Tingkat Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan  | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              | 2 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                              |                                                                   |                      |                                         |                                                | 677.240.400   |                           |     |                           | 711.102.420    |            |      |            | 746.657.541    |            |      |                                   |                                          | 2.135.000.361  | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan/Teknis Bidang Perhubungan | Dokumen              | 5,00                                    | 5,00                                           |               | 5,00                      |     | 5,00                      |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 15,00                                    |                |                                                                                               |
|                                                              | 3 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)                 |                                                                   |                      |                                         |                                                | 107.944.400   |                           |     | -                         |                |            |      |            | -              |            |      |                                   |                                          | 107.944.400    | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase/Tingkat Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat           | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              | 4 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                               |                                                                   |                      |                                         |                                                | 2.088.436.000 |                           |     |                           | 9.006.577.656  |            |      |            | 38.841.717.473 |            |      |                                   |                                          | 49.936.731.129 | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat                   | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              |   | 2                                                                                    | Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan SDP                     | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              | 5 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan                                 |                                                                   |                      |                                         |                                                | 8.659.000.000 |                           |     |                           | 10.023.893.722 |            |      |            | 11.603.931.788 |            |      |                                   |                                          | 30.286.825.510 | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan               | Sarana dan Prasarana | 5,00                                    | 5,00                                           |               | 5,00                      |     | 5,00                      |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 15,00                                    |                |                                                                                               |
|                                                              | 6 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                                      |                                                                   |                      |                                         |                                                | 443.699.100   |                           |     |                           | 443.357.016    |            |      |            | 443.015.195    |            |      |                                   |                                          | 1.330.071.311  | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Darat          | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              |   | 2                                                                                    | Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas SDP            | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |
|                                                              |   | 3                                                                                    | Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Darat                | -                    | 0,00                                    | 0,00                                           |               | 0,00                      |     | 0,00                      |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 0,00                                     |                |                                                                                               |
|                                                              |   | 4                                                                                    | Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas SDP                  | -                    | 0,00                                    | 0,00                                           |               | 0,00                      |     | 0,00                      |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 0,00                                     |                |                                                                                               |
|                                                              | 7 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor                        |                                                                   |                      |                                         |                                                | 610.200.900   |                           |     |                           | 867.470.843    |            |      |            | 1.233.209.690  |            |      |                                   |                                          | 2.710.881.433  | Dinas Perhubungan                                                                             |
|                                                              |   | 1                                                                                    | Persentase Angkutan/Kendaraan Bermotor yang Layak Operasi         | %                    | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00                    |     | 100,00                    |                |            |      |            |                |            |      |                                   | 100,00                                   |                |                                                                                               |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |    |                                                                                                        | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |             |                |             |                |            |      |            |      |            |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |    |                                                                                                        |                                               |        |                                         | Tahun 2019                                     |                | Tahun 2020  |                | Tahun 2021  |                | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |      |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                                                                                                                                        |
|                                                              |    |                                                                                                        |                                               |        |                                         | Target                                         | Rp.            | Target      | Rp.            | Target      | Rp.            | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  |                                   | Target                                   | Rp.                                                                                                                                                    |
| (1)                                                          |    |                                                                                                        | (2)                                           | (3)    | (4)                                     | (5)                                            | (6)            | (7)         | (8)            | (9)         | (10)           | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)                              | (18)                                     | (19)                                                                                                                                                   |
|                                                              | 8  | Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum                                                              |                                               |        |                                         |                                                | 14.440.135.660 |             | 20.539.060.101 |             | 29.213.921.516 |            |      |            |      |            |      |                                   | 64.193.117.277                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                |
|                                                              | 1  | Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik                                              | %                                             | 75,00  | 77,50                                   |                                                | 80,00          |             | 82,50          |             |                |            |      |            |      |            |      | 90,00                             |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 9  | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan |                                               |        |                                         | -                                              |                | 521.999.520 |                | 548.099.496 |                |            |      |            |      |            |      |                                   | 1.070.099.016                            | Dinas Perhubungan                                                                                                                                      |
|                                                              | 1  | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Dalam Kondisi Layak                   | %                                             | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 10 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat                           |                                               |        |                                         | -                                              |                | 113.341.620 |                | 119.008.701 |                |            |      |            |      |            |      |                                   | 232.350.321                              | Dinas Perhubungan                                                                                                                                      |
|                                                              | 1  | Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Dalam Kondisi Layak                 | %                                             | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
| 10                                                           |    |                                                                                                        | Komunikasi dan Informatika                    |        |                                         |                                                |                |             |                |             |                |            |      |            |      |            |      |                                   |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 1  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa                                             |                                               |        |                                         |                                                | 3.624.551.330  |             | 3.470.663.234  |             | 3.323.308.788  |            |      |            |      |            |      |                                   | 10.418.523.352                           | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                       |
|                                                              | 1  | Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda atau yang Bermitra Dengan Pemda                             | Media                                         | 10,00  | 10,00                                   |                                                | 10,00          |             | 10,00          |             |                |            |      |            |      |            |      | 30,00                             |                                          | Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                              | 2  | Program Pengembangan dan Implementasi E-Government                                                     |                                               |        |                                         |                                                | 323.162.500    |             | 216.899.553    |             | 145.578.203    |            |      |            |      |            |      |                                   | 685.640.256                              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                       |
|                                                              | 1  | Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan                                                                      | Aplikasi                                      | 1,00   | 1,00                                    |                                                | 1,00           |             | 1,00           |             |                |            |      |            |      |            |      | 3,00                              |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 3  | Program Implementasi LPSE                                                                              |                                               |        |                                         |                                                | 1.460.627.700  |             | 1.708.055.262  |             | 1.997.396.584  |            |      |            |      |            |      |                                   | 5.166.079.546                            | Sekretariat Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                   |
|                                                              | 1  | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE                                                 | %                                             | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 4  | Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah                                                         |                                               |        |                                         | -                                              |                | 113.341.620 |                | 119.008.701 |                |            |      |            |      |            |      |                                   | 232.350.321                              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                       |
|                                                              | 1  | Persentase Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah                                          | %                                             | -      | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 2  | Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet                                                 | %                                             | -      | 77,50                                   |                                                | 80,00          |             | 82,50          |             |                |            |      |            |      |            |      | 90,00                             |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 3  | Cakupan Layanan Mobile Broadband                                                                       | %                                             | -      | 45,00                                   |                                                | 50,00          |             | 55,00          |             |                |            |      |            |      |            |      | 70,00                             |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 4  | Proporsi Individu yang Menggunakan Internet                                                            | %                                             | -      | 45,00                                   |                                                | 50,00          |             | 55,00          |             |                |            |      |            |      |            |      | 70,00                             |                                          |                                                                                                                                                        |
| 11                                                           |    |                                                                                                        | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah            |        |                                         |                                                |                |             |                |             |                |            |      |            |      |            |      |                                   |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 1  | Program Penciptaan Idim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif                                             |                                               |        |                                         |                                                | 146.627.000    |             | -              |             | -              |            |      |            |      |            |      |                                   | 146.627.000                              | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                                                                             |
|                                                              | 1  | Jumlah UMKM yang Mendapat Pelatihan dan Bantuan                                                        | UMKM                                          | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 0,00           |             | 0,00           |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 2  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah                      |                                               |        |                                         |                                                | 443.711.500    |             | 383.926.510    |             | 332.196.855    |            |      |            |      |            |      |                                   | 1.159.834.865                            | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                                                                             |
|                                                              | 1  | Jumlah UMKM yang Difasilitasi                                                                          | UMKM                                          | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 300,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 3  | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                            |                                               |        |                                         |                                                | 65.872.000     |             | 44.833.516     |             | 30.514.394     |            |      |            |      |            |      |                                   | 141.219.910                              | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                                                                             |
|                                                              | 1  | Jumlah UMKM yang Melakukan Kemitraan                                                                   | UMKM                                          | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 300,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |
|                                                              | 4  | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                                      |                                               |        |                                         |                                                | 192.148.500    |             | 206.438.738    |             | 221.791.752    |            |      |            |      |            |      |                                   | 620.378.990                              | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                                                                             |
|                                                              | 1  | Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi                                                   | %                                             | 100,00 | 100,00                                  |                                                | 100,00         |             | 100,00         |             |                |            |      |            |      |            |      | 100,00                            |                                          |                                                                                                                                                        |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |                                                                         |  | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) |          | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |      |            |      |            |      |            |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                          |  |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         | Tahun 2019                                     |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |               |                                                                            |  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         | Target                                         | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.           |                                                                            |  | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2) |                                                                         |  | (3)                                           | (4)      | (5)      | (6)                                     | (7)                                            | (8)           | (9)        | (10)          | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)       | (18)          | (19)                                                                       |  |                                          |     |
| 12 Penanaman Modal                                           |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         |                                                |               |            |               |            |      |            |      |            |      |            |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi                     |  |                                               |          |          | 490.811.500                             |                                                | 570.431.647   |            | 662.967.889   |            |      |            |      |            |      |            | 1.724.211.036 | Sekretariat Daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                  |  | %                                             | 100,00   | 100,00   |                                         | 100,00                                         |               |            |               |            |      |            |      |            |      | 100,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 2   | Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi             |  |                                               |          |          | 84.550.000                              |                                                | -             |            | -             |            |      |            |      |            |      |            | 84.550.000    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)                                   |  | Milyar                                        | 6.137,29 | 6.500,00 |                                         | 6.750,00                                       |               | 7.000,00   |               |            |      |            |      |            |      | 7.750,00   |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 3   | Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah      |  |                                               |          |          | 67.585.000                              |                                                | -             |            | -             |            |      |            |      |            |      |            | 67.585.000    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah |  | %                                             | 100,00   | 100,00   |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |               |            |      |            |      |            |      | 100,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 4   | Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan                            |  |                                               |          |          | 513.845.000                             |                                                | -             |            | -             |            |      |            |      |            |      |            | 513.845.000   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan            |  | %                                             | 100,00   | 100,00   |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |               |            |      |            |      |            |      | 100,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 5   | Program Pengelolaan dan Peningkatan Investasi                           |  |                                               |          |          | -                                       |                                                | 539.308.083   |            | 566.032.965   |            |      |            |      |            |      |            | 1.105.341.048 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)                 |  | Milyar                                        | 6.137,29 | 6.500,00 |                                         | 6.750,00                                       |               | 7.000,00   |               |            |      |            |      |            |      | 7.750,00   |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 6   | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan               |  |                                               |          |          | -                                       |                                                | 539.308.083   |            | 566.032.965   |            |      |            |      |            |      |            | 1.105.341.048 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai                         |  | Perizinan dan Non Perizinan                   | 0,00     | 0,00     |                                         | 2.585,00                                       |               | 2.630,00   |               |            |      |            |      |            |      | 5.215,00   |               |                                                                            |  |                                          |     |
| 13 Kepemudaan dan Olah Raga                                  |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         |                                                |               |            |               |            |      |            |      |            |      |            |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                              |  |                                               |          |          | 828.190.000                             |                                                | 992.538.471   |            | 1.189.500.739 |            |      |            |      |            |      |            | 3.010.229.210 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Semua Kecamatan                     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Pemuda Pelopor                                                   |  | Orang                                         | 5,00     | 5,00     |                                         | 5,00                                           |               | 5,00       |               |            |      |            |      |            |      | 15,00      |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 2   | Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga                  |  |                                               |          |          | 50.000.000                              |                                                | 52.500.000    |            | 55.125.000    |            |      |            |      |            |      |            | 157.625.000   | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                      |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Persentase Peningkatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga    |  | %                                             | 100,00   | 100,00   |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |               |            |      |            |      |            |      | 100,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 3   | Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga                          |  |                                               |          |          | 772.000.000                             |                                                | 976.908.523   |            | 1.236.205.002 |            |      |            |      |            |      |            | 2.985.113.525 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                      |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Prestasi Olah Raga                                               |  | -                                             | 35,00    | 36,00    |                                         | 37,00                                          |               | 38,00      |               |            |      |            |      |            |      | 111,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 4   | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga                      |  |                                               |          |          | 250.000.000                             |                                                | 360.843.918   |            | 520.833.333   |            |      |            |      |            |      |            | 1.131.677.251 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                      |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk                           |  | -                                             | 0,00     | 0,00     |                                         | 1,00                                           |               | 1,00       |               |            |      |            |      |            |      | 1,00       |               |                                                                            |  |                                          |     |
| 14 Statistik                                                 |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         |                                                |               |            |               |            |      |            |      |            |      |            |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Program Pengembangan Data/Informasi                                     |  |                                               |          |          | 940.615.250                             |                                                | 1.017.588.941 |            | 1.100.861.646 |            |      |            |      |            |      |            | 3.059.065.837 | Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi                      |  | %                                             | 100,00   | 100,00   |                                         | 100,00                                         |               | 100,00     |               |            |      |            |      |            |      | 100,00     |               |                                                                            |  |                                          |     |
| 15 Kebudayaan                                                |     |                                                                         |  |                                               |          |          |                                         |                                                |               |            |               |            |      |            |      |            |      |            |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Program Pengembangan Nilai Budaya                                       |  |                                               |          |          | 694.758.450                             |                                                | 792.685.905   |            | 904.416.412   |            |      |            |      |            |      |            | 2.391.860.767 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                         |  | Event                                         | 2,00     | 3,00     |                                         | 4,00                                           |               | 5,00       |               |            |      |            |      |            |      | 12,00      |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 2   | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                     |  |                                               |          |          | 35.377.600                              |                                                | 36.563.671    |            | 37.789.506    |            |      |            |      |            |      |            | 109.730.777   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan          |  | -                                             | 10,00    | 10,00    |                                         | 10,00                                          |               | 10,00      |               |            |      |            |      |            |      | 30,00      |               |                                                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 3   | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya              |  |                                               |          |          | 82.180.000                              |                                                | 84.942.404    |            | 87.797.663    |            |      |            |      |            |      |            | 254.920.067   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                            |  |                                          |     |
|                                                              | 1   | Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah                    |  | Orang                                         | 20,00    | 25,00    |                                         | 26,00                                          |               | 27,00      |               |            |      |            |      |            |      | 78,00      |               |                                                                            |  |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |  |  |  | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan                                                                                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |                |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |  |  |  |                                               |                                                                                             |                                         | Tahun 2019                                     |           | Tahun 2020    |           | Tahun 2021    |           | Tahun 2022    |        | Tahun 2023 |        | Tahun 2024 |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  |                                               |                                                                                             |                                         |                                                | Target    | Rp.           | Target    | Rp.           | Target    | Rp.           | Target | Rp.        | Target | Rp.        | Target | Rp.                                      |                |                                                                                          |
| (1)                                                          |  |  |  | (2)                                           | (3)                                                                                         | (4)                                     | (5)                                            | (6)       | (7)           | (8)       | (9)           | (10)      | (11)          | (12)   | (13)       | (14)   | (15)       | (16)   | (17)                                     | (18)           | (19)                                                                                     |
| 16                                                           |  |  |  | Perpustakaan                                  |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan                                 |                                         |                                                |           | 614.816.500   |           | 776.513.300   |           | 980.736.375   |        |            |        |            |        |                                          | 2.372.066.175  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                         |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Perpustakaan                                                                         | Perpustakaan                            | 85,00                                          | 100,00    |               | 125,00    |               | 150,00    |               |        |            |        |            |        | 375,00                                   |                |                                                                                          |
| 17                                                           |  |  |  | Kearsipan                                     |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan                                             |                                         |                                                |           | 68.006.100    |           | 63.754.526    |           | 59.768.750    |        |            |        |            |        |                                          | 191.529.376    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                         |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) | %                                       | 100,00                                         | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               |        |            |        |            |        | 100,00                                   |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 2                                             | Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah                                  |                                         |                                                |           | 68.754.800    |           | 63.850.981    |           | 59.296.918    |        |            |        |            |        |                                          | 191.902.699    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku                                             | %                                       | 100,00                                         | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               |        |            |        |            |        | 100,00                                   |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 3                                             | Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan                          |                                         |                                                |           | 8.999.900     |           | 5.224.825     |           | 3.033.234     |        |            |        |            |        |                                          | 17.257.959     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                         |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Frekuensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah                                          | Kali                                    | 5,00                                           | 5,00      |               | 5,00      |               | 5,00      |               |        |            |        |            |        | 15,00                                    |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 4                                             | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi                                            |                                         |                                                |           | 2.412.114.000 |           | 2.819.521.360 |           | 3.295.740.043 |        |            |        |            |        |                                          | 8.527.375.403  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Sekretariat Daerah                                     |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Tersedianya Sistem Arsip Elektronik                                                         | -                                       | Tersedia                                       | Tersedia  |               | Tersedia  |               | Tersedia  |               |        |            |        |            |        | Tersedia                                 |                |                                                                                          |
| URUSAN PILIHAN                                               |  |  |  |                                               |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
| 1                                                            |  |  |  | Kelautan dan Perikanan                        |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                                     |                                         |                                                |           | 686.876.000   |           | 955.240.936   |           | 1.328.457.024 |        |            |        |            |        |                                          | 2.970.573.960  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                          | Ton                                     | 3.472,00                                       | 3.500,00  |               | 4.000,00  |               | 4.500,00  |               |        |            |        |            |        | 12.000,00                                |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 2                                             | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                                      |                                         |                                                |           | 3.287.680.940 |           | 3.058.735.034 |           | 2.845.732.351 |        |            |        |            |        |                                          | 9.192.148.325  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                           | Ton                                     | 25.855,00                                      | 26.250,00 |               | 26.500,00 |               | 26.750,00 |               |        |            |        |            |        | 79.500,00                                |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 3                                             | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar                         |                                         |                                                |           | 2.674.318.000 |           | 2.742.739.669 |           | 2.812.911.887 |        |            |        |            |        |                                          | 8.229.969.556  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Persentase Luasan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar                            | %                                       | 75,00                                          | 77,50     |               | 80,00     |               | 82,50     |               |        |            |        |            |        | 90,00                                    |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 4                                             | Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/ Database Perikanan                      |                                         |                                                |           | 150.000.000   |           | -             |           | -             |        |            |        |            |        |                                          | 150.000.000    | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Tersedianya Sistem Informasi/ Database Perikanan                                            | -                                       | Tersedia                                       | Tersedia  |               | Tersedia  |               | Tersedia  |               |        |            |        |            |        | Tersedia                                 |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 5                                             | Program Pemberdayaan Pengolahan Hasil Perikanan                                             |                                         |                                                |           | 625.581.800   |           | 1.063.221.722 |           | 1.807.022.568 |        |            |        |            |        |                                          | 3.495.826.090  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Dibina                            | Kelompok                                | 180,00                                         | 200,00    |               | 250,00    |               | 300,00    |               |        |            |        |            |        | 750,00                                   |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 6                                             | Program Peningkatan Kehidupan Nelayan                                                       |                                         |                                                |           | 521.138.850   |           | 649.690.366   |           | 809.952.226   |        |            |        |            |        |                                          | 1.980.781.442  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Nelayan yang Difasilitasi                                                            | Nelayan                                 | 200,00                                         | 250,00    |               | 300,00    |               | 350,00    |               |        |            |        |            |        | 900,00                                   |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 7                                             | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan              |                                         |                                                |           | 472.218.200   |           | 348.467.616   |           | 257.147.393   |        |            |        |            |        |                                          | 1.077.833.209  | Dinas Perikanan                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Produksi ikan Hasil Olahan                                                           | Ton                                     | 2.559,00                                       | 3.000,00  |               | 3.250,00  |               | 3.500,00  |               |        |            |        |            |        | 9.750,00                                 |                |                                                                                          |
| 2                                                            |  |  |  | Pariwisata                                    |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                   |                                         |                                                |           | 50.000.000    |           | 42.740.690    |           | 36.535.332    |        |            |        |            |        |                                          | 129.276.022    | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                                    |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD                                        | %                                       | 10,46                                          | 11,46     |               | 12,46     |               | 13,46     |               |        |            |        |            |        | 16,00                                    |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 2                                             | Jumlah Wisatawan Mancanegara                                                                | Orang                                   | 2.120,00                                       | 2.159,00  |               | 2.223,00  |               | 2.290,00  |               |        |            |        |            |        | 6.672,00                                 |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 3                                             | Jumlah Wisatawan Nusantara                                                                  | Orang                                   | 54.280,00                                      | 58.351,00 |               | 60.102,00 |               | 61.905,00 |               |        |            |        |            |        | 180.358,00                               |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 2                                             | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                                   |                                         |                                                |           | 4.063.268.000 |           | 4.266.431.400 |           | 4.479.752.970 |        |            |        |            |        |                                          | 12.809.452.370 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                                    |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Pengembangan Kawasan Pariwisata                                                      | Kawasan                                 | 1,00                                           | 4,00      |               | 3,00      |               | 3,00      |               |        |            |        |            |        | 10,00                                    |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 3                                             | Program Pengembangan Kemitraan                                                              |                                         |                                                |           | 190.000.000   |           | 187.836.423   |           | 185.697.482   |        |            |        |            |        |                                          | 563.533.905    | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                                    |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Usaha/ Kegiatan Pariwisata yang Memiliki Legalitas                                   | Tempat Usaha                            | 46,00                                          | 56,00     |               | 66,00     |               | 76,00     |               |        |            |        |            |        | 198,00                                   |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 4                                             | Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif                                     |                                         |                                                |           | 765.000.000   |           | 1.016.916.450 |           | 1.351.789.630 |        |            |        |            |        |                                          | 3.133.706.080  | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                                    |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif                                                            | Komunitas                               | 5,00                                           | 5,00      |               | 6,00      |               | 7,00      |               |        |            |        |            |        | 18,00                                    |                |                                                                                          |
| 3                                                            |  |  |  | Pertanian                                     |                                                                                             |                                         |                                                |           |               |           |               |           |               |        |            |        |            |        |                                          |                |                                                                                          |
|                                                              |  |  |  | 1                                             | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                                    |                                         |                                                |           | 1.038.069.600 |           | 1.071.163.624 |           | 1.105.312.697 |        |            |        |            |        |                                          | 3.214.545.921  | Dinas Pertanian                                                                          |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |  |  |    | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                                              | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                |     |               |      |            |      |            |      |            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                   |      |
|--------------------------------------------------------------|--|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|------|------------|------|------------|------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------|
|                                                              |  |  |    |                                                                                                                            |           |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020     |     | Tahun 2021    |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |                |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD          |      |
|                                                              |  |  |    |                                                                                                                            |           |                                         | Target                                         | Rp. | Target         | Rp. | Target        | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.            |                                   | Target                                            | Rp.  |
| (1)                                                          |  |  |    | (2)                                                                                                                        | (3)       | (4)                                     | (5)                                            | (6) | (7)            | (8) | (9)           | (10) | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16)           | (17)                              | (18)                                              | (19) |
|                                                              |  |  | 1  | Nilai Tukar Petani (NTP)                                                                                                   | -         | 94,60                                   | 95,00                                          |     | 96,00          |     | 97,00         |      |            |      |            |      |            | 100,00         |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 2  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)                                                                |           |                                         | 2.591.053.510                                  |     | 2.698.954.044  |     | 2.811.347.935 |      |            |      |            |      |            | 8.101.355.489  | Dinas Pertanian                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Skor PPH                                                                                                                   | -         | 89,10                                   | 89,60                                          |     | 90,10          |     | 90,60         |      |            |      |            |      |            | 92,10          |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 3  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                                                          |           |                                         | 2.794.040.950                                  |     | 2.321.893.012  |     | 1.929.530.474 |      |            |      |            |      |            |                | 7.045.464.436                     | Dinas Pertanian                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                                                                      | -         | Skala Nasional                          | Skala Nasional                                 |     | Skala Nasional |     |               |      |            |      |            |      |            | Skala Nasional |                                   | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 4  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan                                                               |           |                                         | 83.876.250                                     |     | 57.620.961     |     | 39.584.211    |      |            |      |            |      |            |                | 181.081.422                       |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Jumlah Komoditas yang Bersertifikat                                                                                        | Komoditas | 10,00                                   | 10,00                                          |     | 10,00          |     | 10,00         |      |            |      |            |      |            | 10,00          |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 5  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                                                                          |           |                                         | 1.761.373.200                                  |     | 1.610.209.828  |     | 1.472.019.495 |      |            |      |            |      |            |                | 4.843.602.523                     | Dinas Pertanian                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Indeks Pertanaman                                                                                                          | -         | 110,00                                  | 112,00                                         |     | 115,00         |     | 118,00        |      |            |      |            |      |            |                | 127,00                            | Dinas Pertanian                                   |      |
|                                                              |  |  | 6  | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan                                                                |           |                                         | 597.414.050                                    |     | 582.431.835    |     | 567.825.351   |      |            |      |            |      |            |                | 1.747.671.236                     |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan                                                        | -         | 23 : 1                                  | 23 : 1                                         |     | 23 : 1         |     |               |      |            |      |            |      |            | 23 : 1         |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 7  | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak                                                                      |           |                                         | 179.606.350                                    |     | 137.696.684    |     | 105.566.294   |      |            |      |            |      |            |                | 422.869.328                       | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 1  | Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular                                                                                        | Ekor      | -                                       | 550,00                                         |     | 500,00         |     | 475,00        |      |            |      |            |      |            |                | 400,00                            | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 8  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                                                              |           |                                         | 850.834.200                                    |     | 757.097.047    |     | 673.686.999   |      |            |      |            |      |            |                | 2.281.618.246                     |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                                                           | %         | 5,00                                    | 5,00                                           |     | 5,00           |     | 5,00          |      |            |      |            |      |            | 5,00           |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 9  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                                                                    |           |                                         | 85.588.500                                     |     | 107.430.908    |     | 134.847.556   |      |            |      |            |      |            |                | 327.866.964                       | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 1  | Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                                                                 | %         | 5,00                                    | 5,00                                           |     | 5,00           |     | 5,00          |      |            |      |            |      |            | 5,00           |                                   | Dinas Pertanian                                   |      |
|                                                              |  |  | 10 | Program Sistem Informasi/Database Pertanian                                                                                |           |                                         | 129.531.700                                    |     | 139.250.175    |     | 149.697.805   |      |            |      |            |      |            |                | 418.479.680                       |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian                                                                            | -         | Tersedia                                | Tersedia                                       |     | Tersedia       |     | Tersedia      |      |            |      |            |      |            | Tersedia       |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 11 | Program Pengembangan Agribisnis                                                                                            |           |                                         | 985.826.350                                    |     | 944.635.140    |     | 905.165.040   |      |            |      |            |      |            |                | 2.835.626.530                     | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 1  | Jumlah Ijin Usaha Perkebunan                                                                                               | Ijin      | 200,00                                  | 190,00                                         |     | 180,00         |     |               |      |            |      |            |      |            |                | 140,00                            | Dinas Pertanian                                   |      |
|                                                              |  |  | 12 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian                                                         |           |                                         | 3.804.383.000                                  |     | 3.593.011.746  |     | 3.393.384.264 |      |            |      |            |      |            |                | 10.790.779.010                    |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Produktivitas Padi                                                                                                         | Kw/Ha     | 27,20                                   | 27,30                                          |     | 27,40          |     | 27,50         |      |            |      |            |      |            | 27,80          |                                   |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 13 | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) |           |                                         | 105.867.800                                    |     | 89.412.774     |     | 75.515.353    |      |            |      |            |      |            |                | 270.795.927                       | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 1  | Jumlah Pencapaian Swasembada Daging Sapi                                                                                   | Ekor      | -                                       | 850,00                                         |     | 950,00         |     | 1.050,00      |      |            |      |            |      |            |                | 1.350,00                          | Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan |      |
|                                                              |  |  | 14 | Program Perlindungan Perkebunan                                                                                            |           |                                         | 184.402.600                                    |     | 202.842.860    |     | 223.127.146   |      |            |      |            |      |            |                | 610.372.606                       |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Persentase Peningkatan Perlindungan Perkebunan                                                                             | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |     | 100,00         |     | 100,00        |      |            |      |            |      |            |                | 100,00                            |                                                   |      |
| 4 Kehutanan                                                  |  |  |    |                                                                                                                            |           |                                         |                                                |     |                |     |               |      |            |      |            |      |            |                |                                   | Sekretariat Daerah                                |      |
|                                                              |  |  | 1  | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan                                                                          |           |                                         | 85.000.000                                     |     | 93.500.000     |     | 102.850.000   |      |            |      |            |      |            |                | 281.350.000                       |                                                   |      |
|                                                              |  |  | 1  | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan                                                           | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |     | 100,00         |     | 100,00        |      |            |      |            |      |            |                | 100,00                            |                                                   |      |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |  |   |                                                                                                       | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) |  |  |                 | Satuan |  |  |        | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) |  |  |                | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|--------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|-----------------|--------|--|--|--------|-----------------------------------------|--|--|----------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|-----|------------|----------------|------------|-----|------------|--------|------------------------------------------|-----------------|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|------|--|------|
|                                                              |  |   |                                                                                                       |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |     | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |     | Tahun 2024 |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  |   |                                                                                                       |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                | Target                                         | Rp. | Target     | Rp.            | Target     | Rp. | Target     | Rp.            | Target     | Rp. | Target     | Rp.    | Target                                   | Rp.             |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| (1)                                                          |  |   |                                                                                                       | (2)                                           |  |  |                 | (3)    |  |  |        | (4)                                     |  |  |                | (5)                                            |     | (6)        |                | (7)        |     | (8)        |                | (9)        |     | (10)       |        | (11)                                     |                 | (12) |                | (13)                              |                                     | (14) |  | (15)                                                       |  | (16)                                                       |  | (17)               |  | (18) |  | (19) |
| 5                                                            |  |   |                                                                                                       | Energi dan Sumber Daya Mineral                |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  | Sekretariat Daerah |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                                                  |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 85.000.000     |                                                |     |            | 93.500.000     |            |     |            | 102.850.000    |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   | 281.350.000                         |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                                   |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      | 100,00         |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| 6                                                            |  |   |                                                                                                       | Perdagangan                                   |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                                |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 449.931.900    |                                                |     |            | 469.572.907    |            |     |            | 490.071.309    |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   | 1.409.576.116                       |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha                                                |                                               |  |  | Pelaku Usaha    |        |  |  | 50,00  |                                         |  |  | 60,00          |                                                |     |            | 70,00          |            |     |            | 80,00          |            |     |            |        |                                          |                 |      | 210,00         |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 2 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan                                                      |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 2.556.082.875  |                                                |     |            | 2.941.980.399  |            |     |            | 3.386.137.731  |            |     |            |        |                                          |                 |      | 8.884.201.005  |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima                                                                   |                                               |  |  | Kali            |        |  |  | 2,00   |                                         |  |  | 4,00           |                                                |     |            | 6,00           |            |     |            | 8,00           |            |     |            |        |                                          |                 |      | 18,00          |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 3 | Program Penyelenggaraan Metrologi Legal                                                               |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 262.993.100    |                                                |     |            | 196.264.474    |            |     |            | 146.466.746    |            |     |            |        |                                          |                 |      | 605.724.320    |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)                |                                               |  |  | Kali            |        |  |  | 5,00   |                                         |  |  | 5,00           |                                                |     |            | 5,00           |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          | 15,00           |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| 7                                                            |  |   |                                                                                                       | Perindustrian                                 |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Program Penataan Struktur Industri                                                                    |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 449.931.900    |            |     |            | 469.572.907    |            |     |            | 100,00 |                                          |                 |      |                |                                   | 100,00                              |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 2 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial                                                 |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 426.424.500    |                                                |     |            | 416.462.403    |            |     |            | 406.733.041    |            |     |            |        |                                          |                 |      | 1.249.619.944  |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Sentra Industri Potensial yang Mendapat Fasilitas                                              |                                               |  |  | Sentra Industri |        |  |  | 5,00   |                                         |  |  | 5,00           |                                                |     |            | 5,00           |            |     |            | 5,00           |            |     |            |        |                                          | 15,00           |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| 8                                                            |  |   |                                                                                                       | Transmigrasi                                  |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                        |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                                                             |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 44.760.800     |                                                |     |            | 46.998.840     |            |     |            | 49.348.782     |            |     |            |        |                                          |                 |      | 141.108.422    |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi                                              |                                               |  |  | %               |        |  |  | 60,00  |                                         |  |  | 65,00          |                                                |     |            | 70,00          |            |     |            | 75,00          |            |     |            |        |                                          | 90,00           |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 2 | Program Transmigrasi Lokal                                                                            |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 23.653.400     |                                                |     |            | -              |            |     |            | -              |            |     |            |        |                                          |                 |      | 23.653.400     |                                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal                                                  |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            |                |            |     |            | 100,00 |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |  |   |                                                                                                       |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  | Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD                       |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
| 1                                                            |  |   |                                                                                                       | Administrasi Perkantoran                      |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  |                |                                                |     |            |                |            |     |            |                |            |     |            |        |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                            |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 28.663.549.690 |                                                |     |            | 28.329.675.971 |            |     |            | 27.999.691.221 |            |     |            |        |                                          |                 |      | 84.992.916.882 |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            | 100,00         |            |     |            |        |                                          | 100,00          |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                     |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 54.837.505.262 |                                                |     |            | 60.593.470.596 |            |     |            | 66.953.605.225 |            |     |            |        |                                          | 182.384.581.083 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                  |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            | 100,00         |            |     |            |        |                                          | 100,00          |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan                        |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 2.175.582.370  |                                                |     |            | 2.083.216.949  |            |     |            | 1.994.772.948  |            |     |            |        |                                          | 6.253.572.267   |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu                             |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            |                |            |     |            | 100,00 |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 2 | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)                                                |                                               |  |  | -               |        |  |  | CC     |                                         |  |  | CC             |                                                |     |            | CC             |            |     |            | B              |            |     |            |        |                                          | BB              |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 4 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                        |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 9.091.335.700  |                                                |     |            | 9.049.973.126  |            |     |            | 9.008.798.739  |            |     |            |        |                                          | 27.150.107.565  |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan                                                               |                                               |  |  | Perda           |        |  |  | 10,00  |                                         |  |  | 10,00          |                                                |     |            | 10,00          |            |     |            |                |            |     |            | 30,00  |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 5 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                             |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 2.424.940.000  |                                                |     |            | 3.138.047.496  |            |     |            | 4.060.860.099  |            |     |            |        |                                          | 9.623.847.595   |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri |                                               |  |  | Kali            |        |  |  | 10,00  |                                         |  |  | 10,00          |                                                |     |            | 10,00          |            |     |            |                |            |     |            | 30,00  |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 6 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi                                                            |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 618.939.200    |                                                |     |            | 709.758.990    |            |     |            | 813.905.184    |            |     |            |        |                                          | 2.142.603.374   |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            |                |            |     |            | 100,00 |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 7 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                               |                                               |  |  |                 |        |  |  |        |                                         |  |  | 359.086.100    |                                                |     |            | 356.225.764    |            |     |            | 353.388.212    |            |     |            |        |                                          | 1.068.700.076   |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |
|                                                              |  | 1 | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan                                                     |                                               |  |  | %               |        |  |  | 100,00 |                                         |  |  | 100,00         |                                                |     |            | 100,00         |            |     |            |                |            |     |            | 100,00 |                                          |                 |      |                |                                   |                                     |      |  |                                                            |  |                                                            |  |                    |  |      |  |      |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |             | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                                         | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |      |            |      |            |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                             |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------------|------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |             |                                                                                                                       |           |                                         | Tahun 2019                                     |               | Tahun 2020 |               | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |                |                                                                               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |             |                                                                                                                       |           |                                         | Target                                         | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.            |                                                                               | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2) | (3)         | (4)                                                                                                                   | (5)       | (6)                                     | (7)                                            | (8)           | (9)        | (10)          | (11)       | (12)          | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)       | (18)           | (19)                                                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 8           | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                                                 |           |                                         |                                                | 295.000.000   |            | 340.087.921   |            | 392.067.098   |            |      |            |      |            | 1.027.155.019  | Sekretariat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah                                                                              | Kerjasama | 5,00                                    | 5,00                                           |               | 5,00       |               | 5,00       |               |            |      |            |      | 15,00      |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 9           | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                         |           |                                         |                                                | 3.516.918.500 |            | 3.787.061.582 |            | 4.077.955.012 |            |      |            |      |            | 11.381.935.094 | Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Raperda yang Disetujui DPRD                                                                                | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 10          | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                                                                                  |           |                                         |                                                | 613.000.000   |            | 558.636.670   |            | 509.094.500   |            |      |            |      |            | 1.680.731.170  | Sekretariat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Jumlah Koordinasi Penegasan Batas Daerah                                                                              | Kali      | 5,00                                    | 5,00                                           |               | 5,00       |               | 5,00       |               |            |      |            |      | 15,00      |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 11          | Program Penataan Kelembagaan                                                                                          |           |                                         |                                                | 944.575.500   |            | 1.026.466.580 |            | 1.115.457.303 |            |      |            |      |            | 3.086.499.383  | Sekretariat DPRD                                                              |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Jumlah Pelantikan Kepala Daerah                                                                                       | Kali      | 0,00                                    | 1,00                                           |               | 0,00       |               | 0,00       |               |            |      |            |      | 1,00       |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 12          | Program Penataan Kecamatan/ Kelurahan                                                                                 |           |                                         |                                                | 184.000.000   |            | 371.256.806   |            | 749.084.871   |            |      |            |      |            | 1.304.341.677  | Sekretariat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Jumlah Pemekaran Kecamatan                                                                                            | -         | 0,00                                    | 0,00                                           |               | 1,00       |               | 1,00       |               |            |      |            |      | 2,00       |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 13          | Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah                        |           |                                         |                                                | 3.699.489.625 |            | 4.822.752.008 |            | 6.287.066.404 |            |      |            |      |            | 14.809.308.037 | Semua SKPD                                                                    |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah         | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              | 2   | Pengawasan  |                                                                                                                       |           |                                         |                                                |               |            |               |            |               |            |      |            |      |            |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH                             |           |                                         |                                                | 2.150.386.900 |            | 2.260.597.049 |            | 2.376.455.612 |            |      |            |      |            | 6.787.439.561  | Inspektorat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Jumlah LHP Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di OPD dan Desa                                           | Dokumen   | -                                       | 100,00                                         |               | 105,00     |               | 115,00     |               |            |      |            |      | 320,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 2           | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                               | %         | -                                       | 75,00                                          |               | 80,00      |               | 85,00      |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 2           | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                                          |           |                                         |                                                | 100.400.000   |            | 108.730.648   |            | 117.752.528   |            |      |            |      |            | 326.883.176    | Inspektorat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti BinteK Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor | %         | -                                       | 50,00                                          |               | 50,00      |               | 55,00      |               |            |      |            |      | 70,00      |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 3           | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                                           |           |                                         |                                                | 102.767.000   |            | -             |            | -             |            |      |            |      |            | 102.767.000    | Inspektorat Daerah                                                            |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK                                                  | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              | 3   | Perencanaan |                                                                                                                       |           |                                         |                                                |               |            |               |            |               |            |      |            |      |            |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar                                                         |           |                                         |                                                | 250.600.000   |            | -             |            | -             |            |      |            |      |            | 250.600.000    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar                                          | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 2           | Program Perencanaan Pembangunan Dearah                                                                                |           |                                         |                                                | 4.210.713.200 |            | 4.397.677.438 |            | 4.592.943.269 |            |      |            |      |            | 13.201.333.907 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                 | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 3           | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                                               |           |                                         |                                                | 499.392.100   |            | 530.596.548   |            | 563.750.802   |            |      |            |      |            | 1.593.739.450  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                                                | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 2           | PDB Per Kapita                                                                                                        | Ribu      | 46,72                                   | 51,85                                          |               | 57,54      |               | 63,85      |               |            |      |            |      | 87,26      |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 3           | Tingkat pertumbuhan PDB Riil Per Orang Per Tahun                                                                      | %         | 1,00                                    | 1,00                                           |               | 1,00       |               | 1,00       |               |            |      |            |      | 1,00       |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 4           | Program Perencanaan Sosial Budaya                                                                                     |           |                                         |                                                | 601.190.500   |            | 911.465.947   |            | 1.381.875.083 |            |      |            |      |            | 2.894.531.530  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                          |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya                                                                  | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 5           | Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam                                                            |           |                                         |                                                | 865.277.300   |            | 1.060.630.659 |            | 1.300.088.878 |            |      |            |      |            | 3.225.996.837  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                          |     |
|                                                              |     | 1           | Persentase Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                                             | %         | 100,00                                  | 100,00                                         |               | 100,00     |               | 100,00     |               |            |      |            |      | 100,00     |                |                                                                               |                                          |     |
|                                                              |     | 6           | Program Penelitian dan Pengembangan                                                                                   |           |                                         |                                                | 500.375.000   |            | 550.412.500   |            | 605.453.750   |            |      |            |      |            | 1.656.241.250  | Badan Perencanaan                                                             |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |  |    |   | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                               | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |                |        |                |      |            |      |            |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                |                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|------|------------|------|------------|------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                              |  |    |   |                                                                             |          |                                         | Tahun 2019                                     |        | Tahun 2020     |        | Tahun 2021     |      | Tahun 2022 |      | Tahun 2023 |      |                                   | Tahun 2024 |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                                                        |
|                                                              |  |    |   |                                                                             |          |                                         | Target                                         | Rp.    | Target         | Rp.    | Target         | Rp.  | Target     | Rp.  | Target     | Rp.  |                                   | Target     | Rp.            | Target                                   | Rp.                                                    |
| (1)                                                          |  |    |   | (2)                                                                         | (3)      | (4)                                     | (5)                                            | (6)    | (7)            | (8)    | (9)            | (10) | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)                              | (16)       | (17)           | (18)                                     | (19)                                                   |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan                 | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          | Pembangunan Daerah                                     |
|                                                              |  | 7  |   | Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama                            |          |                                         | 2.554.005.750                                  |        | 3.203.675.560  |        | 4.018.603.755  |      |            |      |            |      |                                   |            | 9.776.285.065  |                                          | Sekretariat Daerah                                     |
|                                                              |  |    | 1 | Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi                                 | Kegiatan | 25,00                                   | 30,00                                          | 35,00  |                | 40,00  |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 105,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 8  |   | Program Pemberdayaan Kecamatan                                              |          |                                         | 3.380.070.800                                  |        | 3.031.252.355  |        | 2.718.431.472  |      |            |      |            |      |                                   |            | 9.129.754.627  |                                          | Semua Kecamatan                                        |
|                                                              |  |    | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 9  |   | Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah                       |          |                                         | 167.258.550                                    |        | 163.727.161    |        | 160.270.332    |      |            |      |            |      |                                   |            | 491.256.043    |                                          | Sekretariat Daerah                                     |
|                                                              |  |    | 1 | Laporan Realisasi Kegiatan SKPD                                             | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 10 |   | Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah                             |          |                                         | 2.934.552.000                                  |        | 310.430.838    |        | 328.388.474    |      |            |      |            |      |                                   |            | 3.573.371.312  |                                          | Sekretariat Daerah                                     |
|                                                              |  |    | 1 | Laju Inflasi Daerah                                                         | %        | 5,19                                    | 5,17                                           | 5,14   |                | 5,12   |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 5,06           |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 11 |   | Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah                              |          |                                         | 130.000.000                                    |        | 136.500.000    |        | 143.325.000    |      |            |      |            |      |                                   |            | 409.825.000    |                                          | Sekretariat Daerah                                     |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah                           | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
| 4 Keuangan                                                   |  |    |   |                                                                             |          |                                         |                                                |        |                |        |                |      |            |      |            |      |                                   |            |                |                                          |                                                        |
|                                                              |  |    | 1 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah            |          |                                         | 12.041.480.285                                 |        | 12.342.007.148 |        | 12.650.034.451 |      |            |      |            |      |                                   |            | 37.033.521.884 |                                          | Semua SKPD                                             |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan                     | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
| 5 Kepegawaian                                                |  |    |   |                                                                             |          |                                         |                                                |        |                |        |                |      |            |      |            |      |                                   |            |                |                                          |                                                        |
|                                                              |  |    | 1 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                       |          |                                         | 1.370.185.850                                  |        | 1.418.970.700  |        | 1.469.492.513  |      |            |      |            |      |                                   |            | 4.258.649.063  |                                          | Semua SKPD                                             |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur                                    | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 2  |   | Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS                                   |          |                                         | 41.998.800                                     |        | 45.665.160     |        | 49.651.581     |      |            |      |            |      |                                   |            | 137.315.541    |                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                              |  |    | 1 | Jumlah SK Pensiun PNS                                                       | SK       | 250,00                                  | 270,00                                         | 290,00 |                | 310,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 870,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 3  |   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                          |          |                                         | 5.738.686.800                                  |        | 6.669.978.800  |        | 7.752.403.771  |      |            |      |            |      |                                   |            | 20.161.069.371 |                                          | Semua SKPD                                             |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 4  |   | Program Pendidikan Kedinasan                                                |          |                                         | 451.088.100                                    |        | 473.642.505    |        | 497.324.630    |      |            |      |            |      |                                   |            | 1.422.055.235  |                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                              |  |    | 1 | Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan                              | PNS      | 125,00                                  | 200,00                                         | 200,00 |                | 200,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  | 5  |   | Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur                                 |          |                                         | 4.875.353.400                                  |        | 6.725.516.808  |        | 9.277.804.626  |      |            |      |            |      |                                   |            | 20.878.674.834 |                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                              |  |    | 1 | Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur                              | %        | 100,00                                  | 100,00                                         | 100,00 |                | 100,00 |                |      |            |      |            |      |                                   |            | 100,00         |                                          |                                                        |
|                                                              |  |    |   |                                                                             |          |                                         |                                                |        |                |        |                |      |            |      |            |      |                                   |            |                |                                          |                                                        |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                                                                 | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)               |                                                                                                                                   | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                   |           |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020  |                 | Tahun 2021 |             | Tahun 2022      |             | Tahun 2023  |                 | Tahun 2024  |                 | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                   |           |                                         | Target                                         | Rp. | Target      | Rp.             | Target     | Rp.         | Target          | Rp.         | Target      | Rp.             | Target      | Rp.             | Target                                   | Rp.             |                                   |
| (1)                                                          | (2)                                                             | (3)                                                         | (4)                                                                                                                               | (5)       | (6)                                     | (7)                                            | (8) | (9)         | (10)            | (11)       | (12)        | (13)            | (14)        | (15)        | (16)            | (17)        | (18)            | (19)                                     |                 |                                   |
| I                                                            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                             |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 1                                                               | Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan                         |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 1                                                               | Program Pengelolaan Pendidikan                              |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Persentase Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan yang Representatif                                                                | %         | 92,19                                   | 97,16                                          |     | 97,77       | 77.684.153.778  |            | 98,02       | 93.705.586.686  |             | 98,27       | 130.726.328.564 |             | 207.072.117.885 | 98,52                                    | 509.188.186.913 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              |                                                                 | 2                                                           | Persentase Kualitas Manajemen Sekolah yang Kondusif, Profesional dan Representatif                                                | %         | 23,15                                   | 19,71                                          |     | 44,23       | 47,73           |            | 55,23       |                 | 63,73       | 73,23       |                 | 73,23       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 3                                                           | Persentase Prestasi Siswa Melalui Kinerja Sekolah yang Berkualitas dan Bermutu                                                    | %         | 127,78                                  | 78,28                                          |     | 92,82       | 93,27           |            | 93,52       |                 | 94,17       | 94,42       |                 | 94,42       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 2                                                               | Program Pengembangan Kurikulum                              |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Persentase Anak Usia 4-6 Tahun Bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                     | %         | 98,77                                   | 55,75                                          |     | 76,00       | 78,50           |            | 82,00       | 63.799.375.067  |             | 86,50       | 65.394.359.444  |             | 67.029.218.430  | 89,00                                    | 258.466.245.689 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|                                                              |                                                                 | 2                                                           | Persentase Peserta Didik Pendidikan Non Formal dari Buta Huruf Menjadi Melek Huruf                                                | %         | 95,19                                   | 87,69                                          |     | 80,19       | 72,69           |            | 65,19       |                 | 57,69       | 50,19       |                 | 50,19       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 3                                                           | Persentase APM, APK, APS dan Angka Kelulusan yang Berkualitas pada Jenjang Sekolah Dasar                                          | %         | 22,39                                   | 40,32                                          |     | 56,70       | 64,20           |            | 72,70       |                 | 82,20       | 89,70       |                 | 89,70       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 4                                                           | Persentase APM, APK, APS dan Angka Kelulusan yang Berkualitas pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)                         | %         | 22,90                                   | 101,03                                         |     | 82,57       | 84,32           |            | 86,07       |                 | 96,82       | 97,57       |                 | 97,57       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 3                                                               | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Persentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Melaksanakan Tugas Serta Fungsinya Dengan Proporsional dan Profesional | %         | 97,98                                   | 74,57                                          |     | 45,29       | 65,29           |            | 80,29       |                 | 90,29       | 95,29       |                 | 95,29       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 2                                                               | Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan                          |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                       |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Usia Harapan Hidup                                                                                                                | Tahun     | 69,80                                   |                                                |     | 70,72       | 142.472.745.158 |            | 70,89       | 190.299.609.846 |             | 71,03       | 258.274.015.115 |             | 71,25           |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 2                                                           | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup                                                                                    | Kasus     | 14,00                                   |                                                |     | 13,00       |                 |            | 11,00       |                 | 9,00        | 8,00        |                 | 8,00        |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 3                                                           | Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup                                                                                 | Kasus     | 37,00                                   |                                                |     | 27,00       |                 |            | 24,00       |                 | 22,00       | 19,00       |                 | 19,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 4                                                           | Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup                                                                                     | Kasus     | 38,00                                   |                                                |     | 28,00       |                 |            | 25,00       |                 | 23,00       | 20,00       |                 | 20,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 5                                                           | Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup                                                                              | Kasus     | 1,00                                    |                                                |     | 1,00        |                 |            | 1,00        |                 | 1,00        | 1,00        |                 | 1,00        |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 6                                                           | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)                                                   | %         | 25,60                                   |                                                |     | 22,00       |                 |            | 21,00       |                 | 20,00       | 19,00       |                 | 19,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 7                                                           | Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita                                                                           | %         | 14,70                                   |                                                |     | 10,00       |                 |            | 9,00        |                 | 8,00        | 7,00        |                 | 7,00        |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 8                                                           | Jumlah Fasyankes Swasta yang Terakreditasi                                                                                        | Fasyankes | 0,00                                    |                                                |     | 27,00       |                 |            | 32,00       |                 | 38,00       | 43,00       |                 | 43,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 9                                                           | Persentase Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Minimal (SPM) Sesuai Standar                                              | %         | 61,00                                   |                                                |     | 80,00       |                 |            | 90,00       |                 | 95,00       | 100,00      |                 | 100,00      |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 10                                                          | Insiden Tuberkulosis (ITB) Per 1.000 Penduduk                                                                                     | -         | 319,00                                  |                                                |     | 244,00      |                 |            | 219,00      |                 | 194,00      | 190,00      |                 | 190,00      |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 11                                                          | Persentase Capaian SPM HIV/AIDS                                                                                                   | %         | 24,00                                   |                                                |     | 21,00       |                 |            | 20,00       |                 | 19,00       | 18,00       |                 | 18,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 12                                                          | Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)                                                  | %         | 72,30                                   |                                                |     | 81,70       |                 |            | 85,00       |                 | 90,00       | 95,00       |                 | 95,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 13                                                          | Angka Kesakitan DBD [Inseiden Rate] < 49 Per 1.000 Penduduk                                                                       | -         | < 383 Kasus                             |                                                |     | < 314 Kasus |                 |            | < 308 Kasus |                 | < 301 Kasus | < 294 Kasus |                 | < 294 Kasus |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              | 2                                                               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                       | %         | -                                       |                                                |     | 65,00       |                 |            | 71,00       |                 | 75,00       | 80,00       |                 | 80,00       |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 2                                                           | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                       |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 | 1                                                           | Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                       | %         | -                                       |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |
|                                                              |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                   |           |                                         |                                                |     |             |                 |            |             |                 |             |             |                 |             |                 |                                          |                 |                                   |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |     | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                 | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |     |                                                                                               |        |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                 |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD                                         |     |
|                                                              |     |     |                                                                                               |        |                                         | Target                                         | Rp. | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.            | Target     | Rp.             |                                   | Target                                                                           | Rp. |
| (1)                                                          | (2) | (3) | (4)                                                                                           | (5)    | (6)                                     | (7)                                            | (8) | (9)        | (10)           | (11)       | (12)           | (13)       | (14)           | (15)       | (16)           | (17)       | (18)            | (19)                              |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Persentase Puskesmas Tanpa Dokter                                                             | %      | 0,00                                    |                                                |     | 0,00       |                | 0,00       |                | 0,00       |                | 0,00       |                | 0,00       |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Persentase Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                 | %      | -                                       |                                                |     | 45,00      |                | 50,00      |                | 60,00      |                | 70,00      |                | 70,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Monitoring dan Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya            | %      | 85,00                                   |                                                |     | 92,50      |                | 95,00      |                | 97,50      |                | 100,00     |                | 100,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan                                                     | %      | 50,00                                   |                                                |     | 80,00      |                | 90,00      |                | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                                   |        |                                         |                                                |     |            | 5.267.219.165  |            | 5.499.318.194  |            | 5.773.155.476  |            | 6.044.700.628  |            | 22.584.393.463  | Dinas Kesehatan                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial                                        | %      | 93,00                                   |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat                                                          | %      | 80,90                                   |                                                |     | 87,00      |                | 89,00      |                | 90,00      |                | 92,30      |                | 92,30      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas                                              | %      | 70,00                                   |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                | 100,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 4   | Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar     | %      | 0,00                                    |                                                |     | 70,00      |                | 75,00      |                | 80,00      |                | 85,00      |                | 85,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 5   | Persentase Makanan Memenuhi Syarat/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)                        | %      | 60,40                                   |                                                |     | 80,00      |                | 85,00      |                | 90,00      |                | 95,00      |                | 95,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 4   | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                              |        |                                         |                                                |     |            | 12.002.218.017 |            | 18.885.721.979 |            | 29.780.255.095 |            | 47.017.095.669 |            | 107.685.290.760 |                                   | Dinas Kesehatan                                                                  |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Rumah Tangga Hidup Bersih dan Sehat                                                | %      | 63,60                                   |                                                |     | 75,00      |                | 80,00      |                | 85,00      |                | 90,00      |                | 90,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri                                                       | %      | 76,00                                   |                                                |     | 82,00      |                | 84,00      |                | 86,00      |                | 88,00      |                | 88,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 18 Tahun                                           | %      | 9,10                                    |                                                |     | 8,90       |                | 8,80       |                | 8,80       |                | 8,70       |                | 8,70       |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 4   | Proporsi Populasi yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air                    | %      | 70,00                                   |                                                |     | 77,50      |                | 80,00      |                | 82,50      |                | 85,00      |                | 85,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 5   | Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)                       | Desa   | 38,00                                   |                                                |     | 89,00      |                | 98,00      |                | 107,00     |                | 117,00     |                | 117,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 6   | Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | Desa   | 10,00                                   |                                                |     | 40,00      |                | 50,00      |                | 60,00      |                | 70,00      |                | 70,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                    |        |                                         |                                                |     |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 1   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                     |        |                                         |                                                |     |            | 61.929.276.264 |            | 66.424.508.780 |            | 71.249.868.578 |            | 76.429.909.779 |            | 276.033.563.401 |                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |     |
|                                                              |     | 1   | Luas Daerah Irigasi dan Rawa yang Fungsional                                                  | Ha     | 3.144,00                                |                                                |     | 628,00     |                | 628,00     |                | 628,00     |                | 628,00     |                | 2.512,00   |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang Berfungsi Dengan Baik                                  | M      | 7.165,00                                |                                                |     | 145,00     |                | 145,00     |                | 145,00     |                | 145,00     |                | 580,00     |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 3   | Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik                                                           | Unit   | 82,00                                   |                                                |     | 16,00      |                | 16,00      |                | 16,00      |                | 18,00      |                | 66,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |
|                                                              |     | 2   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                              |        |                                         |                                                |     |            | 4.072.123.864  |            | 3.950.395.531  |            | 3.832.306.034  |            | 3.717.746.596  |            | 15.572.572.025  |                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak                   | %      | 18,00                                   |                                                |     | 21,00      |                | 22,00      |                | 23,00      |                | 24,00      |                | 24,00      |                 |                                   |                                                                                  |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |     |                                                                                                        | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |     |                                                                                                        |                                               |          |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020 |                 | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                 | Tahun 2023 |                 | Tahun 2024 |                 |                                                                                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |     |                                                                                                        |                                               |          |                                         | Target                                         | Rp. | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             |                                                                                  | Target                                   | Rp. |
|                                                              | (1) | (2) | (3)                                                                                                    | (4)                                           | (5)      | (6)                                     | (7)                                            | (8) | (9)        | (10)            | (11)       | (12)            | (13)       | (14)            | (15)       | (16)            | (17)       | (18)            | (19)                                                                             |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Proporasi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan                 | %                                             | 48,00    |                                         |                                                |     | 51,00      |                 | 52,00      |                 | 53,00      |                 | 55,00      |                 | 55,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                       |                                               |          |                                         |                                                |     |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Penanganan Sampah                                                                           | %                                             | 65,00    |                                         |                                                |     | 80,00      |                 | 85,00      |                 | 90,00      |                 | 95,00      |                 | 95,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                 |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 8.844.388.628   |            | 9.416.649.071   |            | 10.093.469.076  |            | 10.889.415.884  |            | 39.243.922.659  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal                       | %                                             | 60,00    |                                         |                                                |     | 66,00      |                 | 68,00      |                 | 70,00      |                 | 72,00      |                 | 72,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar                                          | %                                             | 65,00    |                                         |                                                |     | 71,00      |                 | 73,00      |                 | 75,00      |                 | 77,00      |                 | 77,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 5   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                   |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 15.511.887.973  |            | 16.848.969.024  |            | 18.301.302.694  |            | 19.878.823.437  |            | 70.540.983.128  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan | %                                             | 45,00    |                                         |                                                |     | 60,00      |                 | 65,00      |                 | 70,00      |                 | 75,00      |                 | 75,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 6   | Program Pengembangan Permukiman                                                                        |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 145.280.579.411 |            | 146.588.002.410 |            | 147.907.191.295 |            | 149.238.251.953 |            | 589.014.025.069 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik                                                 | %                                             | 60,00    |                                         |                                                |     | 75,00      |                 | 80,00      |                 | 85,00      |                 | 90,00      |                 | 90,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 7   | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                       |                                               |          |                                         |                                                |     |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   |                                                                                                        |                                               |          |                                         |                                                |     |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 8   | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                                            |                                               |          |                                         |                                                |     |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               |            | -               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   |                                                                                                        |                                               |          |                                         |                                                |     |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 9   | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                          |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 151.095.127.045 |            | 150.552.447.793 |            | 150.760.934.756 |            | 151.355.780.875 |            | 603.764.290.469 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang                          | %                                             | 65,00    |                                         |                                                |     | 74,00      |                 | 77,00      |                 | 80,00      |                 | 83,00      |                 | 83,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan / Jembatan Kabupaten                                         | Km                                            | 2,94     |                                         |                                                |     | 5,00       |                 | 5,00       |                 | 5,00       |                 | 5,00       |                 | 20,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana Yang Direhabilitasi                              | %                                             | 53,00    |                                         |                                                |     | 62,00      |                 | 62,00      |                 | 65,00      |                 | 65,00      |                 | 65,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 10  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                   |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 2.682.311.389   |            | 6.264.843.936   |            | 14.791.068.235  |            | 35.180.278.571  |            | 58.918.502.131  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Ketaatan Peraturan Jasa Konstruksi                                                          | %                                             | 98,00    |                                         |                                                |     | 98,00      |                 | 98,00      |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                    | %                                             | 100,00   |                                         |                                                |     | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 11  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                 |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 6.421.524.961   |            | 7.841.211.611   |            | 9.594.227.791   |            | 11.759.103.747  |            | 35.616.068.110  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Kesesuaian Tata Ruang                                                                       | %                                             | 80,00    |                                         |                                                |     | 87,50      |                 | 90,00      |                 | 92,50      |                 | 95,00      |                 | 95,00      |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Tersedianya RDTR                                                                                       | Dokumen                                       | 0,00     |                                         |                                                |     | 1,00       |                 | 1,00       |                 | 1,00       |                 | 1,00       |                 | 4,00       |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang                                           | -                                             | Tersedia |                                         |                                                |     | Tersedia   |                 | Tersedia   |                 | Tersedia   |                 | Tersedia   |                 | Tersedia   |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Ketaatan Terhadap RTRW                                                                                 | Objek / Kasus                                 | -        |                                         |                                                |     | 35,00      |                 | 35,00      |                 | 35,00      |                 | 35,00      |                 | 140,00     |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                              |                                               |          |                                         |                                                |     |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                                                                                  |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Progran Pengembangan Perumahan                                                                         |                                               |          |                                         |                                                |     |            | 457.974.487     |            | 490.010.103     |            | 524.286.631     |            | 560.960.824     |            | 2.033.232.045   | Dinas Pekerjaan                                                                  |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |     |                                                                                                                            | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |             |                |             |                |             |                |             |                |                                                                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |     |                                                                                                                            |                                               |             |                                         | Tahun 2019                                     |             | Tahun 2020    |             | Tahun 2021     |             | Tahun 2022     |             | Tahun 2023     |             | Tahun 2024     |                                                                                  |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |     |                                                                                                                            |                                               |             |                                         | Target                                         | Rp.         | Target        | Rp.         | Target         | Rp.         | Target         | Rp.         | Target         | Rp.         | Target         | Rp.                                                                              |                                   | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2) | (3) | (4)                                                                                                                        | (5)                                           | (6)         | (7)                                     | (8)                                            | (9)         | (10)          | (11)        | (12)           | (13)        | (14)           | (15)        | (16)           | (17)        | (18)           | (19)                                                                             |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Rasio Rumah Layak Huni                                                                                                     | %                                             | 75,00       |                                         |                                                | 82,50       |               | 85,00       |                | 87,50       |                | 90,00       |                | 90,00       |                | Unit dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                 |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Program Kawasan Permukiman                                                                                                 |                                               |             |                                         |                                                |             | 1.843.445.090 |             | 3.375.092.501  |             | 6.179.326.660  |             | 11.313.490.804 |             | 22.711.355.055 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Peningkatan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                       | %                                             | 100,00      |                                         |                                                | 100,00      |               | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                             |                                               |             |                                         |                                                |             | 1.843.445.090 |             | 3.375.092.501  |             | 6.179.326.660  |             | 11.313.490.804 |             | 22.711.355.055 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan                                                                                         | %                                             | 50,00       |                                         |                                                | 65,00       |               | 70,00       |                | 75,00       |                | 80,00       |                | 80,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 5   | Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                                    |                                               |             |                                         |                                                |             |               |             |                |             |                |             |                |             |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                       |                                               |             |                                         |                                                |             | 6.898.221.608 |             | 10.011.340.507 |             | 16.423.025.440 |             | 30.155.798.020 |             | 63.488.385.575 | Satuan Polisi Pamong Praja                                                       |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah/Per Satuan Wilayah                                                                      | -                                             | 2 Kali/Hari |                                         |                                                | 2 Kali/Hari |               | 2 Kali/Hari |                | 3 Kali/Hari |                | 3 Kali/Hari |                | 3 Kali/Hari |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Jumlah Kegiatan Penegakan Perda                                                                                            | Kali                                          | 18,00       |                                         |                                                | 18,00       |               | 18,00       |                | 18,00       |                | 18,00       |                | 72,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Program Penanggulangan Bencana                                                                                             |                                               |             |                                         |                                                |             | 458.495.286   |             | 631.454.558    |             | 869.659.670    |             | 1.197.723.466  |             | 3.157.332.980  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                              |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Angka Kejadian Bencana                                                                                                     | -                                             | 20,00       |                                         |                                                | 14,00       |               | 12,00       |                | 10,00       |                | 8,00        |                | 8,00        |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah                                              | Dokumen                                       | 1,00        |                                         |                                                | 1,00        |               | 1,00        |                | 1,00        |                | 1,00        |                | 1,00        |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Serta Kebencanaan                                                            | -                                             | 1,00        |                                         |                                                | 1,00        |               | 1,00        |                | 1,00        |                | 1,00        |                | 1,00        |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang                                               | Orang                                         | 40,00       |                                         |                                                | 25,00       |               | 20,00       |                | 15,00       |                | 10,00       |                | 10,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 5   | Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana                                                                            | Juta                                          | 1.000,00    |                                         |                                                | 700,00      |               | 600,00      |                | 500,00      |                | 400,00      |                | 2.200,00    |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                  |                                               |             |                                         |                                                |             | 4.075.882.545 |             | 7.755.039.484  |             | 15.554.250.742 |             | 31.928.316.474 |             | 59.313.489.245 | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)                                                                   | Menit                                         | 20,00       |                                         |                                                | 16,00       |               | 14,00       |                | 12,00       |                | 11,00       |                | 11,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Jumlah Titik Hotspot                                                                                                       | Titik                                         | 50,00       |                                         |                                                | 35,00       |               | 30,00       |                | 25,00       |                | 20,00       |                | 20,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 6   | Urusan Pemerintah Bidang Sosial                                                                                            |                                               |             |                                         |                                                |             |               |             |                |             |                |             |                |             |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                |                                               |             |                                         |                                                |             | 446.508.360   |             | 507.586.832    |             | 581.525.039    |             | 669.593.540    |             | 2.205.213.771  | Dinas Sosial                                                                     |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri                                                                | %                                             | 75,00       |                                         |                                                | 82,50       |               | 85,00       |                | 87,50       |                | 90,00       |                | 90,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Jumlah peserta PKH                                                                                                         | KK                                            | 150,00      |                                         |                                                | 300,00      |               | 350,00      |                | 400,00      |                | 450,00      |                | 1.500,00    |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Jumlah Peserta Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)                                                                        | Orang                                         | 10,00       |                                         |                                                | 25,00       |               | 30,00       |                | 35,00       |                | 40,00       |                | 130,00      |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                |                                               |             |                                         |                                                |             | 769.318.391   |             | 1.234.295.964  |             | 2.077.839.501  |             | 3.594.405.850  |             | 7.675.859.706  | Dinas Sosial                                                                     |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar                                             | %                                             | 100,00      |                                         |                                                | 100,00      |               | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 2   | Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial                                                                              | %                                             | 33,00       |                                         |                                                | 50,00       |               | 60,00       |                | 70,00       |                | 80,00       |                | 80,00       |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 3   | Persentase Peningkatan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | %                                             | 100,00      |                                         |                                                | 100,00      |               | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                | 100,00      |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 4   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                    |                                               |             |                                         |                                                |             | 1.071.117.601 |             | 2.977.792.877  |             | 8.278.503.139  |             | 23.014.902.998 |             | 35.342.316.615 | Dinas Sosial                                                                     |                                   |                                          |     |
|                                                              |     | 1   | Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan                                                                        | Orang                                         | 100,00      |                                         |                                                | 250,00      |               | 300,00      |                | 350,00      |                | 400,00      |                | 1.300,00    |                |                                                                                  |                                   |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                                                                       | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                                                                                |     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                              |     |        |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020    |            | Tahun 2021    |            | Tahun 2022    |            | Tahun 2023    |            | Tahun 2024     |                                                                                               |                                     | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                              |     |        |                                         | Target                                         | Rp. | Target        | Rp.        | Target        | Rp.        | Target        | Rp.        | Target        | Rp.        | Target         | Rp.                                                                                           |                                     | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2)                                                                   | (3)                                                                                                                                                          | (4) | (5)    | (6)                                     | (7)                                            | (8) | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       | (17)           | (18)                                                                                          | (19)                                |                                          |     |
| II                                                           | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
| 7                                                            | Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja                                 |                                                                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                       |     |        |                                         |                                                |     |               | 94.508.305 |               | 95.467.721 |               | 96.436.878 |               | 97.415.873 |                | 383.828.777                                                                                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                                                                                           |     | Orang  | -                                       |                                                |     | 15,00         |            | 20,00         |            | 25,00         |            | 25,00         |            | 85,00          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Jumlah Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)                                                           |     | Orang  | -                                       |                                                |     | 30,00         |            | 35,00         |            | 35,00         |            | 35,00         |            | 135,00         |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 3                                                                     | Persentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan                                                                                           |     | %      | 100,00                                  |                                                |     | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00         |                                                                                               | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |                                          |     |
|                                                              | 3                                                                     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     | 225.934.956   |            | 236.324.474   |            | 247.191.750   |            | 258.558.752   |            | 968.009.932    |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Jumlah Peningkatan Kesempatan Kerja                                                                                                                          |     | -      | -                                       |                                                |     | 598.426,00    |            | 611.109,00    |            | 624.389,00    |            | 638.301,00    |            | 2.472.225,00   |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 4                                                                     | Program Hubungan Industrial                                                                                                                                  |     |        |                                         |                                                |     | 153.911.971   |            | 155.442.487   |            | 156.988.223   |            | 158.549.330   |            | 624.892.011    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Nilai Upah Minimum Kabupaten                                                                                                                                 |     | -      | 2.075.000,00                            |                                                |     | 2.615.000,00  |            | 2.825.000,00  |            | 3.050.000,00  |            | 3.295.000,00  |            | 3.295.000,00   |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketrnagakerjaan                                                                                                 |     | Orang  | -                                       |                                                |     | 33.700,00     |            | 36.600,00     |            | 39.500,00     |            | 42.400,00     |            | 152.200,00     |                                                                                               |                                     |                                          |     |
| 8                                                            | Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                                                                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                    |     |        |                                         |                                                |     | 384.700.000   |            | 384.700.000   |            | 384.700.000   |            | 384.700.000   |            | 1.538.800.000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Persentase Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                          |     | %      | 100,00                                  |                                                |     | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00         |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG                                                                                                           |     | %      | 15,00                                   |                                                |     | 30,00         |            | 35,00         |            | 35,00         |            | 40,00         |            | 40,00          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Program Perlindungan Perempuan                                                                                                                               |     |        |                                         |                                                |     | 219.600.000   |            | 219.600.000   |            | 219.600.000   |            | 219.600.000   |            | 878.400.000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapatkan Pelayanan Konverensif                                                                               |     | %      | 87,64                                   |                                                |     | 90,00         |            | 90,00         |            | 90,00         |            | 90,00         |            | 90,00          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 3                                                                     | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                        |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 4                                                                     | Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 5                                                                     | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                                                             |     |        |                                         |                                                |     | 590.000.000   |            | 590.000.000   |            | 590.000.000   |            | 590.000.000   |            | 2.360.000.000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Persentase Kelembagaan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak Sesuai Standar (Forum Anak Kab/Kota, Forum Anak Kecamatan, Kelurahan, Kelana, Dekelana, Ila, Tesa, Pisa) |     | %      | 10,00                                   |                                                |     | 25,00         |            | 30,00         |            | 35,00         |            | 40,00         |            | 40,00          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Persentase Perangkat Daerah (Gugus Tugas KLA) yang Melaksanakan Anggaran Responsif Anak                                                                      |     | %      | 15,00                                   |                                                |     | 33,00         |            | 39,00         |            | 45,00         |            | 51,00         |            | 51,00          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 6                                                                     | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                             |     |        |                                         |                                                |     | 912.000.000   |            | 912.000.000   |            | 912.000.000   |            | 912.000.000   |            | 3.648.000.000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Persentase Peningkatan Perlindungan Anak                                                                                                                     |     | %      | 100,00                                  |                                                |     | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00        |            | 100,00         |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan                                                                                                                 |     | -      | 1/100                                   |                                                |     | 1/250         |            | 1/300         |            | 1/350         |            | 1/400         |            | 1/400          |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 3                                                                     | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Layanan Sesuai Standar, Sekolah PMTAS                                                    |     | %      | 3,00                                    |                                                |     | 2,80          |            | 2,70          |            | 2,60          |            | 2,50          |            | 2,50           |                                                                                               |                                     |                                          |     |
| 9                                                            | Urusan Pemerintah Bidang Pangan                                       |                                                                                                                                                              |     |        |                                         |                                                |     |               |            |               |            |               |            |               |            |                |                                                                                               |                                     |                                          |     |
|                                                              | 2                                                                     | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                            |     |        |                                         |                                                |     | 3.540.216.571 |            | 3.654.045.194 |            | 3.772.763.658 |            | 3.896.574.925 |            | 14.863.600.348 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                          |                                     |                                          |     |
|                                                              | 1                                                                     | Skor PPH                                                                                                                                                     |     | -      | 89,10                                   |                                                |     | 90,60         |            | 91,10         |            | 91,60         |            | 92,10         |            | 92,10          |                                                                                               |                                     |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                                    |                                                                                                          | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                                                     |            | Satuan             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |                                                                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |                                    |                                                                                                          |                                                                                                                   |            |                    |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020         |      | Tahun 2021         |      | Tahun 2022         |      | Tahun 2023         |      | Tahun 2024         |                                                                                                                |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |                                    |                                                                                                          |                                                                                                                   |            |                    |                                         | Target                                         | Rp. | Target             | Rp.  | Target             | Rp.  | Target             | Rp.  | Target             | Rp.  | Target             | Rp.                                                                                                            |                                   | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2)                                | (3)                                                                                                      | (4)                                                                                                               | (5)        | (6)                | (7)                                     | (8)                                            | (9) | (10)               | (11) | (12)               | (13) | (14)               | (15) | (16)               | (17) | (18)               | (19)                                                                                                           |                                   |                                          |     |
| 10                                                           | Urusan Pemerintah Bidang Pertanian |                                                                                                          |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1                                  | Program Pengelolaan Izin Lokasi                                                                          |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 9.565.061.325      |      | 8.905.668.305      |      | 8.291.732.302      |      | 7.720.119.615      |      | 34.482.581.547     | Sekretariat Daerah                                                                                             |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan                       | %          | 100,00             |                                         |                                                |     | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 2                                                                                                        | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                       |            |                    |                                         |                                                |     | 380.567.277        |      | 465.658.470        |      | 569.775.237        |      | 697.171.515        |      | 2.113.172.499      |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara                                                                        | %          | 100,00             |                                         |                                                |     | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             | Sekretariat Daerah                                                                                             |                                   |                                          |     |
|                                                              | 8                                  | Program Penatagunaan Tanah                                                                               |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 9.565.061.325      |      | 8.905.668.305      |      | 8.291.732.302      |      | 7.720.119.615      |      | 34.482.581.547     |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan                       | %          | 100,00             |                                         |                                                |     | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 11                                 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup                                                              |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                         |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1                                  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 90.110.052         |      | 88.508.793         |      | 86.935.990         |      | 85.391.134         |      | 350.945.969        |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten                               | Dokumen    | 1,00               |                                         |                                                |     | 1,00               |      | 1,00               |      | 1,00               |      | 1,00               |      | 4,00               |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2                                  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 616.282.057        |      | 493.090.782        |      | 404.594.376        |      | 340.692.330        |      | 1.854.659.545      | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                         |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                  | -          | Baik               |                                         |                                                |     | Baik               |      | Baik               |      | Baik               |      | Baik               |      | Baik               |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 2                                                                                                        | Indeks Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan                                                                    | -          | DDL < 1            |                                         |                                                |     | DDL < 1            |      | DDL < 1            |      | DDL < 1            |      | DDL < 1            |      | DDL < 1            |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3                                  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                       |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 10.846.190.115     |      | 14.143.476.631     |      | 18.469.346.197     |      | 24.146.558.092     |      | 67.605.571.035     | Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman       |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Luas RTH Per Luas Kawasan Perkotaan                                                                               | %          | 0,25               |                                         |                                                |     | 0,40               |      | 0,45               |      | 0,50               |      | 0,55               |      | 0,55               |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 4                                  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 128.816.782        |      | 158.166.805        |      | 194.204.030        |      | 238.452.090        |      | 719.639.707        |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup                                                                               | -          | Di bawah Baku Mutu |                                         |                                                |     | Di bawah Baku Mutu |      | Di bawah Baku Mutu |      | Di bawah Baku Mutu |      | Di bawah Baku Mutu |      | Di bawah Baku Mutu | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                         |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 2                                                                                                        | Jumlah Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru                                                          | Peserta    | 5,00               |                                         |                                                |     | 11,00              |      | 13,00              |      | 15,00              |      | 17,00              |      | 56,00              |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 3                                                                                                        | Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri) | %          | 5,00               |                                         |                                                |     | 12,50              |      | 15,00              |      | 17,50              |      | 20,00              |      | 20,00              |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 4                                                                                                        | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001                                                       | Perusahaan | 5,00               |                                         |                                                |     | 11,00              |      | 13,00              |      | 15,00              |      | 17,00              |      | 17,00              | Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |                                   |                                          |     |
|                                                              | 10                                 | Program Pengelolaan Persampahan                                                                          |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 25.900.891.068     |      | 30.085.091.657     |      | 34.951.821.808     |      | 40.612.985.087     |      | 131.550.789.620    |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Persentase Penanganan Sampah                                                                                      | %          | 65,00              |                                         |                                                |     | 80,00              |      | 85,00              |      | 90,00              |      | 95,00              |      | 95,00              |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 2                                                                                                        | Persentase Timbunan Sampah yang Didaur Ulang                                                                      | %          | 0,50               |                                         |                                                |     | 2,54               |      | 3,39               |      | 4,24               |      | 5,08               |      | 5,08               | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                  |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 3                                                                                                        | Persentase Meningkatnya Kualitas Kebersihan Lingkungan                                                            | %          | 80,00              |                                         |                                                |     | 87,50              |      | 90,00              |      | 92,50              |      | 95,00              |      | 95,00              |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 12                                 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |                                                                                                                |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1                                  | Program Pendaftaran Penduduk                                                                             |                                                                                                                   |            |                    |                                         |                                                |     | 2.800.951.790      |      | 3.496.611.371      |      | 4.365.048.740      |      | 5.449.175.924      |      | 16.111.787.825     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                        |                                   |                                          |     |
|                                                              |                                    | 1                                                                                                        | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan                                                                       | %          | 100,00             |                                         |                                                |     | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |      | 100,00             |                                                                                                                |                                   |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |     |                                                                                                                      | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan                    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                 |                                                                                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                                              |     |     |                                                                                                                      |                                               |                           |                                         | Tahun 2019                                     |                           | Tahun 2020     |                           | Tahun 2021     |                           | Tahun 2022     |                           | Tahun 2023     |                           | Tahun 2024      |                                                                                               |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |
|                                                              |     |     |                                                                                                                      |                                               |                           |                                         | Target                                         | Rp.                       | Target         | Rp.                       | Target         | Rp.                       | Target         | Rp.                       | Target         | Rp.                       | Target          | Rp.                                                                                           |                                   | Target                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2) | (3) | (4)                                                                                                                  | (5)                                           | (6)                       | (7)                                     | (8)                                            | (9)                       | (10)           | (11)                      | (12)           | (13)                      | (14)           | (15)                      | (16)           | (17)                      | (18)            | (19)                                                                                          |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2   |     | Program Pencatatan Sipil                                                                                             |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 2.800.951.790  |                           | 3.496.611.371  |                           | 4.365.048.740  |                           | 5.449.175.924  |                           | 16.111.787.825  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Persentase Penduduk yang Melakukan Pencatatan Sipil                                                                  | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3   |     | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                              |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 39.441.160     |                           | 43.385.276     |                           | 47.723.804     |                           | 52.496.184     |                           | 183.046.424     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diarsipkan                                                     | Dokumen                                       | 10.000,00                 |                                         |                                                | 40.000,00                 |                | 50.000,00                 |                | 60.000,00                 |                | 70.000,00                 |                | 220.000,00                |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 13  |     | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                          |                                               |                           |                                         |                                                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3   |     | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                                                               |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 11.936.061.028 |                           | 18.495.047.696 |                           | 29.127.486.814 |                           | 46.418.936.422 |                           | 105.977.531.960 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Jumlah Desa Sangat Tertinggal                                                                                        | Desa                                          | 16,00                     |                                         |                                                | 7,00                      |                | 4,00                      |                | 1,00                      |                | 0,00                      |                | 0,00                      |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2   |     | Jumlah Desa Tertinggal                                                                                               | Desa                                          | 60,00                     |                                         |                                                | 40,00                     |                | 30,00                     |                | 20,00                     |                | 8,00                      |                | 8,00                      |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3   |     | Jumlah Desa Berkembang                                                                                               | Desa                                          | 31,00                     |                                         |                                                | 25,00                     |                | 20,00                     |                | 18,00                     |                | 15,00                     |                | 15,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 4   |     | Jumlah Desa Maju                                                                                                     | Desa                                          | 10,00                     |                                         |                                                | 21,00                     |                | 31,00                     |                | 38,00                     |                | 46,00                     |                | 46,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 5   |     | Jumlah Desa Mandiri                                                                                                  | Desa                                          | 0,00                      |                                         |                                                | 24,00                     |                | 32,00                     |                | 40,00                     |                | 48,00                     |                | 48,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 6   |     | Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan                                                         | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 7   |     | Persentase Desa yang Menyusun APBDes dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Sesuai Ketentuan | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 8   |     | Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa                                                                              | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 9   |     | Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Inventarisasi Aset Desa                                                      | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 4   |     | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                  |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 562.626.744    |                           | 814.791.141    |                           | 1.194.122.013  |                           | 1.765.050.039  |                           | 4.336.589.937   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Jumlah Kelompok Binaan LPM                                                                                           | Kelompok                                      | 75,00                     |                                         |                                                | 90,00                     |                | 95,00                     |                | 100,00                    |                | 105,00                    |                | 390,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2   |     | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)                  | %                                             | 100,00                    |                                         |                                                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                | 100,00                    |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 14  |     | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                              |                                               |                           |                                         |                                                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Program Pengendalian Penduduk                                                                                        |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 62.925.059     |                           | 78.781.660     |                           | 98.633.994     |                           | 123.488.954    |                           | 363.829.667     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Cakupan Sekolah Siaga Kependudukan                                                                                   | -                                             | 1,00                      |                                         |                                                | 6,00                      |                | 6,00                      |                | 8,00                      |                | 8,00                      |                | 8,00                      |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2   |     | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                            |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 7.294.802.095  |                           | 8.624.081.132  |                           | 10.212.010.174 |                           | 12.111.162.840 |                           | 38.242.056.241  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                              | %                                             | 27,00                     |                                         |                                                | 27,60                     |                | 27,75                     |                | 27,85                     |                | 28,00                     |                | 28,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 2   |     | Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB                                                                                | -                                             | 1 Desa 20%                |                                         |                                                | 1 Desa 40%                |                | 1 Desa 60%                |                | 1 Desa 80%                |                | 1 Desa 100%               |                | 1 Desa 100%               |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3   |     | Persentase PPKBD dan Sub PPKBD yang Dibentuk                                                                         | %                                             | 64,00                     |                                         |                                                | 67,00                     |                | 68,00                     |                | 69,00                     |                | 70,00                     |                | 70,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 4   |     | Cakupan Balai Penyuluh KB dan Kampung KB                                                                             | -                                             | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                                         |                                                | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                | 9 Balai dan 20 Kampung KB |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 3   |     | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                         |                                               |                           |                                         |                                                |                           | 1.377.128.958  |                           | 1.920.443.551  |                           | 2.781.999.187  |                           | 4.164.662.537  |                           | 10.244.234.233  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Cakupan Sasaran PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif (67 = 100%)                                                        | -                                             | 64,00                     |                                         |                                                | 65,25                     |                | 65,67                     |                | 65,97                     |                | 66,21                     |                | 66,21                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Cakupan PUS Peserta KB/Anggota UPPKS yang ber-KB (87 = 100%)                                                         | -                                             | 76,00                     |                                         |                                                | 77,30                     |                | 77,60                     |                | 77,90                     |                | 78,20                     |                | 78,20                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |
|                                                              | 1   |     | Jumlah Kelompok PIK Remaja                                                                                           | Kelompok                                      | 65,00                     |                                         |                                                | 78,00                     |                | 81,00                     |                | 84,00                     |                | 87,00                     |                | 87,00                     |                 |                                                                                               |                                   |                                          |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |  |   | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                              | Satuan                      | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |                |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |                                                            |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|                                                              |  |   |                                                                            |                             |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020 |                | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                 | Tahun 2023 |                   | Tahun 2024 |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD                   |      |                                   |
|                                                              |  |   |                                                                            |                             |                                         | Target                                         | Rp. | Target     | Rp.            | Target     | Rp.             | Target     | Rp.             | Target     | Rp.               | Target     | Rp.               | Target                                                     | Rp.  |                                   |
| (1)                                                          |  |   | (2)                                                                        | (3)                         | (4)                                     | (5)                                            | (6) | (7)        | (8)            | (9)        | (10)            | (11)       | (12)            | (13)       | (14)              | (15)       | (16)              | (17)                                                       | (18) | (19)                              |
| 15                                                           |  |   | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan                                     |                             |                                         |                                                |     |            |                |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)              |                             |                                         |                                                |     |            | 82.201.461.904 |            | 225.599.068.245 |            | 800.938.899.216 |            | 3.222.457.819.730 |            | 4.331.197.249.095 | Dinas Perhubungan                                          |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Persentase Layanan Angkutan Darat                                          | %                           | 0,07                                    |                                                |     | 0,08       |                | 0,08       |                 | 0,09       |                 | 0,10       |                   | 0,10       |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Tingkat Kecukupan Perlengkapan Jalan                                       | %                           | 59,20                                   |                                                |     | 71,44      |                | 75,00      |                 | 77,00      |                 | 79,00      |                   | 79,00      |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 3 | Persentase Wajib Uji Kendaraan Bermotor                                    | %                           | 80,92                                   |                                                |     | 50,93      |                | 70,00      |                 | 72,00      |                 | 75,00      |                   | 75,00      |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Program Pengelolaan Pelayaran                                              |                             |                                         |                                                |     |            | 52.183.421.493 |            | 182.743.773.369 |            | 739.816.815.162 |            | 3.135.345.961.409 |            | 4.110.089.971.433 | Dinas Perhubungan                                          |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Persentase Layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan                | %                           | 0,47                                    |                                                |     | 0,44       |                | 0,45       |                 | 0,50       |                 | 0,55       |                   | 0,55       |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Persentase Dermaga Dalam Keadaan Baik dan Berfungsi                        | %                           |                                         |                                                |     | 76,30      |                | 86,79      |                 | 93,26      |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
| 16                                                           |  |   | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika                      |                             |                                         |                                                |     |            |                |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                    |                             |                                         |                                                |     |            | 4.137.213.972  |            | 4.115.543.818   |            | 4.117.388.515   |            | 4.145.065.128     |            | 16.515.211.433    | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda atau yang Bermitra Dengan Pemda | Media                       | 10,00                                   |                                                |     | 10,00      |                | 10,00      |                 | 10,00      |                 | 10,00      |                   | 40,00      |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Persentase Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi                     | %                           | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Program Aplikasi Informatika                                               |                             |                                         |                                                |     |            | 264.586.904    |            | 222.668.020     |            | 196.787.144     |            | 181.783.334       |            | 865.825.402       | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan                                          | Aplikasi                    | 1,00                                    |                                                |     | 1,00       |                | 1,00       |                 | 1,00       |                 | 1,00       |                   | 4,00       |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Persentase Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah              | %                           | -                                       |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 3 | Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet                     | %                           | -                                       |                                                |     | 82,50      |                | 85,00      |                 | 87,50      |                 | 90,00      |                   | 90,00      |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 4 | Cakupan Layanan Mobile Broadband                                           | %                           | -                                       |                                                |     | 55,00      |                | 60,00      |                 | 65,00      |                 | 70,00      |                   | 70,00      |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 5 | Proporsi Individu yang Menggunakan Internet                                | %                           | -                                       |                                                |     | 55,00      |                | 60,00      |                 | 65,00      |                 | 70,00      |                   | 70,00      |                   |                                                            |      |                                   |
| 17                                                           |  |   | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah              |                             |                                         |                                                |     |            |                |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 5 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                             |                             |                                         |                                                |     |            | 221.791.752    |            | 238.286.583     |            | 256.008.147     |            | 275.047.679       |            | 991.134.161       | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi                       | %                           | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 7 | Program Pengembangan UMKM                                                  |                             |                                         |                                                |     |            | 362.711.249    |            | 308.205.748     |            | 262.843.758     |            | 224.818.557       |            | 1.158.579.312     | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Jumlah UMKM yang Mendapat Pelatihan dan Bantuan                            | UMKM                        | 100,00                                  |                                                |     | 0,00       |                | 0,00       |                 | 0,00       |                 | 0,00       |                   | 0,00       |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Jumlah UMKM yang Difasilitasi                                              | UMKM                        | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 400,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 3 | Jumlah UMKM yang Melakukan Kemitraan                                       | UMKM                        | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 400,00     |                   |                                                            |      |                                   |
| 18                                                           |  |   | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal                                 |                             |                                         |                                                |     |            |                |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                 |                             |                                         |                                                |     |            | -              |            | -               |            | -               |            | -                 |            | -                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah    | %                           | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Program Promosi Penanaman Modal                                            |                             |                                         |                                                |     |            | 662.967.889    |            | 770.515.494     |            | 895.509.625     |            | 1.040.780.484     |            | 3.369.773.492     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                     | %                           | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal                                          |                             |                                         |                                                |     |            | 566.032.965    |            | 594.082.171     |            | 623.521.329     |            | 654.419.315       |            | 2.438.055.780     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |      |                                   |
|                                                              |  | 1 | Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan               | %                           | 100,00                                  |                                                |     | 100,00     |                | 100,00     |                 | 100,00     |                 | 100,00     |                   | 100,00     |                   |                                                            |      |                                   |
|                                                              |  | 2 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Selesai                            | Perizinan dan Non Perizinan | 0,00                                    |                                                |     | 2.630,00   |                | 2.655,00   |                 | 2.680,00   |                 | 2.752,00   |                   | 10.717,00  |                   |                                                            |      |                                   |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                             |     |                                                                                                               | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
|                                                              |                             |     |                                                                                                               |                                               |           |                                         | Tahun 2019                                     |       | Tahun 2020 |           | Tahun 2021    |           | Tahun 2022    |           | Tahun 2023    |           | Tahun 2024    |            |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD               |     |
|                                                              |                             |     |                                                                                                               |                                               |           |                                         | Target                                         | Rp.   | Target     | Rp.       | Target        | Rp.       | Target        | Rp.       | Target        | Rp.       | Target        | Rp.        |                                   | Target                                                 | Rp. |
|                                                              |                             | (1) | (2)                                                                                                           | (3)                                           | (4)       | (5)                                     | (6)                                            | (7)   | (8)        | (9)       | (10)          | (11)      | (12)          | (13)      | (14)          | (15)      | (16)          | (17)       | (18)                              | (19)                                                   |     |
|                                                              |                             | 4   | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                              |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 566.032.965   |           | 594.082.171   |           | 623.521.329   |           | 654.419.315   |            | 2.438.055.780                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |     |
|                                                              |                             | 1   | Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)                                                                         | Milyar                                        | 6.137,29  |                                         |                                                |       |            | 7.000,00  |               | 7.250,00  |               | 7.500,00  |               | 7.750,00  |               | 7.750,00   |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 19  | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                                            |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                          |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 1.189.500.739 |           | 1.425.548.781 |           | 1.708.438.894 |           | 2.047.466.558 |            | 6.370.954.972                     | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |     |
|                                                              |                             | 1   | Jumlah Pemuda Pelopor                                                                                         | Orang                                         | 5,00      |                                         |                                                |       |            | 5,00      |               | 5,00      |               | 5,00      |               | 5,00      |               | 20,00      |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan                                                       |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 1.812.163.335 |           | 2.373.964.804 |           | 3.125.382.071 |           | 4.134.934.008 |            | 11.446.444.218                    | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Peningkatan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga                                          | %                                             | 100,00    |                                         |                                                |       |            | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Jumlah Prestasi Olah Raga                                                                                     | -                                             | 35,00     |                                         |                                                |       |            | 38,00     |               | 39,00     |               | 40,00     |               | 41,00     |               | 158,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 3   | Rasio Gelanggang Olah Raga Per 1.000 Penduduk                                                                 | -                                             | 0,00      |                                         |                                                |       |            | 1,00      |               | 1,00      |               | 1,00      |               | 1,00      |               | 1,00       |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 20  | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik                                                                          |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                    |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 1.100.861.646 |           | 1.190.948.835 |           | 1.288.408.160 |           | 1.393.842.908 |            | 4.974.061.549                     | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Peningkatan Pengembangan Data/Informasi                                                            | %                                             | 100,00    |                                         |                                                |       |            | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 21  | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian                                                                         |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                                                 |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | -             |           | -             |           | -             |           | -             |            | -                                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |     |
|                                                              |                             | 1   |                                                                                                               |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 22  | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan                                                                         |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                               |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 87.797.663    |           | 90.784.900    |           | 93.799.339    |           | 96.952.316    |            | 369.334.218                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan Serta Dikembangkan Sebagai Ciri Khas Daerah                           | %                                             | 96,59     | 97,63                                   |                                                | 84,47 |            | 86,52     |               | 88,57     |               | 90,62     |               | 92,67     |               | 92,67      |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                     |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 904.416.412   |           | 1.031.895.535 |           | 1.177.343.070 |           | 1.343.291.696 |            | 4.456.946.713                     | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional Sebagai Ciri Khas Daerah                                         | %                                             | 97,37     | 97,56                                   |                                                | 97,44 |            | 97,89     |               | 98,24     |               | 98,49     |               | 98,64     |               | 98,64      |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 3   | Program Pembinaan Sejarah                                                                                     |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 37.789.506    |           | 38.734.244    |           | 39.702.600    |           | 40.695.165    |            | 156.921.514                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Kompetensi Tenaga Teknis Dalam Menjaga dan Melestarikan Sejarah Daerah                             | %                                             | 96,13     | 87,62                                   |                                                | 89,20 |            | 89,45     |               | 89,70     |               | 89,85     |               | 90,30     |               | 90,30      |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 4   | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                              |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 37.789.506    |           | 39.056.438    |           | 40.365.846    |           | 41.719.153    |            | 158.930.943                       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase Pemahaman serta Melestarikan Cagar Budaya yang Dimiliki Sebagai Aset Daerah yang Bernilai Ekonomis | %                                             | 58,82     | 50,00                                   |                                                | 47,50 |            | 67,50     |               | 82,50     |               | 92,50     |               | 97,50     |               | 97,50      |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 23  | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                                                                       |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 980.736.375   |           | 1.238.670.139 |           | 1.564.440.508 |           | 1.975.888.517 |            | 5.759.735.539                     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                       |     |
|                                                              |                             | 1   | Jumlah Perpustakaan                                                                                           | Perpustakaan                                  | 85,00     |                                         |                                                |       |            | 150,00    |               | 175,00    |               | 200,00    |               | 225,00    |               | 750,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 24  | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                                                                          |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Pengelolaan Arsip                                                                                     |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 3.355.508.793 |           | 3.908.424.475 |           | 4.555.592.630 |           | 5.312.878.493 |            | 17.132.404.391                    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                       |     |
|                                                              |                             | 1   | Tersedianya Sistem Arsip Elektronik                                                                           | -                                             | Tersedia  |                                         |                                                |       |            | Tersedia  |               | Tersedia  |               | Tersedia  |               | Tersedia  |               | Tersedia   |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)                   | %                                             | 100,00    |                                         |                                                |       |            | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                                   |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 62.330.152    |           | 56.828.587    |           | 52.162.349    |           | 48.086.064    |            | 219.407.152                       | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                       |     |
|                                                              |                             | 1   | Persentase SKPD yang Telah Melakukan Arsip Baku                                                               | %                                             | 100,00    |                                         |                                                |       |            | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00    |               | 100,00     |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah                                                             | Kali                                          | 5,00      |                                         |                                                |       |            | 5,00      |               | 5,00      |               | 5,00      |               | 5,00      |               | 20,00      |                                   |                                                        |     |
| III                                                          | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |     |                                                                                                               |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 25  | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan                                                             |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           |               |           |               |           |               |           |               |            |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                         |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 2.845.732.351 |           | 2.647.562.643 |           | 2.463.192.980 |           | 2.291.662.360 |            | 10.248.150.334                    | Dinas Perikanan                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                                             | Ton                                           | 25.855,00 |                                         |                                                |       |            | 26.750,00 |               | 27.000,00 |               | 27.250,00 |               | 27.500,00 |               | 108.500,00 |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                        |                                               |           |                                         |                                                |       |            |           | 4.141.368.911 |           | 4.732.369.427 |           | 5.527.999.268 |           | 6.607.535.568 |            | 21.009.273.174                    | Dinas Perikanan                                        |     |
|                                                              |                             | 1   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                            | Ton                                           | 3.472,00  |                                         |                                                |       |            | 4.500,00  |               | 5.000,00  |               | 5.500,00  |               | 6.000,00  |               | 21.000,00  |                                   |                                                        |     |
|                                                              |                             | 2   | Persentase Luasan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar                                              | %                                             | 75,00     |                                         |                                                |       |            | 82,50     |               | 85,00     |               | 87,50     |               | 90,00     |               | 90,00      |                                   |                                                        |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |                                          |     | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)                                          | Satuan       | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                                                            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                              |                                          |     |                                                                                        |              |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020     |               | Tahun 2021     |               | Tahun 2022     |               | Tahun 2023     |                | Tahun 2024     |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD                   |                                   |     |
|                                                              |                                          |     |                                                                                        |              |                                         | Target                                         | Rp. | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.           | Target         | Rp.            | Target         | Rp.            | Target                                                     |                                   | Rp. |
| (1)                                                          | (2)                                      | (3) | (4)                                                                                    | (5)          | (6)                                     | (7)                                            | (8) | (9)            | (10)          | (11)           | (12)          | (13)           | (14)          | (15)           | (16)           | (17)           | (18)           | (19)                                                       |                                   |     |
|                                                              |                                          | 4   | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                       |              |                                         |                                                |     |                | 2.874.122.187 |                | 4.270.671.458 |                | 6.618.525.142 |                | 10.543.886.605 |                | 24.307.205.392 | Dinas Perikanan                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Dibina                       | Kelompok     | 180,00                                  |                                                |     | 300,00         |               | 350,00         |               | 400,00         |               | 450,00         |                | 1.500,00       |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Jumlah Nelayan yang Difasilitasi                                                       | Nelayan      | 200,00                                  |                                                |     | 350,00         |               | 400,00         |               | 450,00         |               | 500,00         |                | 1.700,00       |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan                                                      | Ton          | 2.559,00                                |                                                |     | 3.500,00       |               | 3.750,00       |               | 4.000,00       |               | 4.250,00       |                | 15.500,00      |                |                                                            |                                   |     |
| 26                                                           | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata    |     |                                                                                        |              |                                         |                                                |     |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                    |              |                                         |                                                |     |                | 4.665.450.452 |                | 4.887.323.517 |                | 5.120.420.044 |                | 5.365.299.728  |                | 20.038.493.741 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                  |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Pengembangan Kawasan Pariwisata                                                 | Kawasan      | 1,00                                    |                                                |     | 3,00           |               | 3,00           |               | 3,00           |               | 3,00           |                | 12,00          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Jumlah Usaha/Kegiatan Pariwisata yang Memiliki Legalitas                               | Tempat Usaha | 46,00                                   |                                                |     | 76,00          |               | 86,00          |               | 96,00          |               | 106,00         |                | 364,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Program Pemasaran Pariwisata                                                           |              |                                         |                                                |     |                | -             |                | -             |                | -             |                | -              |                | -              | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                  |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD                                   | %            | 10,46                                   |                                                |     | 13,46          |               | 14,46          |               | 15,46          |               | 16,00          |                | 16,00          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Jumlah Wisatawan Mancanegara                                                           | Orang        | 2.120,00                                |                                                |     | 2.290,00       |               | 2.359,00       |               | 2.430,00       |               | 2.503,00       |                | 9.582,00       |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Jumlah Wisatawan Nusantara                                                             | Orang        | 54.280,00                               |                                                |     | 61.905,00      |               | 63.762,00      |               | 65.675,00      |               | 67.645,00      |                | 258.987,00     |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 4   | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                        |              |                                         |                                                |     | 1.351.789.630  |               | 1.796.937.402  |               | 2.388.673.469  |               | 3.175.269.733  |                | 8.712.670.234  |                | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                  |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif                                                       | Komunitas    | 5,00                                    |                                                |     | 7,00           |               | 8,00           |               | 9,00           |               | 10,00          |                | 34,00          |                |                                                            |                                   |     |
| 27                                                           | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian     |     |                                                                                        |              |                                         |                                                |     |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                   |              |                                         |                                                |     |                | 2.616.916.403 |                | 2.513.432.693 |                | 2.425.792.861 |                | 2.351.888.156  |                | 9.908.030.113  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perkebunan     |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Nilai Tukar Petani (NTP)                                                               | -            | 94,60                                   |                                                |     | 97,00          |               | 98,00          |               | 99,00          |               | 100,00         |                | 100,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Indeks Pertanaman                                                                      | -            | 110,00                                  |                                                |     | 118,00         |               | 121,00         |               | 124,00         |               | 127,00         |                | 127,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Jumlah Komoditas yang Bersertifikat                                                    | Komoditas    | 10,00                                   |                                                |     | 10,00          |               | 10,00          |               | 10,00          |               | 10,00          |                | 10,00          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                |              |                                         |                                                |     |                | 5.546.041.884 |                | 5.053.758.819 |                | 4.629.280.905 |                | 4.262.938.460  |                | 19.492.020.068 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perkebunan     |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Produktivitas Padi                                                                     | Kw/Ha        | 27,20                                   |                                                |     | 27,50          |               | 27,60          |               | 27,70          |               | 27,80          |                | 27,80          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                                  | -            | Skala Nasional                          |                                                |     | Skala Nasional |               | Skala Nasional |               | Skala Nasional |               | Skala Nasional |                | Skala Nasional |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Persentase Peningkatan Perlindungan Perkebunan                                         | %            | 100,00                                  |                                                |     | 100,00         |               | 100,00         |               | 100,00         |               | 100,00         |                | 100,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                |              |                                         |                                                |     |                | 989.616.202   |                | 913.438.586   |                | 861.792.580   |                | 834.393.827    |                | 3.599.241.195  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular                                                    | Ekor         | -                                       |                                                |     | 475,00         |               | 450,00         |               | 425,00         |               | 400,00         |                | 400,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 2   | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                       | %            | 5,00                                    |                                                |     | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |                | 5,00           |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan                             | %            | 5,00                                    |                                                |     | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |                | 5,00           |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 4   | Jumlah Pencapaian Swasembada Daging Sapi                                               | Ekor         | -                                       |                                                |     | 1.050,00       |               | 1.150,00       |               | 1.250,00       |               | 1.350,00       |                | 1.350,00       |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 5   | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                      |              |                                         |                                                |     |                | 905.165.040   |                | 867.344.136   |                | 831.103.519   |                | 796.377.160    |                | 3.399.989.855  | Dinas Perkebunan                                           |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Ijin Usaha Perkebunan                                                           | Ijin         | 200,00                                  |                                                |     | 170,00         |               | 160,00         |               | 150,00         |               | 140,00         |                | 140,00         |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 6   | Program Penyuluhan Pertanian                                                           |              |                                         |                                                |     |                | 567.825.351   |                | 553.585.175   |                | 539.702.120   |                | 526.167.231    |                | 2.187.279.877  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan                    | -            | 23 : 1                                  |                                                |     | 23 : 1         |               | 23 : 1         |               | 23 : 1         |               | 23 : 1         |                | 23 : 1         |                |                                                            |                                   |     |
| 30                                                           | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan   |     |                                                                                        |              |                                         |                                                |     |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 3   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                    |              |                                         |                                                |     |                | 3.386.137.731 |                | 3.897.350.484 |                | 4.485.742.166 |                | 5.162.964.650  |                | 16.932.195.031 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima                                                    | Kali         | 2,00                                    |                                                |     | 8,00           |               | 10,00          |               | 12,00          |               | 14,00          |                | 44,00          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 5   | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                         |              |                                         |                                                |     |                | 146.466.746   |                | 109.304.080   |                | 81.570.610    |                | 60.873.890     |                | 398.215.326    | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTPP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) | Kali         | 5,00                                    |                                                |     | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |               | 5,00           |                | 20,00          |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 6   | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                   |              |                                         |                                                |     |                | 490.071.309   |                | 511.464.534   |                | 533.791.643   |                | 557.093.404    |                | 2.092.420.890  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha                                 | Pelaku Usaha | 50,00                                   |                                                |     | 80,00          |               | 90,00          |               | 100,00         |               | 110,00         |                | 380,00         |                |                                                            |                                   |     |
| 31                                                           | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian |     |                                                                                        |              |                                         |                                                |     |                |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                                                            |                                   |     |
|                                                              |                                          | 1   | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                           |              |                                         |                                                |     |                | 490.071.309   |                | 511.464.534   |                | 533.791.643   |                | 557.093.404    |                | 2.092.420.890  | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian                 |                                   |     |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan |     |    |                                                                                | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) | Satuan          | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------|-----------------|--------|--|-------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                                                              |     |    |                                                                                |                                               |                 |                                         | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020 |     | Tahun 2021 |     | Tahun 2022 |     | Tahun 2023 |     | Tahun 2024 |        |                                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     |    |                                                                                |                                               |                 |                                         | Target                                         | Rp. | Target     | Rp. | Target     | Rp. | Target     | Rp. | Target     | Rp. | Target     | Rp.    |                                   | Target                                   | Rp.            |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              | (1) |    | (2)                                                                            |                                               | (3)             |                                         | (4)                                            |     | (5)        |     | (6)        |     | (7)        |     | (8)        |     | (9)        |        | (10)                              |                                          | (11)           |       | (12)   |        | (13)        |                 | (14)   |  | (15)        |                 | (16)   |             | (17)            |                               | (18)                                                       |                                                        | (19) |
|                                                              |     | 1  | Persentase Peningkatan Penataan Struktur Industri                              |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     | 100,00     |        |                                   |                                          | 100,00         |       |        |        | 100,00      |                 |        |  | 100,00      |                 |        |             |                 | Perdagangan dan Perindustrian |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                        |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 406.733.041                       |                                          |                |       |        |        | 397.230.974 |                 |        |  | 387.950.895 |                 |        | 378.887.616 |                 | 1.570.802.526                 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Jumlah Sentra Industri Potensial yang Mendapat Fasilitas                       |                                               | Sentra Industri |                                         | 5,00                                           |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            | 5,00   |                                   |                                          |                | 5,00  |        |        |             | 5,00            |        |  |             | 20,00           |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 32 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi                                        |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi                                       |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   | 49.348.782                               |                |       |        |        |             | 51.816.221      |        |  |             | 54.407.032      |        |             | 57.127.384      |                               | 212.699.419                                                | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                    |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi                       |                                               | %               |                                         | 60,00                                          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            | 75,00  |                                   |                                          |                | 80,00 |        |        |             | 85,00           |        |  |             | 90,00           |        | 90,00       |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
| IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                       |     |    |                                                                                |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Sekretariat Daerah                                                             |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                  |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   | 45.614.405.408                           |                |       |        |        |             | 106.740.314.891 |        |  |             | 266.034.544.514 |        |             | 684.107.480.591 |                               | 1.102.496.745.404                                          | Sekretariat Daerah; Dinas Sosial                       |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana            |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     | 90,00      |     |            |     | 97,54      |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Program Perekonomian dan Pembangunan                                           |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   | 2.629.380.390                            |                |       |        |        |             | 2.990.514.429   |        |  |             | 3.410.493.849   |        |             | 3.899.107.970   |                               | 12.929.496.638                                             | Sekretariat Daerah                                     |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana              |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     | 96,59      |     |            |     | 99,48      |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Sekretariat DPRD                                                               |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                             |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   | 13.440.141.963                           |                |       |        |        |             | 13.709.577.620  |        |  |             | 14.003.282.727  |        |             | 14.323.104.403  |                               | 55.476.106.713                                             | Sekretariat DPRD                                       |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                          |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
| V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |     |    |                                                                                |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Perencanaan                                                                    |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah              |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 4.592.943.269  |       |        |        |             | 4.796.879.300   |        |  |             | 5.009.870.506   |        |             | 5.232.318.955   |                               | 19.632.012.030                                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah             |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 3.245.714.763  |       |        |        |             | 4.287.649.373   |        |  |             | 5.766.130.716   |        |             | 7.886.223.122   |                               | 21.185.717.974                                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |      |
|                                                              |     |    | Persentase Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Keuangan                                                                       |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                            |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 12.650.034.451 |       |        |        |             | 12.965.749.387  |        |  |             | 13.289.343.821  |        |             | 13.621.014.406  |                               | 52.526.142.065                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah                                         |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 2  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                        |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 6.325.017.226  |       |        |        |             | 6.482.874.694   |        |  |             | 6.644.671.911   |        |             | 6.810.507.203   |                               | 26.263.071.033                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 3  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                          |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 6.325.017.226  |       |        |        |             | 6.482.874.694   |        |  |             | 6.644.671.911   |        |             | 6.810.507.203   |                               | 26.263.071.033                                             | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah           |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah                                       |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 3  | Kepegawaian                                                                    |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Kepegawaian Daerah                                                     |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 9.271.547.865  |       |        |        |             | 10.586.287.182  |        |  |             | 12.107.433.573  |        |             | 13.868.219.066  |                               | 45.833.487.686                                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Kualitas Kepegawaian Daerah                                         |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     | 100,00     |     |            |     | 98,00      |     |            |     |            | 100,00 |                                   |                                          | 100,00         |       |        | 100,00 |             |                 | 100,00 |  |             |                 | 100,00 |             | 100,00          |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 4  | Pendidikan dan Pelatihan                                                       |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                       |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 9.775.129.256  |       |        |        |             | 13.320.859.149  |        |  |             | 18.203.976.131  |        |             | 24.931.599.830  |                               | 66.231.564.366                                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia                           |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     | 97,00      |     |            |     | 46,00      |     |            |     |            | 100,00 |                                   |                                          | 100,00         |       |        | 100,00 |             |                 | 100,00 |  |             |                 | 100,00 |             | 100,00          |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 5  | Penelitian dan Pengembangan                                                    |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          |                |       |        |        |             |                 |        |  |             |                 |        |             |                 |                               |                                                            |                                                        |      |
|                                                              |     | 1  | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                     |                                               |                 |                                         |                                                |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        |                                   |                                          | 605.453.750    |       |        |        |             | 665.999.125     |        |  |             | 732.599.038     |        |             | 805.858.941     |                               | 2.809.910.854                                              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |      |
|                                                              |     | 1  | Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan                    |                                               | %               |                                         | 100,00                                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |        | 100,00                            |                                          |                |       | 100,00 |        |             | 100,00          |        |  |             | 100,00          |        | 100,00      |                 |                               |                                                            |                                                        |      |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                             |  | Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome) |  | Satuan |  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) |  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawa |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                          |  |                                               |  |        |  |                                         |  | Tahun 2019                                     |     | Tahun 2020      |     | Tahun 2021      |     | Tahun 2022      |     | Tahun 2023      |     |                                  |  | Tahun 2024                        |     | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                          |  |                                               |  |        |  |                                         |  | Target                                         | Rp. | Target          | Rp. | Target          | Rp. | Target          | Rp. | Target          | Rp. |                                  |  | Target                            | Rp. | Target                                   | Rp. |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| (1)                                                                                                                                      |  | (2)                                           |  | (3)    |  | (4)                                     |  | (5)                                            |     | (6)             |     | (7)             |     | (8)             |     | (9)             |     | (10)                             |  | (11)                              |     | (12)                                     |     | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  | (17) |  | (18) |  | (19) |  |
| VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                  |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Inspektorat Daerah                                                                                                                     |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                     |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     | 2.494.208.140   |     | 2.625.775.074   |     | 2.764.394.936   |     | 2.910.454.918                    |  | 10.794.833.068                    |     | Inspektorat Daerah                       |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                        |  | Dokumen                                       |  | 80,00  |  |                                         |  |                                                |     | 61,00           |     | 135,00          |     | 135,00          |     | 135,00          |     | 135,00                           |  | 466,00                            |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                                                |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 326.352.997     |     | 342.670.647     |     | 359.804.179     |     | 377.794.388     |     | 1.406.622.211                    |  | Inspektorat Daerah                |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dirumuskan                                                                                               |  | Dokumen                                       |  |        |  |                                         |  | 3,00                                           |     | 2,00            |     | 2,00            |     | 2,00            |     | 2,00            |     | 9,00                             |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2 Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi                                                                                        |  | Dokumen                                       |  |        |  |                                         |  | 14,00                                          |     | 27,00           |     | 27,00           |     | 27,00           |     | 27,00           |     | 95,00                            |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| VII UNSUR KEWILAYAH                                                                                                                      |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Kecamatan                                                                                                                              |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                              |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 543.686.294     |     | 487.578.651     |     | 437.261.235     |     | 392.136.505     |     | 1.860.662.685                    |  | Semua Kecamatan                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat                                                                                     |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                     |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 543.686.294     |     | 487.578.651     |     | 437.261.235     |     | 392.136.505     |     | 1.860.662.685                    |  | Semua Kecamatan                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                    |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 3 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                    |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 543.686.294     |     | 487.578.651     |     | 437.261.235     |     | 392.136.505     |     | 1.860.662.685                    |  | Semua Kecamatan                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                       |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 543.686.294     |     | 487.578.651     |     | 437.261.235     |     | 392.136.505     |     | 1.860.662.685                    |  | Semua Kecamatan                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                        |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 543.686.294     |     | 487.578.651     |     | 437.261.235     |     | 392.136.505     |     | 1.860.662.685                    |  | Semua Kecamatan                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                      |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                            |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 59.876.108      |     | 52.103.256      |     | 45.339.441      |     | 39.453.675      |     | 196.772.480                      |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah                                                                                               |  | Kali                                          |  | 5,00   |  |                                         |  | 5,00                                           |     | 5,00            |     | 5,00            |     | 5,00            |     | 5,00            |     | 20,00                            |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 231.804.594     |     | 243.394.824     |     | 255.564.565     |     | 268.342.793     |     | 999.106.776                      |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat                                                                                      |  | Kali                                          |  | 10,00  |  |                                         |  | 10,00                                          |     | 10,00           |     | 10,00           |     | 10,00           |     | 10,00           |     | 40,00                            |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 145.701.927     |     | 156.532.595     |     | 168.168.354     |     | 180.669.050     |     | 651.071.926                      |  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat                                                                                        |  | %                                             |  | 0,00   |  |                                         |  | 0,00                                           |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00                             |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 2 Angka Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk                                                                                 |  | -                                             |  | 0,00   |  |                                         |  | 0,00                                           |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00            |     | 0,00                             |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 9 NON URUSAN                                                                                                                             |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                                  |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           |  |                                               |  |        |  |                                         |  |                                                |     | 107.295.995.897 |     | 117.015.990.648 |     | 128.411.812.533 |     | 141.839.944.774 |     | 494.563.743.852                  |  | Semua SKPD                        |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| 1 Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      |  | %                                             |  | 100,00 |  |                                         |  | 100,00                                         |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00          |     | 100,00                           |  |                                   |     |                                          |     |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lima tahun kedepan. Dalam masa pandemi ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya cukup optimis untuk menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun lima tahunan tersebut diatas 6 persen. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Kubu Raya menargetkan sebesar 70,01, lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 71,25 dan IPM nasional sebesar 75,54 poin. Peningkatan IPM ini dipicu oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan yaitu semakin meratanya sarana dan prasarana kesehatan, kemudahan untuk mengakses persalinan medis, untuk bidang pendidikan yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Untuk Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Kubu Raya dijabarkan dalam pelayanan urusan wajib baik terkait pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar, dan pelayanan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan.

Sedangkan Aspek Daya Saing terfokus kepada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas dan infrastruktur wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia. Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, dimana semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dari pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKU sebagaimana dalam Tabel 8.1. Adapun penetapan penyelenggaraan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dalam bentuk IKD sebagaimana dalam Tabel 8.2. dan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tabel 8.3.

**Tabel 8.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Indikator                         | Satuan   | Realisasi Capaian |                 | Target Capaian  |                 |                 |                 |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                   |          | 2019              | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1   | Indeks Reformasi Birokrasi        | -        | CC<br>(50,35)     | CC<br>(51,56)   | B<br>(60,00)    | B<br>(62,00)    | B<br>(64,00)    | B<br>(66,00)    |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat        | -        | Baik<br>(83,48)   | Baik<br>(84,14) | Baik<br>(85,00) | Baik<br>(86,00) | Baik<br>(87,00) | Baik<br>(88,00) |
| 3   | Nilai SAKIP                       | -        | CC<br>(56,32)     | CC<br>(58,66)   | B<br>(61,00)    | B<br>(64,50)    | B<br>(68,00)    | BB<br>(71,50)   |
| 4   | Opini BPK                         | Predikat | WTP               | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             |
| 5   | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) | Tahun    | 13,64             | 13,85           | 13,95           | 14,09           | 14,26           | 14,41           |
| 6   | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)      | Tahun    | 6,82              | 6,63            | 6,84            | 7,00            | 7,10            | 7,20            |
| 7   | Angka Usia Harapan Hidup          | Tahun    | 70,43             | 70,01           | 70,72           | 70,89           | 71,03           | 71,25           |
| 8   | Indeks Konektivitas               | -        | 4,00              | 3,11            | 3,78            | 4,22            | 4,67            | 5,00            |
| 9   | Indeks Mobilitas                  | -        | 0,44              | 0,39            | 0,42            | 0,45            | 0,47            | 0,48            |
| 10  | Persentase Rumah Layak Huni       | %        | N/A               | 89,00           | 90,00           | 91,00           | 92,00           | 93,00           |
| 11  | Persentase Daerah Bebas Genangan  | %        | 32,05             | 38,52           | 39,00           | 40,00           | 45,00           | 50,00           |
| 12  | Pertumbuhan PDRB                  | %        | 5,72              | -2,43           | 4,28            | 4,99            | 6,07            | 6,59            |
| 13  | Laju Pertumbuhan UMKM             | Omset    | 8.035.540.000     | 13.451.800.000  | 45.430.612.675  | 54.971.041.337  | 60.468.145.470  | 66.514.960.017  |
| 14  | Nilai Investasi                   | Juta     | 11.211.964,25     | 12.751.262,63   | 13.902.444,49   | 15.053.626,36   | 16.204.808,23   | 17.355.990,10   |
| 15  | Tingkat Pengangguran Terbuka      | %        | 5,62              | 7,14            | 6,89            | 6,13            | 5,67            | 5,31            |
| 16  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | -        | N/A               | N/A             | 68,87           | 69,30           | 69,74           | 70,17           |

| No. | Indikator                                                 | Satuan | Realisasi Capaian |                  | Target Capaian   |                  |                  |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                           |        | 2019              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| 17  | Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan RTRW Kabupaten | %      | 80,12             | 81,25            | 82,00            | 82,75            | 83,50            | 84,25            |
| 18  | Indeks Resiko Bencana                                     | -      | 168,40            | 168,38           | 167,97           | 164,92           | 162,84           | 161,36           |
| 19  | Jumlah Desa Mandiri                                       | Desa   | 14                | 21               | 42               | 55               | 65               | 75               |
| 20  | Jumlah Kasus Konflik Antar Agama                          | Kasus  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21  | Jumlah Kasus Pekat                                        | Kasus  | 45                | 40               | 35               | 30               | 25               | 20               |
| 22  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                          | -      | 72,43             | 73,24            | 73,54            | 73,84            | 74,14            | 74,44            |
| 23  | Status Kabupaten Layak Anak                               | -      | Pratama<br>(500)  | Pratama<br>(520) | Pratama<br>(550) | Pratama<br>(600) | Pratama<br>(610) | Pratama<br>(650) |

**Tabel 8.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan     | Satuan   | Realisasi Capaian |                 | Target Capaian  |                 |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                             |          | Tahun 2019        | Tahun 2020      | Tahun 2021      | Tahun 2022      | Tahun 2023      | Tahun 2024      |
|     | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                       |          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.  | Pertumbuhan PDRB                                            | %        | 5,72              | -2,43           | 4,28            | 4,99            | 6,07            | 6,59            |
| 2.  | Laju Inflasi                                                | %        | 2,64              | 2,11            | 2,50            | 2,40            | 2,30            | 2,10            |
| 3.  | PDRB per Kapita                                             | Milyar   | 29.110,82         | 28.932,30       | 31.671,45       | 34.975,48       | 39.044,16       | 43.801,74       |
| 4.  | Indeks Gini                                                 | -        | 0,295             | 0,290           | 0,287           | 0,285           | 0,282           | 0,280           |
| 5.  | Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | -        | 0,401             | 0,408           | 0,409           | 0,412           | 0,415           | 0,418           |
| 6.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                            | -        | 67,65             | 67,95           | 68,13           | 68,52           | 68,83           | 69,21           |
| 7.  | Angka Melek Huruf                                           | %        | 91,59             | 97,76           | 97,81           | 97,86           | 97,91           | 97,96           |
| 8.  | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                | Tahun    | 6,82              | 6,83            | 6,84            | 6,85            | 6,86            | 6,87            |
| 9.  | Angka Usia Harapan Hidup                                    | Tahun    | 70,43             | 70,59           | 70,72           | 70,89           | 71,03           | 71,25           |
| 10. | Prevalensi Balita Gizi Kurang                               | %        | 9,92              | 6,60            | 10,00           | 9,00            | 8,00            | 7,00            |
| 11. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                          | -        | 64,48             | 67,71           | 70,94           | 74,17           | 77,40           | 80,63           |
| 12. | Tingkat Pengangguran Terbuka                                | %        | 5,62              | 7,14            | 6,89            | 6,13            | 5,67            | 5,31            |
| 13. | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | -        | Baik<br>(83,48)   | Baik<br>(84,14) | Baik<br>(85,00) | Baik<br>(86,00) | Baik<br>(87,00) | Baik<br>(88,00) |
| 14. | Opini BPK                                                   | Predikat | WTP               | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             | WTP             |
| 15. | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                   | -        | 73,70             | 76,00           | 78,20           | 80,20           | 82,70           | 85,00           |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan              | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                      |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 16. | Penguatan Cadang Pangan                                              | Kg     | 9.514,00          | 9.484,00   | 9.285,00       | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  |
| 17. | Penanganan Daerah Rawan Pangan                                       | Kg     | N/A               | 5.500,00   | 2.600,00       | 3.000,00   | 3.500,00   | 4.000,00   |
| 18. | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB                 | %      | 12,04             | 13,05      | 12,70          | 12,44      | 12,04      | 11,62      |
| 19. | Produksi Sektor Pertanian                                            | Ton    | 114.753,80        | 99.613,60  | 139.750,00     | 140.400,00 | 141.050,00 | 141.700,00 |
| 20. | Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB                         | %      | 3,30              | 3,49       | 3,33           | 3,26       | 3,16       | 3,10       |
| 21. | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB                             | %      | 32,40             | 34,01      | 33,53          | 33,24      | 33,21      | 33,26      |
| 22. | Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Terhadap PDRB            | %      | 0,33              | 0,40       | 0,32           | 0,34       | 0,34       | 0,34       |
| 23. | Kontribusi Sektor Pengadaan Air Bersih dan Daur Ulang Terhadap PDRB  | %      | 0,03              | 0,04       | 0,04           | 0,04       | 0,04       | 0,04       |
| 24. | Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap PDRB                           | %      | 11,75             | 11,84      | 12,41          | 12,29      | 12,23      | 12,16      |
| 25. | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB         | %      | 9,86              | 9,87       | 9,47           | 9,60       | 9,73       | 9,88       |
| 26. | Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB         | %      | 11,97             | 8,20       | 10,44          | 10,74      | 10,95      | 10,98      |
| 27. | Kontribusi Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Terhadap PDRB | %      | 1,63              | 1,51       | 1,55           | 1,56       | 1,58       | 1,60       |
| 28. | Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB             | %      | 3,23              | 3,56       | 3,11           | 3,18       | 3,25       | 3,32       |
| 29. | Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDRB           | %      | 1,30              | 1,30       | 1,29           | 1,30       | 1,32       | 1,33       |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan            | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                    |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 30.       | Kontribusi Sektor Real Estate Terhadap PDRB                        | %      | 2,87              | 3,02       | 2,81           | 2,85       | 2,89       | 2,94       |
| 31.       | Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan Terhadap PDRB                    | %      | 0,41              | 0,40       | 0,40           | 0,41       | 0,41       | 0,42       |
| 32.       | Kontribusi Sektor Administrasi Pemerintahan Terhadap PDRB          | %      | 3,52              | 3,95       | 3,39           | 3,49       | 3,56       | 3,63       |
| 33.       | Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan Terhadap PDRB                    | %      | 3,87              | 3,65       | 3,71           | 3,75       | 3,78       | 3,83       |
| 34.       | Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Terhadap PDRB | %      | 0,64              | 0,92       | 0,69           | 0,70       | 0,71       | 0,73       |
| 35.       | Kontribusi Sektor Jasa Lainnya Terhadap PDRB                       | %      | 0,84              | 0,80       | 0,81           | 0,81       | 0,82       | 0,83       |
|           |                                                                    |        |                   |            |                |            |            |            |
|           | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                     |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.        | Pengeluaran Per Kapita Per Tahun                                   | Ribu   | 8.773,00          | 8.709,00   | 8.732,00       | 8.771,00   | 8.803,00   | 8.854,00   |
| 2.        | Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa              | %      | 11,86             | 17,80      | 35,59          | 46,61      | 55,08      | 63,56      |
|           |                                                                    |        |                   |            |                |            |            |            |
|           | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                        |        |                   |            |                |            |            |            |
|           | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                                  |        |                   |            |                |            |            |            |
| <b>1.</b> | <b>Pendidikan</b>                                                  |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.1.      | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                   | Siswa  | 1.205             | 3.713      | 3.898          | 4.084      | 4.269      | 4.456      |

| No.    | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|        |                                                         |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1.2.   | Angka Partisipasi Kasar                                 |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.2.1. | Angka Partisipasi Kasar SD/SDLB/MI/Paket A              | %      | 108,24            | 103,14     | 102,19         | 101,23     | 100,00     | 99,33      |
| 1.2.2. | Angka Partisipasi Kasar SMP/SMPB/MTs/Paket B            | %      | 116,12            | 94,11      | 93,30          | 92,49      | 91,68      | 90,87      |
| 1.2.3. | Angka Partisipasi Kasar SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C        | %      | 80,31             | 70,60      | 69,72          | 68,84      | 67,96      | 67,08      |
| 1.3.   | Angka Pendidikan yang Ditamatkan                        |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.3.1. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI                  | %      | 100,00            | 98,32      | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.3.2. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs                | %      | 99,98             | 101,49     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.3.3. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA/SMK             | %      | 100,00            | 104,50     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.4.   | Angka Partisipasi Murni                                 |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.4.1. | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A                   | %      | 96,58             | 89,17      | 88,25          | 87,32      | 86,40      | 85,48      |
| 1.4.2. | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B                 | %      | 81,11             | 79,56      | 78,58          | 77,60      | 76,62      | 75,64      |
| 1.4.3. | Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C              | %      | 53,24             | 49,99      | 49,05          | 48,11      | 47,17      | 46,23      |
| 1.5.   | Angka Partisipasi Sekolah                               |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.5.1. | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A                 | %      | 99,93             | 92,36      | 91,44          | 90,51      | 89,59      | 88,66      |
| 1.5.2. | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B               | %      | 113,89            | 104,48     | 103,56         | 102,56     | 101,73     | 100,81     |
| 1.5.3. | Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK/Paket C            | %      | 80,40             | 64,01      | 63,21          | 63,21      | 61,62      | 60,83      |

| No.    | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                    | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|        |                                                                            |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1.6.   | Angka Putus Sekolah                                                        |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.6.1. | Angka Putus Sekolah SD/MI                                                  | %      | 0,08              | 0,05       | 0,02           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.6.2. | Angka Putus Sekolah SMP/MTs                                                | %      | 0,33              | 0,22       | 0,10           | 0,05       | 0,00       | 0,00       |
| 1.6.3. | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK                                             | %      | 0,29              | 0,10       | 0,05           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.   | Angka Kelulusan                                                            |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.7.1. | Angka Kelulusan SD/MI                                                      | %      | 100,00            | 98,32      | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.7.2. | Angka Kelulusan SMP/MTs                                                    | %      | 99,98             | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.7.3. | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA                                                 | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.8.   | Angka Melanjutkan                                                          |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.8.1. | Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke SMP/MTs                                    | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.8.2. | Angka Melanjutkan Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                               | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.9.   | Fasilitas Pendidikan                                                       |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.9.1. | Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik                             | Unit   | 544               | 545        | 547            | 549        | 561        | 563        |
| 1.9.2. | Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik                           | Unit   | 240               | 240        | 241            | 242        | 243        | 244        |
| 1.9.3. | Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik                        | Unit   | 137               | 139        | 141            | 143        | 145        | 147        |
| 1.10.  | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar | Unit   | 42                | 43         | 44             | 45         | 46         | 47         |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                       | Satuan      | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                               |             | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1.11.     | Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah | %           | 98,89             | 97,05      | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.12.     | Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar                            | Guru/Murid  | 96,00             | 96,00      | 96,00          | 96,00      | 96,00      | 96,00      |
| 1.13.     | Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah                         | Guru/Murid  | 36,00             | 51,00      | 60,00          | 60,00      | 60,00      | 60,00      |
| 1.14.     | Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar                   | Kelas/Murid | 16,00             | 16,00      | 20,00          | 20,00      | 20,00      | 20,00      |
| 1.15.     | Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah                | Kelas/Murid | 12,00             | 17,00      | 20,00          | 20,00      | 20,00      | 20,00      |
| 1.16.     | Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar                 | %           | 99,99             | 99,44      | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.17.     | Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)       | %           | 5,84              | 5,76       | 5,68           | 5,60       | 5,52       | 5,44       |
| 1.18.     | Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)              | 5           | 97,76             | 97,76      | 96,84          | 96,38      | 95,92      | 95,46      |
| 1.19.     | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4                                          | %           | 78,48             | 78,92      | 79,36          | 79,80      | 80,24      | 80,68      |
| <b>2.</b> | <b>Kesehatan</b>                                                              |             |                   |            |                |            |            |            |
| 2.1.      | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup                           | -           | 2,75              | 2,86       | 2,70           | 2,60       | 2,50       | 2,40       |
| 2.2.      | Angla Kematian Neonantal per 1.000 Kelahiran Hidup                            | -           | 2,75              | 2,86       | 2,70           | 2,60       | 2,50       | 2,40       |
| 2.3.      | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup                                | -           | 142,10            | 107,30     | 102,00         | 97,00      | 92,00      | 87,00      |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                 | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                         |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2.4.  | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani                                             | %      | 49,76             | 44,11      | 70,00          | 72,00      | 74,00      | 76,00      |
| 2.5.  | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | %      | 88,74             | 86,86      | 88,00          | 89,00      | 91,00      | 93,00      |
| 2.6.  | Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                        | %      | 66,70             | 43,70      | 62,00          | 72,00      | 82,00      | 92,00      |
| 2.7.  | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan                                            | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2.8.  | Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk                                                 | Kasus  | 5                 | 1          | 4              | 4          | 4          | 4          |
| 2.9.  | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani                                                 | %      | 3,93              | 1,27       | 7,00           | 8,00       | 9,00       | 10,00      |
| 2.10. | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA                              | %      | 78,90             | 61,20      | 85,00          | 90,00      | 90,00      | 90,00      |
| 2.11. | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)                                  | -      | 316               | 316        | 316            | 316        | 316        | 316        |
| 2.12. | Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)                             | %      | 2,66              | 1,59       | 1,40           | 1,30       | 1,20       | 1,00       |
| 2.13. | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS                   | Kasus  | 639               | 503        | 900            | 1.300      | 1.600      | 1.928      |
| 2.14. | Proporsi Kasus Tuberkolosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DPTS                  | %      | 97,34             | 98,41      | 98,60          | 98,70      | 98,80      | 99,00      |
| 2.15. | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD                                  | Kasus  | 350               | 101        | < 290          | < 290      | < 290      | < 290      |
| 2.16. | Penderita Diare yang Ditangani                                                          | %      | 88,40             | 82,30      | 85,00          | 90,00      | 95,00      | 100,00     |
| 2.17. | Angka Kejadian Malaria                                                                  | Kasus  | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          |

| No.   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                        |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2.18. | Tingkat Kematian Akibat Malaria                                                        | Kasus  | 0                 | 0          | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 2.19. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi (per 1.000 Penduduk)                  | %      | 0,70              | 1,10       | 0,24           | 0,24       | 0,24       | 0,24       |
| 2.20. | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin                           | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2.21. | Cakupan Kunjungan Bayi                                                                 | %      | 83,05             | 75,76      | 92,00          | 93,00      | 94,00      | 95,00      |
| 2.22. | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4                                                         | %      | 89,10             | 87,12      | 94,00          | 95,00      | 96,00      | 97,00      |
| 2.23. | Cakupan Pelayanan Nifas                                                                | %      | 87,26             | 86,12      | 88,00          | 89,00      | 91,00      | 93,00      |
| 2.24. | Caupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani                                       | %      | 30,21             | 32,83      | 35,00          | 37,00      | 39,00      | 40,00      |
| 2.25. | Cakupan Pelayanan Anak Balita                                                          | %      | 68,00             | 73,40      | 85,00          | 90,00      | 95,00      | 100,00     |
| 2.26. | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin     | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2.27. | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat                                   | %      | 95,30             | 94,00      | 85,00          | 90,00      | 95,00      | 100,00     |
| 2.28. | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin                                    | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2.29. | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)     | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 2.30. | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                           | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                   |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| <b>3.</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                          |        |                   |            |                |            |            |            |
| 3.1.      | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik                                                | %      | 67,55             | 60,60      | 64,50          | 69,00      | 73,00      | 77,00      |
| 3.2.      | Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk                                                        | %      | 13,58             | 16,05      | 18,96          | 22,39      | 26,45      | 31,24      |
| 3.3.      | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)                                       | %      | 67,55             | 60,60      | 64,50          | 69,00      | 73,00      | 77,00      |
| 3.4.      | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                                                              | %      | 69,01             | 53,43      | 55,43          | 60,00      | 62,00      | 65,00      |
| 3.5.      | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat                      | %      | 32,05             | 38,52      | 39,00          | 40,00      | 45,00      | 50,00      |
| 3.6.      | Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun                                                           | %      | 72,37             | 80,57      | 89,70          | 99,87      | 100,00     | 100,00     |
| 3.7.      | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik                                                   | %      | 83,39             | 86,93      | 90,61          | 94,46      | 98,46      | 100,00     |
| 3.8.      | Rasio Jaringan Irigasi                                                                            | %      | 72,31             | 76,90      | 81,78          | 86,96      | 92,48      | 98,35      |
| 3.9.      | Persentase Penduduk Berakses Air Minum                                                            | %      | 18,82             | 23,28      | 51,00          | 52,00      | 53,00      | 55,00      |
| 3.10.     | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan | %      | 18,82             | 23,28      | 51,00          | 52,00      | 53,00      | 55,00      |
| 3.11.     | Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan                                             | %      | 0,96              | 1,02       | 1,08           | 1,14       | 1,20       | 1,26       |
| 3.12.     | Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan                                                        | %      | 60,00             | 61,85      | 63,76          | 65,73      | 67,75      | 69,85      |
| 3.13.     | Ketaatan Terhadap RTRW                                                                            | %      | 80,01             | 81,25      | 82,00          | 82,75      | 83,50      | 84,25      |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                        |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| <b>4.</b> | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                                          |        |                   |            |                |            |            |            |
| 4.1.      | Rasio Permukiman Layak Huni                                                            | %      | 99,56             | 99,66      | 99,76          | 99,86      | 99,96      | 100,00     |
| 4.2.      | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni                                                  | %      | 7,27              | 7,37       | 7,47           | 7,57       | 7,67       | 7,77       |
| 4.3.      | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau                                       | %      | 6,94              | 7,04       | 7,14           | 7,24       | 7,34       | 7,44       |
| 4.4.      | Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh                                                  | %      | 0,50              | 0,46       | 0,42           | 0,38       | 0,34       | 0,30       |
| 4.5.      | Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan                                 | %      | 9,84              | 9,74       | 9,64           | 9,54       | 9,44       | 9,34       |
| 4.6.      | Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan                                                  | %      | 9,84              | 9,74       | 9,64           | 9,54       | 9,44       | 9,34       |
| <b>5.</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                        |        |                   |            |                |            |            |            |
| 5.1.      | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                       | %      | 8,01              | 8,11       | 8,21           | 8,31       | 8,41       | 8,51       |
| 5.2.      | Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)                        | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| <b>6.</b> | <b>Sosial</b>                                                                          |        |                   |            |                |            |            |            |
| 6.1.      | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial                                         | %      | 15,19             | 19,10      | 24,03          | 30,23      | 38,03      | 47,84      |
| 6.2.      | Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Standar | %      | 23,62             | 23,99      | 24,36          | 24,73      | 25,10      | 25,47      |
| 6.3.      | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat     | %      | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                                            | Satuan   | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                    |          | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 6.4.      | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial | %        | 56,00             | 61,93      | 67,86          | 73,79      | 79,72      | 85,65      |
|           | <b>Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>                                                                    |          |                   |            |                |            |            |            |
| <b>1.</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                                                |          |                   |            |                |            |            |            |
| 1.1.      | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun                                                                         | -        | 28                | 26         | 24             | 22         | 20         | 18         |
| 1.2.      | Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                     | Kasus    | 12                | 11         | 10             | 9          | 8          | 7          |
| 1.3.      | Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek                                                       | Orang    | 43.525            | 46.067     | 48.609         | 51.151     | 53.693     | 56.235     |
| 1.4.      | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah                                              | Sengketa | 28                | 26         | 24             | 22         | 20         | 18         |
| 1.5.      | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                                                | Orang    | 48                | 58         | 68             | 78         | 88         | 98         |
| 1.6.      | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat                                                | Orang    | 48                | 58         | 68             | 78         | 88         | 98         |
| 1.7.      | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan                                                      | Orang    | 48                | 58         | 68             | 78         | 88         | 98         |
| <b>2.</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                                |          |                   |            |                |            |            |            |
| 2.1.      | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                                                             | %        | 39,27             | 41,06      | 42,85          | 44,64      | 46,43      | 48,22      |
| 2.2.      | Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD                                                                     | %        | 11,00             | 11,00      | 11,00          | 11,00      | 11,00      | 11,00      |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                                                                                                                                          | Satuan           | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                  |                  | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2.3.      | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta                                                                                                                                                                          | %                | 64,95             | 72,82      | 80,69          | 88,56      | 96,43      | 100,00     |
| 2.4.      | Rasio KDRT                                                                                                                                                                                                       | %                | 0,24              | 0,23       | 0,22           | 0,21       | 0,20       | 0,19       |
| 2.5.      | Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD                                                                                                                                                                              | %                | 0,90              | 0,84       | 0,79           | 0,74       | 0,70       | 0,66       |
| 2.6.      | Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP                                                                                                                                                                             | %                | 0,88              | 0,78       | 0,68           | 0,60       | 0,53       | 0,46       |
| 2.7.      | Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA                                                                                                                                                                             | %                | 0,95              | 0,84       | 0,73           | 0,62       | 0,51       | 0,40       |
| 2.8.      | Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun                                                                                                                                  | %                | 0,94              | 0,88       | 0,82           | 0,77       | 0,72       | 0,68       |
| <b>3.</b> | <b>Pangan</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |            |                |            |            |            |
| 3.1.      | Ketersediaan Pangan Utama                                                                                                                                                                                        | -                | 29,94             | 30,07      | 30,20          | 30,33      | 30,46      | 30,59      |
| 3.2.      | Ketersediaan Energi per Kapita                                                                                                                                                                                   | kkal/kapita/hari | 1.843,26          | 1.846,53   | 1.849,81       | 1.853,09   | 1.856,38   | 1.859,67   |
| 3.3.      | Ketersediaan Protein per Kapita                                                                                                                                                                                  | kkal/kapita/hari | 57,75             | 59,14      | 60,56          | 62,01      | 63,49      | 65,02      |
| <b>4.</b> | <b>Pertanahan</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                   |            |                |            |            |            |
| 4.1.      | Penyelesaian Kasus Tanah Negara                                                                                                                                                                                  | Kasus            | 4                 | 3          | 2              | 2          | 1          | 1          |
| 4.2.      | Penyelesaian Izin Lokasi                                                                                                                                                                                         | Izin             | 2                 | 3          | 4              | 5          | 6          | 7          |
| <b>5.</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                                                                          |                  |                   |            |                |            |            |            |
| 5.1.      | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | %                | 80,12             | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan              | Satuan   | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                      |          | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 5.2.      | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional | %        | 7,00              | 8,63       | 10,63          | 13,10      | 16,14      | 19,88      |
| 5.3.      | Penetapan Hak MHA                                                    | %        | 7,00              | 8,63       | 10,63          | 13,10      | 16,14      | 19,88      |
| 5.4.      | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat                    | Kali     | 4                 | 8          | 16             | 32         | 64         | 128        |
| 5.5.      | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup                 | Kali     | 3                 | 3          | 3              | 3          | 3          | 3          |
| <b>6.</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                |          |                   |            |                |            |            |            |
| 6.1.      | Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk                           | %        | 96,81             | 97,07      | 97,33          | 97,59      | 97,85      | 98,11      |
| 6.2.      | Rasio Bayi Berakta Kelahiran                                         | %        | 90,08             | 92,65      | 95,30          | 98,03      | 100,00     | 100,00     |
| 6.3.      | Rasio Pasangan Berakta Nikah                                         | %        | 19,99             | 23,24      | 27,02          | 31,41      | 36,52      | 42,45      |
| 6.4.      | Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Provinsi                 | -        | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6.5.      | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK                                  | -        | Sudah             | Sudah      | Sudah          | Sudah      | Sudah      | Sudah      |
| 6.6.      | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                        | %        | 100,00            | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 6.7.      | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran                                    | %        | 83,28             | 92,88      | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| <b>7.</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                              |          |                   |            |                |            |            |            |
| 7.1.      | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                                 | Kelompok | 3.125             | 3.261      | 3.403          | 3.552      | 3.707      | 3.869      |
| 7.2.      | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat                   | -        | 9                 | 9          | 9              | 9          | 9          | 9          |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                                            | Satuan    | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                    |           | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| <b>8.</b> | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                                |           |                   |            |                |            |            |            |
| 8.1.      | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                                                    | %         | 1,74              | 1,57       | 1,41           | 1,28       | 1,15       | 1,04       |
| 8.2.      | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB          | %         | 7,00              | 9,28       | 12,31          | 16,33      | 21,66      | 28,73      |
| 8.3.      | Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | Kerjasama | 3                 | 4          | 6              | 9          | 12         | 18         |
| 8.4.      | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                  | -         | 5.292             | 7.060      | 9.419          | 12.566     | 16.766     | 22.368     |
| 8.5.      | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                  | -         | 3.994             | 6.650      | 11.074         | 18.439     | 30.705     | 51.128     |
| 8.6.      | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                  | -         | 2.805             | 3.770      | 5.068          | 6.813      | 9.159      | 12.313     |
| 8.7.      | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan                                                      | -         | 1                 | 1          | 1              | 1          | 1          | 1          |
| 8.8.      | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan                                               | -         | 118               | 121        | 124            | 128        | 131        | 135        |
| <b>9.</b> | <b>Perhubungan</b>                                                                                                 |           |                   |            |                |            |            |            |
| 9.1.      | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum                                                                                | Orang     | 3.3488.376        | 3.655.853  | 3.831.371      | 4.015.316  | 4.208.092  | 4.410.123  |
| 9.2.      | Rasio Izin Trayek                                                                                                  | -         | 0,00029           | 0,00031    | 0,00034        | 0,00037    | 0,00040    | 0,00043    |
| 9.3.      | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum                                                                                       | Uji       | 4.382             | 4.875      | 5.423          | 6.033      | 6.711      | 7.465      |

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan        | Satuan                 | Realisasi Capaian     |                       | Target Capaian        |                       |                       |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                |                        | Tahun 2019            | Tahun 2020            | Tahun 2021            | Tahun 2022            | Tahun 2023            | Tahun 2024            |
| 9.4.       | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                       | -                      | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     |
| 9.5.       | Persentase Layanan Angkutan Darat                              | %                      | 0,24                  | 0,23                  | 0,22                  | 0,20                  | 0,19                  | 0,18                  |
| 9.6.       | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum                       | %                      | 77,78                 | 78,29                 | 78,80                 | 79,32                 | 79,84                 | 80,37                 |
| 9.7.       | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan                       | -                      | 111,98                | 104,33                | 97,20                 | 90,56                 | 84,37                 | 78,61                 |
| 9.8.       | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum               | Orang                  | 54.394.929            | 56.294.078            | 58.259.534            | 60.293.613            | 62.398.709            | 64.577.303            |
| 9.9.       | Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun | Orang                  | 54.368.463            | 56.266.092            | 58.229.954            | 60.262.362            | 62.365.706            | 64.542.464            |
| <b>10.</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                      |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 10.1.      | Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif                               | %                      | 94,85                 | 95,05                 | 95,25                 | 95,45                 | 95,65                 | 95,85                 |
| 10.2.      | Persentase BPR/LKM Aktif                                       | %                      | 11,41                 | 16,67                 | 24,37                 | 35,62                 | 52,07                 | 76,11                 |
| <b>11.</b> | <b>Penanaman Modal</b>                                         |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.1.      | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)               | Investor               | 196                   | 233                   | 273                   | 323                   | 373                   | 423                   |
| 11.1.1     | PMDN                                                           | Investor               | 179                   | 210                   | 250                   | 300                   | 350                   | 400                   |
| 11.1.2     | PMA                                                            | Investor               | 17                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    | 23                    |
| 11.2.      | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)        | Rp.                    | 11.211.964.347.233,50 | 12.751.262.627.233,50 | 13.902.444.494.254,20 | 15.053.626.361.275,00 | 16.204.808.228.295,70 | 17.355.990.095.316,40 |
| 11.3.      | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja                                  |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.3.1     | Akumulasi Tahunan                                              | Org / Thn / Perusahaan | -                     | 149                   | 155                   | 175                   | 180                   | 200                   |

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                    | Satuan                 | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|            |                                                                                            |                        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 11.3.2     | Tahun Berjalan                                                                             | Org / Thn / Perusahaan | -                 | 10         | 15             | 20         | 25         | 30         |
| 11.4.      | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN                                                    | %                      | 19                | 19         | 15             | 15         | 15         | 15         |
| <b>12.</b> | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>                                                             |                        |                   |            |                |            |            |            |
| 12.1.      | Jumlah Atlet Berprestasi                                                                   | Orang                  | 200               | 259        | 336            | 436        | 566        | 734        |
| 12.2.      | Jumlah Prestasi Olahraga                                                                   | Prestasi               | 24                | 32         | 43             | 58         | 79         | 106        |
| <b>13.</b> | <b>Statistik</b>                                                                           |                        |                   |            |                |            |            |            |
| 13.1.      | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi                                    | -                      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| 13.2.      | Buku “Kabupaten Dalam Angka”                                                               | -                      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| 13.3.      | Buku “PDRB”                                                                                | -                      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| <b>14.</b> | <b>Persandian</b>                                                                          |                        |                   |            |                |            |            |            |
| 14.1.      | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah | %                      | 10,00             | 12,50      | 15,00          | 17,50      | 20,00      | 22,50      |
| <b>15.</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                                          |                        |                   |            |                |            |            |            |
| 15.1.      | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                                                   | Event                  | 14                | 18         | 23             | 28         | 36         | 44         |
| 15.2.      | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan                                    | -                      | 10                | 10         | 10             | 10         | 10         | 10         |
| 15.3.      | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu                                           | -                      | 10                | 10         | 10             | 10         | 10         | 10         |
| <b>16.</b> | <b>Perpustakaan</b>                                                                        |                        |                   |            |                |            |            |            |
| 16.1.      | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun                                                   | Orang                  | 2.902             | 3.239      | 3.616          | 4.037      | 4.506      | 5.030      |

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan             | Satuan     | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|            |                                                                     |            | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 17.2.      | Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk                              | -          | 1,27              | 1,44       | 1,62           | 1,83       | 2,06       | 2,32       |
| 17.3.      | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan                              | Buku       | 5.617             | 5.945      | 6.273          | 6.601      | 6.929      | 7.257      |
| <b>17.</b> | <b>Kearsipan</b>                                                    |            |                   |            |                |            |            |            |
| 17.1.      | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku        | %          | 23,36             | 24,72      | 26.08          | 27,44      | 28,80      | 30,16      |
|            | <b>Urusan Pilihan</b>                                               |            |                   |            |                |            |            |            |
| <b>1.</b>  | <b>Pariwisata</b>                                                   |            |                   |            |                |            |            |            |
| 1.1.       | Kunjungan Wisatawan                                                 | Orang      | 56.687            | 56.974     | 57.261         | 57.548     | 57.835     | 58.122     |
| 1.2.       | PAD Sektor Pariwisata                                               | %          | 9,40              | 8,61       | 8,00           | 8,20       | 8,51       | 8,80       |
| <b>2.</b>  | <b>Pertanian</b>                                                    |            |                   |            |                |            |            |            |
| 2.1.       | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB                | Juta       | 2.394.418         | 2.493.713  | 2.593.007      | 2.692.301  | 2.791.595  | 2.890.889  |
| 2.2.       | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB                | Juta       | 413.047           | 408.968    | 409.936        | 410.904    | 411.872    | 412.840    |
| 2.3.       | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB          | Juta       | 1.154.822         | 1.213.238  | 1.271.653      | 1.330.068  | 1.388.483  | 1.446.898  |
| 2.4.       | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar | Kw/Ha      | 29,85             | 29,85      | 29,85          | 29,85      | 29,85      | 29,85      |
| 2.5.       | Cakupan Bina Kelompok Petani                                        | Poktan/PPL | 23                | 23         | 23             | 23         | 23         | 23         |
| <b>3.</b>  | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                       |            |                   |            |                |            |            |            |
| 3.1.       | Produksi Perikanan                                                  | Ton        | 24.005,74         | 22.603,09  | 21.282,39      | 20.038,86  | 18.867,99  | 17.765,54  |
| 3.2.       | Konsumsi Ikan                                                       | %          | 30,50             | 28,61      | 26,84          | 25,17      | 23,61      | 22,15      |
| 3.3.       | Cakupan Bina Kelompok Nelayan                                       | Kelompok   | 10                | 10         | 10             | 10         | 10         | 10         |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                          | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                  |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 3.4.      | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan                                              | Ton    | 21.865,78         | 20.509,77  | 19.237,85      | 18.044,81  | 16.925,76  | 15.876,10  |
|           | <b>Urusan Penunjang</b>                                                          |        |                   |            |                |            |            |            |
| <b>1.</b> | <b>Perencanaan Pembangunan</b>                                                   |        |                   |            |                |            |            |            |
| 1.1.      | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA         | -      | Tersedia          | Tersedia   | Tersedia       | Tersedia   | Tersedia   | Tersedia   |
| 1.2.      | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA | -      | Tersedia          | Tersedia   | Tersedia       | Tersedia   | Tersedia   | Tersedia   |
| 1.3.      | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA        | -      | Tersedia          | Tersedia   | Tersedia       | Tersedia   | Tersedia   | Tersedia   |
| 1.4.      | Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA                      | -      | Tersedia          | Tersedia   | Tersedia       | Tersedia   | Tersedia   | Tersedia   |
| 1.5.      | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD                               | -      | Ya                | Ya         | Ya             | Ya         | Ya         | Ya         |
| 1.6.      | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD                                | -      | Ya                | Ya         | Ya             | Ya         | Ya         | Ya         |
| 1.7.      | Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW                                       | -      | Sesuai            | Sesuai     | Sesuai         | Sesuai     | Sesuai     | Sesuai     |
| <b>2.</b> | <b>Keuangan</b>                                                                  |        |                   |            |                |            |            |            |
| 2.1.      | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan                                              | -      | WTP               | WTP        | WTP            | WTP        | WTP        | WTP        |
| 2.2.      | Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana                                | %      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.3.      | Persentase Belanja Pendidikan (20%)                                              | %      | 30,31             | 28,83      | 27,43          | 26,09      | 24,82      | 23,60      |
| 2.4.      | Persentase Belanja Kesehatan (10%)                                               | %      | 10,03             | 11,02      | 12,11          | 13,31      | 14,62      | 16,07      |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                      | Satuan | Realisasi Capaian     |                       | Target Capaian        |                       |                       |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                              |        | Tahun 2019            | Tahun 2020            | Tahun 2021            | Tahun 2022            | Tahun 2023            | Tahun 2024            |
| 2.5.      | Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung                           | %      | 0,84                  | 0,81                  | 0,78                  | 0,75                  | 0,73                  | 0,70                  |
| 2.6.      | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa                                                           | -      | 12.239.546.50<br>0,00 | 14.144.158.24<br>9,97 | 16.345.149.11<br>1,56 | 18.888.639.02<br>3,78 | 21.827.924.70<br>9,38 | 25.224.596.46<br>3,44 |
| 2.7.      | Penetapan APBD                                                                               | -      | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           | Tepat Waktu           |
| <b>3.</b> | <b>Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                                            |        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1.      | Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan                                  | JP     | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    |
| 3.2.      | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal                                    | Orang  | 59,00                 | 56                    |                       |                       |                       |                       |
| 3.3.      | Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM II)  | Orang  | 10,00                 | 11                    | 9                     | 17                    | 25                    | 28                    |
| 3.4.      | Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM III) | Orang  | 41,00                 | 41                    | 31                    | 46                    | 61                    | 76                    |
| 3.5.      | Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Diklat PIM IV)  | Orang  | 133                   | 106                   | 98                    | 113                   | 128                   | 143                   |
| 3.6.      | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah                                      | -      | 27                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    | 29                    |
| 3.7.      | Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah                                         | -      | 576                   | 579                   | 579                   | 216                   | 216                   | 216                   |
| 3.8.      | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah                         | -      | 4.811                 | 4.701                 | 5.279                 | 5.279                 | 5.279                 | 5.279                 |

| No.  | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan                                                                                                                                                                        | Satuan | Realisasi Capaian |            | Target Capaian |            |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                |        | Tahun 2019        | Tahun 2020 | Tahun 2021     | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 5.   | Pengawasan                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |            |                |            |            |            |
| 5.1. | Persentase Tindak Lanjut Temuan                                                                                                                                                                                                | %      | 0,70              | 0,81       | 0,93           | 1,07       | 1,23       | 1,42       |
| 5.2. | Jumlah Temuan BPK                                                                                                                                                                                                              | Kasus  | 7                 | 5          | 4              | 3          | 2          | 1          |
| 6.   | Sekretariat Dewan                                                                                                                                                                                                              |        |                   |            |                |            |            |            |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupateb                                                                                                                                             | -      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6.2. | Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | -      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |
| 6.3. | Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD                                                           | -      | Ada               | Ada        | Ada            | Ada        | Ada        | Ada        |

**Tabel 8.3.**  
**Standar Pelayanan Minimal Daerah**  
**Kabupaten Kubu Raya**

| No.        | Indikator                                                                                                                                         | Satuan | Realisasi Capaian |       | Target Capaian |       |       |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|--------|
|            |                                                                                                                                                   |        | 2019              | 2020  | 2021           | 2022  | 2023  | 2024   |
| <b>I.</b>  | <b>URUSAN PENDIDIKAN</b>                                                                                                                          |        |                   |       |                |       |       |        |
| 1.         | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)                                                 | %      | 16,66             | 17,07 | 17,48          | 17,89 | 18,30 | 18,71  |
| 2.         | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan | %      | 5,40              | 5,76  | 6,12           | 6,48  | 6,84  | 7,20   |
| 3.         | Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD                                                                    | %      | 32,77             | 32,13 | 32,41          | 32,69 | 32,97 | 33,25  |
| <b>II.</b> | <b>URUSAN KESEHATAN</b>                                                                                                                           |        |                   |       |                |       |       |        |
| 1.         | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                               | %      | 89,11             | 92,60 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2.         | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                            | %      | 88,74             | 88,90 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 3.         | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                         | %      | 75,76             | 91,30 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 4.         | Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                                  | %      | 68,00             | 73,40 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 5.         | Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                      | %      | 57,18             | 20,60 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |

| No.  | Indikator                                                                                                                                                              | Satuan | Realisasi Capaian |       | Target Capaian |       |       |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|--------|
|      |                                                                                                                                                                        |        | 2019              | 2020  | 2021           | 2022  | 2023  | 2024   |
| 6.   | Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                                  | %      | 57,89             | 45,50 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 7.   | Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                                     | %      | 43,60             | 75,20 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 8.   | Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                            | %      | 35,98             | 39,90 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 9.   | Jumlah Warga Negara Penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                              | %      | 30,12             | 84,20 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 10.  | Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan                                                                                                | %      | 116,02            | 71,00 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 11.  | Jumlah Warga Negara Terduga <i>Tuberculosis</i> yang Mendapatkan Layanan Kesehatan                                                                                     | %      | 81,39             | 70,20 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 12.  | Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | %      | 60,85             | 72,10 | 85,00          | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| III. | <b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                                        |        |                   |       |                |       |       |        |
| 1.   | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari                                                                                              | %      | 42,95             | 43,77 | 49,47          | 52,87 | 56,37 | 60,00  |

| No.        | Indikator                                                                                                                                            | Satuan | Realisasi Capaian |        | Target Capaian |        |        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|            |                                                                                                                                                      |        | 2019              | 2020   | 2021           | 2022   | 2023   | 2024   |
| 2.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik                                                                           | %      | 61,27             | 61,54  | 62,65          | 63,04  | 64,95  | 66,15  |
| <b>IV.</b> | <b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                                                                                                       |        |                   |        |                |        |        |        |
| 1.         | Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                                  | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.         | Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <b>V.</b>  | <b>URUSAN TRANTIBUMLINMAS</b>                                                                                                                        |        |                   |        |                |        |        |        |
| 1.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada                                                            | %      | N/A               | 100,00 | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana                                                                                  | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                            | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.         | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                                               | %      | 43,39             | 58,13  | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No. | Indikator                                                                                                        | Satuan | Realisasi Capaian |        | Target Capaian |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                  |        | 2019              | 2020   | 2021           | 2022   | 2023   | 2024   |
| VI. | URUSAN SOSIAL                                                                                                    |        |                   |        |                |        |        |        |
| 1.  | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti                     | %      | N/A               | 100,00 | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.  | Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti                                          | %      | N/A               | 44,90  | 55,00          | 65,00  | 70,00  | 80,00  |
| 3.  | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti                      | %      | N/A               | 100,00 | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.  | Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti | %      | N/A               | N/A    | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.  | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial                | %      | 92,75             | 100,00 | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi pedoman dan arahan bersama bagi Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 menjadi tanggung jawab serta kerjasama semua pihak dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utamanya, serta mewujudkan strategi dan kebijakan daerah.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan diperlukannya penyesuaian atas RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan R-APBD Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan pada masa tersebut.

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kubu Raya. Gambaran pencapaian target-target kinerja akan terlihat pada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini kepada *stakeholder* yang terkait.

- b. Target-target yang telah tercantum di dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 agar didukung oleh semua SKPD maupun *stakeholder* melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsisten, transparan, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra Perubahan SKPD Tahun 2019-2024.
- d. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini menjadi penyelar antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, sekaligus penghubung dokumen jangka pendek di bawahnya (RKPD) setiap tahunnya dari tahun 2019-2024. Oleh karena itu, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terhindar dari duplikasi-duplikasi dalam implementasinya di SKPD sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*).
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini.

Akhirnya, semoga RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan, dan tata kelola kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, sehingga terwujud **Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius.**

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...10... November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021. NOMOR 3 ..